

**PERS DAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA:
ANALISIS *FRAMING* ISU DEMOKRATISASI
DALAM TAJUK RENCANA
KOMPAS, SUARA PEMBARUAN, REPUBLIKA, DAN JAWA POS
PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2004**

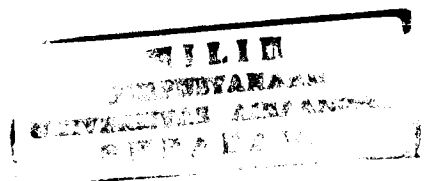
TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Prasyarat Guna Mendapat
Gelar Magister Sains Bidang Studi Media dan Komunikasi



Oleh:
Sahat P. Siburian
NIM: 090310604/L

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



TESIS

**PERS DAN PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA:
ANALISIS *FRAMING* ISU DEMOKRATISASI
DALAM TAJUK RENCANA
KOMPAS, SUARA PEMBARUAN, REPUBLIKA, DAN JAWA POS
PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2004**



Sahat P. Siburian
NIM: 090310604/L

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

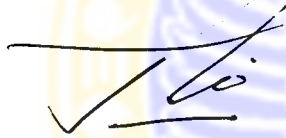
LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI SETUJU UNTUK DIUJIKAN

TELAH DIUJIKAN TANGGAL

17 Pebruari 2006

Pembimbing Utama



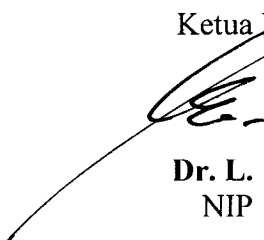
Drs. Henry Subiakto, SH. MA.
NIP 131 801 645

Pembimbing Kedua



Dra. Yuyun W.I. Surya, MA.
NIP 132 164 002

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. L. Dyson P, MA.
NIP 130 937 724

LEMBAR PERNYATAAN

Bagian atau keseluruhan isi tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi tesis.



Surabaya, 8 Pebruari 2006

Sahat P. Siburian
NIM: 090310604/L

KATA PENGANTAR

Hasrat untuk dapat menyelesaikan tesis ini, akhirnya terkabul juga. Patut diungkapkan, pilihan mengkaji teks surat kabar menyangkut isu demokratisasi merupakan bagian dari refleksi hidup dan kehidupan bersama masyarakat di berbagai daerah Sumatera Utara, secara khusus di Tapanuli, di mana hampir seluruh warga masyarakat cenderung mengkonsumsi teks-teks yang disajikan surat kabar nyaris tanpa daya kritis. Lantas menjadi sasaran opini yang diinseminasikan oleh surat kabar dan tergiring mengikuti bidang posisi yang diarahkan surat kabar itu sendiri. Kepada sesama 'korban' opini surat kabar, hasil penelitian ini terasa cukup relevan.

Proses studi ini melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk berbagai kalangan yang memberi pencerahan dan inspirasi terlebih ketika saya turut mengelola Majalah (*Surat Parsaoran*) Immanuel Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Saya, secara khusus, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan staf *Evangelischer Entwicklungsdienst* (EED) Jerman yang memberikan beasiswa dari awal hingga akhir studi ini. Juga kepada HKBP yang merekomendasikan sekaligus memperkenankan saya mengikuti studi ini.

Studi dengan beasiswa dari EED dapat terealisasi atas jasa baik Ephorus (emeritus) Pdt D. Dr. S.A.E. Nababan, LLD, dan Ephorus (emeritus) Pdt Dr. J.R. Hutauruk. Kepada beliau, terima kasih dan rasa hormat yang tulus. Terima kasih juga kepada Praeses Pdt Siter M.P. Hutasoit, MA, dan Praeses Pdt. E. Siagian yang turut mendukung proses tugas belajar ini.

Terima kasih dan rasa kagum saya tujukan untuk Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, yang membukakan kesempatan memasuki Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak, staf pengajar Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga: Dra. Sri Moerdijati, MS., Yuyun W.I. Surya, MA., Dra. Sutinah, MS., Dra. Ratih Puspa, MA., Dra. S.S. Andarini, SU, Drs. Henry Subiakto, SH. MA., Daniel T. Sparringa, PhD., Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Dr. Jangkung Karyantoro, MBA., Drs. Yan Yan Cahyana, MA., Drs. Edy Hery, MSi., Drs. I. Basis Susilo, MA., Drs. Ronny H. Mustamu, MSc., Ishadi SK, MSc., dan Garin Nugroho.

Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan masukan berupa kritik serta usul-usul penyempurnaan, terlebih kepada pembimbing penulisan tesis ini, Drs. Henry Subiakto, SH. MA., dan Dra. Yuyun W.I. Surya, MA. Terima kasih, kesan simpatik kepada Ketua Program Studi, Dr. L. Dyson, MA., yang setiap bertemu selalu memotivasi semangat belajar.

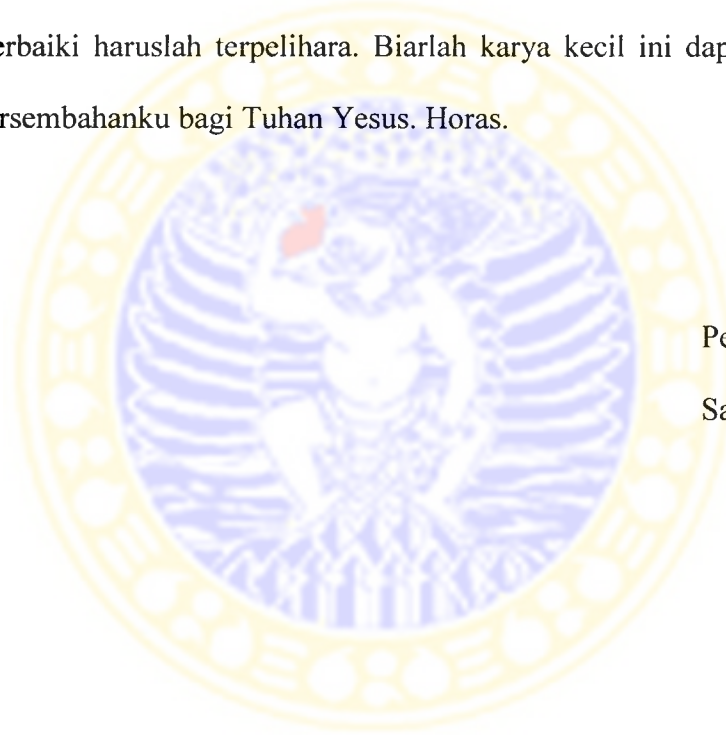
Rasa terima kasih saya tujukan pula kepada Ir. Joel Steven Siburian sekeluarga, di Bogor yang secara sukarela menolong mengumpulkan rubrik tajuk rencana *Suara Pembaruan*, dan juga kepada ibu Dra. Sumartini yang mempersilahkan saya membongkar bundel surat kabar *Kompas*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, di perpustakaan umum Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

Tesis ini saya peruntukkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda Pdt G.T. Siburian, SmTh dan ibunda N.T. Pardede. Hanya Tuhanlah yang paling banyak tahu tentang jasa dan pengabdian mereka berdua, hingga tesis ini menjadi dapat dirampungkan. Juga kepada Andreia Eirene, Artha Elisabeth, Grace Thresia, dan

Samuel Putra yang senantiasa saya rindukan dalam cinta kasih. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Ompung Andre atas beragam dukungan selama ini.

Ingin diungkapkan kenangan khusus kepada adikku Ir. Martua Ganda Siburian (25 Maret 1966 – 27 April 2004) di Muara Bulian, Jambi, yang wafat ketika studi ini masih harus berlanjut. Ia meninggalkan kesan amat sangat mendalam terlebih untuk tetap setia sampai akhir hayat beriman kepada Tuhan Yesus, tanpa harus fanatik ‘buta’ pada lembaga gereja tertentu.

Tesis ini tentu sangat jauh dari sempurna dan karena itu semangat untuk memperbaiki haruslah terpelihara. Biarlah karya kecil ini dapat menjadi bagian dari persembahanku bagi Tuhan Yesus. Horas.



Penulis

Sahat P. Siburian

RINGKASAN

**Pers dan Pemilihan Presiden di Indonesia:
Analisis *Framing* Isu Demokratisasi dalam Tajuk Rencana
Kompas, Suara Pembaruan, Republika, dan Jawa Pos
Pada Pemilihan Presiden 2004**

Sahat P. Siburian

Pemilihan Presiden 2004 merupakan peristiwa politik penting dalam agenda demokrasi di Indonesia. Fakta peristiwa atau realitas politik ini mendapat liputan luas dari media massa. Dalam konteks ini, mengemuka pertanyaan tentang bagaimana posisi pers nasional kita mencoba ‘mewarnai’ peta perjalanan demokratisasi bangsa ini ke depan. Pertanyaan ini menjadi menarik mengingat pers sebagai wadah mediasi politik berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kalangan dengan kepentingan politik tertentu. Apalagi pers juga mempunyai kemampuan untuk mengkonstruksi dan memaknai realitas pemilihan presiden sekaligus memproduksi pesan (*framing*) tertentu.

Penelitian ini berupaya menjelaskan *framing* pers tentang isu demokratisasi ketika menghadirkan fakta pemilihan presiden 2004 sebagai topik ulasan tajuk rencananya. Tajuk rencana menempati posisi tersendiri dalam seluruh rubrik surat kabar. Tajuk rencana merupakan pandangan resmi suatu institusi pers atas pelbagai fakta peristiwa maupun isu permasalahan. Dalam tajuk rencana bisa terbaca bagaimana sikap dan pandangan institusi pers, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan redaksional, atas suatu isu permasalahan.

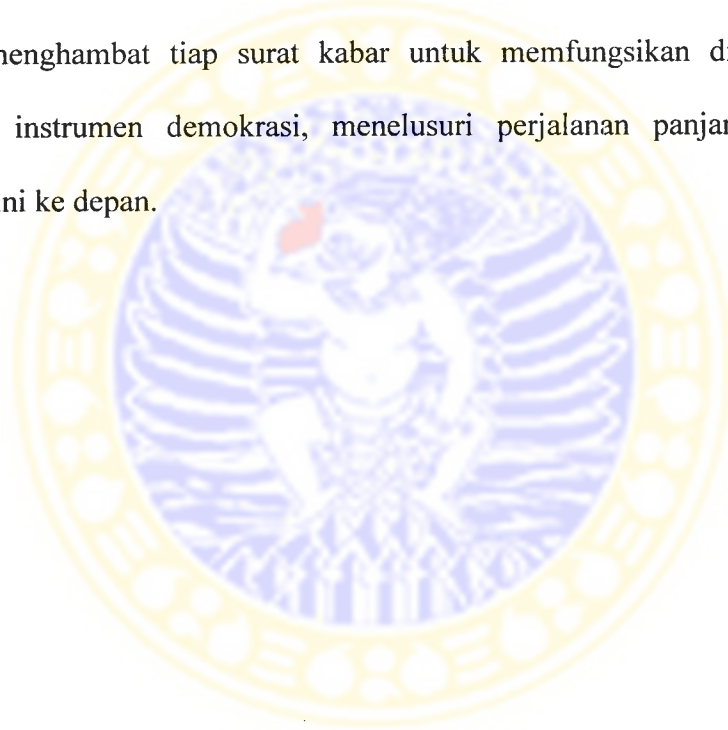
Empat surat kabar dipilih sebagai sasaran penelitian, yaitu *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos*. Keempat surat kabar ini merupakan institusi pers yang berpengaruh dalam kehidupan pers Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, masing-masing surat kabar ini memiliki kedekatan atau berafiliasi dengan kekuatan sosial politik tertentu di Indonesia. *Kompas* memiliki kedekatan dengan kelompok Katolik; *Suara Pembaruan* dengan kelompok Kristen Protestan; *Republika* dengan kelompok Islam; dan *Jawa Pos* dengan kelompok bisnis secara khusus etnis Tionghoa. Faktor kedekatan ini dapat mempengaruhi setiap surat kabar dalam membuat (*framing*) ulasan tajuk rencana.

Teks tajuk rencana yang dianalisis adalah seluruh teks yang disajikan oleh keempat surat kabar, selama pemilihan presiden, yaitu mulai dari edisi 2 Mei hingga 20 September 2004, yang secara eksplisit memuat isu demokratisasi. Dengan merujuk pada pengertian demokrasi yang komprehensif, ditetapkan lima isu demokrasi sebagai *focal points*, yaitu: (1) tentang persamaan di depan hukum; (2) tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan; (3) tentang pelaksanaan pemilihan presiden; (4) tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat; dan (5) tentang *image* calon presiden. Teks tajuk rencana keempat pers diklasifikasi atas dasar lima isu demokratisasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dari sudut pandang konstruktivis dengan mengikuti *framing analysis* model William Gamson. Hasil analisis *framing* terhadap teks tajuk rencana memperlihatkan, keempat surat kabar membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi secara berbeda. Terbukti pula bahwa perbedaan *framing* tersebut tidak luput dari faktor pengaruh kedekatan

maupun keterikatan masing-masing surat kabar pada kelompok tertentu di negeri ini.

Kendati demikian, secara umum, keempat surat kabar membingkai (*framing*) isu demokratisasi atas dasar pemahaman bahwa pemilu presiden merupakan bagian dari proses konsolidasi demokrasi atau dalam penelitian ini disebut sebagai menggunakan perspektif demokratisasi. Namun pada dasarnya setiap surat kabar memiliki orientasinya sendiri, terutama pada ikatan primordial terhadap kelompok tertentu dan kepentingan ekonomi (pasar). Fenomena ini tentu dapat menghambat tiap surat kabar untuk memfungsikan diri lebih optimal sebagai instrumen demokrasi, menelusuri perjalanan panjang demokratisasi bangsa ini ke depan.



SUMMARY

**A Press and Presidential Election in Indonesia:
An Framing Analysis of Democracy Issues in Editorials
of *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, and *Jawa Pos*
in the Course of Presidential Election 2004**

Sahat P. Siburian

The presidential election in 2004 represented an essential political event in the democracy agenda in Indonesia. This factual event or political reality obtained a nationwide attention from the mass media. In this context a question arises of how the national presses try to “color” or influence the course of the Indonesian democratization in the future. This question becomes a quite attractive since the press as vehicle mediating the political events is potentially benefited by a group with certain political interests. Furthermore, the press is also able to construct and make a sense of the presidential election reality and then produce or frame a certain message.

The research was aimed at elucidating *framing* of the press about democratization issues when attending fact of the presidential election 2004 as the topic in their editorials. The editorials possessed a distinct place in all newspaper columns. The editorials constituted a formal opinion of the relevant newspapers with respect to the recent factual events or recent social and political issues occurring in Indonesia. In the editorials the views and opinions of the related press institution could be known obviously. This was more recognized as the editor’s policy regarding the certain issue which currently happened in our neighborhoods.

Four newspapers notably *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika* and *Jawa Pos* were chosen as the research targets. The four presses accounted for the press institution that was influential in Indonesia. Viewed from their respective histories each newspaper had a close relationship or affiliated with certain social and political forces in Indonesia. For example, *Kompas* had a close relationship with Catholic groups; *Suara Pembaruan* with Christian Protestant groups; *Republika* with Muslim groups; and *Jawa Pos* with the business groups, particularly those having Chinese ethnic. This proximity factor could bring about a significant effect on each newspaper in framing messages or opinions in their editorials.

All texts of the editorials as presented in the four newspapers during the presidential election from editions of 2 May up to 20 September 2004, explicitly describing democratization issues were analyzed here. With reference to comprehensive meaning of democracy, five democracy issues could be defined as focal points, that: (1) regarding *equality before the law*; (2) the people's sovereignty in determining their ultimate choice; (3) implementation of the presidential election; (4) clean government and the people's rights; and (5) president candidate image. The texts were classified in accordance with five democratization issues.

The research used the framing analysis method from constructivist's point of view by adopting framing analysis model developed by William Gamson. The results of the framing analysis over the editorial texts indicated that the four newspapers framed democratization issues differently. It was plainly proved that a difference in framing was extremely affected by the proximity factor or affiliation of each newspaper with the certain groups in the country.

However, the newspapers framed democratization issues on the ground that the presidential election represented an integral part of the democracy consolidation processes or in this research they used democratization perspective. Nevertheless, generally speaking each newspaper had its own orientation, that is, primordial ties with certain groups and certain interests (market). This phenomenon surely hindered each newspaper from undertaking their optimal function as the democracy instrument passing through a long path of the democratization processes in the future.



ABSTRACT

A Press and Presidential Election in Indonesia: An Framing Analysis of Democracy Issues in Editorials of *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, and *Jawa Pos* in the Course of Presidential Election 2004

Sahat P. Siburian

The press, in this case the newspapers constructed and made a sense of the factual events or relevant social and political issues related to the presidential election 2004. Four nationally circulated newspapers namely *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika* and *Jawa Pos* broached democratization issues or took these issues as the main discussion in their editorials.

The democratization issues covered *equality before the law*; the people's sovereignty in determining their ultimate choice; the implementation of the presidential election; and clean government and the people's rights. In addition, how the four newspapers framed those issues? Each newspaper did so in different manner. The disparity could be discerned from a strategy and technique in making the coverage of issues (*framing analysis*). Each newspaper made the coverage of the issues by selecting factual events and by salience of certain dimensions of the factual events and then attributing them to other facts.

A difference in the framing strategy, which the four newspapers have so far applied, has resulted in a distinctive meaning or message construction. Therefore, even though they raised the similar issues but they essentially presented opinions or messages independently and showed their own position or attitude in relation to the democratization issues.

Key words: Framing, democratization issues, editorial, presidential election.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vii
ABSTRACT	x
Bab I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	20
I.3. Tujuan	20
I.4. Manfaat	21
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Demokrasi dan Isu Demokratisasi	22
II.2. <i>Framing</i> Menyingkap Posisi dan Opini Pers	28
II.3. Tajuk Rencana Mencerminkan Posisi dan Opini Pers	35
II.4. Pers sebagai Agen Konstruksi Realitas	41
II.5. Teks Pers Produk dari Berbagai Faktor Pengaruh	47
II.6. Pers dan Demokrasi	52
II.7. Pers dan Pemilihan Presiden	64
II.8. Pers dalam Konteks Politik di Indonesia	72
II.9. Karakteristik Pers Sasaran Penelitian	78
Bab III METODOLOGI	
III.1. Metode Penelitian	82
III.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian	88
III.3. Unit Analisis	90
III.4. Teknik Pengumpulan Data	91
III.5. Teknik Analisis Data	92

Bab IV ANALISIS *FRAMING* ISU DEMOKRATISASI DALAM TEKS TAJUK RENCANA

IV.1. *Kompas*

1.1. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan	94
1.1.1. Bingkai Inti: Rakyat Bebas Menentukan Pilihan Sendiri Sesuai Akal Sehat dan Hati Nurani	94
1.1.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	98
1.1.2.1. Metafora: Seperti Tarik Suara	
1.1.2.2. <i>Catchphrases</i> : Rakyat Memiliki <i>People's Wisdom</i>	
1.1.2.3. <i>Exemplars</i> : Jati Diri Capres-cawapres yang Asli	
1.1.2.4. <i>Depictions</i> : Rakyat Tidak Mau Diatur-atur Seperti Zaman Orde Baru	
1.1.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	102
1.1.3.1. <i>Roots</i> : Cara dan Sikap Capres Menghadapi Persoalan Rakyat	
1.1.3.2. <i>Appeals to principle</i> : Menggunakan Hak Pilih Lebih Baik	
1.2. Perspektif: Dalam Demokrasi Rakyat Bebas Menentukan Pilihan Sendiri	104
1.3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden	105
1.3.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Suatu Proses untuk Memperbaiki Kehidupan Seluruh Bangsa	106
1.3.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	114
1.3.2.1. Metafora: Jalan yang Panjang	
1.3.2.2. <i>Catchphrases</i> : Demokrasi dalam Pembangunan	
1.3.2.3. <i>Exemplars</i> : Pengalaman Indonesia Tujuh Tahun Terakhir	
1.3.2.4. <i>Depictions</i> : Membutuhkan Waktu	
1.3.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	120
1.3.3.1. <i>Roots</i> : Memperbaiki Kehidupan Rakyat	
1.3.3.1. <i>Appeals to principle</i> : Janganlah Terlalu Banyak Kata-kata	
1.4. Perspektif: Pemilihan Presiden Proses Menuju Demokrasi yang Bekerja	122
1.5. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat	123
1.5.1. Bingkai Inti: Presiden Harus Memelihara Persemaian Demokrasi dan Memperbaiki Kehidupan Rakyat	124

1.5.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	129
1.5.2.1. Metafora: Banting Setir	
1.5.2.2. <i>Catchphrases</i> : Membuat Demokrasi Lebih Bermakna	
1.5.2.3. <i>Exemplars</i> : Melangkah Maju	
1.5.2.4. <i>Depictions</i> : Persemaian Demokrasi	
1.5.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	133
1.5.3.1. <i>Roots</i> : Gagal Menyatukan Seluruh Potensi yang Ada	
1.5.3.1. <i>Appeals to principle</i> : Apa yang Dapat Anda Lakukan Untuk Negara	
1.6. Perspektif: Kekuasaan Demokrasi Mengutamakan Kepentingan Rakyat	136
IV.2. <i>Suara Pembaruan</i>	
2.1. Tentang Persamaan di Depan Hukum	140
2.1.1. Bingkai Inti: Hukum Tidak Boleh Diskriminatif	140
2.1.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	143
2.1.2.1. Metafora: Sasaran Tembak	
2.2.2.2. <i>Catchphrases</i> : Pelajaran dari Kasus Gus Dur	
2.2.2.3. <i>Exemplars</i> : UU Pemilu Pilpres Hasil Kompromi Elit Politik	
2.2.2.4. <i>Depictions</i> : Mencoret, Konspirasi Politik	
2.1.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	146
2.1.3.1. <i>Roots</i> : Perancang dan Penyusun Legislasi Sering Kurang Tuntas	
2.1.3.1. <i>Appeals to principle</i> : UUD '45 Tidak Mengenal Diskriminasi	
2.2. Perspektif: Demokrasi Tidak Mengenal Diskriminasi	148
2.3. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan	149
2.3.1. Bingkai Inti: Rakyat Berdaulat Meyakinkan Diri Sebelum Menentukan Pilihan	149
2.3.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	151
2.3.2.1. Metafora: Menjatuhkan Pilihan	
2.3.2.2. <i>Catchphrases</i> : Golput Tidak Mau Tau Akan Pemerintah	
2.3.2.3. <i>Exemplars</i> : Tidak Ada Landasan Hukum Menggugat Presiden	
2.3.2.4. <i>Depictions</i> : Jangan Pilih yang Suka Ingkar Janji	
2.3.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	154
2.3.3.1. <i>Roots</i> : Presiden dan Wakil Presiden Tidak Dapat Dijatuhkan	

2.3.3.1. <i>Appeals to principle</i> : Kualitas Kepemimpinan Menjadi Jaminan	
2.4. Perspektif: Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Hukum dan Konstitusi	155
2.5. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden	157
2.5.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Belum <i>Fairness</i> , Perlu Aturan yang Rinci	158
2.5.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	167
2.5.2.1. Metafora: Tidak Sekadar ‘Tukang’	
2.5.2.2. <i>Catchphrases</i> : <i>Fairness</i> dalam Pilpres	
2.5.2.3. <i>Exemplars</i> : Anomali dalam Politik	
2.5.2.4. <i>Depictions</i> : Kurang Antisipatif	
2.5.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	172
2.5.3.1. <i>Roots</i> : UU Pilpres Memiliki Sejumlah Kelemahan	
2.5.3.1. <i>Appeals to principle</i> : Pengalaman dan Pelajaran Berharga	
2.6. Perspektif: Pilpres Harus Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang	174
2.7. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat	176
2.7.1. Bingkai Inti: Presiden Harus Mewujudkan Program yang Dikemukakan Kepada Rakyat	177
2.7.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	180
2.7.2.1. Metafora: Rakyat Bukan Kawula	
2.7.2.2. <i>Catchphrases</i> : Pemerintahan yang Bersih	
2.7.2.3. <i>Exemplars</i> : Menggandeng Presiden Pendahulu	
2.7.2.4. <i>Depictions</i> : Perjuangan Berat	
2.7.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	183
2.7.3.1. <i>Roots</i> : Ini Baru Merupakan Tahap Awal	
2.7.3.2. <i>Appeals to principle</i> : Kemenangan Sama Sekali Bukan Pesta	
2.8. Perspektif: Pemerintahan Demokrasi Mengutamakan Rakyat	184
IV.3. <i>Republika</i>	
3.1. Tentang Persamaan di Depan Hukum	188
3.1.1. Bingkai Inti: Semua Pihak Harus Tunduk Pada Hukum	188
3.1.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	190
3.1.2.1. Metafora: Hukum adalah “Tuan”	
3.1.2.2. <i>Catchphrases</i> : Memaksakan Kehendak, Mengajak	

Golput	
3.1.2.3. <i>Exemplars</i> : MK dan MA Menolak <i>Judicial Review</i> dari Gus Dur	
3.1.2.4. <i>Depictions</i> : Ngotot	
3.1.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	192
3.1.3.1. <i>Roots</i> : Gugatan Gus Dur ke KPU	
3.1.3.2. <i>Appeals to principle</i> : Cara-cara yang Benar	
3.2. Perspektif: Dalam Demokrasi, Hukum adalah ‘Tuan’	193
3.3. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan	194
3.3.1. Bingkai Inti: Rakyat Harus Menentukan Pilihan Secara Rasional	194
3.3.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	198
3.3.2.1. Metafora: Tersandera Oleh Pemimpin yang Gagal	
3.3.2.2. <i>Catchphrases</i> : Kemampuan Calon	
3.3.2.3. <i>Exemplars</i> : Kedaulatan Kembali ke Tangan Rakyat	
3.3.2.4. <i>Depictions</i> : Terjegal	
3.3.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	200
3.3.3.1. <i>Roots</i> : Transisi Demokrasi Akan Semakin Panjang	
3.3.3.2. <i>Appeals to principle</i> : <i>Gemah Ripah Loh Jinawi</i>	
3.4. Perspektif: Kedaulatan Rakyat Harus Dilandasi Pikiran Rasional	201
3.5. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden	202
3.5.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Belum Jurdil, Sebuah Pelajaran Demokrasi	203
3.5.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	205
3.5.2.1. Metafora: Ibarat Kotak Pandora	
3.5.2.2. <i>Catchphrases</i> : Politik Uang	
3.5.2.3. <i>Exemplars</i> : Kita Butuh Satu Tahap Lagi	
3.5.2.4. <i>Depictions</i> : Pemimpin yang Kotor-kotor	
3.5.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	210
3.5.3.1. <i>Roots</i> : Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus	
3.5.3.2. <i>Appeals to principle</i> : <i>Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono</i>	
3.6. Perspektif: Pemilihan Presiden Proses Transisi Demokrasi	211
3.7. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat	212
3.7.1. Bingkai Inti: Pemerintah Harus Memberantas Korupsi Mengatasi Masalah Pendidikan dan Ekonomi	213

3.7.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	215
3.7.2.1. Metafora: Republik Ini Memerlukan Seorang Imam	
3.7.2.2. <i>Catchphrases</i> : Berantas Korupsi Mulai Dari Presiden	
3.7.2.3. <i>Exemplars</i> : Karya Habibie dan Gagasan Amien Rais	
3.5.2.4. <i>Depictions</i> : KKN Bukannya Mengempes	
3.7.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	218
3.7.3.1. <i>Roots</i> : Ujungnya Konflik Sosial	
3.7.3.2. <i>Appeals to principle</i> : “ <i>Sami’naa wa atha’naa</i> ”	
3.8. Perspektif: Pemerintahan Demokrasi Harus Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	220
IV.4. Jawa Pos	
4.1. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan	224
4.1.1. Bingkai Inti: Rakyat Harus Berdaulat, Mandiri Serta Otonom Menentukan Pilihan	224
4.1.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	227
4.1.2.1. Metafora: Saatnya Kini Para Pemilih Angkuh	
4.1.2.2. <i>Catchphrases</i> : Bebas Menentukan Pilihan Sesuka Hati	
4.1.2.3. <i>Exemplars</i> : Ini Benar-benar Buah Demokrasi	
4.1.2.4. <i>Depictions</i> : Perebutan Kursi Presiden Masalah Profan	
4.1.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	230
4.1.3.1. <i>Roots</i> : Warga NU Harus Mengendurkan Patronasenya dengan Kiai	
4.1.3.2. <i>Appeals to principle</i> : <i>Taushiyah</i> Syuriah PB NU	
4.2. Perspektif: Dalam Demokrasi Rakyat Berdaulat Menentukan Pilihan Politik Sendiri	232
4.3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden	233
4.3.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Belum Mengutamakan Pendidikan Politik, Miskin Kampanye Kreatif	234
4.3.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	241
4.3.2.1. Metafora: Ajang Kampanye Harus Dijadikan Pasar Bebas	
4.3.2.2. <i>Catchphrases</i> : Pendidikan Politik Rakyat Pemilih	
4.3.2.3. <i>Exemplars</i> : Banyak Pemilih Masih Awam	
4.3.2.4. <i>Depictions</i> : Menjajakan Dagangan Politik	
4.3.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	246
4.3.3.1. <i>Roots</i> : Program Kerja Perlu sebagai ‘GBHN’	
4.3.3.2. <i>Appeals to principle</i> : Tali Silaturahmi	

4.4. Perspektif: Pemilihan Presiden Merupakan Pendidikan Politik Rakyat	248
4.5. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat	250
4.5.1. Bingkai Inti: Kita Harus Mengontrol Pemerintah dan Menagih Janji Presiden	250
4.5.2. Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	253
4.5.2.1. Metafora: Angin Segar	
4.5.2.2. <i>Catchphrases</i> : SBY Kelebihan Beban Harapan	
4.5.2.3. <i>Exemplars</i> : Mencegah Kejatuhan Bangsa	
4.5.2.4. <i>Depictions</i> : Tak Bisa Terpuruk Lebih Dalam Lagi	
4.5.3. Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)	255
4.5.3.1. <i>Roots</i> : Memilih Jaksa Agung	
4.5.3.2. <i>Appeals to principle</i> : Korupsi Akar dari Segala Kejahatan	
4.6. Perspektif: Kontrol terhadap Pemerintah Demi Hak-hak Rakyat	256
IV.5. <i>Framing</i> Pers Mengenai Isu Demokratisasi	259
IV.6. Perspektif Pers dan Demokratisasi di Indonesia	272
Bab V KESIMPULAN	
V.1. Kesimpulan	274
V.2. Saran/Rekomendasi	282
DAFTAR PUSTAKA	284
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Tabel <i>Framing</i> Isu Demokratisasi oleh Surat Kabar Indonesia	291
Lampiran 2 Klasifikasi Isu Demokratisasi dalam Tajuk Rencana <i>Kompas</i> , <i>Suara Pembaruan</i> , <i>Republika</i> , dan <i>Jawa Pos</i> Edisi Mei – September 2004 Tentang Pemilihan Presiden	298
Lampiran 3 Judul Tajuk Rencana/Editorial, Tentang Pemilihan Presiden 2004, <i>Kompas</i> , <i>Suara Pembaruan</i> , <i>Republika</i> , dan <i>Jawa Pos</i> Edisi Mei – September 2004	303

DAFTAR TABEL

Tabel 1: <i>Framing</i> Isu Demokratisasi oleh <i>Kompas</i>	138-139
Tabel 2: <i>Framing</i> Isu Demokratisasi oleh <i>Suara Pembaruan</i>	186-187
Tabel 3: <i>Framing</i> Isu Demokratisasi oleh <i>Republika</i>	222-223
Tabel 4: <i>Framing</i> Isu Demokratisasi oleh <i>Jawa Pos</i>	258-259



B A B I

P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

Media massa sebagai perangkat komunikasi dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang jamak. Media massa tidak sekadar mendistribusikan informasi perihal berbagai fakta peristiwa, tetapi juga berperan dalam mendefinisikan isu atau permasalahan, menyajikan suatu kerangka acuan pemahaman, mengarahkan perhatian publik terhadap suatu perspektif tertentu, serta menciptakan opini publik.¹

Berbagai peran media massa dalam konteks kehidupan sosial tersebut erat berkaitan dengan keberadaan media massa sebagai bagian integral dari institusi-institusi sosial. Justru dalam proses interaksi dengan institusi sosial lain, seperti pemerintahan, partai politik, lembaga agama, dan lain-lain, media massa menjadi semakin menempati peran penting yang signifikan memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial maupun budaya.²

¹ Denis McQuail, merangkum peran media massa dalam kehidupan sosial berdasarkan perspektif khalayak, yakni: Pertama, sebagai *window on events and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Kedua, sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection* (cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya). Ketiga, sebagai *filter* atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal yang perlu atau yang tidak perlu mendapat perhatian khalayak. Keempat, sebagai *guide* atau *interpreter*, yang menunjukkan arah dan menjelaskan tentang berbagai hal. Kelima, sebagai *forum* untuk merepresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, yang memungkinkan terjadinya umpan balik. Keenam, sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalulalangnya informasi tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif. Lihat Henry Subianto, 2001, "Media Massa di Indonesia Baru", dalam *Jurnal Penelitian Media Massa*, Vol. 4 No. 7, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Surabaya, hlm. 30-31.

² Bandingkan Stephen W. Littlejohn, 1992, *Theories of Human Communication*, Fourth Edition, California: Wadsworth Publishing Company, hlm. 341; juga Denis McQuail, 2003, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, hlm. 34.

Namun media massa dengan segala peran yang disandangnya dalam konteks kehidupan sosial mengandung persoalan dalam dirinya sendiri. Persoalan tersebut lebih pada aspek kemampuan media massa untuk menjaga independensinya dengan secara berimbang mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat. Karena yang cenderung terjadi adalah media massa lebih mengutamakan kepentingan kalangan tertentu atau cenderung bersikap partisan maupun konformis kepada kelompok yang berpengaruh dominan dalam masyarakat kekuatan dominan dalam masyarakat. Dengan kecenderungan ini, pada satu sisi, media massa dapat semakin mengukuhkan kehadirannya tetapi pada saat yang sama ia juga memarjinalkan kelompok yang tidak dominan dalam masyarakat.³

Hal yang membuat media massa menjadi gamang untuk mempertahankan diri sebagai entitas yang benar-benar otonom dan mandiri dalam kehidupan sosial terkait dengan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup siapa, kepentingan apa, dan perspektif mana yang memperoleh akses kepada media massa itu sendiri. Faktor-faktor ini signifikan memengaruhi bagaimana media memproduksi suatu teks (*media content*) yang memuat informasi tentang fakta peristiwa atau realitas tertentu.⁴

Salah satu fakta peristiwa atau realitas yang kerap menjadi bahan informasi media massa, dalam hal ini pers, adalah peristiwa politik. Peristiwa politik yang

³ Kerangka pemikiran ini berpangkal pada pandangan Marxis tentang adanya sistem dominasi antarkelompok dalam masyarakat. Mengenai hal ini lihat uraian Stephen W. Littlejohn, *op.cit*, hlm. 245, 348; dan Denis McQuail, 2003, *op.cit*, hlm. 63, dan juga Eriyanto, 2004, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 22-23.

⁴ Lihat Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, 1996, *Mediating the Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, USA: Logman Publisher, hlm. 144, 190. Shoemaker dan Reese memformulasikan dua faktor utama yang signifikan memengaruhi media dalam memproduksi suatu teks informasi, yaitu komponen intramedia dan komponen ekstramedia. Intramedia mencakup seluruh pekerja media dan pemilik media. Ekstramedia meliputi semua aspek yang memiliki akses dan berkepentingan untuk memengaruhi media massa, yaitu: lingkungan ekonomi, sumber penghasilan, pemasang iklan, budaya, ideologi dominan, dan terutama pemodal.

selalu menarik menjadi komoditas informasi pers meliputi: peristiwa rutin, peristiwa insidental, skandal, dan peristiwa yang ditemukan secara kebetulan tanpa disengaja.⁵ Dengan kata lain, hampir seluruh aktivitas yang melibatkan pejabat politik selalu menarik menjadi bahan informasi bagi pers.

Intensitas pemberitaan pers mengenai peristiwa politik dapat dipahami dari dua aspek pokok. Pertama, pers mengasumsikan bahwa peristiwa politik merupakan informasi yang diminati publik, dan dengan demikian ia selalu bernilai berita. Peristiwa politik dipandang bernilai berita, karena peristiwa politik signifikan memengaruhi kehidupan publik.⁶ Kedua, para pejabat politik berusaha untuk menggunakan pers sebagai sarana untuk mempublikasikan kepentingan politiknya.⁷ Kedua aspek tersebut mengindikasikan bahwa dalam penyajian informasi tentang peristiwa politik oleh pers, termaktub aspek kepentingan pers sebagai industri komersial, kepentingan publik, dan juga kepentingan pejabat politik.

Menurut McNair, penyajian informasi tentang peristiwa politik secara luas oleh media massa berkaitan erat dengan dimensi keberadaan media massa dalam era politik modern. Ia mengatakan, dalam konteks politik modern, media massa memiliki dua peran penting dan strategis. Pertama, media massa menempati posisi sebagai mediasi antara politikus dengan publik. Para aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian organisasi media agar aktivitas politiknya dapat terpublikasi melalui media massa. Kedua, bagi media massa peristiwa politik selalu mempunyai nilai berita. Dalam bingkai dua poin ini, media massa bisa

⁵ Dan Nimmo, 1993, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, (penerjemah Tjun Surjaman), Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 219.

⁶ *Ibid.*, hlm. 214-218.

⁷ *Ibid.*, hlm. 228-230.

menjadi penyampai (*transmitters*) pesan-pesan politik dari pihak di luar media massa, tetapi bisa juga menjadi pengirim (*senders*) pesan politik yang dibuat (*constructed*) oleh pihak pekerja media massa.⁸

John Street juga mengemukakan pendapat yang relatif sama. Ia menyatakan produk informasi media massa tentang peristiwa politik terselenggara dalam konteks perubahan karakter komunikasi politik modern. Perubahan karakter komunikasi politik modern ditandai oleh dua aspek yang saling berhubungan, yaitu: perubahan motivasi dan praktek politikus, dan perubahan korporasi media kontemporer. Pada satu pihak, politikus selalu berupaya untuk memengaruhi media agar menjadi instrumen yang menyebarkan aspirasi politiknya. Antara lain dengan menyusun agenda kampanye sesuai dengan jadwal pekerja media, menerbitkan regulasi, melakukan pendekatan sesuai dengan yang dikehendaki media, dan lain-lain. Tetapi pada pihak lain, pemilik media dengan otoritas yang dimilikinya juga berkepentingan untuk memperluas pengaruh politisnya maupun untuk mencapai tujuan politis tertentu.⁹

Paparan di atas, menunjuk perubahan karakter komunikasi politik telah menumbuhkembangkan hubungan interdepen-densi antara media dan politikus. Dalam konteks politik kontemporer, media massa semakin menempati posisi strategis serta dapat memainkan peran penting dalam ranah politik. Pesan politik

⁸ Pandangan McNair diuraikan Ibnu Hamad, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, hlm. 1.

⁹ John Street, 2001, *Mass Media, Politics and Democracy*, New York: Palgrave., hlm. 2. Mengenai perilaku pemilik media, Street menyebut contoh faktual seorang pemilik media dengan jaringan global bernama Rupert Murdoch yang dengan leluasa dapat memengaruhi apa yang menjadi sajian persnya, mengarahkan apa sepatutnya dilakukan pemerintah, dan apa yang dipikirkan publik. Bagi Street, Rupert Murdoch merupakan figur yang memiliki pengaruh politis yang merusak. Dikatakan, Murdoch lebih dari suatu pemimpin untuk kerajaannya, ia menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan politis dan juga memengaruhi apa yang dikatakan dalam seluruh jaringan media miliknya, apa yang dipikirkan pemberi suara dan apa dilakukan pemerintah. (hlm. 133-139).

tidak lagi dikomunikasikan secara langsung kepada publik melainkan disampaikan melalui media massa. Media massa, sebagai mediasi, bisa sekadar menjadi wadah pejabat politik untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya, tetapi media massa juga dapat bertindak sebagai pihak yang memproduksi pesan-pesan politik dengan mengkonstruksi dan memaknai realitas politik. Kondisi faktual ini pula disebut Street sebagai faktor yang melatarbelakangi munculnya pandangan tentang media sebagai *fourth power* (kekuatan/pilar keempat) demokrasi. Media dipandang memiliki kuasa (*power*) dalam setiap proses politik dan dapat memengaruhi pemerintahan.¹⁰

Keberadaan media sebagai instrumen mediasi politik memunculkan variasi format sajian media (*media content*) tentang realitas politik. McNair membedakan tiga bentuk realitas politik dalam sajian media, yaitu: (1) Realitas politik sebagaimana adanya (*objective political reality*), (2) Realitas menurut persepsi aktor-aktor politik dan khalayak (*subjective reality*); dan (3) Realitas politik hasil liputan media massa (*constructed reality*). Konstruksi realitas politik oleh media bukan merupakan realitas obyektif melainkan suatu realitas yang dikonstruksi secara subyektif dalam suatu kerangka perspektif tertentu dan di dalamnya termaktub pesan politik tertentu.¹¹

Asumsi bahwa informasi media (*media content*) tentang berbagai fakta peristiwa atau realitas, dalam hal ini realitas politik, merupakan produk konstruksi

¹⁰ John Street, *op.cit.*, hlm. 231. Street menjelaskan, latar belakang pandangan tentang media sebagai institusi politik (selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif) adalah karena media memiliki kuasa (*power*). Sebenarnya keberadaan media sebagai kekuatan politik tidak melekat sejak semula melainkan pada sekitar satu dekade terakhir yaitu semenjak media menunjukkan peran serius dalam ranah politik. Media, dalam ranah politik, berperan seperti malah kadang-kadang lebih dari partai, parlemen atau kongres. Media mengakomodasi sebutan sebagai kekuatan politis dengan asumsi, secara implisit atau eksplisit, bahwa televisi, radio, pers dan media yang baru adalah 'powerfull'.

¹¹ Lihat Ibnu Hamad, *op.cit.*, hlm. 3.

media atas realitas terpumpun dalam paradigma konstruktivisme.¹² Paradigma ini berpangkal pada pemikiran sosiolog Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang memperkenalkan konsep konstruktivisme dengan tesis: konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*).¹³ Berger membedakan tiga jenis realitas, yakni: realitas obyektif sosial, realitas simbolik sosial, dan realitas subyektif sosial. Realitas obyektif sosial adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia obyektif yang berada di luar diri individu, dan dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolik sosial adalah ekspresi simbolik dari realitas obyektif dalam berbagai bentuk, termasuk isu media massa. Realitas subyektif sosial adalah realitas yang terbentuk akibat proses penyerapan kembali realitas obyektif dan realitas simbolik ke dalam individu melalui proses internalisasi.¹⁴ Dalam terang perspektif ini, Subianto menyebut pers berperan membentuk realitas subyektif

¹² W. Lawrence Neuman, 2000, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Fourth Edition, Boston: Allyn and Bacon, hlm 64-85; Deddy Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 8-52; Dedy N. Hidayat, 1999, "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi" dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. III/April, Bandung, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan Remaja Rosdakarya, hlm. 32-40. Metode riset komunikasi dikelompokkan ke dalam 3 tipologi paradigma atau perspektif dasar, yaitu: (1) paradigma klasik (yang mencakup positivisme dan postpositivisme), (2) paradigma kritis, dan (3) paradigma konstruktivisme. Perbedaan ketiga paradigma ini antara lain adalah berkaitan dengan asumsi mengenai realitas. Paradigma klasik memandang realitas sebagai ada (*exist*) yang stabil dan terpola yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Paradigma konstruktivisme memandang realitas sebagai ada (*exist*) yang diciptakan oleh interaksi manusia. Suatu realitas hasil pengamatan seseorang tidak bisa digeneralisasikan menjadi hasil pengamatan semua orang, karena masing-masing orang boleh jadi berbeda-beda memandang dan mendefinisikan suatu realitas. Paradigma kritis memandang realitas sebagai ada (*exist*) yang selalu terdapat konflik dan diatur oleh *the hidden underlying structures*, sehingga realitas sulit dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia.

¹³ Lihat Stephen W. Littlejohn, *op.cit.*, hlm. 190. Littlejohn mencatat sebenarnya gagasan Peter L. Berger dan Thomas Luckman mengenai konstruksi sosial atas realitas diilhami oleh pemikiran filsuf Alfred Schutz yang menyatakan bahwa pemaknaan dan pemahaman kita akan realitas muncul dari komunikasi kita dengan yang lain.

¹⁴ Lihat Henry Subianto, 1997, "Dominasi Negara dan Wacana Pemberitaan Pers, dalam I. Basis Susilo (editor), *Masyarakat dan Negara*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 93.

dengan memproduksi realitas simbolik atas berbagai fakta peristiwa atau realitas dengan menggunakan bahasa.¹⁵

Penggunaan bahasa (kata-kata) dalam konteks informasi media massa, menurut Stuart Hall, adalah sebagai medium untuk memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna atas suatu realitas tertentu. Bagi Hall, media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan mendefinisikan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata terpilih. Karena setiap kata mengandung makna tersendiri, maka melalui pemakaian kata-kata terpilih terkandung maksud untuk mengedepankan makna-makna tertentu. Jadi, makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktek pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial atau suatu praktek konstruksi sehingga makna tidak secara sederhana bisa dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertarungan sosial (*social struggle*), sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Masing-masing kelompok sosial saling bertarung, saling menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu realitas dengan menggunakan elemen-elemen simbolik atau istilah-istilah tertentu.¹⁶

Dalam kondisi media sebagai arena *social struggle*, menurut Hall, menimbulkan persoalan tersendiri menyangkut independensi media massa. Asumsi bahwa media sebagai ranah independen, sehingga jika terjadi perebutan pemaknaan di antara kelompok-kelompok sosial maka media akan mengakomodasi semua kelompok secara adil, ternyata tidak benar. Karena yang terjadi secara

¹⁵ Henry Subiakto., *op.cit.*, hlm. 94. Subiakto mengisyaratkan pers sebagai institusi yang memengaruhi realitas subyektif memiliki tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi yang dimuatnya.

¹⁶ Stuart Hall, 1982, "The Rediscovery of 'Ideology': Return of the Repressed in Media Studies", dalam Michael Gurevith, et.al, (ed.) *Culture, Society and Media*, London, Methuen, hlm. 67, 78.

faktual adalah justru sebaliknya. Media selama ini justru dikuasai kelompok tertentu yang dominan dalam masyarakat. Dalam sajian media, kelompok dan ideologi dominan jauh lebih berpengaruh dalam memaknai realitas.¹⁷

Berdasarkan konsepsi Berger dan Hall, dapat dikatakan, media bukanlah saluran yang bebas tetapi lebih tepat dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas berdasarkan konsep subyektif pekerja media. Pekerjaan media massa pada dasarnya adalah mengkonstruksi realitas. Realitas itu tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari pekerja media, dengan penggunaan bahasa. Pemakaian kata-kata oleh pekerja media menyangkut suatu realitas menunjukkan bagaimana ia mengkonstruksi realitas dan bagaimana cara pandangnya terhadap realitas tersebut. Ini berarti, realitas yang disajikan oleh media massa itu bersifat subyektif, bukan realitas yang obyektif. Realitas bisa berbeda-beda tergantung bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh pekerja media yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Oleh karena itu, suatu titik penting dalam memahami berbagai informasi media sebagai produk konstruksi realitas (*constructed reality*) adalah dengan memperhatikan bagaimana media secara subyektif mengkonstruksi realitas dengan menggunakan elemen-elemen simbolik atau kata-kata terpilih. Kata-kata atau istilah-istilah yang dipakai oleh media dalam mengkonstruksi realitas tidak semata-mata hanya karena kebetulan melainkan sebagai sarana operasinya untuk memaknai realitas dan sekaligus sebagai komponen strategi membingkai pesan ter-

¹⁷ Stuart Hall, *op.cit.*, hlm. 109. Tentang hasil-hasil penelitian komunikasi yang menunjuk media massa berpihak kepada kelompok dominan, lihat Denis McQuail, 2003, *op.cit.*, hlm. 186-187.

bingkai (*frame*) sehingga menghasilkan konstruksi makna yang spesifik. Proses *framing* melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak (reporter, para redaktur, petugas tata letak), dan juga pihak yang berkepentingan dengan liputan suatu peristiwa.²⁰

Pendapat Aditjondro itu, jelas berpangkal pada pandangan para pemikir konsep *framing* seperti Gamson dan Modigliani, serta Entman. Menurut Gamson dan Modigliani, yang dikenal sebagai ilmuwan yang konsisten mengembangkan konsep *framing* dengan paradigma konstruktivisme, *frame* merupakan perangkat yang selalu hadir (*ever-present*) dan digunakan dalam mengkonstruksi makna suatu tindakan komunikatif.²¹ *Frame* merupakan perangkat untuk melihat suatu fakta peristiwa atau realitas dengan suatu sudut pandang tertentu. Sudut pandang setiap orang dalam memahami suatu peristiwa atau realitas bisa saja berbeda. *Frame* menunjukkan bidang posisi ("*implies a range of positions*") atas suatu fakta peristiwa atau realitas.²²

Konsepsi Gamson dan Modigliani tentang *framing* paralel dengan pandangan Entman. Ia menyatakan, *framing* selalu melibatkan dua dimensi besar yaitu seleksi (*selection*) dan penonjolan (*salience*) aspek tertentu dari suatu fakta peristiwa atau isu tertentu. Media bukan sekadar melakukan seleksi dan

²⁰ Pandangan George J. Aditjondro ini didasarkan pada studinya tentang pemberitaan masalah lingkungan dalam pers Indonesia. Lihat Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *Pers yang Gamang - Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*, Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS), hlm. 9-10.

²¹ Lihat Adam Simon dan Michael Xenos, "*Media Framing and Effective Public Deliberation*," dalam <http://jsis.artsci.washington.edu/programs/cwesuw/simon.htm> (diakses 23 Nopember 2004); Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, op.cit., hlm. 76-77.

²² John Street, op.cit., hlm. 37-38. Street mencatat, bagi Gamson posisi dalam konsepsi *framing* tidak harus dikacaukan dengan posisi tertentu atau untuk melawan suatu kebijakan tertentu. Suatu posisi, dalam konsepsi *framing*, tidak dapat diidentikkan dengan bias. Pandangan Gamson paralel dengan pandangan Entman yang menyatakan *frame* berbeda dengan bias atau dugaan penyimpangan. Bias cenderung membingkai aktor dan peristiwa yang berbeda dengan cara yang sama dan cenderung menegaskan posisi tunggal pada setiap fakta peristiwa atau realitas yang terjadi.

penonjolan tetapi juga menyertakan pengertian pekerja media atas suatu fakta peristiwa atau realitas tertentu. Dengan *framing*, media menetapkan *setting* suatu fakta peristiwa yang akan menggiring dan mengarahkan pemahaman khalayak tentang suatu realitas. Oleh karena itu, suatu format *framing* berpotensi untuk memengaruhi khalayak dalam memahami dan memaknai suatu fakta peristiwa.²³

Dalam suatu format pbingkaian pesan atau pengemasan pesan (*framing*),²⁴ media massa secara subyektif mengedepankan suatu perspektif tertentu tentang suatu fakta peristiwa atau isu permasalahan tertentu. Suatu format *framing* dapat secara signifikan memengaruhi khalayak ataupun mengubah pemahaman publik terhadap suatu peristiwa atau realitas tertentu. Jika realitas tersebut adalah tentang sistem politik demokrasi, maka media melakukan pbingkaian pesan (*framing*) atas fakta peristiwa maupun isu permasalahan tentang demokrasi. Namun perihal implementasi *framing* dalam konteks sistem politik demokrasi menuai diskusi tersendiri. Pertanyaan pokok yang mengemuka adalah: Apakah dampak *framing* terhadap kehidupan demokrasi? Sejauh manakah kontribusi media bagi usaha demokratisasi bilamana ia melakukan *framing* atas peristiwa politik?

²³ Robert M. Entman, 2002, "Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm," dalam dalam McQuail, Denis., (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications, hlm. 391-394, bandingkan John Street, *op.cit.*, hlm. 37-38. Perihal perangkat *framing* ini akan dijelaskan lebih lanjut ketika menguraikan metodologi.

²⁴ Dalam studi media dan komunikasi, istilah pbingkaian pesan merupakan konotasi dari istilah *framing* dalam siaran media cetak, Sedangkan istilah pengemasan pesan sebagai konotasi dari istilah *packaging* dalam sajian media elektronik (televisi dan radio). Meski kedua istilah ini berbeda namun asumsi yang mendasarinya adalah sama, yakni informasi peristiwa yang termuat dalam media massa tidak luput dari upaya untuk mengkonstruksi dan memaknai realitas. Dalam penelitian ini istilah pbingkaian pesan dan pengemasan pesan digunakan secara bergantian dengan pengertian *framing*. Uraian panjang lebar mengenai *packaging* dapat dilihat dalam Bob Franklin, 1995, "The Media and Party Politics", dalam <http://www.psa.ac.uk/cps/1995%5Cfrank.pdf> (diakses, 20 April 2005). Lihat pula Jhon Street, *op.cit.* hlm. 187-192. Street menguraikan bahwa teknik *packaging* antara lain adalah mewawancarai tokoh politik, mengemas *image* dan penampilan seorang figur politik, mendayakanfaatkan jasa selebriti, mengelola ahli, menggunakan jasa konsultan media dan pemasangan iklan.

Jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi perdebatan. Franklin, misalnya, dengan tegas menyatakan pengemasan politik tidak memberikan kontribusi positif bagi demokrasi melainkan justru merusak demokrasi. Karena dalam proses pengemasan politik, politikus mendikte media sehingga lantas media menjadi sekadar sebagai corong politikus. Dengan demikian, media tidak meningkatkan pengetahuan publik dan tidak meningkatkan partisipasi warga negara maupun meningkatkan tanggung jawab pemerintah. Media tidak memberdayakan publik, tetapi justru menjadikan warga negara sebagai penerima pasif bukan sebagai partisipan aktif dalam dialog demokrasi.²⁵

Menurut Street, klaim mengenai pembingkaiian politik berbahaya terhadap demokrasi patut diperhatikan dengan saksama. Klaim tersebut pada dasarnya mengarahkan kesalahan kepada politikus dan terhadap media yang berkonspirasi mengikis demokrasi.²⁶ Bagaimanapun setiap kali media memproduksi informasi politik, ia sangat sulit menghindarkan diri untuk tidak melakukan *framing*.²⁷ Tetapi dalam kasus tertentu boleh jadi suatu pengemasan pesan mengandung kontribusi positif bagi demokrasi. Suatu *framing* tentang seorang sosok politikus, misalnya, bisa saja bermanfaat bagi pengembangan demokrasi karena dengan demikian publik dapat melakukan penilaian dan menentukan pilihan. Maka bagi

²⁵ Bob Franklin, *loc. cit.* Pendapat Franklin didasarkan pada hasil studi yang dilakukannya tentang pengemasan politik (*packaging politics*) dalam sajian media elektronik secara khusus televisi dan radio dalam konteks demokrasi di Inggris. Meski bukan kajian tentang *framing* media cetak, namun terasa relevan dikemukakan untuk memperoleh gambaran umum perihal *framing* dalam konteks demokrasi. Tetapi menurut Street, argumen Franklin merupakan keluhan umum yang menghendaki agar media merepresentasikan informasi politik secara proporsional. Argumen tersebut dipandang tidak selalu relevan dan berlaku umum dalam setiap konteks politik. Dalam konteks tertentu, *packaging politics* boleh jadi berkontribusi bagi demokrasi. Misalnya, *packaging politics* tentang seorang sosok politikus tertentu secara implisit boleh saja bermanfaat bagi pengembangan demokrasi karena dengan demikian publik dapat melakukan penilaian dan menentukan pilihan. Lihat John Street, *op. cit.*, hlm. 201-203.

²⁶ John Street, *op. cit.*, hlm. 185.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 187-201.

Street, klaim mengenai dampak buruk *framing* terhadap demokrasi selalu harus dibuktikan berdasarkan suatu analisis ilmiah.²⁸

Dengan kata lain, *framing* dapat memberikan kontribusi positif bagi demokrasi tetapi bisa pula berdampak buruk bagi demokrasi. Dampak buruk dapat terjadi apabila disertai oleh suatu kolaborasi atau bahkan konspirasi antara media dan politikus. Namun perlu diperhatikan bahwa implikasi *framing* pada kehidupan demokrasi tidak selalu sama pada setiap kasus atau berlaku umum. Sehingga keliru apabila suatu klaim digunakan menjadi patokan umum, tetapi lebih cermat dilihat kasus per kasus dan dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah. Termasuk dengan memerhatikan bagaimana hubungan antara media dengan politikus.

Wacana tentang implikasi *framing* dalam kehidupan demokrasi terkait dengan peran atau fungsi standar media dalam demokrasi.²⁹ Media dipandang sebagai er titas demokrasi yang signifikan dapat memengaruhi setiap proses kehidupan politik. Media berfungsi sebagai *watchdog* (anjing penjaga) demokrasi. Menjaga agar penyelenggara kekuasaan menghormati hak setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik, dan mengembangkan kapasitas warga negara untuk menentukan keputusannya secara bebas. Media

²⁸ John Street, *op.cit.*, hlm. 208-211.

²⁹ Perihal peran standar media dalam demokrasi kerap diformulasikan secara berbeda namun selalu didasarkan pad. konsepsi demokrasi. McNair mengemukakan lima fungsi media dalam demokrasi, yaitu: 1) Media massa harus menginformasikan (*inform*) dalam pengertian "*surveillance*" atau "monitoring" mengenai apa yang terjadi di sekitar masyarakatnya; 2) Media massa harus mendidik (*educate*) mengenai makna dan manfaat fakta-fakta (*facts*) dengan tetap mempertahankan obyektivitasnya dalam menganalisis fakta itu; 3) Media massa harus menyediakan satu *platform* untuk publik mengenai wacana politik, memfasilitasi pembentukan opini publik, dan menyiapkan opini balikan dari mana saja datangnya; 4) Memberikan publisitas kepada pemerintah dan instansi lainnya, dalam arti berperan sebagai "*watchdog*"; 5) Media massa dalam masyarakat demokratis melayani sebagai suatu saluran untuk kepentingan pemberdayaan (*advocacy*) mengenai berbagai titik pandang politik. Lihat Ibnu Hamad, 2004, "Mempersiapkan Media yang Fair pada Pemilu 2004: Mempertanyakan Kembali Independensi dan Komitmen Media pada Demokrasi", dalam [http:// www.pantaupemilu.or.id/index.cfm?fuseaction=analisis.detail&detailid=19](http://www.pantaupemilu.or.id/index.cfm?fuseaction=analisis.detail&detailid=19) (diakses 5 Oktober 2004). Bandingkan dengan pandangan McQuail yang merangkum enam peran media dalam pers-pektif khalayak, lihat Henry Subiakto, *loc.cit.*, hlm 30-31.

sebagai *watchdog* berperan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi serta memberikan kontribusi bagi terciptanya tatanan dan kondisi yang demokratis.

Menurut Street, untuk memperoleh gambaran sejauh mana media memfungsikan dirinya dalam kehidupan demokrasi adalah memerhatikan teks media (*media content*) itu sendiri.³⁰ Ini beranjak dari asumsi bahwa setiap informasi media dapat mengindikasikan bagaimana media mengimplementasikan perannya dalam demokrasi.³¹ Dengan kata lain, teks media tentang informasi politik relevan digunakan sebagai perangkat analisis untuk memperoleh gambaran bagaimana media mengimplementasikan fungsinya dalam kehidupan demokrasi atau sejauh mana kontribusi media dalam kehidupan demokrasi. Penggunaan teks media sebagai rujukan utama dipandang tepat, paling tidak karena ada tiga alasan.

Pertama, teks media merupakan produk utama media. Di dalam teks, media memuat berbagai informasi politik, yakni meliputi semua proses politik, termasuk tindakan dan kinerja politikus. Kedua, teks media pada dasarnya merupakan wadah bagi media untuk mengimplementasikan perannya dalam demokrasi. Oleh karena itu, melalui teks media dapat diidentifikasi sejauh mana kontribusi media dalam demokrasi. Ketiga, pola penyajian informasi politik, seyogianya harus membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk melakukan penilaian secara obyektif terhadap proses politik yang terjadi atau yang sedang berlangsung. Jadi idealnya, format informasi politik adalah harus memberdayakan, mencerdaskan

³⁰ John Street, *op.cit.*, hlm. 272.

³¹ Bandingkan J. Herbert Altschull, 1984, *Agent of Power, The Role of the News Media in Human Affairs*, New York: Longman Inc., hlm. 18-21. Memang bagi Altschull, informasi media kontemporer merupakan produk industri komersial. Tetapi ia sepenuhnya tidak membantah bahwa tahap awal perkembangan demokrasi di Amerika juga dipengaruhi oleh media. Media melalui teks pemberitaan tentang peristiwa politik menginformasikan berbagai informasi yang signifikan menumbuhkembangkan demokrasi di kalangan warga negara Amerika.

dan menyadarkan warga negara akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara termasuk hak-hak politiknya.³²

Berdasarkan karakteristik isinya, teks media dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: berita (*news*) dan isu (*issues*). Berita (*news*) adalah peristiwa (*event*) bukan isu. Tetapi *news* akan berubah menjadi isu ketika *news* tersebut digunakan oleh kolumnis, termasuk redaktur, menjadi topik bahasan dalam rubrik lain, misalnya dalam tajuk rencana atau editorial.³³ Ketika *news* didefinisikan menjadi isu, media menciptakan wacana tertentu tentang suatu *news*.³⁴ Pada tataran inilah, teks editorial atau populer juga dengan sebutan tajuk rencana³⁵ menempati posisi penting dan strategis tersendiri bagi suatu institusi media. Tajuk rencana merupakan rubrik atau kolom khusus bagi suatu insitusi media untuk menyampaikan pandangan kolektif organisasinya tentang suatu fakta peristiwa maupun suatu isu tertentu.³⁶

Lebih lanjut, pers dalam tajuk rencananya secara subyektif mencampurkan fakta dan opini atau secara dominan melakukan pembedaan (*framing*). Media mengkonstruksi dan memaknai suatu fakta peristiwa (berita) dengan mengedepankan isu permasalahan tertentu disertai argumentasi yang dianggapnya relevan

³² John Street, *op.cit.*, hlm. 185-186.

³³ Rowland Lorimer, 1994, *Mass Communications, A Comparative Introduction*, New York: Manchester University Press, hlm. 207.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 220.

³⁵ Institusi-institusi pers menggunakan istilah yang berbeda untuk sebutan rubrik editorial, contoh: *Kompas* dan *Suara Pembaruan* memakai istilah Tajuk Rencana, *Republika* menyebutnya dengan istilah Tajuk, dan *Jawa Pos* menyandingkan sebutan Jati Diri. Dalam penelitian ini digunakan istilah Tajuk Rencana.

³⁶ Perihal Tajuk Rencana sebagai rubrik pernyataan sikap dan pandangan institusi pers tentang suatu isu permasalahan, lihat Maria Frauenrath, Yonis Ali Nur, Menuk Suwondo, 2003, "*Jadi, Bagaimana Menurut Pendapat Anda...?*" *Buku Panduan Praktis Bagi Wartawan*, London: BBC World Service Trust, hlm. 35. Frauenrath mengklasifikasikan Tajuk Rencana sebagai komentar yang mengungkapkan pandangan surat kabar bersangkutan, mewakili pandangan kolektif organisasi, dan biasanya formatnya adalah menyimpulkan semua pendapat yang ada sebelum menyusun suatu kesimpulan.

bagi khalayak.³⁷ Dengan demikian, gambaran tentang bagaimana posisi dan opini media menyangkut isu permasalahan tertentu dapat dibaca melalui tajuk rencana.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, ingin digarisbawahi dua poin penting. *Pertama*, pada dasarnya pers selalu melakukan pembedaan pesan (*framing*) atas berbagai fakta peristiwa maupun isu permasalahan. *Framing* memiliki implikasi bagi kehidupan demokrasi, dan oleh karena itu suatu format penyajian (*frame*) dapat mengindikasikan sejauh mana pers tertentu memfungsikan dirinya sebagai instrumen perwujudan demokrasi. Perihal implikasi *framing* bagi demokrasi ataupun kontribusi pers bagi kehidupan demokrasi perlu dan harus dilandaskan pada kajian ilmiah antara lain dengan melakukan analisis teks (*media content*) pers itu sendiri. *Kedua*, teks tajuk rencana merupakan pandangan kolektif suatu institusi pers atas suatu fakta peristiwa maupun isu tertentu. Dalam tajuk rencana, secara implisit maupun eksplisit, pers memperlihatkan apa opini serta bagaimana posisi pers tersebut mengenai suatu isu tertentu. Hal ini dapat dikaji dengan mengaplikasikan metode analisis *framing*.

Dalam terang pemahaman kedua poin tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana suatu institusi pers membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi adalah dengan mengkaji teks tajuk rencana pers itu sendiri.³⁸ Isu demokratisasi, merujuk pandangan David Held, meliputi semua aspek yang berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi itu sendiri, seperti tentang akuntabilitas ne-

³⁷ Lihat Susan Dente Ross, *loc. cit.*, hlm. 1-2.

³⁸ Aplikasi pemikiran ini antara lain dilakukan oleh Susan Dente Ross, *loc. cit.*; dan juga Ayo Olutokun and Dele Seteolu., "The Media and Democratic Rule in Nigeria", dalam *Development Policy Management Network Bulletin* Vol. XIII, No. 3, September 2001, hlm. 30-34, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN004216.pdf> (diakses, 20 April 2005). Mereka menganalisis rubrik editorial pers di Nigeria untuk mengidentifikasi bagaimana peran pers memfungsikan diri sebagai *watchdog* dalam proses demokrasi di Nigeria.

gara; masyarakat warga (*civil society*) yang kuat; kebebasan menggunakan hak pilih, mengemukakan pendapat, melakukan kontrol terhadap agenda politik; dan terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi.³⁹ Ini menunjuk bahwa isu demokratisasi sangat luas, mencakup semua hal dalam bidang kehidupan demokrasi itu sendiri.⁴⁰

Dalam pada itu, terasa relevan mengkaji bagaimana pers Indonesia membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi dalam konteks kehidupan politik di Indonesia kontemporer. Relevansi kajian ini semakin terasa penting seiring dengan terjadinya perubahan kondisi politik Indonesia, terlebih setelah Soeharto turun dari puncak pemerintahan, menggelorakan suatu kerinduan menuju tatanan dan kondisi politik ke arah yang demokratis.⁴¹

Demokratisasi di Indonesia tampak terus bergulir antara lain dengan terbukanya ruang kebebasan pers, dan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada Pemilihan Umum 2004 (selanjutnya disebut pilpres).⁴² Pilpres dipandang sebagai suatu peristiwa politik dalam agenda

³⁹ Lihat Georg Sorensen., 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, (terjemahan I. Made Krisna, penyunting dan pengantar Tadjuddin Noer Effendi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS, hlm. 14-15.

⁴⁰ Bandingkan dengan uraian Hotman yang menjabarkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan 12 elemen dasar, yaitu: penghargaan dan perhormatan terhadap hak kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, persamaan di depan hukum, kebebasan beragama, hak atas penghidupan yang layak, hak atas pendidikan, penyelesaian konflik secara damai dan melembaga, kesetaraan *gender*, penghargaan pluralitas, menghargai hak minoritas, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan antimonopoli. Lihat Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm 95-100.

⁴¹ Lihat Glen Lewis dan Christina Slade, 2000, *Critical Communication*, second edition, Australia: Prentice Hall, hlm. 287-290.

⁴² Agenda pemilihan Presiden, sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), diselenggarakan secara bertahap. Pengajuan calon presiden berlangsung pada 1-7 Mei 2004. Sesuai Undang-Undang Pemilu, yang berhak mengajukan calon adalah partai politik dengan perolehan suara nasional sebanyak lima persen atau tiga persen kursi perwakilan di DPR hasil pemilihan legislatif pada 5 April 2004. Proses pemilihan presiden dilaksanakan dalam dua putaran. Putaran pertama berlangsung pada 5 Juli 2004, dan kedua pada 20 September 2004. Dalam setiap putaran, capres-cawapres mengadakan kampanye.

demokrasi di Indonesia. Peristiwa politik ini mendapat liputan luas dari media massa. Pers di Indonesia menyajikan berbagai ulasan seputar pilpres.

Intensitas pers menyajikan informasi tentang pilpres niscaya tidak luput dari keinginan pers untuk semakin memantapkan posisi pers sebagai wadah mediasi politik di Indonesia. Dalam kondisi ini, pers menjadi aktor-aktor politik yang menentukan secara dominan sebagai penentu kecenderungan opini publik. Apalagi selain sebagai wadah yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kalangan dengan kepentingan politik tertentu, pers juga mempunyai kemampuan untuk mengkonstruksi dan memaknai realitas pilpres sekaligus memproduksi pesan-pesan (*framing*) politik tertentu.⁴³ Tetapi pertanyaan yang perlu diajukan kemudian adalah: Sejauh mana pers telah berfungsi menciptakan dirinya sebagai instrumen demokrasi? Apakah kontribusi pers bagi usaha demokratisasi di Indonesia? Apa opini serta bagaimana posisi pers ketika mengeksplorasi isu demokratisasi dan lalu diolah menjadi komoditas informasi? Deretan pertanyaan ini tentu menarik ditelaah lebih lanjut. Namun penelitian ini tidak berpretensi untuk memaparkan jawaban secara menyeluruh, melainkan terfokus untuk mengkaji bagaimana pers membingkai (*framing*) isu demokratisasi ketika pers mengangkat fakta peristiwa pilpres sebagai topik ulasan dalam tajuk rencana.

Kajian ini memilih menggunakan teks tajuk rencana sebagai perangkat analisis berdasar pada asumsi bahwa dalam teks tajuk rencana suatu institusi pers dengan lebih eksplisit mengungkapkan posisi (sikap) dan opini (pandangan)-nya tentang isu-isu tertentu. Pilihan menggunakan teks tajuk rencana juga disertai

⁴³ Deskripsi tentang peran pers dalam konteks pemilihan Presiden secara langsung di Indonesia, lihat Dedy Djamiluddin Malik, 1998, "Pemilihan Langsung Presiden: Perspektif Budaya dan Komunikasi Politik," dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, No. 2/Oktober, Bandung: Remadja Rosdakarya, hlm. 55-56.

fakta, karena sepanjang diketahui masih belum ada yang mengkaji teks tajuk rencana, khususnya tentang pemilihan presiden. Sementara studi, dengan teks berita sebagai perangkat analisis, yang menunjukkan pers di Indonesia melakukan strategi *framing* telah banyak dilakukan.⁴⁴

Asumsi dasar studi ini adalah bahwa *framing* isu demokratisasi dalam tajuk rencana menunjukkan bagaimana pers mengkonstruksi dan memaknai demokratisasi di Indonesia. Diasumsikan pula, *framing* isu demokratisasi dalam teks tajuk rencana menunjukkan posisi dan opini pers dalam konteks demokratisasi di Indonesia. Beranjak dari asumsi dasar ini, dengan mengkaji *framing* isu demokratisasi dalam teks tajuk rencana (*content analysis*), diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana posisi pers dalam konteks demokratisasi dan apa pandangan (opini) pers tentang demokratisasi di Indonesia. Dengan demikian, tipe riset yang hendak dilakukan adalah melihat bagaimana pesan dibentuk (*analisis frame media*), tidak mengungkapkan bagaimana pesan diterima (*analisis frame khalayak*).⁴⁵

Penelitian ini memilih menggunakan teks yang terdapat dalam tajuk rencana *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, edisi Mei - September 2004. Penetapan rentang waktu Mei - September, adalah sesuai dengan jadwal pe-

⁴⁴ Untuk menyebut beberapa studi yang terpublikasi antara lain adalah oleh: Hotman M. Siahaan, dkk., *Pers yang Gamang - Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*, Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS), 2001; Agus Sudibyo., *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta, LkiS, 2001; J. Anto., *Limbah Pers di Danau Toba – Media Pers Menghadapi Gurita Indorayon Anno 2000*, Medan: Yayasan Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS), 2001; Fathurin Zen., *NU Politik – Analisis Wacana Media*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

⁴⁵ Lihat Jennifer L. St. Pierre, 2004, "Framing The War With Iraq: A Content Analysis of Three Newspapers' Coverage", *A Thesis*, The Pennsylvania State University Schreyer Honors College, dalam <http://www.jstpierre.com/Thesis%20final%20draft.htm> (diakses 19 September 2005), hlm. 3. Pierre menjelaskan pandangan Valkenburg, Semetko, dan De Vreese, yang membedakan dua konsepsi *framing*, yaitu: *frame media* dan *frame khalayak*.

milihan presiden.⁴⁶ Pemilihan pada keempat pers tersebut adalah karena *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, dipandang konsisten menghadirkan wacana politik pada pilpres, dengan mengkonstruksi dan melakukan pembingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi dengan variasi sudut pandang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

I.2. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* dalam tajuk rencananya membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi pada pemilihan presiden?

I.3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menunjukkan pembingkai (*framing*) isu demokratisasi oleh *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* ketika mengangkat fakta peristiwa pemilihan presiden sebagai topik ulasan dalam tajuk rencananya.

⁴⁶ Jadwal pemilihan presiden, sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU): Putaran I: Masa persiapan (2 Mei - 31 Mei 2004); Masa kampanye (1 Juni - 1 Juli 2004); Masa pelaksanaan (2 Juli - 25 Juli 2004); Putaran II: Masa persiapan (26 Juli - 5 Agustus 2004); Masa kampanye (6 Agustus - 16 September 2004); Masa pelaksanaan (17 September-20 September 2004).

I.4. Manfaat

Hasil penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat antara lain:

1. Secara teoretis adalah sebagai upaya untuk secara konseptual mengungkapkan opini dan posisi *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* tentang isu demokratisasi pada pemilihan presiden.
2. Secara praktis adalah diperolehnya petunjuk bagi lembaga-lembaga pers di Indonesia, terutama pers yang diteliti, yang bermaksud untuk lebih memantapkan perannya dalam konteks demokratisasi di Indonesia melalui ulasan dalam rubrik tajuk rencana.



B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Demokrasi dan Isu Demokratisasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*). Rakyat yang menentukan kebijakan politik. Rakyat yang memutuskan siapa yang menjadi wakilnya. Rakyat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik, termasuk menilai kinerja pemerintah dan pemerintahan. Tetapi mengenai bagaimanakah seharusnya implementasi demokrasi itu atau apa saja karakteristik dari suatu sistem politik yang demokratis masih menjadi bahan perdebatan yang terbuka. Lingkup perdebatan tersebut, menurut Georg Sorensen, pada dasarnya beranjak dari cara pandang yang berbeda dalam memahami konsep demokrasi itu sendiri.⁴⁷

Sorensen lebih lanjut menjelaskan, dalam perkembangan kontemporer ruang perdebatan tentang demokrasi berkisar pada dua konsep demokrasi. Yakni pengertian sempit demokrasi, dan pengertian demokrasi yang sangat komprehensif. Konsep pertama dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. Konsep kedua dikemukakan oleh David Held. Bagi Schumpeter, demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik oleh rakyat.⁴⁸

Held mengkonstruksi dan memaknai demokrasi berlandaskan suatu prinsip dasar otonomi di mana individu bebas dan setara menentukan kondisi kehidupan masing-masing; dan setiap individu memperoleh hak dan kewajiban yang sama.

⁴⁷ Georg Sorensen., *op.cit.*, hlm. 1-13.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 14. Dalam kalimat Schumpeter, “metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.”

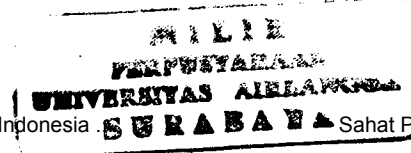
Prinsip dasar ini disebut Held sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*). Otonomi demokrasi, menurut Held, membutuhkan terjadinya akuntabilitas negara; masyarakat warga (*civil society*) yang kuat; kebebasan menggunakan hak pilih, mengemukakan pendapat, melakukan kontrol terhadap agenda politik; dan terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁴⁹

Pengertian sempit demokrasi lebih melihat demokrasi sebagai sebuah metode untuk memilih kepemimpinan politik atau sekadar sebagai suatu proses pembentukan pemerintahan. Pengertian ini jelas mereduksi demokrasi menjadi pemilihan umum. Sedang pengertian komprehensif lebih melihat demokrasi sebagai sebuah proses untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kesetaraan yang melembaga dalam sistem demokrasi itu sendiri. Pengertian demokrasi yang komprehensif, memandang pemerintah sebagai salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat. Konsepsi sedemikian ini, tampaknya juga mewarnai pemikiran Street yang juga menekankan arti penting rakyat menagih janji pemerintah terpilih.⁵⁰

Dengan kata lain, konsepsi demokrasi sangat menekankan penghargaan atas harkat rakyat. Konsepsi demokrasi memposisikan rakyat sebagai lokus utama. Rakyat yang menentukan kebijakan politik. Rakyat yang memutuskan siapa yang menjadi wakilnya. Rakyat memiliki hak untuk menilai apakah suatu kebijakan

⁴⁹ Lihat Georg Sorensen., *op.cit.*, hlm. 14-15. Menurut Held prinsip dasar otonomi adalah: "Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya; yaitu, mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain."

⁵⁰ Street memformulasikan konsepsi demokrasi bukan sebatas pada pelaksanaan pemilu tetapi juga berkaitan dengan kinerja pemimpin politik untuk merealisasikan janji yang disampaikan pada pemilu. John Street, *op.cit.*, hlm. 185-186. Dalam bahasa Street, "Rule by the people" the most basic of definitions of democracy, depends upon the capacity of 'the people' to form judgements about what policies or representatives they want, and about whether those policies or representatives delivered what they promised."



politik sesuai dengan aspirasi rakyat. Rakyat juga berhak menilai apakah para pejabat pemerintahan maupun wakil rakyat melakukan apa yang dijanjikannya.

Proses mewujudkan demokrasi, menurut Sorensen, terdiri dari tiga tahapan. *Pertama*, tahapan persiapan (*preparatory phase*) ditandai dengan perjuangan politik yang bergerai untuk menghancurkan rezim nondemokratis; *Kedua*, tahapan keputusan, di mana elemen yang jelas dari tertib demokrasi telah terwujud dan tata tertib demokrasi telah dibangun; *Ketiga*, tahapan konsolidasi, dimana berlangsung pengembangan demokrasi lebih lanjut, hingga akhirnya, praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik. Para pemimpin politik dan juga mayoritas aktor politik serta masyarakat melihat praktek demokrasi sebagai bagian dari hak dan tata tertib.⁵¹ Bagi Sorensen, sebelum praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik atau sebelum tatanan sosial-politik yang demokratis terwujud merupakan transisi menuju demokrasi atau proses demokratisasi.⁵²

Menurut Sorensen, demokrasi yang sedang bersemi dalam tahapan konsolidasi dapat berubah menjadi demokrasi beku (*frozen democracies*) atau demokrasi lemah serta demokrasi tidak solid. Kondisi ini lebih disebabkan oleh karena pemerintah yang berkuasa tidak melakukan tindakan konkret untuk mengatasi berbagai kendala atau isu-isu permasalahan yang ada. Atau malah justru mengulangi kesalahan rezim pendahulu. Beberapa isu yang relevan digarispawahi di sini, adalah:

Pertama, isu permasalahan sosial dan ekonomi yang akut seperti krisis ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Isu peningkatan standard kehidupan atau kesejahteraan sosial dan ekonomi ini karena rezim otoritarian meninggalkan

⁵¹ Georg Sorensen., *op.cit.*, hlm. 41-81.

⁵² *Ibid.*

persoalan tersebut. *Kedua*, isu penegakan hukum. Isu ini kerap berhubungan dengan masalah hukum yang diwariskan rezim pendahulu, seperti kasus korupsi, pertanggungjawaban militer atas kasus pelanggaran hak-asasi manusia. *Ketiga*, isu partisipasi politik yang bebas dan setara bagi setiap warga maupun kelompok tanpa ada kekecualian. Isu ini secara khusus berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum yang *fair* dengan kompetisi yang sehat tanpa dominasi aparatur negara maupun partai presiden yang berkuasa. *Keempat*, isu kebebasan sipil dalam berorganisasi, atau membentuk asosiasi. Isu ini juga berkaitan dengan kebebasan berbicara, dan menyatakan pendapat.⁵³

Isu-isu yang dikemukakan oleh Sorensen pada dasarnya merupakan isu yang inheren dengan elemen-elemen mendasar demokrasi, dan oleh karena itu berlaku umum. Tetapi tiap negara mempunyai penekanan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang melatarbelakangi proses mencapai konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks di Indonesia, menurut pengamatan Tadjuddin Noer Effendi dan Heru Nugroho, perangkat kelembagaan demokrasi (tahapan keputusan) telah berhasil dilalui. Namun sampai pada masa pemerintahan Megawati, tahapan konsolidasi demokrasi masih belum optimal dan bahkan masih berada pada satu fase demokrasi beku. Kondisi ini terjadi, karena pemerintah termasuk para elit politik tidak menempatkan penanganan isu-isu demokratisasi sebagai agenda prioritas tetapi malah lebih mengutamakan bagaimana untuk memperoleh kekuasaan, dan atau untuk mempertahankan kekuasaan. Sinyalemen Effendi dan Nugroho ini

⁵³ Georg Sorensen., *op.cit.*, hlm. 82-107. Isu-isu ini dikemukakan Sorensen berdasarkan studi kasus pada beberapa negara seperti Brazil, Afrika, dan Amerika Latin.

mengindikasikan bahwa pada dasarnya demokrasi yang dicita-citakan Indonesia adalah demokrasi dalam pengertian demokrasi yang komprehensif.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dibedakan dua macam perspektif atau cara pandang tentang demokrasi, yaitu: perspektif sempit dan perspektif demokratisasi. Perspektif sempit melihat demokrasi sekadar sebagai sistem memilih pemimpin politik. Perspektif demokratisasi lebih melihat demokrasi sebagai seperangkat gagasan untuk mengimplementasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan yang melembaga dalam tatanan sosial-politik yang demokratis. Demokratisasi dipahami sebagai proses konsolidasi demokrasi menuju budaya politik demokrasi. Ruang lingkup pengertian inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam terang pengertian itu, isu demokratisasi sangat luas dan beragam, yakni meliputi seluruh aspek kehidupan demokrasi itu sendiri. Tetapi dalam konteks penelitian tentang isu demokratisasi dalam teks media, merujuk pandangan Hertog dan Mcleod, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan isu demokratisasi apa saja yang menjadi fokus utama (*focal points*) kajian. Penentuan *focal points* tersebut lebih tepat didasarkan pada hasil observasi atas teks media sasaran penelitian.⁵⁵

Sehubungan dengan itu, isu demokratisasi yang menjadi fokus penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi lima poin, yakni: tentang persamaan di depan hukum, tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan, tentang pelaksanaan pemilihan

⁵⁴ Lihat Tadjuddin Noer Effendi., "Lika Liku Demokrasi: Sebuah Pengantar", dalam Georg Sorensen., 2003, *op.cit.*, hlm. ix-xii; Heru Nugroho., 2002, "Terpaan Demokrasi Global dan Pasang Surut Demokratisasi di Indonesia, Sebuah Pengantar untuk John Makrkoff," dalam John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, (terjemahan, Ari Setyanigrum, penyunting dan pengantar, Heru Nugroho), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CSSS., hlm. v-xxvi.

⁵⁵ Lihat Jennifer L. St. Pierre, *op.cit.*, hlm. 3. Jennifer memaparkan metode analisis *framing* yang diajukan oleh Hertog dan Mcleod (2001). Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III.

an presiden, tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, dan tentang *image* calon presiden. Kelima *focal points* ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tentang Persamaan di Depan Hukum. Isu ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pers membingkai (*framing*) masalah hukum terkait kontroversi tentang kriteria calon presiden, yakni sehat jasmani dan rohani. Isu ini mengemuka menjadi wacana publik sehubungan dengan proses pencalonan Abdurrahman Wahid. Isu ini secara substansial menyangkut aspek penegakan hukum dan kedudukan setiap warga negara di depan hukum.
2. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan. Isu ini muncul menjadi wacana publik berkaitan dengan perubahan sistem pemilihan presiden dari sistem perwakilan menjadi langsung oleh rakyat. Melalui isu ini akan diperoleh gambaran bagaimana pers membingkai (*framing*) kebebasan rakyat pilih dalam proses pemilihan presiden, termasuk pembentukan citra capres-cawapres tertentu. Isu ini lebih dilihat sebagai bagian dari kebebasan rakyat berpartisipasi dalam kegiatan politik.
3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden. Isu ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pers membingkai (*framing*) proses pelaksanaan pemilihan presiden. Hal ini juga berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), aktivitas kampanye calon presiden. Isu ini dapat dilihat sebagai bagian integral dari pelaksanaan pemilihan yang *fair* dan kompetisi yang konstruktif di antara pasangan capres-cawapres.
4. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat. Isu ini digunakan untuk melukiskan bagaimana pers membingkai (*framing*) hasil pemilihan

presiden dalam hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi rakyat. Isu ini juga berkaitan dengan implementasi program yang disampaikan capres pada pemilu dan masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.

5. Tentang *Image* Calon Presiden. Isu ini digunakan untuk melukiskan bagaimana pers membingkai (*framing*) *image* (citra) calon presiden dalam kaitan dengan kompetensi masing-masing calon ataupun klaim tentang kepastian calon presiden tertentu untuk menjadi presiden. Isu ini juga berkaitan dengan prediksi, harapan, dan pembentukan citra (*image*) calon presiden tertentu oleh pers disertai maksud untuk menggiring perhatian publik terhadap calon presiden tertentu.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan isu demokratisasi dalam penelitian ini lebih terfokus pada kelima poin tersebut di atas. Yakni, tentang persamaan di depan hukum, tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan, tentang pelaksanaan pemilihan presiden, tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, dan tentang *image* calon presiden.

II.2. *Framing* Menyingkap Posisi dan Opini Pers

Teks media (*media content*) sebagai produk informasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengkomunikasikan suatu pesan. Pesan tersebut diproduksi dalam suatu kerangka pembingkaiian pesan (*framing*). Pengertian *framing* berdasar pada kajian ilmiah pertama kali diformulasikan oleh Bateson. Ia mengatakan *frame* adalah seperangkat pesan atau tindakan penuh arti (*“set of messages or meaning-*

ful actions”) dan suatu *frame* membantu penilaian atas seluruh pesan tersebut. *Frame* membantu penerima pesan dalam usaha untuk memahami pesan itu.⁵⁶

Pengertian *framing* kemudian dikembangkan Goffman. Menurut Goffman, *frame* adalah "*schemata of interpretation*" (skema interpretasi) yang memungkinkan seseorang dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap berbagai peristiwa yang terjadi serta informasi. Ia menjelaskan konsep *frame* sebagai skema interpretasi dengan mengatakan setiap orang aktif mengklasifikasi dan mengorganisir pengalaman hidupnya dan kemudian menggunakannya sebagai pertimbangan dalam kehidupannya.⁵⁷

Dengan kata lain, setiap individu memiliki skema interpretasi. *Frame* (skema interpretasi) selalu inheren dalam diri setiap orang. *Frame* tersebut digunakan setiap kali hendak memahami dan memaknai realitas dan situasi sehari-hari. Jadi, pemahaman dan pemaknaan itu tidak luput dari dimensi subyektifitas.⁵⁸

Goffman lebih lanjut mengatakan *frame* juga terjadi dalam komunikasi. Setiap kali seseorang hendak menyampaikan informasi, selalu didasarkan pada penaksiran sistematis (*systematic account*) bagaimana agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam proses memaknai kehidupan sosial. Ketika hendak menyampaikan informasi selalu disertai harapan agar informasi tersebut berimplikasi sosial. Setiap informasi berdasar pada *frame* tertentu, dan kemudian disampaikan sebagai pesan komunikasi. Dalam kaitan ini, tujuan analisis

⁵⁶ Lihat Jennifer L. St. Pierre, *loc.cit*, hlm. 3. Pierre mencatat, landasan teori *framing* berpangkal pada ide Gregory Bateson (1955) dalam bukunya *Steps to an Ecology of the Mind*. Buku ini merupakan hasil studi Bateson tentang interaksi binatang.

⁵⁷ Lihat Adam Simon dan Michael Xenos, *loc.cit.*, hlm. 2; Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 76-77.

⁵⁸ *Ibid.*

framing menurut Goffman adalah untuk menjelaskan bagaimana *frame* yang digunakan dalam suatu pesan komunikasi.⁵⁹

Penggunaan *framing* tertentu dalam suatu pesan komunikasi memiliki implikasi bagi kehidupan sosial. Hal ini dengan tegas dikemukakan Entman. Ia menyatakan *framing* memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Implikasi ini terjadi karena pada dasarnya *frame* menuntut perhatian pada aspek tertentu dari suatu realitas sembari mengaburkan elemen yang lain dengan maksud untuk memandu khalayak agar tidak memberikan reaksi yang berbeda.⁶⁰

Menurut Entman, dalam konteks politik, untuk dapat mengkonstruksi suatu *frame* berita politik kerap terjadi sesama politikus yang hendak mencari dukungan dari khalayak dipaksa bersaing satu sama lain termasuk dengan jurnalis. Suatu *frame* pemberitaan dalam ranah politik dipandang menjadi semakin penting. Fakta ini didasarkan pada hasil studi Entman tentang *frame* teks berita media pada masa perang Teluk (*Gulf War*). Ia menunjukkan fakta sebagian besar *frame* pemberitaan yang muncul dan mendominasi wacana publik hanya untuk mendesakkan kekuasaan politik. *Frame* berita dikendalikan oleh kekuasaan politik dan preferensi kepentingan kekuasaan. Kekuasaan politik bersama pekerja media mengkonstruksi *frame* berita untuk mendominasi wacana publik. Dalam kondisi ini, *framing* berita politik yang dimuat media merupakan refleksi dari permainan kekuasaan dan dengan sistematis membatasi batas wacana khalayak atas sebuah isu.⁶¹

⁵⁹ Lihat Jennifer L. St. Pierre, *loc. cit.*, hlm. 3; Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 76-77.

⁶⁰ Robert M. Entman, *op.cit.*, hlm. 394; Lihat juga Adam Simon dan Michael Xenos, *loc.cit.*, hlm. 2; Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 80-81.

⁶¹ Robert M. Entman, *op.cit.*, hlm. 394; Lihat juga Adam Simon dan Michael Xenos, *loc.cit.*, hlm. 2; Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 80-81.

Proses konstruksi suatu *frame*, jelas Entman, dilakukan dengan cara menyeleksi (*selection*) dan menonjolkan (*salience*) aspek tertentu dari suatu realitas sembari mengaburkan aspek lain. Aspek tertentu tersebut secara konsisten disoroti dalam suatu teks komunikasi sebagai suatu cara untuk mengajukan definisi permasalahan, menginterpretasikan penyebab masalah, mengevaluasi implikasi moral permasalahan, dan merekomendasikan solusi untuk memperbaiki masalah yang diuraikan.⁶²

Dengan cara itu, suatu teks komunikasi sebagai hasil konstruksi *frame* dapat menggiring khayalak pada suatu pemahaman tertentu. Kendati demikian, masih menurut Entman, kehadiran suatu *frame* tertentu dalam teks komunikasi tidak menjamin secara pasti memengaruhi pemikiran khayalak kecuali jika khalayak tidak memiliki data lain sebagai rujukan. Apabila khalayak masih memperoleh informasi lain selain data teks informasi dari suatu media, maka khalayak akan menginterpretasikan berbagai informasi yang diterima sebelum kemudian memberi respons. Oleh karena itu, Entman menggarisbawahi analisis *framing* lebih signifikan menginterpretasikan *frame* teks komunikasi atau melakukan analisis teks (*content analysis*).⁶³

Paralel dengan pandangan itu, Valkenburg, Semetko, dan De Vreese membedakan dua jenis konsep mengenai *framing*, yakni *frame* media, dan *frame* khalayak (*audience*). *Frame* media dikonstruksi oleh pekerja media (jurnalis) untuk memudahkan khalayak menerima suatu informasi secara optimal, sedang *frame* khalayak terdiri atas penafsiran yang memungkinkan seseorang dapat mempertimbangkan informasi yang baru. Analisis *frame* media (*media frame analysis*) dan

⁶² Robert M. Entman, *op.cit.*, hlm. 391-392; Lihat juga John Street, *op.cit.*, hlm. 37.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 393-396.

analisis *frame* khalayak (*audience frame analysis*) dapat dilakukan dengan menggunakan teks media (*content analysis*). *Media frame analysis* terfokus pada bagaimana pesan dibentuk sedang *audience frame analysis* berkaitan dengan bagaimana pesan diterima. Untuk mengetahui bagaimana pesan diterima dapat dilakukan dengan *audience frame analysis*. Kepada khalayak diberi suatu teks informasi tentang suatu peristiwa atau realitas yang terdiri dari beberapa *frame* yang berbeda. Lalu khalayak diminta untuk menentukan sendiri, *frame* mana yang paling efektif membantu mereka untuk mengingat, menganalisa, dan memahami pesan tersebut.⁶⁴

Gamson juga mengisyaratkan fokus analisis *framing* (*framing analysis*) adalah pada bagaimana pesan dibentuk bukan pada bagaimana pesan diterima. Gamson, yang dikenal konsisten mengembangkan konsep *framing* berdasar pada paradigma konstruktivisme, mendefinisikan *framing* sebagai "*central organizing idea or storyline that provides meaning*" (organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna) atau sebagai "*a central organizing idea for making sense of relevant events and suggesting what is at issue*" (organisasi gagasan sentral untuk memaknai peristiwa relevan dan mengusulkan apa yang menjadi isu). Bagi Gamson, *frame* merupakan perangkat yang selalu hadir (*ever-present*) pada setiap mengkonstruksi makna suatu tindakan komunikatif tertentu. *Framing* lebih dilihat sebagai pengorganisasian informasi yang selalu disertai de-

⁶⁴ Lihat Jennifer L. St. Pierre, *loc.cit.*, hlm. 3. Pierre mencatat, riset Valkenburg, Semetko, dan De Vreese dipublikasikan dalam *Journal of Communications*, 2000, dengan tajuk *Framing European Politics: A content Analysis of Press and Television News*.

ngan kecenderungan untuk memfokuskan cara membingkai pesan atas suatu peristiwa atau isu, tanpa berhubungan langsung dengan khalayak.⁶⁵

Menurut Gamson, *frame* merupakan perangkat yang digunakan oleh setiap orang untuk memformulasikan makna dan atau isu. Dalam memaknai suatu pesan atau dalam proses mengkonstruksi makna, setiap individu menyertakan pengalaman hidupnya, interaksi sosial, dan kecenderungan psikologis.⁶⁶ Jadi, *frame* bersifat subyektif. *Frame* memainkan peran yang sangat penting dalam proses mengkomunikasikan informasi, termasuk dalam proses produksi informasi oleh media. Pekerja media dengan *frame* tertentu memproduksi informasi bagi khalayak. Oleh karena itu, ketika pengorganisasian atas suatu informasi yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda boleh jadi menghasilkan pemaknaan yang berbeda. Bagi Gamson, perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bias melainkan lebih tepat dipahami sebagai sesuatu yang menunjukkan bidang posisi.⁶⁷

Menurut Gamson, *frame* "*implies a range of positions*" (menunjukkan bidang posisi) atas suatu fakta peristiwa atau realitas. Posisi tersebut tidak harus dicampuradukkan dengan posisi untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu.⁶⁸

Gamson lebih lanjut menjelaskan, cara *frame* untuk mencapai efeknya adalah melalui penggunaan *framing devices* (perangkat *framing* yang mengarahkan bagaimana cara melihat fakta peristiwa atau isu permasalahan), dan *reasoning devices* (perangkat penalaran yang memberikan alasan pembenar apa yang seha-

⁶⁵ Lihat Robert M. Entman, *op.cit.*, hlm. 391-392; Adam Simon dan Michael Xenos, *loc.cit.*, hlm.2.

⁶⁶ Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 94.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

rusnya dilakukan terhadap fakta peristiwa atau isu permasalahan tersebut). *Framing devices* (perangkat *framing*) terdiri dari metaphors (metafora), *catch-phrases*, *exemplars*, *depictions*, dan *visual images*. *Reasoning devices* (perangkat penalaran) terdiri dari *roots*, *appeals to principle*, dan *consequences*.⁶⁹

Berarti, penggunaan *framing devices* dan *reasoning devices* inheren dengan maksud untuk mengarahkan makna dan mengusulkan apa yang menjadi isu. *Framing devices* dan *reasoning devices* terintegrasi untuk mengkonstruksi suatu pandangan (opini) serta bidang posisi atas suatu fakta atau isu permasalahan. Dengan kata lain, *framing* dalam suatu teks informasi dapat diidentifikasi dengan memerhatikan penggunaan *framing devices* dan *reasoning devices*. *Framing devices* dan *reasoning devices* merupakan perangkat analisis untuk mendiagnosa, mengevaluasi, dan menentukan bagaimana *frame* terimplementasi dalam teks komunikasi.⁷⁰

Dengar demikian, teks komunikasi dapat dipandang sebagai produk *framing* dengan mana suatu sumber komunikasi mendefinisikan dan mengkonstruksi suatu fakta peristiwa atau isu permasalahan.⁷¹ Bagaimana pembingkai pesan (*framing*) dalam suatu teks komunikasi ini dapat dikaji dengan mengaplikasikan analisis *framing*. Analisis *framing*, sebagaimana disebut Gamson, berpretensi untuk

⁶⁹ Mengenai pandangan Gamson tentang cara *frame* mencari efeknya akan dijelaskan lebih lanjut pada metodologi. Uraian lebih luas tentang hal ini lihat Robert M. Entman, *op.cit.*, 392, Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 81-87, Eriyanto, *op.cit.*, hlm. 217-228, dan John Street, *op.cit.*, hlm. 37-38.

⁷⁰ Lihat Robert M. Entman, *op.cit.*, hlm. 391-392.

⁷¹ Kerangka pemahaman sedemikian ini diformulasikan oleh Nelson, Oxley, dan Clawson. Mereka mendefinisikan *framing* sebagai "proses dengan mana suatu sumber komunikasi mendefinisikan dan mengkonstruksi esensi permasalahan pokok yang mendasari kehidupan sosial tertentu atau isu politis dan menguraikan secara singkat seperangkat pertimbangan yang dianggap relevan untuk isu tersebut." Lihat Adam Simon dan Michael Xenos, *loc.cit.*, hlm. 2. Simon mencatat, riset T. E. Nelson, Z. M. Oxley, dan R. A. Clawson dipublikasikan dalam *American Political Science Review*, 1997, dengan tajuk: *Media Framing of a Civil Rights Conflict and its Effect on Tolerance*.

menjelaskan bagaimana suatu pesan dibentuk dalam teks komunikasi. Sekaligus pula dapat menyingkapkan bagaimana posisi serta apa pandangan (opini) sumber komunikasi atas suatu fakta peristiwa atau isu permasalahan.

II.3. Tajuk Rencana Mencerminkan Posisi dan Opini Pers

Rubrik tajuk rencana (editorial) seringkali diklaim oleh para pekerja pers terutama editor sebagai otonomi pers. Klaim mengenai otonomi tajuk rencana atau otonomi editorial (*editorial autonomy*) ini disertai pandangan menyangkut aspek kebebasan pers untuk mengemukakan pendapat dalam tajuk rencana. Klaim sedemikian, menurut Lichtenberg, tidak tepat terutama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia tentang kebebasan menyampaikan pendapat (*free speech*). Karena bagaimanapun tajuk rencana selalu terikat dengan kontrol internal pers maupun regulasi kebebasan pers oleh kekuasaan eksternal.⁷² Lichtenberg lebih lanjut menegaskan, klaim *editorial autonomy* secara substansial bukan merupakan *free speech* dan klaim tersebut kurang tepat digunakan sebagai tolak ukur kebebasan pers.⁷³

Pada tataran tertentu argumen Lichtenberg bisa saja benar, kendati tentu ia akan sulit membantah adanya nuansa otonomi pers atas tajuk rencana. Ini dapat dibaca dari perbedaan karakteristik tajuk rencana dengan rubrik-rubrik lain, misalnya, antara rubrik tajuk rencana dengan rubrik berita. Menurut Gouldner,

⁷² Judith Lichtenberg, 2002, "Foundations and Limits of Freedom of the Press," dalam Denis McQuail (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications, hlm. 180-181.

⁷³ *Ibid.* Argumen Lichtenberg ini parallel dengan pandangan J. Herbert Altschull tentang keterbatasan otonomi pekerja media. Kalaupun ada yang patut disebut sebagai otonomi pekerja media, tetapi otonomi tersebut sangat terbatas oleh faktor kepentingan ekonomi dan dominasi politik kekuasaan. Lihat J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 253-256.

berita boleh jadi luput dari kebijakan editorial karena faktor ‘kelalaian’ tertentu, tetapi editorial selalu mendapat kontrol khusus dari editor karena ia berkaitan dengan kebijakan redaksional atau kebijakan institusi pers. Pemisahan antara berita dan tajuk rencana pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan rasionalitas publik.⁷⁴

Tajuk rencana merupakan rubrik khusus untuk mendiskusikan isu-isu yang dipandang oleh pers relevan sebagai agenda publik. Isu tersebut adalah menyangkut pada fakta peristiwa atau realitas yang dimuat dalam rubrik pemberitaan pers. Berdasar pada suatu berita (*news*) dikemas menjadi isu dalam tajuk rencana.⁷⁵ Dalam rubrik tajuk rencana, pers memiliki keleluasaan tersendiri untuk memilih dan menentukan topik dari berbagai fakta peristiwa atau realitas yang terjadi. Selain itu, pers juga mempunyai otoritas untuk mengkonstruksi dan memaknai realitas peristiwa yang menjadi topik tajuk rencana. Bahkan jika mau melalui rubrik tajuk rencana, terbuka peluang bagi pers untuk mengkampanyekan isu-isu yang dianggapnya relevan sebagai agenda publik misalnya tentang demokratisasi,⁷⁶ dan atau mengutarakan pendapatnya secara kritis atas berbagai fakta peristiwa.⁷⁷

⁷⁴ Alvin W. Gouldner, *op.cit.*, hlm. 84-85. Dalam bahasa Gouldner, “*News was separated from editorial policy in part because an 'imprudent' pursuit of the paper's policy might offend and limit its market...This, than, controls the editor's single minded pursuit of policy, splitting the presentation of news from editorial.*”

⁷⁵ Bandingkan Rowland Lorimer, *op.cit.*, hlm. 207.

⁷⁶ Lihat Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 56.

⁷⁷ Lihat Susan Dente Ross, *loc.cit.*, hlm. 3. Ross mencatat, pers dalam Tajuk Rencana bisa melegitimasi pihak tertentu atau mendelegitimasi pihak lain, merangkul pemerintah yang berkuasa maupun menyenangkan kalangan yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politis. Bandingkan dengan pandangan Ashadi Siregar dalam Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 58. Ashadi mengatakan: “Pers sebenarnya tidak pernah melakukan kritik. Kalaupun harus melakukan kritik hanya dapat dimunculkan dalam kolom Tajuk Rencana. Di kolom ini pandangan pengelola koran dapat ditampilkan, apakah bersifat kritis atau sekadar menjelaskan suatu fakta.”

Dalam paparan di atas, tampak adanya nuansa kebebasan pers atas tajuk rencana. Tetapi soal bagaimana kebebasan tersebut diimplementasikan tergantung pada pilihan subyektif pers itu sendiri. Hal ini juga dikemukakan Ross dengan mengajukan premis utama bahwa tajuk rencana merupakan *newspaper's dominant frames*.

Premis tersebut didasarkan pada fakta dalam tajuk rencana, pers secara dominan melakukan pembingkaiian pesan (*framing*) tentang topik yang menjadi subyek/obyek ulasan tajuk rencana. Pers dengan otoritas subyektifnya melakukan seleksi terhadap berbagai fakta peristiwa atau realitas dan mengajukan pandangan disertai argumentasi yang dianggapnya relevan untuk itu.⁷⁸

Dengan kata lain, pers dalam tajuk rencananya memiliki otoritas untuk melakukan konstruksi realitas dalam kerangka pembingkaiian pesan (*framing*), yakni dengan menyeleksi sumber dan fakta dan menggunakan istilah-istilah tertentu ataupun dengan konsisten menekankan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain dari suatu kenyataan yang menjadi topik ulasannya. Pers dapat memfokuskan perhatian membahas dimensi realitas peristiwa atau isu permasalahan tertentu dan mengajukan argumentasi berdasar versinya sendiri.

Itu berarti faktor kedalaman pembahasan, ketajaman analisis, dan pengajuan argumentasi atas suatu fakta peristiwa dapat dipandang sebagai bagian konstruksi realitas dalam kerangka *framing*. Konsekuensi ini bermuara pada motif

⁷⁸ Susan Dente Ross, *loc. cit.*, hlm. 1. Dalam bahasa Ross, "*Editorial-page commentary is a useful bellwether of a newspaper's dominant frames because unsigned editorial express the newspaper's public stance on issues and establish a context for reader decoding of new stories.*"

pers untuk menggiring pemahaman publik menyangkut suatu realitas peristiwa atau isu permasalahan tertentu.⁷⁹

Oleh karena itu, dapat dikatakan tajuk rencana bukanlah sekadar deskripsi atas suatu fakta peristiwa melainkan merupakan produk konstruksi realitas dalam suatu kerangka pembedahan pesan (*framing*).

Berarti, tajuk rencana selalu melibatkan dua dimensi besar, yaitu: konstruksi realitas dan pembedahan pesan (*framing*). Dengan kedua dimensi ini, pers dalam tajuk rencananya menunjukkan bagaimana posisi pers terhadap suatu peristiwa atau permasalahan serta memaparkan apa pandangan (opini) pers tentang peristiwa maupun isu permasalahan tersebut.⁸⁰ Dalam konteks pemikiran inilah, tajuk rencana dapat dipandang sebagai rubrik yang mencerminkan apa posisi dan bagaimana opini pers tentang suatu fakta peristiwa atau suatu isu permasalahan.

Dengan demikian dalam tajuk rencana bisa terbaca bagaimana sikap dan pandangan institusi pers, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan redaksional, atas suatu isu permasalahan.⁸¹ Jika isu dimaksud misalnya tentang demo-

⁷⁹ Bandingkan dengan definisi Spencer mengenai Tajuk Rencana atau editorial, berikut ini: "...penyajian fakta dan opini yang disusun secara ringkas, logis dan menyenangkan untuk menghibur, memengaruhi opini atau menginterpretasikan berita penting sedemikian rupa sehingga hal yang penting itu menjadi jelas bagi rata-rata pembaca." Esensi pandangan ini bersesuaian dengan kriteria dan standar umum penulisan Tajuk Rencana menurut Pulitzer Prize. Kriteria dimaksud adalah: *clearness of style* (jelas dalam gaya), *moral purpose* (tujuan yang bermoral), *sound reasoning* (pertimbangan yang sehat), dan *power to influence opinion* (daya untuk memengaruhi opini publik). Sedangkan pola baku (*standard pattern*) kerangka penulisan Tajuk Rencana adalah: judul yang mengimbau pembaca, kalimat untuk lead yang tidak terlalu panjang, kalimat pada paragraf terakhir yang menggunakan judul dan lead serta mempertegas problema yang dikupas. Lihat Onong Uchjana Effendy, *op.cit.*, hlm. 71-72.

⁸⁰ Menurut Gamson dan Modigliani, *frame* menunjukkan bidang posisi ("*implies a range of positions*") atas suatu fakta peristiwa atau realitas. Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 37-38.

⁸¹ Lihat Maria Frauenrath, Yonis Ali Nur, Menuk Suwondo, *op.cit.*, hlm. 35, dan H. Rosihan Anwar, "Sikap Media Hadapi Pemilu 2004," dalam *Pikiran Rakyat*, edisi 24 Maret 2004, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0304/24/0801.htm> (diakses 5 Oktober 2004). Anwar, wartawan senior di Indonesia, mengisyaratkan prinsip penting yang patut diperhatikan pers dalam tajuk rencana, yaitu harus menyatakan sikap secara tegas, tidak boleh *plinplan*, tapi jelas dan terbuka memberikan pimpinan kepada masyarakat di mana pers yang bersangkutan berdiri.

kratisasi maka untuk memperoleh gambaran bagaimana pandangan suatu institusi pers tentang demokratisasi adalah dengan membaca tajuk rencana yang memuat isu demokratisasi.⁸²

Isu permasalahan yang lazim menjadi topik tajuk rencana adalah menyangkut peristiwa aktual yang dimuat dalam rubrik pemberitaan pers. Dengan asumsi bahwa berita merupakan produk *framing*, berarti bilamana suatu berita menjadi topik ulasan tajuk rencana maka ia memperoleh *framing* tersendiri lagi. Mengenai hubungan antara *framing* berita dengan *framing* tajuk rencana, apakah *framing* editorial merupakan kesinambungan *framing* berita atau *framing* tajuk rencana memiliki perbedaan dengan *framing* berita, masih belum ada patokan yang jelas. Namun menurut Chomsky dan Gilboa, cenderung terdapat perbedaan antara *framing* editorial dengan *framing* berita. Chomsky menyatakan *framing* editorial bukan kelanjutan ("*seamless continuation*") *framing* berita sedangkan Gilboa berpendapat *framing* editorial secara signifikan berbeda dari *framing* berita ("*differs significantly from the framing found in news content*").⁸³

Perbedaan *framing* tajuk rencana dengan *framing* berita tampak lebih berpeluang terjadi, karena tajuk rencana justru memuat tanggapan atau opini pers atas berita tertentu. Bagaimanapun, tanggapan tersebut berkaitan dengan faktor kebijakan suatu institusi pers dalam menyikapi suatu isu tertentu.⁸⁴ Aspek kebijakan

⁸² Bandingkan Ayo Olutokun dan Dele Seteolu, *loc.cit.* Mereka mengkaji editorial pers pada masa transisi demokrasi di Nigeria, 1998-1999, untuk mengidentifikasi apa saja kontribusi pers dalam demokratisasi.

⁸³ Pandangan Chomsky dan Gilboa diuraikan oleh Susan Dente Ross, *loc.cit.*, hlm. 2.

⁸⁴ Gambaran mengenai aspek kebijakan redaksional institusi pers memengaruhi ruang lingkup pembahasan dan sikap pers atas suatu isu yang sama dalam Tajuk Rencana, lihat Muhammad Qodari, 2001, "Membandingkan Tajuk Rencana Tahun 1965," dalam *Pantau – Kajian Media dan Jurnalisme*, edisi 10, Jakarta: ISAI, hlm. 53-65. Qodari melakukan riset isi Tajuk Rencana *Duta Masyarakat, Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Republika* tahun 1965 dan 2000. Kelima institusi pers ini mengajukan interpretasi dan sikap yang berbeda meskipun obyek ulasannya sama, yaitu isu G30S/PKI dan Tap MPRS/PKI.

redaksional tersebut diawali dengan melakukan seleksi dan menentukan fakta peristiwa yang menjadi topik ulasan tajuk rencana. Tidak semua berita menjadi subyek ulasan tajuk rencana, tetapi suatu berita menjadi tajuk rencana merupakan hasil seleksi pekerja pers. Oleh karena itu, obyek ulasan tajuk rencana sangat subyektif. Ini jelas cukup berbeda dengan rubrik-rubrik lain yang relatif berpotensi untuk menyajikan informasi secara ‘obyektif’. Ini bukan hendak menyangkal pandangan bahwa pada dasarnya rubrik-rubrik pers tentang berbagai fakta peristiwa bersifat subjektif, melainkan hendak lebih menggarisbawahi adanya karakteristik khas rubrik tajuk rencana daripada rubrik-rubrik lain.⁸⁵

Karakteristik tajuk rencana menjadi semakin khas, sebab ia secara eksplisit merepresentasikan bagaimana posisi dan apa pandangan (opini) kolektif suatu organisasi pers tentang realitas atau isu permasalahan tertentu. Pers dengan perspektif subyektifnya menetapkan sendiri realitas atau isu permasalahan apa yang menjadi obyek/subyek ulasannya. Terhadap realitas atau isu permasalahan tersebut, pers secara dominan melakukan konstruksi realitas dalam suatu kerangka pbingkaiian pesan (*framing*). Oleh karena itu, kendati obyek ulasan pers menyangkut hal yang sama, tetapi pers yang berbeda bisa jadi menunjukkan posisi dan opini yang berbeda. Jika obyek ulasan tersebut adalah tentang realitas atau isu politik, maka dengan membaca tajuk rencana dapat diperoleh gambaran bagaimana posisi dan pandangan politik pers dalam suatu konteks kehidupan politik tertentu.

⁸⁵ Denis McQuail, 2003, *op.cit.*, hlm. 131. McQuail: “media itu tidak sepenuhnya obyektif.”

II.4. Pers sebagai Agen Konstruksi Realitas

Tugas pers pada dasarnya adalah mengkonstruksi dan memaknai fakta peristiwa atau realitas, menjadi produk informasi. Produk informasi tersebut kemudian disajikan kepada publik pembaca dalam bentuk teks (*media content*). Namun pers tidak menginformasikan perihal semua fakta peristiwa atau realitas yang terjadi. Selalu ada fakta peristiwa atau realitas yang tidak menjadi produk informasi pers. Bahkan produk informasi pers tentang suatu fakta peristiwa selalu tidak lengkap sehingga tidak identik dengan fakta peristiwa yang sesungguhnya (realitas obyektif).

Kinerja pers semikian itu, menunjukkan bahwa pers secara subyektif melakukan seleksi atas fakta peristiwa atau realitas yang terjadi. Pers tidak hanya memilih aspek tertentu dari suatu fakta peristiwa, melainkan juga mempertimbangkan aspek mana saja dari suatu fakta peristiwa yang patut disajikannya kepada publik pembaca. Dengan demikian pers sekaligus membuat bahan informasi dan menentukan *setting* informasi tersebut dalam bentuk suatu cerita atau narasi (menuturkan).⁸⁶

Perihal mengapa pers tidak secara lengkap menginformasikan fakta peristiwa atau realitas, menurut Lippmann, bukan karena alasan teknis semata seperti keterbatasan halaman. Tetapi lebih karena fungsi pers adalah sebagai pembentuk gambaran realitas (*make a picture of reality*) dengan maksud untuk mengubah pemahaman dan untuk memandu pola tindakan publik menyangkut suatu realitas peristiwa.⁸⁷ Lippmann menyebutkan, gambaran realitas atau informasi pers tentang

⁸⁶ Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 36-37.

⁸⁷ Walter Lippmann, 1990, "Newspaper" dalam Doris A. Graber, *Media Power in Politics*, second edition, USA: Congressional Quarterly Inc., hlm. 41.

berbagai realitas peristiwa bukanlah “*mirror of reality*” melainkan hasil seleksi sesuai dengan interes suatu institusi surat kabar. Interes tersebut ditentukan oleh editor.⁸⁸ Ini berarti bagi Lippmann, tugas pers pada dasarnya adalah memproduksi suatu gambaran realitas berdasarkan kepentingan pers itu sendiri. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi interes pers tersebut.

Menurut Gamson dan Modigliani, dalam proses mengkonstruksi dan memaknai realitas atau membuat suatu realitas menjadi produk informasi (teks media) jurnalis tidak terikat pada mekanisme redaksional semata melainkan juga menyertakan pengalaman hidup, interaksi sosial, kecenderungan psikologisnya.⁸⁹ Artinya, faktor subyektifitas jurnalis seperti pengalaman, pendidikan, kondisi psikologis turut serta dalam proses produksi suatu informasi.

Dengan kata lain, setiap individu yang terlibat dalam proses membuat fakta peristiwa menjadi produk informasi selalu menyertakan cara orang itu memandang setiap hal yang ada dan terjadi. Jadi, faktor subyektifitas tersebut pada dasarnya signifikan memengaruhi perspektif jurnalis dalam mengkonstruksi dan memaknai realitas. Konsekuensi dari penyertaan subyektifitas ini bermuara pada produk konstruksi pers atas realitas yang boleh jadi berbeda, oleh orang yang berbeda. Pemahaman inilah dalil utama konsep *framing*.⁹⁰

Selain faktor subyektifitas individu, faktor kepentingan kelompok tertentu seperti ekonomi dan politik juga berpotensi memengaruhi hasil konstruksi pers atas suatu realitas tertentu. Justru terkait dengan faktor kepentingan ini, Gamson

⁸⁸ Walter Lippmann., *op.cit.*, hlm. 37-40. Dalam bahasa Lippmann, “*the news is not a mirror of social conditions, but the report of an aspect that has obtruded itself*”.

⁸⁹ Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 94.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 36-38.

dan Modigliani mengisyaratkan bahwa format *coverage* pers tentang suatu realitas dapat dijelaskan dengan memperhatikan keterlibatan ‘sponsor’ – pejabat pemerintah, interes kelompok, dan lain-lain – dalam produk informasi pers.⁹¹

Dengan demikian dapat dikatakan, fakta atau realitas dalam teks pers (*media content*) merupakan realitas hasil konstruksi berdasar pada perspektif subyektif pers. Pers memproduksi informasi atas suatu realitas dengan menggunakan cara pandang tertentu. Perspektif subyektif atau cara pandang tertentu oleh pers dalam hal ini meliputi semua pihak yang terlibat dalam proses memproduksi suatu informasi: perspektif individu jurnalis, serta potensi pengaruh kepentingan tertentu.⁹²

Dalam mengkonstruksi realitas, pers sekaligus pula melakukan pembingkaihan (*framing*) atas fakta peristiwa atau realitas sehingga dalam setiap informasi pers termaktub pesan tertentu. Pesan tersebut kemudian disampaikan dan disebar-kan pers dan serta-merta menggiring khayalak untuk mengkonstruksi realitas sesuai dengan kehendak pers.

Sehubungan dengan ini, para pemikir konstruktivisme menyatakan bahwa konstruksi realitas adalah suatu proses interaktif dan kompleks. Disebut demikian, karena di dalam teks pers sebagai hasil konstruksi realitas, pers secara eksplisit maupun implisit menyampaikan pendapat yang tersusun (koheren) dengan menghubungkan suatu pengertian tertentu yang berbeda dari fakta yang sesungguhnya.

⁹¹ Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 158.

⁹² Bandingkan Rowland Lorimer, *op.cit.*, hlm. 220-224. Lorimer mengatakan media memiliki kebebasan untuk memaknai setiap peristiwa. Kebebasan ini melekat pada ruang lingkup tugas media itu sendiri. Media berwenang untuk melakukan seleksi dan menekankan aspek tertentu dari suatu fakta peristiwa. Media dapat mengintervensi pemaknaan fakta peristiwa ketika mereka menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan, mengkonstruksi dan menyebarkan image dan informasi. Media juga dapat mendefinisikan isu, atau menciptakan wacana dalam isu yang didefinisikan. Tetapi setelah monopoli dalam segmen pasar terjadi, pers juga bebas menjadi kaki tangan kepentingan tertentu.

guhnya (realitas obyektif) melalui pendefinisian berita, pemilihan sumber dan fakta, dan penggunaan berbagai perangkat semantik.⁹³

Dengan kata lain, konstruksi realitas bermuara pada penyampaian pesan atau pembentukan makna mengenai suatu fakta peristiwa atau isu permasalahan tertentu. Pembentukan makna atau pesan tersebut, paling tidak dilakukan dengan dua cara, yakni penggunaan perangkat semantik, dan menyeleksi sumber dan fakta atau *framing*. Perangkat semantik dimaksud adalah kata atau bahasa yang dipakai dalam teks. Kata atau istilah yang termaktub dalam teks dipilih dan ditentukan sendiri oleh jurnalis. Setiap kata atau istilah memiliki arti tersendiri, tetapi arti dari suatu kata dapat pula dikonstruksi dengan menghubungkannya dengan kata tertentu.⁹⁴

Pemikiran tentang konstruksi realitas berpangkal pada pandangan Berger dan Luckman. Menurut Berger dan Luckman, realitas merupakan produk konstruksi manusia. Konstruksi manusia atas suatu realitas berpotensi untuk tidak selalu sama bahkan setiap individu bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Konstruksi yang berbeda-beda tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari faktor perbedaan pengalaman, preferensi, pendidikan, persepsi, dan lingkungan pergaulan atau relasi sosial tertentu. Setiap individu akan mengkonstruksi realitas sesuai dengan cara pandangnya sendiri. Suatu realitas sebagai hasil konstruksi sosial merupakan realitas subyektif dan realitas obyektif sekali-

⁹³ Susan Dente Ross, *op.cit.*, hlm. 2-3. Ross merangkumkan pandangan konstruktivisme tentang teks pers sebagai produk konstruksi realitas, dengan mengatakan: “*While reality construction is a complex and interactive process, newspaper content conveys explicit and implicit judgment that create a “coheren whole” and attribute a specific meaning to discrete facts through the definition of news, selection of sources and fact, and use of various semantic devices* (Pan & Kosicki, 1993:55; Domke, 1997; Etman, 1993; Gamson, 1989; Gamson & Mondigliani, 1989; Gitlin, 1980; Van Dijk, 1991; Tuchman 1978; Goffman, 1974).”

⁹⁴ Tentang penggunaan kata dalam mengkonstruksi makna, lihat Glen Lewis dan Christina Slade, 2000, *Critical Communication*, second edition, Australia: Prentice Hall, hlm. 55-57.

gus. Ini berarti, konstruksi manusia atas suatu realitas tidak selalu tunggal malah cenderung berwajah ganda atau jamak.⁹⁵

Konstruksi sosial atas realitas, masih menurut Berger dan Luckman,⁹⁶ merupakan sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada dalam konteks relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Konstruksi manusia atas realitas terselenggara dalam interaksi sosial, di mana setiap individu memproduksi, mereproduksi dan menyesuaikan definisi realitas. Aktivitas konstruksi sosial oleh setiap individu berlangsung dalam rangkaian proses percakapan atau komunikasi.⁹⁷ Ini berarti, konstruksi sosial bersifat dinamis.

Berger dan Luckman lebih lanjut menyatakan tidak semua percakapan berkaitan dengan pemaknaan dan pendefinisian realitas, tetapi dalam interaksi sosial selalu terjadi konstruksi sosial atas realitas karena percakapan sehari-hari memerlukan definisi bersama. Dalam percakapan sebagai bagian integral konstruksi sosial atas realitas, bahasa merupakan elemen kunci atau unsur penting. Ini berarti instrumen utama konstruksi realitas adalah bahasa. Bahasa (kata-kata), dalam konsepsi Berger dan Luckman, bukan sekadar sebagai sarana operasional komunikasi atau untuk mencerminkan realitas tetapi sebagai instrumen utama konstruksi realitas atau sebagai format simbolis dari realitas.⁹⁸ Contoh, apabila dalam suatu pertemuan seseorang menyebut 'meja', tidak perlu harus ada meja di antara mereka. Tetapi 'meja' hadir dan dipikirkan melalui denotasi, yang makna-

⁹⁵ Lihat Liesbet van Zoonen, 2002, "A 'New' Paradigm?" dalam McQuail, Denis., (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications, hlm. 55.

⁹⁶ Lihat Liesbet van Zoonen, *op.cit.*, hlm. 55.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Lihat Liesbet van Zoonen, *op.cit.*, hlm. 55.

nya dipahami bersama sehingga muncul pemaknaan.⁹⁹ Jadi, selain merepresentasikan realitas secara simbolik atau konsepsional, bahasa juga berperan penting memaknai realitas.

Pers dengan cara pandang yang dimiliki, menyeleksi sumber data dan informasi, menafsirkan komentar-komentar sumber data dan informasi melalui wacana atau penggunaan istilah-istilah tertentu. Sehingga lazim terjadi aksentuasi pada suatu aspek tertentu dan pada saat yang sama menafikan aspek-aspek lain. Sekadar contoh, meski pers mengangkat fakta yang sama, yakni penolakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi obyek ulasan tajuk rencana. Namun dalam mengkonstruksi dan memaknai fakta tersebut, pers memberikan aksentuasi pada fakta tertentu sehingga memunculkan pesan yang berbeda. Pers yang menginterpretasi fakta tersebut dari sudut pandang keputusan hukum formal akan sangat berbeda dari ulasan yang didasarkan pada perspektif hak asasi manusia.¹⁰⁰

Dengan kata lain, melalui konstruksi realitas sebagai strategi *framing*, pers mengarahkan perhatian publik untuk memahami suatu realitas peristiwa. Pers secara subyektif menentukan informasi yang relevan bagi publik dan menetapkan konteks pemahaman untuk memengaruhi hal apa yang akan dipikirkan publik pembaca dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitarnya. Jadi, pers tidak sekadar melaporkan peristiwa, melainkan berperan mengkonstruksi realitas dalam suatu kerangka pbingkaian pesan (*framing*). Oleh karenanya, dalam perspektif

⁹⁹ Lihat Stephen W. Littlejohn, *op.cit.*, hlm. 191.

¹⁰⁰ Bandingkan dengan perspektif *Suara Pembaruan* (Bab III.3.2) dan perspektif *Republika* (Bab III.4.2) dalam penelitian ini.

konstruktivis, pers beserta jajaran pekerja pers disebut pula sebagai agen konstruksi realitas.¹⁰¹

II.5. Teks Pers Produk dari Berbagai Faktor Pengaruh

Teks pers atau informasi yang disajikan oleh pers kepada khalayak merupakan produk dari berbagai faktor pengaruh atau kepentingan yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi media dalam memproduksi suatu teks informasi.

Pertama, individual pekerja media. Faktor ini mencakup karakteristik personal, latar belakang sosial, serta profesionalisme pekerja media tersebut. Antara lain adalah jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, agama, nilai-nilai yang dianut, pendidikan, pengalaman kerja, sikap politik, orientasi religius. Semua aspek ini potensial memengaruhi seorang pekerja media dalam melakukan tugas jurnalistik.¹⁰² Sebutlah misalnya, jurnalis yang memiliki orientasi politik pada PKB secara hipotetik cenderung akan lebih menonjolkan citra positif PKB ketika mengkonstruksi dan memaknai kasus partai tersebut.

Kedua, rutinitas media (*media routines*). Faktor rutinitas media berhubungan dengan tuntutan teknis seperti jadwal terbit dan halaman yang terbatas, tuntutan faktualitas informasi yang disajikan menyangkut kebutuhan konsumen atau segmen pasar, dan tuntutan kepentingan organisasi untuk memperoleh keuntungan. Ketiga aspek ini berkaitan dengan prosedur standar dan proses menentukan produk informasi: apa yang disampaikan kepada khayalak (*consumer*), siapa dan bagaimana proses pengolahan, dan siapa yang menyediakan infor-

¹⁰¹ Lihat Eriyanto, *op.cit.*, hlm. 22-31.

¹⁰² Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese., *op.cit.*, hlm. 63-103.

masi.¹⁰³ Contoh, sajian media tentang kasus busung lapar di Papua. Dengan alasan teknis atau geografis, boleh jadi teks informasi media lebih didasarkan pada keterangan pers (*press release*) pejabat pemerintah.

Ketiga, level organisasi. Faktor level organisasi berkaitan dengan struktur organisasi. Selain bagian redaksi, ada juga bagian pemasaran, iklan, sirkulasi dan lain-lain. Semua bagian ini juga terikat dengan kebijakan dan tujuan organisasi yang biasanya ditetapkan pemilik modal. Setiap bagian struktur organisasi ini memiliki kepentingan dengan teks informasi yang disajikan. Misalnya bagian pemasaran selalu lebih menghendaki sajian yang laku dijual. Kepentingan semacam ini tentu juga dipertimbangkan bagian redaksi. Sehingga boleh jadi editor lebih berperan sebagai manager daripada sebagai jurnalis.¹⁰⁴

Keempat, faktor ekstramedia. Ini berhubungan dengan lingkungan di luar organisasi media (*outside of media organisation*) yakni: sumber informasi media seperti kelompok kepentingan (*interest groups*) yang ingin menginformasikan isu-isu tertentu, *public relations*, kantor-kantor berita (*news organizations*); sumber penghasilan media seperti pemasang iklan dan *audiences* (pelanggan/pembeli); dan institusi-institusi sosial, seperti pemerintah, perusahaan atau pemilik modal. Komponen ekstramedia ini sangat signifikan memengaruhi sajian media.¹⁰⁵ Sebut saja sebagai contoh, suatu partai politik tentu berkepentingan memengaruhi opini publik atas isu-isu tertentu dan untuk itu mereka berupaya agar menjadi sumber informasi bagi sajian media. Demikian juga pemerintah cenderung memanfaatkan media sebagai corong untuk kepentingan kekuasaan dengan menerbitkan regulasi.

¹⁰³ Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese., *op.cit.*, hlm. 108-109.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 172-173.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

Kelima, level ideologi. Ideologi dalam hal ini berhubungan dengan konsepsi atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang atau suatu kelompok dalam memahami fakta peristiwa. Konsepsi berpikir ini sangat dipengaruhi oleh kalangan tertentu yang memiliki kekuatan dominan atau yang berkuasa dalam masyarakat. Ideologi kekuatan dominan ini menentukan kerangka berpikir pekerja media dalam menyajikan informasi.¹⁰⁶ Sebutlah misalnya, kekuatan dominan tersebut menyebarkan ideologi anti militerisme, maka pandangan tersebut akan mewarnai konsepsi pekerja media dalam mengkonstruksi dan memaknai fakta peristiwa.

Shoemaker dan Reese menggarisbawahi, komponen ekstramedia (*outside of media organisation*) memiliki pengaruh yang kuat untuk mengontrol organisasi media. "*Media organizations often find themselves controlled by nonmedia owners.*"¹⁰⁷ Perihal adanya intensitas kontrol oleh kalangan yang bukan pemilik media (ekstramedia) terhadap organisasi media (intramedia) tentu bukan dalam konteks hubungan dikotomis antara ekstramedia dengan intramedia. Karena pada dasarnya, faktor komponen ekstramedia menjadi menentukan dalam proses pengambilan keputusan apa yang akan disajikan oleh media sangat erat berkaitan dengan kepentingan komersial media.¹⁰⁸ Dengan kata lain, komponen intramedia mengakomodasi faktor pengaruh komponen ekstramedia adalah demi kepentingan ekspansi industri-komersial media.¹⁰⁹

Pandangan mengenai teks pers sebagai produk dari berbagai faktor penga-

¹⁰⁶ Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese., *op.cit.*, hlm. 251.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 219.

¹⁰⁹ Kondisi sedemikian ini, merujuk uraian Altschull, telah terjadi semenjak abad 19 dan terus berkembang hingga sekarang. Menurut Altschull, media menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan (*agency for profit*) dan oleh karena itu organisasi media cenderung selalu mengakomodasi kepentingan ekstramedia. Lihat J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 37-38.

ruh juga dikemukakan oleh Street. Ia menyatakan, informasi media tentang peristiwa politik terselenggara dalam konteks hubungan antara politik dan media. Hubungan antara politik dan media terbingkai dalam suatu kekuasaan berdimensi ganda, yakni: kuasa dibalik media dan kuasa media. Kuasa dibalik media dan kuasa media, berinteraksi secara singergis dan saling memengaruhi produk informasi politik dalam sajian media. Kuasa dibalik media adalah menyangkut apa yang dapat disajikan media, sedang kuasa media adalah tentang apa yang dapat diubah oleh media. Jadi, bilamamana realitas politik yang dimuat oleh media berbeda dengan realitas yang sesungguhnya, maka perlu ditelusuri siapa yang melakukan kesalahan tersebut atau pihak yang mendistorsinya. Apakah kuasa media atau kuasa dibalik media, atau merupakan perpaduan dari dua dimensi kekuasaan tersebut.¹¹⁰

Kuasa media, jelas Street, tidak hanya terletak pada otoritas internal atau kebijakan redaksional semata melainkan juga dapat melibatkan sudut pandang setiap individu pekerja media. Pekerja media, sesuai sudut pandang maupun akal sehat (*common sense*) serta kompetensi yang dimilikinya, dapat memengaruhi apa yang akan disajikan media kepada khalayak. Karenanya kuasa media, yaitu menyangkut apa yang dapat diubah oleh media, patut mendapat perhatian tersendiri terutama apabila ingin mengetahui detail apakah suatu teks merupakan ketentuan redaksional atau lebih karena faktor keputusan pekerja media (editor).¹¹¹

¹¹⁰ John Street, *op.cit.*, hlm. 4. Dalam bahasa Street, “*The relationship between politics and the media is a power one, and there are two dimensions to this: there is the power over the media – what gets shown or reported – and there is power of the media – what gets changed by the media. In respect of the first dimension, if media does not simply mirror or distil reality, if it imposes particular biases or stories upon the world, we need to ask who is to blame for the result.*”

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Street lebih lanjut menjelaskan kuasa dibalik media bukan hanya kepada aktor-aktor politik seperti: pemerintah, tokoh partai dan politikus tetapi harus pula tertuju kepada perangkat politis (*political devices*) yang secara langsung terlibat membentuk *image* politikus tertentu. Perangkat politis dimaksud adalah kalangan yang digunakan penguasa maupun politikus untuk mewujudkan pembentukan *image*-nya dalam sajian media, termasuk pengelola dan pemilik media. Oleh karena itu, untuk lebih memahami informasi politik yang dimuat oleh media, perlu mengetahui korporasi politik, mengetahui politik jurnalistik serta memahami kepentingan kalangan yang berpengaruh dalam korporasi media.¹¹²

Dengan kata lain, untuk dapat memahami suatu teks pers secara lebih komprehensif perlu dan harus pula memperhatikan berbagai faktor pengaruh yang terjadi dalam proses produksi teks itu sendiri. Tentu intensitas pengaruh dari faktor-faktor tersebut bervariasi, dan faktor kepentingan komersial kerap disebut lebih dominan. Namun menurut Gouldner, justru dalam kompetisi surat kabar untuk memperoleh keuntungan ekonomi (*profit*) memungkinkan terjadinya persaingan dalam pola mengemas komoditas informasi. Suatu fakta peristiwa atau realitas yang sama disajikan secara berbeda oleh surat kabar yang berbeda, disertai orientasi *profit*.¹¹³

Gouldner lebih lanjut mengatakan, variasi penyajian informasi antarinstansi surat kabar, termasuk pemisahan berita dan editorial, terkait dengan upaya surat kabar untuk menyaingi tuntutan serta peluang pasar, untuk meraih segmen pasar tertentu dan meningkatkan oplah. Tetapi dengan cara ini pula, surat kabar

¹¹² John Street, *op.cit.*, hlm. 5.

¹¹³ Alvin W. Gouldner, 2002, "The Communications Revolution: News, Public, and Ideologi", dalam Denis Mcquail (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications, hlm. 84.

memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan rasionalitas publik dalam memahami suatu fakta peristiwa atau realitas tertentu.¹¹⁴

II.6. Pers dan Demokrasi

Pers dan demokrasi pada hakikatnya merupakan dua entitas yang terpisah. Tetapi keduanya berasosiasi dalam suatu hubungan yang kompleks. Kompleksitas hubungan ini berkelindan dengan asas kehidupan masyarakat yang demokratis, yakni kebebasan informasi (*freedom of information*).¹¹⁵ Asas *freedom of information* sebenarnya beranjak dari asumsi dasar bahwa demokrasi dapat tumbuh subur secara berkesinambungan apabila setiap individu warga negara bisa mengakses informasi yang memungkinkannya dapat melibatkan diri dalam wacana tentang berbagai permasalahan bersama, dalam kerangka pencapaian konsensus di antara mereka sendiri ataupun mengontrol kekuasaan.

Dalam konteks itu, pers sebagai perangkat komunikasi massa didaulat menjadi menempati posisi sentral, berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi (*flow of information*) yang diperlukan untuk penentuan sikap dalam proses politik, memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah non-partisan di mana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.¹¹⁶ Dalam simpul pemikiran sedemikian ini, hubungan antara pers sebagai elemen media massa dan demokrasi sebagai sistem politik menjadi sulit

¹¹⁴ Alvin W. Gouldner, , *op.cit.*, hlm. 84.

¹¹⁵ Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 271.

¹¹⁶ Lihat J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 18-19. Altschull menjelaskan asumsi ini berkembang pada abad 18 di Amerika, yaitu semenjak media massa dipandang memberikan kontribusi signifikan dalam proses menumbuhkembangkan demokrasi. Kontribusi media terutama adalah dalam hal penyebaran informasi (*flow of information*). Seiring dengan itu mencuat gagasan tentang urgensi kebebasan pers (*free press*). Dalam gagasan tentang urgensi kebebasan pers (*free press*) sejatinya terkandung proklamasi kekuasaan pers dalam kehidupan demokrasi.

dipisahkan, tetapi sekaligus pula telah menjadi cukup problematik. Permasalahan pokoknya adalah menyangkut dua aspek penting.

Pertama, bagaimana pers yang demokratis dalam tatanan sistem politik demokrasi. Kedua, bagaimana sistem politik demokrasi memosisikan pers sebagai instrumen *flow of information*. Aspek pertama lebih tertuju pada institusi pers, sedang aspek kedua tertuju pada institusi politik. Meski dua aspek ini tampak agak berbeda tetapi pada hakikatnya berakar pada prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.¹¹⁷

Namun mengenai bagaimana karakteristik pers yang demokratis, dan bagaimana sistem politik demokrasi memosisikan pers, cenderung masih menjadi diskusi terbuka yang bisa diperdebatkan (*arguable*).¹¹⁸ Terlebih jika suatu formulasi diperhadapkan dengan realitas faktual. Tetapi yang jelas, pandangan seputar

¹¹⁷ Bandingkan Rowland Lorimer, *op.cit.*, hlm. 228-231. Menurut Lorimer, ada tiga prinsip dasar demokrasi, yaitu: *free speech* atau *freedom to speak*, *free press*, dan *free flow of information*. Ketiga prinsip ini saling berkaitan. Prinsip kebebasan informasi (*freedom of information*) dapat operasional terutama apabila pemerintah menerapkan sistem informasi yang bebas dan terbuka. Dalam sistem informasi yang bebas dan terbuka, dijamin hak untuk mengetahui (*right to know*) segala kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Atas dasar *right to know* semua warga masyarakat memperoleh kebebasan untuk mengakses informasi dan dengan demikian harus terjamin pula kebebasan untuk menyebarkan informasi (*free flow of information*). Jadi, *free press* tidak mungkin terselenggara tanpa menjamin *right to know*. Prinsip *free speech* maupun *free press* lebih merupakan konsepsi ideal yang tidak mudah terimplementasikan pada setiap negara di dunia.

¹¹⁸ Sekadar gambaran, K. Newton memformulasikan karakteristik isi media yang demokratis dari perspektif kebijakan publik, adalah: tidak selektif; memuat pertimbangan yang terbuka tanpa mengindoktrinasi suatu pendapat termasuk pendapat partai politik tertentu; harus lebih inklusif daripada eksklusif; dan mempresentasikan keberagaman sudut pandang tanpa menekankan sudut pandang tertentu. Tetapi formulasi ini, bagi Street, mempunyai konsekuensi penting terutama dalam hal implementasinya. Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 34. Begitu juga tentang bagaimana sistem politik demokrasi memosisikan pers. Street memberi contoh, untuk memformulasikan apakah kontrol terhadap media perlu atau bisa diterima dalam demokrasi, membutuhkan penetapan batas-batas politis. Antara lain meliputi siapa yang mengadvokasi regulasi publik, membagi kepemilikan media atau membuat peraturan bagi jurnalis dan editor, dan pada pihak lain, siapa yang mendukung deregulasi menyeluruh, mengadili pasar. Kendati batas-batas politis ini dapat ditetapkan, tetapi untuk menerapkannya tentu akan lebih rumit sebab dalam sistem demokrasi terdapat banyak persaingan. Selain itu, aspek yang lebih kompleks lagi adalah melakukan perubahan agar gagasan tersebut dapat terlaksana. Lihat John Street, *op.cit.*, hlm. 8-9.

hubungan antara pers dan demokrasi bermuara pada harapan agar pers dapat berkontribusi dalam membangun tatanan dan kondisi kehidupan yang demokratis. Bertolak dari perspektif sedemikian ini, para pemikir komunikasi merumuskan fungsi pers dalam demokrasi.¹¹⁹

Salah satu fungsi pers yang populer disebut dalam konteks demokrasi adalah pers sebagai *watchdog* (anjing penjaga) demokrasi. Konsepsi ini cenderung lebih melihat pers sebagai entitas kekuatan integral *civil society*, ketimbang sebagai institusi politik atau *fourth power* (kekuasaan keempat).¹²⁰ Namun substansi kedua pandangan tersebut, pers sebagai *watchdog* ataupun sebagai *fourth power* demokrasi, sama-sama berpijak pada asumsi bahwa pers dapat memainkan peran penting dan strategis dalam ranah politik demokrasi. Pers dapat menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa (*power*) dalam proses politik. Pers memiliki *power* yang dapat memengaruhi proses politik, dan memengaruhi pemerintahan.¹²¹

Pers dapat disebut instrumen *watchdog* demokrasi, menurut Dušan Reljiæ, apabila ia mengedepankan kepentingan publik dan memberikan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat sipil. Pers berperan membangun institusi masyarakat

¹¹⁹ Antara lain lihat pandangan McNair dalam Ibnu Hamad, *loc.cit.*, bandingkan dengan penjelasan Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 52; John Street, *op.cit.*, hlm. 185-186. Street menyebutkan, tugas pokok media adalah: menyajikan berbagai informasi yang mengembangkan kapasitas warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Media harus membuka kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengakses pelbagai informasi. Media berperan menjaga agar penyelenggara kekuasaan menghormati hak setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik.

¹²⁰ Lihat Dušan Reljiæ, 2004, "Who Builds Civil Society? Civil Society, Mass Media and Democracy in Post-Communist Countries," dalam *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Working Paper No. 131*, Januari, www.dcaf.ch/publications/Working_Papers/131.pdf (diakses, 20 April 2005), hlm. 1; dan Peter Phillips, "Media Censorship and a Free Press in America," dalam http://www.thirdworldtraveler.com/Media/Media%20Censor_ProjCensor.html (diakses, 20 April 2005). Phillips, mengacu pada konteks Amerika, menegaskan upaya untuk memelihara kesinambungan demokrasi memerlukan figur pemimpin pemerintahan yang dipilih rakyat, dan membutuhkan media yang kuat berperan sebagai *watchdog*. "*Keeping democracy safe in America requires an informed electorate and a strong watchdog press.*" Bandingkan John Srett, *op.cit.*, hlm. 231.

¹²¹ Bandingkan John Srett, *op.cit.*, hlm. 231.

dan memfasilitasi pembentukan opini publik. Peran ini dapat diimplementasikan oleh pers dengan menyajikan laporan investigatif yang mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penguasa dan pengusaha.¹²² Artinya, pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan tersebut diharapkan akan berdampak positif untuk memperbaiki penyelenggaraan kekuasaan. Karena dengan demikian dapat terjadi perubahan dalam penyelenggaraan kekuasaan, yakni kinerja politikus semakin bersandar pada pengutamaan kebijakan publik.

Dalam terang pemahaman itu, pandangan Lippmann tentang pers sebagai organ demokrasi langsung, menjadi relevan. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa pers dalam dirinya sendiri mempunyai beban moral untuk mendorong demokrasi, menjadi acuan pemikiran, dan untuk secara spontan dapat menyediakan informasi tentang berbagai permasalahan sosial-politik yang tidak diperuntukkan bagi pers itu sendiri. Justru oleh karenanya, pers berprakarsa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.¹²³ Hal ini diimplementasikan oleh pers dengan memfungsikan diri sebagai *watchdog* demokrasi, dengan melakukan kritik dan kontrol terhadap sistem kekuasaan yang secara potensial cenderung disalahgunakan. Kritik dan kontrol tersebut dapat dipandang sebagai tindakan preventif demi membangun demokrasi.¹²⁴ Ini berarti bahwa makna hakiki fungsi pers sebagai *watchdog* demokrasi adalah tergantung pada bagaimana pers memfungsikan dirinya dan memberikan kontribusi dalam kehidupan demokrasi. Pers justru dituntut untuk membuktikan dirinya sebagai *watchdogs* demokrasi dengan konsisten

¹²² Dušan Reljiæ, *loc.cit*, hlm. 11; bandingkan Hotman Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 56-57.

¹²³ Walter Lippmann, *op.cit.*, hlm. 43. Lippmann menolak pandangan yang menyebut pers sebagai institusi publik. Karena menurutnya sebutan itu cenderung membatasi peran pers menjadi sekadar sebagai instrumen pengetahuan atau sekadar pembundel masalah.

¹²⁴ Lihat Ayo Olutokun dan Dele Seteolu, *loc.cit.* Mereka menunjuk fakta, pers berfungsi sebagai *watchdog* dalam proses demokrasi di Nigeria.

mengkritisi kinerja politikus, dan itu berarti memberikan pencerahan bagi khalayak tentang isu-isu politik.

Dengan demikian, pandangan tentang peran pers sebagai pers sebagai *watchdog* demokrasi meniscayakan pekerja pers (jurnalis) yang professional.¹²⁵ Profesionalisme pekerja pers dalam hal ini termasuk komitmen jurnalis selaku *gatekeepers* terhadap demokrasi untuk secara bersama menghadapi pelbagai faktor yang dapat menghambat implementasi peran pers sebagai *watchdog* demokrasi.¹²⁶ Faktor penghambat tersebut adalah kepentingan bisnis, dan kepentingan politik pemerintah. Pers lantas menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu, dan cenderung mengeliminasi kepentingan publik.

Apabila pers pers lebih mengutamakan kepentingan ekonomi-politik dan memomorduakan fungsi sebagai *watchdog* demokrasi, menurut Reljiæ, justru akan menjadi kontra-produktif bagi kehidupan demokrasi. Karena dengan demikian tidak lagi terselenggara komunikasi politik yang bebas dan seimbang, dan pem-

¹²⁵ Prinsip-prinsip dasar jurnalisme profesional kerap mengacu pada bagaimana jurnalis mengimplementasikan prinsip obyektifitas, independen dan seimbang. Tuchman menjabarkan prinsip ini dengan mengemukakan empat prosedur yang patut dilakukan jurnalis untuk memisahkan fakta dari opini: (1) Menyajikan dua sisi (*both sides*) permasalahan, memperlihatkan klaim kebenaran dari dua pihak yang saling bertentangan; (2) Menunjukkan pernyataan yang menguatkan atas suatu klaim kebenaran; (3) Menggunakan kutipan langsung untuk menunjuk sumber informasi; (4) Menyusun kisah peristiwa dengan lebih banyak mengungkapkan fakta. Lihat J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 129; bandingkan Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 60-70, dan Rachmah Ida, 2000, "Menyingkap Jurnalisme Profesional di Indonesia: Mengukur Obyektifitas Pemberitaan, dalam *Jurnal Penelitian Media Massa*, Vol. 3 No. 6, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Surabaya, hlm. 72-80.

¹²⁶ Lihat Greg Guma, "Watchdogs and Lapdogs", dalam *Toward Freedom Magazine*, Desember 1997/January 1998, http://www.thirdworldtraveler.com/Media/Lapdogs_TF.html (diakses, 20 April 2005). Menurut Guma, komitmen jurnalis terhadap demokrasi urgen terutama untuk menghadapi tirani korporasi. Dengan komitmen tersebut, jurnalis diyakini dapat mendefinisikan isu aktual dan relevan bagi demokrasi yang kemudian dikonstruksikan dalam pemberitaan pers akan berdampak signifikan memulihkan peran pers sebagai *watchdogs*. Karena, seperti diakui redaktur terkenal Christopher Hitchens, kendala utama yang dihadapi wartawan bukan soal ketidaktersediaan informasi melainkan lebih pada kemampuan wartawan untuk mengkonstruksi berita.

berdayaan *civil society* jadi terabaikan. Kondisi ini jelas akan merusak kondisi kehidupan demokrasi itu sendiri.¹²⁷

Reljiæ lebih lanjut mengategorikan dua tipe pers yang berbahaya bagi demokrasi. Pertama, tipe *petdogs* (anjing kesayangan). Tipe ini merupakan gambaran pers yang perkasa dan kaya. Pers tipe *petdogs* hanya mengikuti kehendak pemilik dan menjadi bagian dari demokrasi semu (*imitation of democracy*). Kedua, tipe *fighting dogs* (anjing perkelahian). Tipe ini menggambarkan pers yang berkepentingan, mengacaukan demokrasi dengan menggiring masyarakat untuk berpaling dari tatanan demokrasi.¹²⁸

Kedua tipe pers itu, sebenarnya hendak menunjuk citra pers yang telah mengalami degradasi fungsi dalam demokrasi. Sebutan *petdogs* atau lebih dikenal dengan sebutan *lapdogs* (anjing piaraan) merupakan sebutan untuk pers yang cenderung mengedepankan kepentingan pengusaha (pemilik) beserta penguasa (pemerintah) dan nyaris tidak lagi mengakomodasi kepentingan publik.¹²⁹ Pers disebut sebagai *lapdogs*, apabila lebih banyak mencekoki khalayak dengan *infotainment*, gosip dan ‘berita’ tanpa disertai alternatif solusi serta mengabaikan perlindungan konsumen.¹³⁰ Kondisi ini terjadi sebagai konsekuensi dari “tirani korporasi” (*corporate tyranny*) yang disertai dengan pengutamaan pasar bebas dan kompetisi.¹³¹ Artinya, kompetensi pers sebagai *watchdog* demokrasi berubah menjadi *lapdogs* adalah seiring dengan keberadaan pers sebagai industri

¹²⁷ Dušan Reljiæ, *loc. cit.*, hlm. 2-8

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

¹²⁹ Lihat John Srett, *op. cit.*, hlm. 146.

¹³⁰ Greg Guma, *loc. cit.*

¹³¹ *Ibid.* Tentang korporasi media di Amerika, lihat Peter Phillips, *loc. cit.* Ia menguraikan data kepemilikan media di Amerika. Pada tahun 1996, pasca program restrukturisasi media yang didukung pemerintah, terdapat 11 korporasi media yang terbesar atau yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Korporasi media terbesar ini, dikelola 115 direktur, merupakan sumber informasi maupun berita bagi mayoritas masyarakat.

komersial di mana kepentingan korporasi atau alasan komersial menjadi rujukan penentu apa yang patut menjadi isi pers.¹³²

Dalam konteks pemahaman itu, McChesney meragukan kredibilitas media sebagai instrumen demokrasi. Keraguan ini didasarkan pada hasil pengamatan empiris dan analisis tentang media sebagai industri-komersial dengan aktifitas yang tersusun (*structured activity*). Disebutkan, dalam kondisi di mana media yang dikuasai oleh segelintir elit media dan pemilik korporasi akan berbahaya bagi demokrasi bahkan boleh menjadi suatu kekuatan antidemokrasi. Karena segelintir elit media dan pemilik korporasi inilah yang menentukan parameter informasi yang patut dimuat oleh media. Para editor dan wartawan, secara umum juga cenderung tunduk pada keinginan elit media dan pemilik korporasi sesuai dengan kultur organisasi korporasi.¹³³

McChesney lebih lanjut mengemukakan, dengan mendayakanfaatkan elit media dan pemilik korporasi, pihak-pihak yang berkepentingan terutama politikus akan semakin mudah mengontrol sumber informasi. Informasi media yang didominasi informasi komersial justru mendepolitisasi masyarakat dan dengan demikian merupakan suatu tindakan yang tidak demokratis. Dengan kata lain, telah mengakibatkan degradasi fungsi pers dalam demokrasi.¹³⁴

Altschull juga sangat meragukan pers sebagai *watchdog*, dalam arti berperan untuk memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan dengan mengungkap kasus suap dan korupsi. Ia malah menyatakan, pengungkapan kasus suap dan korupsi

¹³² Bandingkan J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 37-46.

¹³³ Robert W. McChesney, 2000, *Rich Media, Poor Democracy-Communication Politics in Dubious Times*, New York: The New Press, hlm. 2-3. Elit media dimaksud adalah mereka yang menduduki jajaran direksi suatu perusahaan media.

¹³⁴ *Ibid.*

si oleh pers sebagai *watchdog*, merupakan dongeng (*folklore*) karena menurutnya pers justru merupakan agen kekuasaan politik dan ekonomi.¹³⁵

Altschull menyatakan, keberadaan media sebagai industri-komersial dengan orientasi utama adalah *profit* telah membuat media menjadi agen kekuasaan (*agent of power*) kepentingan korporasi ekonomi dan korporasi politik. Media memilih mengabdikan pada kepentingan kalangan tertentu yang memberi peluang bagi media untuk meraup keuntungan ekonomi (*profit*).¹³⁶ Dalam kondisi ini, menurut Altschull, korporasi ekonomi dan korporasi politik berkolaborasi untuk memengaruhi struktur dan isi media. Seluruh informasi media (*media content*) tentang berbagai fakta peristiwa atau isu permasalahan secara langsung berkorelasi dengan kepentingan dari mereka yang membiayai pers tersebut. Media adalah pemain terompet dan suara terompet tersebut tergantung pada siapa yang membayar.¹³⁷ Dengan demikian, seluruh informasi yang dimuat oleh media telah jadi produk industri dan diongkosi oleh berbagai kalangan demi kepentingan tertentu. Sehingga gagasan tentang kontribusi media bagi kehidupan demokrasi lebih merupakan propaganda kapitalis ketimbang benar-benar dimaksudkan untuk membangun sendi-sendi kehidupan yang demokratis.¹³⁸

¹³⁵ J. Herbert Altschull, *op. cit.*, hlm. 71-77.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 254. Media yang dimaksud Altschull adalah media yang disebutnya sebagai media berita (*news media*) yaitu: surat kabar, kantor berita (*news agencies*) radio, televisi dan majalah (hlm. ix). Altschull menegaskan isi media ditentukan sesuai dengan kehendak siapa yang menjadi acuan utama atau kalangan yang menjadi pola anutan (*pattern*) media. Berdasar pada pola anutan media, ia membedakan 4 jenis isi media, yaitu: (1) pola pemerintah (*official pattern*), isi media ditentukan menurut undang-undang, dan regulasi; (2) pola komersial (*commercial pattern*), isi media mencerminkan pandangan pemasang iklan (*advertiser*) dan konglomerasi media terutama pemilik dan penerbit; (3) pola kepentingan (*interest pattern*), isi media menyuarakan kepentingan kalangan yang membiayai produksi media, seperti partai politik, organisasi religius, atau badan-badan lain; (4) pola informal (*informal pattern*), isi media mencerminkan tujuan famili, sahabat, kenalan, atau siapa saja yang dapat memberikan dana atau yang dapat memengaruhi kesinambungan produksi media.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 254. Dalam bahasa Altschull, "*The press is the piper, and the tune the piper plays is composed by those who pay the piper*".

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 19, 207-230.

Berdasarkan argumen McChesney dan Altschull dapat diartikan setiap produk informasi media adalah mendistribusikan kepentingan korporasi ekonomi maupun korporasi politik. Dalam kondisi ini, relevansi peran media dalam demokrasi menjadi sesuatu yang dipertanyakan, karena ternyata kontribusi media dalam kehidupan demokrasi menjadi hampir tidak ada lagi.

Namun menurut Street, persoalan implementasi peran media dalam kehidupan demokrasi perlu dilihat secara lebih proporsional. Benar bahwa korporasi media maupun korporasi politik bisa saja berkolaborasi untuk mengatur dan memengaruhi struktur dan isi media. Tetapi intervensi tersebut tidak berarti akan menutup segala kemungkinan bagi peran media dalam sistem politik demokrasi. Karena kepentingan korporasi bukanlah merupakan faktor tunggal yang dapat memengaruhi isi media.¹³⁹ Bahkan strategi media untuk memenuhi tuntutan pasar atau untuk memperoleh peluang pasar boleh jadi berpengaruh bagi struktur dan isi media. Faktor perspektif subyektifitas pekerja media pun, bisa saja turut memainkan peranan tersendiri.¹⁴⁰

Fakta mengenai hal itu, dikemukakan Gouldner. Ia mengatakan, meskipun motif yang mendasari pelbagai informasi pers adalah sebagai komoditi untuk memperoleh profit tetapi pada dasarnya juga memiliki bagi prospek pengembangan demokrasi. Kontribusi tersebut adalah untuk mencerdaskan publik atau meningkatkan peningkatan rasionalitas publik. Ini dapat terjadi

¹³⁹ John Street, *op.cit.*, hlm. 35. Street mengisyaratkan, isi media cukup kompleks dan boleh jadi terdapat ketidakcocokan dalam suatu teks atau antar-teks. Gambaran tentang hal tersebut dalam diperoleh dengan melakukan analisis isi media (*analysis media content*).

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 155-162. Street mencatat faktor subyektifitas pekerja media antara lain adalah dalam hal menafsirkan peraturan dan konvensi korporasi maupun dalam proses seleksi menentukan mana yang patut menjadi isi media.

karena pers mendistribusikan informasi tentang berbagai fakta peristiwa yang diperlukan publik dalam kehidupannya.¹⁴¹

Pandangan senada juga dikemukakan Oliver Boyd-Barret, kendati faktor politik-ekonomi memengaruhi isi media massa namun pada taraf tertentu media juga berperan dalam proses menumbuhkembangkan partisipasi publik dan menyuarakan keadilan. Dalam arti, media massa sesuai dengan pandangan ideologis atau cara pandangnya terhadap suatu realitas juga memiliki kontribusi dalam mengkonsolidasikan konsensus politik, mengarahkan sikap publik pada suatu pendapat tertentu, dan mewakili masyarakat secara terbuka mengembangkan mobilitas sosial, dan lain-lain. rasionalitas publik dapat terjadi karena pers mendistribusikan informasi tentang berbagai fakta peristiwa yang diperlukan publik dalam kehidupannya.¹⁴²

Di sisi lain, McChesney merekomendasikan urgensi melakukan suatu upaya sistematis untuk menata media guna merekatkan komitmen media kepada demokrasi. Penataan ini dipandang perlu sebagai tindakan untuk menghargai demokrasi.¹⁴³ Meski ia tidak merinci bentuk penataan dimaksud, namun menurut Street gagasan tersebut lebih sekadar wacana konseptual, karena untuk mewujudkannya boleh jadi berbenturan dengan kondisi faktual dan prinsip dasar opera-

¹⁴¹ Alvin W. Gouldner, *op.cit.*, hlm. 84.

¹⁴² Oliver Boyd-Barret., 1995, *Political Economy and Mass Society, Pluralism: Approach to Media, A Reader.*, Australia: Monash University, hlm. 186-189.

¹⁴³ Robert W. McChesney, *op.cit.*, hlm. 2. Berdasarkan pengamatan empiris terhadap media-media Barat, McChesney menunjuk teks informasi media didominasi oleh informasi komersial sedang analisis kolom berita perihal isu sosial penting semakin kecil. Kondisi ini dinilai telah mendepolitisasi masyarakat dan dipandang sebagai tindakan yang tidak demokratis. Informasi komersial dimaksud bukan hanya menyangkut iklan, tetapi termasuk pula sajian peristiwa tentang skandal seks, selebriti, tindak kriminal.

sional. Terutama untuk merumuskan secara konkret bagaimana sebenarnya peran media dalam demokrasi.¹⁴⁴

Street menjelaskan, perumusan peran media dalam demokrasi, paling tidak terkait dengan dua pokok penting. Pertama, harus terlebih dahulu ditetapkan secara faktual apa kebutuhan demokrasi dalam bidang komunikasi. Kebutuhan ini mencakup aspek tanggung jawab, dimensi kebebasan, format penyajian, serta sistem komunikasi. Kedua, setiap negara demokrasi dengan caranya sendiri menetapkan sistem regulasi media. Format regulasi tersebut cenderung berbeda-beda. Bagi suatu negara, ketentuan politik yang mengatur tempat dan fungsi media massa dimaksudkan untuk melindungi kebebasan pers, tetapi bagi negara yang lain peraturan seperti itu justru dipandang membatasi kebebasan pers.¹⁴⁵

Padahal, masih menurut Street, gagasan untuk membuat peraturan media yang relevan dalam demokrasi boleh jadi mengabaikan aspek tertentu. Misalnya membuat peraturan tentang format sajian, bisa jadi menimbulkan perdebatan berkaitan dengan dimensi kebebasan media.¹⁴⁶

Kendati demikian Street tidak memungkiri perlu memperhatikan bagaimana realitas hubungan antara media dan sistem politik dalam konteks demokrasi. Tetapi ia tidak begitu mempersoalkan persentase antara informasi komersial dengan informasi sosial-politik dalam sajian media. Melainkan lebih terfokus pada bagaimana format *coverage* media tentang politik.¹⁴⁷ Karena menurut Street, untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara media dan sistem politik dalam konteks demokrasi adalah dengan menganalisis format *coverage* media ten-

¹⁴⁴ John Street, *op.cit.*, hlm. 250-252.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 257-259.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

tang politik. Format *coverage* (cara pemberitaan atau ulasan) media tentang politik cenderung berbeda pada setiap sistem politik. Perbedaan *coverage* ini terjadi karena dalam proses mengkonstruksi suatu narasi politik, jurnalis terikat pada suatu konvensi tertentu dan penggunaan *frame* tertentu. Dengan demikian, informasi yang diproduksi media tidak mencerminkan citra (*image*) sistem politik, tetapi dibentuk oleh proses hubungan antara politik dan media.¹⁴⁸

Menurut Street, media yang demokratis adalah media yang memenuhi fungsi yang diberikan padanya. Media yang demokratis, bagaimanapun, harus menjaga agar para penguasa melaksanakan tugas sesuai dengan posisinya. Tetapi untuk dapat mengetahui sejauh mana media mengaktualisasikan fungsi tersebut adalah dengan melihat karakteristik isi pers itu sendiri. Karena hubungan antara pers dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari karakter dan isi pers itu sendiri.¹⁴⁹ Maka untuk memperoleh gambaran sejauh mana media memfungsikan dirinya dalam kehidupan demokrasi adalah memperhatikan teks media (*media content*) itu sendiri.¹⁵⁰

Dalam bingkai pemikiran tersebut, Olutokun dan Seteolu mengkaji rubrik editorial pers pada masa transisi atau proses demokratisasi, 1998-1999, di Nigeria. Mereka menunjukkan fakta, pers dalam editorialnya ekstensif menyoroti tindakan tokoh-tokoh politik, sipil maupun militer, yang melakukan korupsi, yang menyalahgunakan wewenang, dan yang melakukan berbagai kecurangan pada

¹⁴⁸ John Street, *op.cit.*, hlm. 58.

¹⁴⁹ *Ibid.* Street menyatakan, karakteristik pers yang demokratis sejatinya tidak terletak pada pers itu sendiri melainkan juga melekat pada sistem politik demokrasi. “*Democratic media do not, in and of themselves, create democracy. Democratic media need a democratic polity, and vice versa.*” (Media yang demokratis tidak menciptakan demokrasi dalam dirinya sendiri. Media yang demokratis memerlukan suatu pemerintahan demokratis, dan sebaliknya).

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 272.

pemilu.¹⁵¹ Meski Olutokun dan Seteolu tidak menjelaskan mengapa pers ekstensif menyoroti perilaku politikus, dan apa faktor yang melatarbelakangi pers melakukan hal tersebut. Tetapi patut digarisbawahi, pers dapat memfungsikan dirinya sebagai *watch-dogs* demokrasi dengan membingkai pesan (*framing*) tentang realitas politik berlandaskan komitmen keberpihakan pada publik demi pengembangan demokrasi. Dengan kata lain, fungsi normatif pers sebagai *watchdog* demokrasi menuntut pers untuk memposisikan diri sebagai entitas publik dan mengemukakan opini yang mendorong partisipasi aktif publik dalam dialog demokrasi.

II.7. Pers dan Pemilihan Presiden

Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan agenda politik penting demokrasi, dan hal itu dipandang sebagai suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Demokrasi dengan tegas meniscayakan kedaulatan rakyat dalam setiap aktifitas politik termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang memerintah dan bagaimana pemerintahan diselenggarakan. Pada titik ini pula esensi kedaulatan rakyat diaplikasikan dalam konteks partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden.¹⁵²

Menurut Kellner, demokrasi pada intinya membutuhkan warga pemilih yang mengetahui tentang berbagai persoalan politik (*affairs politik*). Rakyat perlu

¹⁵¹ Ayo Olutokun dan Dele Seteolu, loc.cit. Mereka merekomendasikan urgensi meningkatkan mekanisme kontrol internal institusi pers untuk mencegah agar pers tidak terpengaruh problema sosial politik sehingga pers tetap dapat mempertahankan eksistensinya sebagai *watchdog* demokrasi.

¹⁵² Douglas Kellner, 2004, "The Media and the Crisis of Democracy in the Age of Bush-2" dalam *e-Journal National Communication Association*, Vol.1, No. 1, Maret, USA: Routledge, hlm. 29-30; Tentang karakteristik sistem pemilihan presiden dalam demokrasi, yaitu: langsung oleh rakyat, dan sistem perwakilan melalui parlemen, lihat Afan Gaffar, 2002, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 155-156, 362.

memiliki wawasan politik untuk dapat semakin memantapkan partisipasinya dalam demokrasi. Oleh karenanya, rakyat patut memperoleh informasi yang memadai dan mampu mengambil bagian dalam debat publik, pemilihan, dan kegiatan politik. Pada titik inilah peran pers (surat kabar) menjadi penting dan strategis, yakni untuk mengembangkan ruang publik demokratis (*democratic public sphere*) dengan menyediakan pelbagai informasi, gagasan, dan memperdebatkan isu-isu yang signifikan bagi publik.¹⁵³

Sehubungan dengan itu, menurut Kellner, pers sebagai sebuah institusi utama dalam masyarakat demokratis seyogianya menginformasikan isu-isu pokok (*key issues*) yang memampukan rakyat pemilih atau mereka yang mempunyai hak pilih untuk berpartisipasi aktif dan membuat keputusan secara cerdas.¹⁵⁴ Tetapi ternyata, pers justru melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini dikemukakan Kellner berdasarkan pada riset terbaru yang dilakukannya perihal bagaimana perilaku media dalam meng-*cover* pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2000, diikuti dua orang calon presiden yaitu: Bush dan Gore. Kajian ini Kellner dilandaskan pada dua pokok argumentasi. Pertama, informasi dan atau isu penting yang dimuat oleh media adalah informasi dan isu yang tidak bertentangan dengan kepentingan media itu sendiri. Kedua, sebagian besar korporasi media mengejar pertumbuhan korporasi dan meningkatkan kekuasaan dalam negara (*state power*) serta merusak demokrasi.¹⁵⁵

Diperoleh bukti bahwa karakteristik isi media cenderung tidak mencerdaskan publik serta berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi. Media membingkai

¹⁵³ Douglas Kellner, *op.cit.*, hlm. 29-30.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

(*framing*) peristiwa debat calon presiden secara kontras. Bush ditampilkan sebagai tokoh '*likeable*' (yang menyenangkan) sedang Gore diperlihatkan sebagai sosok '*arrogant*' (yang arogan). Pembingkaiannya ini jelas meningkatkan *image* politik Bush.¹⁵⁶ Tema *coverage* media tentang calon presiden pun, tidak berimbang, menguntungkan Bush dan memojokkan Gore.¹⁵⁷

Karakteristik isi media tersebut, menurut Kellner, tidak luput dari dominasi kaum terpelajar konservatif yang juga merupakan pemilik korporasi media AS. Mereka turut mendukung Bush untuk memenangkan pemilihan Presiden AS.¹⁵⁸ Selain itu, Kellner memberi catatan khusus tentang apa yang disebutnya sebagai suatu skandal pemilihan presiden AS 2000. Yakni, media sama sekali tidak mengangkat topik tentang sejarah kehidupan keluarga Bush, antara lain tentang keterlibatan kakeknya mendanai Nazi. Pers justru memfokuskan perhatian pada sisi kehidupan Bush yang positif terutama menyangkut aktifitas kampanye yang simpatik.¹⁵⁹

Oleh karena itu, bagi Kellner, kondisi faktual pemilihan Presiden AS 2000 memunculkan persoalan baru dalam kehidupan demokrasi AS. Persoalan tersebut terletak pada dua faktor penting. Pertama, *coverage* media sangat menguntungkan Bush, ia dianggap sebagai orang yang baik hati. Kedua, dukungan yang diperoleh Bush dari dominasi kaum terpelajar konservatif serta kegagalan media untuk tidak menginvestigasi sejarah kehidupan Bush. Faktor pertama terkait dengan hasil riset

¹⁵⁶ Douglas Kellner, *op.cit.*, hlm. 40-41.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 45. Kellner mengemukakan ini dengan merujuk pada hasil studi *Pew Research Center* dan *Project for Excellence in Journalism* (PEJ) terhadap 2.400 surat kabar, televisi, dan internet edisi Februari-Juni 2000. Terungkap, 76% tema *coverage* tentang Gore adalah: *that Gore lies and exaggerates or is marred by scandal* (membesar-besarkan kebohongan Gore atau dirusak oleh perbuatan yang memalukan) sedang tema *coverage* tentang Bush adalah ia seorang "*different kind of republican*" (anggota partai Republik yang agak berbeda).

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 34-38.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 46-47.

tentang isi media, sedang faktor kedua merupakan argumentasi Keller. Kedua faktor ini dipandang Kellner sebagai mengindikasikan demokrasi AS sedang mengalami krisis.¹⁶⁰

Kendati demikian, Kellner tidak menjelaskan lebih lanjut sejauh mana efektifitas penggunaan pers sebagai wadah kampanye pada pemilihan presiden AS memengaruhi warga dalam menentukan pilihan. Tentang penggunaan pers sebagai wadah kampanye memunculkan wacana tersendiri. McQuail mengakui bahwa media memiliki pengaruh signifikan dalam kampanye, tetapi pengaruh informasi kampanye nampak lebih mungkin untuk mensukseskan pemilihan daripada untuk mengubah sikap atau opini khalayak.¹⁶¹ Berarti, bagi McQuail penggunaan pers tidak signifikan dapat memengaruhi bagaimana hasil suatu pemilihan presiden. Sementara menurut Alger, pers dapat memengaruhi warga masyarakat yang mempunyai hak pilih.¹⁶²

Dalam kaitan itu, menarik memerhatikan hasil studi tentang peran media (televisi dan surat kabar) pada pemilihan presiden AS 1976. Pemilihan diikuti dua calon presiden, yakni Jimmy Carter dan Jerry Ford. Pemilihan dimenangkan oleh Jimmy Carter. Menurut Alger, media signifikan memengaruhi kesuksesan Carter meraih kursi presiden. Bagi Alger, media merupakan instrumen penting bagi calon presiden yang bermaksud meraih posisi tertentu pada pemilihan umum.

¹⁶⁰ Douglas Kellner, *op.cit.*, hlm. 50.

¹⁶¹ Denis McQuail, 1990, "The Influence and Effects of Mass Media", dalam Doris A. Graber., *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc, hlm. 23. McQuail menyatakan, media massa telah terbukti dapat memengaruhi situasi kehidupan sosial-politik terutama dalam hal: penyelenggaraan kampanye, pendefinisian realitas sosial dan norma sosial, pengajuan respons atau reaksi atas berbagai permasalahan, perubahan institusi sosial, dan perubahan kultur masyarakat.

¹⁶² Dean E. Alger, 1990, "The Media in Elections: Evidence on the Role and the Impact", dalam Doris A. Graber, *Media Power in Politics, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc.*, hlm. 147-148.

Media efektif digunakan sebagai wadah kampanye untuk memengaruhi pandangan publik dan untuk membentuk citra calon.¹⁶³

Argumentasi Alger didasarkan pada hasil kajiannya Paterson tentang *framing* dan pola *coverage* media terhadap kedua calon presiden AS tahun 1976, disertai maksud untuk menominasikan calon tertentu bagi khalayak. Ketika itu, media secara intensif menerapkan dua pola *coverage*. Pertama, lebih banyak menyajikan ulasan tentang *style* dan *images* kandidat daripada mengekspose kecapakan dan kepemimpinan kandidat. Kedua, mendisain tujuan dasar proses pemilihan dengan memfokuskan perhatian publik untuk membandingkan penampilan kandidat. Dengan pola *coverage* ini ternyata efektif meningkatkan citra kandidat presiden Carter melampaui popularitas Ford.¹⁶⁴ Kesuksesan Carter mendayakanfaatkan media ditopang pula oleh kepiawaiannya mengangkat isu-isu kampanye tentang citra buruk Ford, yang kemudian tampil menjadi topik sajian pers.¹⁶⁵

Berbeda dengan Alger, Arterton justru mempertanyakan manfaat media dalam sistem pemilihan presiden. Ia tidak sepenuhnya membantah pengaruh media dalam kampanye presiden AS 1976. Tetapi ia menemukan fakta, media tidak dapat memprediksi secara akurat apa dampak yang akan dihasilkan atau juga tidak bisa mencegah efek yang tidak dikehendaki. Ini didasarkan pada hasil wawancara terhadap manajer kampanye dan sekretaris media masing-masing calon presiden. Mereka ternyata dalam merumuskan dampak politik yang diharapkan,

¹⁶³ Dean E. Alger, *op.cit.*, hlm. 158. Alger dengan merujuk pandangan Paterson, menyatakan dalam membentuk image calon, televisi dan surat kabar saling melengkapi. Televisi lebih menolong dalam pembentukan image dan surat kabar terutama untuk menyempurnakan image tersebut.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 147-148.

¹⁶⁵ David Nythan, 1990, "Newspaper in Campaigns" dalam Doris A. Graber, *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc., hlm. 173.

lebih banyak berdasarkan persepsi daripada realitas persaingan. Malah mereka sering berbeda pemahaman tentang pentingnya mempublikasikan suatu peristiwa. Kinerja sedemikian ini dipandang Arterton sebagai pertanda bahwa penggunaan media sebagai instrumen kampanye bukan jaminan utama akan efektif untuk memenangkan figur calon presiden yang dinominasikan.¹⁶⁶

Terlepas dari efektifitas penggunaan surat kabar dalam memengaruhi khalayak, yang jelas berdasarkan pandangan Kellner, Alger, dan juga Arterton, dapat disebutkan bahwa pers dalam pemilihan presiden menempati posisi penting dan strategis. Pers bukan lagi sekadar sebagai mediasi dalam pengertian untuk menyampaikan informasi tentang calon, proses pemilihan, aturan dan jadwal pemilihan. Tetapi lebih merupakan instrumen kampanye tempat di mana calon presiden menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Pers tampil untuk mengkomunikasikan pilihan.¹⁶⁷

Pers sebagai instrumen kampanye dipandang potensial untuk mengkomunikasikan pesan politik tertentu. Pers dapat mengkonstruksi citra positif figur calon presiden tertentu sembari membengkokkan citra negatif kandidat lain. Ini dilakukan oleh pers dengan cara mengedepankan *coverage* atas peristiwa politik pemilihan presiden. Pers dapat memengaruhi dan mengatur aliran pesan dan informasi politik kepada publik, dan pers signifikan menjadi rujukan informasi bagi warga masyarakat.

¹⁶⁶ F. Christopher Arterton, 1990, "Campaign Organization Confront the Media-Political Environment", dalam Doris A. Graber, *Media Power in Politics*, United States of America: Congressional Quarterly Inc., hlm. 161-162.

¹⁶⁷ Bandingkan John Street, *op.cit.*, hlm. 2. Street menyebut keberadaan media semakin penting dalam aktivitas politik merupakan konsekuensi dari perubahan karakter komunikasi politik modern. Politikus berkepentingan menggunakan media sebagai instrumen penyebaran aspirasi politiknya tetapi pada saat yang sama korporasi media juga berkepentingan memanfaatkan media untuk memantapkan pengaruh politisnya. Dalam kondisi ini, dapat terjadi kolaborasi bahkan kolusi antara korporasi media dan politikus untuk memandu serta memengaruhi isi media.

Dalam kondisi itu berpeluang terjadi persaingan antarcalon presiden untuk dapat menggunakan pers sebagai wadah kampanye guna meningkatkan citranya (*image*) dan membantu mereka untuk memperoleh interes politiknya. Namun dapat terjadi pula, pers demi meraih kepentingan politiknya mengkontruksi dan membingkai pesan (*framing*) dengan mengartikulasikan pelbagai isu yang relevan atas figur calon presiden yang dinominasikan oleh pers itu sendiri.¹⁶⁸ Dengan demikian, pers bukan lagi sekadar sebagai medium pencitraan diri yang digunakan oleh calon presiden tertentu melainkan lebih sebagai elemen yang turut bermain politik. Oleh karena itu, pers pada pemilihan presiden selalu berada pada posisi untuk menentukan sikap berpihak pada salah satu kontestan pemilihan presiden.

Keberpihakan pers pada calon presiden tertentu, seperti disebut Kellner, karena faktor kepentingan politik-ekonomi.¹⁶⁹ Tetapi Nythan, wartawan surat kabar utama *Boston Globe* yang telah turut meng-*cover* kampanye presiden Amerika sejak tahun 1968, membantah tuduhan pers berpihak pada salah satu calon presiden apalagi condong mengemas citra positif calon presiden yang sedang berkuasa. Ia menyatakan orientasi utama pers adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Karena pers juga mengakses informasi dari kandidat lain dan

¹⁶⁸ Bandingkan John Street, *op.cit.*, hlm. 199-201. Street menguraikan pandangan tentang potensi media untuk memelintir proses pemilu (*spinning elections*) dengan cenderung mengemas pesan politik untuk memenangkan figur calon presiden tertentu dan pada saat yang sama mengabaikan yang lain.

¹⁶⁹ Bandingkan Robert W. McChesney, *op.cit.*, hlm. 261-265; Bob Franklin, *loc.cit.* McChesney mensinyalir, pers cenderung memandang calon presiden selaku kontestan pemilihan umum sebagai komoditi. Calon presiden yang tidak mampu bersaing menyediakan dana kampanye melalui media tertentu tidak akan mendapat liputan yang sepatutnya. Sedang Franklin menunjuk fakta tentang keadaan pers di Inggris. Dalam perkembangan monopoli surat kabar nasional dan lokal beberapa editor surat kabar justru membarter surat kabarnya menjadi surat kabar politik dengan mendukung tokoh-tokoh politik tertentu.

kerap mengembangkan isu-isu kritis termasuk berperan memotivasi warga masyarakat untuk mengikuti rangkaian proses pemilu.¹⁷⁰

Argumen Nythan sebagai suatu kesaksian boleh jadi sulit dibantah, meski tentu tidak selalu mutlak benar dalam keseluruhan kasus. Lagi pula, manajemen redaksional pers pada pemilu secara subyektif ditentukan oleh setiap institusi pers.¹⁷¹ Artinya, selalu terbuka kemungkinan bagi suatu institusi pers untuk menyatakan keberpihakan kepada suatu pihak tertentu.¹⁷²

Penggunaan pers sebagai instrumen kampanye, seperti disebut Alger, termaktub maksud untuk memengaruhi warga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Tetapi sejauh mana efektifitasnya sulit ditentukan. Oleh karena itu, merujuk pemikiran Kellner, dan Arterton, intensitas penggunaan pers sebagai instrumen kampanye oleh calon presiden lebih karena faktor potensi pers untuk mengkonstruksi dan membingkai pesan (*framing*) politik yang dapat menguntungkan figur calon presiden tertentu.

Dalam konteks pemilihan presiden, sebagaimana dikemukakan Kellner, pers sebenarnya memiliki kompetensi untuk menyebarkan pesan politik yang bermanfaat membangun kehidupan demokrasi. Tetapi pers dapat pula merusak kehidupan demokrasi manakala ia mengabdikan diri pada kepentingan ekonomi-politik tertentu. Karena dengan demikian pers tidak lagi memberdayakan publik, melainkan justru menjadikan warga negara sebagai penerima pasif bukan sebagai parti-

¹⁷⁰ David Nythan, *op.cit.*, hlm. 171-173.

¹⁷¹ Bandingkan Doris A. Graber, *op.cit.*, hlm. 145.

¹⁷² Bandingkan Jhon Downing, et.al., 1990, *Questioning The Media, A Critical Introduction*, California: Sage Publications, hlm. 16-17. Downing mengatakan, politikus memanfaatkan media untuk meningkatkan citranya (*image*) dan membantu mereka untuk memperoleh interes politiknya. Namun pada saat yang sama, media juga berpotensi untuk mengemas (*package*) figur politikus sedemikian rupa dan mengartikulasikan isu dalam kerangka kepentingan politik tertentu.

sipan aktif dalam dialog demokrasi. Namun, seperti diisyaratkan Kellner, untuk membuktikan bagaimana karakteristik pers pada pemilihan presiden adalah berdasarkan kajian ilmiah. Dalam hal ini, isi pers (*media content*) pada masa pemilihan presiden pun relevan digunakan sebagai perangkat analisis untuk memperoleh gambaran bagaimana kondisi kehidupan demokrasi dalam suatu negara.

II.8. Pers dalam Konteks Politik Indonesia

Pers dalam konteks politik Indonesia, signifikan dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Pada masa pergerakan nasional hingga awal abad 20, pers merupakan instrumen pergerakan sosial. Ketika itu, pers Indonesia secara umum dikuasai kaum priyayi atau lapisan masyarakat terhormat. Berdasarkan informasi atau pesan yang dimuat, pers dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, pers yang intens menyampaikan “pesan yang idealistik” untuk menentang sistem kolonial dan menjadi “pelopor diskursus kecendekiaan.”¹⁷³ Kedua, pers yang justru memperkuat dominasi feodalisme dan tidak pernah melakukan kritik sosial.¹⁷⁴ Perbedaan kedua kategori ini mengindikasikan bahwa pers cenderung digunakan untuk menyebarkan ide atau pandangan pihak pengelola pers itu sendiri.

Penggunaan pers Indonesia sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan kepentingan politik tertentu semakin nyata semenjak masa pemerintahan Soekarno terlebih setelah ia mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin (*Guided Demo-*

¹⁷³ Taufik Abdullah, 1999, “Pers dan Tumbuhnya Nasionalisme Indonesia”, dalam *Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia*, edisi 7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-10.

¹⁷⁴ Kuntowijoyo, 1993, “Peranan Budaya dalam Pembangunan Pers Pancasila”, dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W., (editor), *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari, Empat Puluh Tahun Surabaya Post*, Surabaya: Yayasan Keluarga Bakti, hlm. 405-407.

cracy). Rezim Soekarno berkepentingan mengontrol arus informasi yang disebar-kan oleh pers. Lantas Soekarno mempolitisasi pers, dengan menunjuk pers sebagai “alat revolusi”. Fungsi pers difokuskan untuk memobilisasi opini publik sesuai dengan kehendak politik kekuasaan dan memantapkan kepentingan rezim berkuasa. Soekarno memperkenankan pers menjadi milik pribadi tetapi seluruh isi pers dipandu oleh pejabat pemerintahan.¹⁷⁵

Pada pihak lain, Soekarno menerapkan sistem lisensi (*licensing system*) untuk dapat memperoleh mesin cetak yang diimpor negara dan diberikan kepada kalangan yang tunduk pada garis politik kekuasaan. Ia mengharuskan media menjadi organ partai politik, sehingga sebagian besar pers menjadi partisan berindukan partai politik dan dikuasai kaum politikus, yang sekaligus sebagai representasi kelas menengah. Pers lantas menjadi corong partai politik tertentu dan cenderung menjadi lebih afirmatif daripada kritis.¹⁷⁶ Dalam kaitan ini, Altschull boleh benar ketika menyebut model jurnalisme Indonesia pada masa rezim Soekarno sebagai jurnalisme terpimpin (*guided journalism*). Pimpinannya adalah rezim Soekarno.¹⁷⁷

Politisasi pers semakin meningkat pada masa Orde Baru atau rezim Soeharto. Kendati struktur pers terpimpin diganti dengan sebutan sistem pers bebas atau kemudian disebut sebagai kebijakan pers demokrasi Pancasila, tetapi esensinya tidak berbeda. Pers tetap diwajibkan untuk menyajikan informasi yang tidak bertentangan dengan filosofi rezim Soeharto. Jurnalis diwajibkan untuk mematuhi

¹⁷⁵ J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 157; Krishna Sen dan David T. Hill, *op.cit.*, hlm. 63-64.

¹⁷⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 408, dan Daniel Dhakidae, 1993, “Negara dan Ekonomi Pers Indonesia” dalam dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W., (editor), *op.cit.*, hlm. 376-377.

¹⁷⁷ J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 201.

prinsip-prinsip ideologi nasional sesuai rumusan pemerintah. Pers dilarang mem-beritakan isu-isu yang bersifat memecah-belah etnis atau agama. Tetapi tafsir tentang isu-isu tersebut ditentukan oleh rezim.¹⁷⁸

Rezim Orde Baru dengan ketat melakukan kontrol terhadap pers dengan menetapkan sistem perizinan penerbitan pers. Ketetapan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 1/1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dengan sistem tersebut, pers Indonesia diperhadapkan pada dominasi eksekutif dan birokrasi. Pers yang tidak tunduk pada kepentingan kelompok penguasa akan memperoleh ganjaran pencabutan izin terbit. Ini antara lain dialami *Sinar Harapan*, *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*. Pers lantas memilih bersikap afirmatif dengan menyesuaikan *coverage* politik yang tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok yang berkuasa.¹⁷⁹

Pers hanya mengemukakan gagasan yang tidak bertentangan dengan ke-untungan *status quo* atau pandangan rezim penguasa. Kalaupun ada pers yang terkesan kritis, terbatas pada apa yang disebut Hallin sebagai *sphere of legitimate controversy*, yaitu perbedaan dan konflik yang masih diperbolehkan oleh sistem yang berkuasa untuk dibahas.¹⁸⁰ Tetapi untuk dapat melakukan hal tersebut, pers juga harus memiliki keberanian antara lain untuk menanggung risiko pencabutan SIUPP atau ancaman breidel oleh rezim Soeharto.¹⁸¹

¹⁷⁸ Glen Lewis dan Christina Slade, *op.cit.*, hlm. 290; J. Herbert Altschull, *op.cit.*, hlm. 157.

¹⁷⁹ Ashadi Siregar, 1994, "Pers Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Politik, dalam Bambang Wahyudi dan M.Faried Cahyono (editor), *Pers, Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 42; Victor Menayang, et.al., 2000, "Pers Bawah Tanah: Media sebagai Pergerakan Sosial", dalam Dedy N. Hidayat, et.al. (editor), *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 287.

¹⁸⁰ Pandangan Hallin diuraikan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, *op.cit.*, hlm. 227.

¹⁸¹ R. William Ladle, 1994, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, hlm. 151.

Kecenderungan pers menjadi parsial, pragmatis, atau partisan pada masa Orde Baru, menurut Dakhidae, semata-mata bukan karena faktor politik saja. Tetapi juga disertai dengan kepentingan ekonomi atau faktor industri komersial pers. Pers semakin bersikap afirmatif dan tidak bersuara kritis, justru dalam upaya untuk memproteksi kesinambungan bisnis yang ketika itu sedang mengalami perkembangan sirkulasi yang signifikan.¹⁸² Dengan kata lain, pers Indonesia pada masa Orde Baru dipengaruhi kekuasaan politik sebagai faktor eksternal dan kepentingan bisnis sebagai faktor internal.

Namun patut dicatat bahwa ketika rezim Orde Baru, pers Indonesia juga ditandai dengan kehadiran “pers bawah tanah”. Pers bawah tanah merupakan media alternatif, sekaligus untuk menyiasati tindakan penguasa terhadap pers *mainstreams*. Karakteristik “pers bawah tanah” berbeda dengan pers *mainstreams*. Pers bawah tanah dikelola tanpa izin penguasa, dan lebih dilandaskan pada gelora idealisme insan pers. Jurnalis yang terlibat dalam pers bawah tanah juga berperan dalam pers *mainstreams*. “Pers bawah tanah” mengusung agenda demokratisasi dengan mengkritisi kinerja pemerintah. Sementara pers *mainstreams* dikelola berdasarkan izin usaha dari pemerintah dan memiliki orientasi untuk menjadi industri-komersial. Pers *mainstreams* selalu diperhadapkan pada pertimbangan bagaimana menghadapi mesin kekuasaan represif yang secara sepihak dapat mencabut izin terbit pers.¹⁸³

Pada tahun 1998, menjelang jatuhnya rezim Orde Baru, pers Indonesia dalam hal ini termasuk pers *mainstreams* menunjukkan sikap kritis terhadap rezim dan menyebarkan wacana demokratisasi. Tetapi secara umum sikap pers *main-*

¹⁸² Daniel Dakhidae, *op.cit.*, hlm.377-379.

¹⁸³ Victor Menayang, et.al., *op.cit.*, hlm. 275-296; bandingkan Daniel Dhakidae, *op.cit.*, hlm. 363.

streams digambarkan Gazali sebagai berada “antara benci dan banci terhadap rezim”. Artinya, ketika hendak mengungkapkan sikap kritis selalu masih disertai pertimbangan apa dampaknya bagi institusi pers itu sendiri.¹⁸⁴

Dengan kata lain, kebijakan politik pemerintah sangat memengaruhi karakteristik pers. Sejak rezim Soekarno hingga Soeharto, pers dibelenggu dengan berbagai kontrol kekuasaan. Meski kedua rezim tersebut menggunakan istilah demokrasi, Soekarno: demokrasi terpimpin; dan Soeharto: demokrasi Pancasila, tetapi pers tidak memiliki kebebasan untuk menjadi entitas publik melainkan dipolitisasi sebagai alat kekuasaan. Dari masa rezim Soekarno hingga Soeharto, pers Indonesia dapat dicandra sebagai bangunan sistem yang diatur dan dikendalikan dari atas oleh penguasa.

Setelah kekuasaan pemerintahan Orde Baru semakin merosot, yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan secara dramatis dengan cara yang tidak terhormat (*in disgrace*),¹⁸⁵ pemerintah Reformasi mengapresiasi pentingnya kebebasan pers. Pemerintah menerbitkan UU No. 40/1999 yang membuka kebebasan pers yang dibelenggu hingga 1998.

Pers secara sah memiliki kebebasan untuk mengembangkan atau menciptakan opini publik dalam sebuah sistem demokrasi. Pers dapat membicarakan berbagai persoalan, termasuk menyampaikan kritik dan evaluasi tentang kinerja pemerintah. Pers Indonesia tidak lagi mengalami hambatan yang signifikan dalam menunaikan fungsi jurnalistiknya termasuk untuk menyatakan sikap maupun

¹⁸⁴ Effendi Gazali, 2000, “Antara Benci dan Banci terhadap Rezim: Analisis Peran Koran dan Radio Lokal” dalam Dedy N. Hidayat, et.al. (editor), *Pers dalam “Revolusi Mei” Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 298-323.

¹⁸⁵ Afan Gaffar., *op.cit*, hlm. 306.

orientasi sosial dan politiknya.¹⁸⁶ Kendati demikian bukan berarti pers sama sekali tidak lagi mengalami hambatan maupun tekanan. Tetapi hambatan atau tekanan tersebut lebih bersifat kasuistik ketimbang sistemik.¹⁸⁷

Meski pers tidak lagi dibelenggu oleh regulasi kekuasaan politik, namun faktor industri komersial niscaya berpotensi untuk memengaruhi isi pers itu sendiri. Apabila ini terjadi akan berimplikasi bagi pengembangan demokrasi Indonesia.¹⁸⁸ Sehubungan dengan ini menarik memerhatikan fenomena penggunaan pers oleh pemilik pers untuk meraih interes politiknya telah terjadi pada Pemilu 2004. Hal ini diungkapkan Haryanto dengan mengajukan fakta bahwa pemilik pers dengan sengaja menggunakan pers miliknya sebagai corong untuk mengkampanyekan diri dan memublikasikan kepentingan politiknya.¹⁸⁹ (*media content*)

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks politik Indonesia kontemporer, karakteristik isi pers berpotensi mendapat pengaruh dari kekuasaan politik dan pemilik pers itu sendiri.¹⁹⁰ Sehingga meskipun kini telah terbuka pelu-

¹⁸⁶ Bandingkan Glen Lewis dan Christina Slade, *op.cit.*, hlm. 287-288.

¹⁸⁷ Tentang kasus-kasus yang dihadapi pers, secara khusus yang dialami wartawan, lihat Lukas Luwarso, dkk. (editor.), 2002, *Natural Press Attackers: Tekanan terhadap Pers Indonesia 2001 – Laporan Tahunan The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta Office*, Jakarta: SEAPA.

¹⁸⁸ Agus Sudibyo, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS, hlm.15-16.

¹⁸⁹ Ignatius Haryanto, “Kepemilikan Media Terpusat dan Ancaman terhadap Demokrasi”, dalam *Kompas*, 4 Agustus 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/04/Bentara/1189006.htm> (diakses 8 Oktober 2004). Haryanto menunjuk tiga contoh kasus, yakni: Surya Paloh di Jakarta menggunakan *Media Indonesia* dan *Metro TV* untuk kampanye dirinya pada Konvensi Partai Golkar; Budi Santoso pemilik *Harian Suara Merdeka* dan *Wawasan* di Semarang menggunakan kedua medianya untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon anggota DPD Jawa Tengah; Alwi Hamu pemilik *Harian Fajar*, *Ujung Pandang Ekspres*, dan *Berita Kota* di Makassar menggunakan ketiga medianya sebagai sarana kampanye dirinya untuk menjadi anggota DPD Sulawesi Selatan. Budi Santoso berhasil, sedang Surya Paloh dan Alwi Hamu gagal. Alwi Hamu kemudian beralih menjadi tim sukses calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Jusuf Kalla.

¹⁹⁰ Sekadar gambaran, menurut data Krishna Sen dan David T. Hill, industri-komersial pers Indonesia dikuasai segelintir konglomerasi. Hingga pertengahan 1990-an, 16 kelompok pers besar menguasai dua pertiga dari seluruh industri pers di Indonesia. Lihat Krishna Sen dan David T. Hill, *op.cit.*, hlm. 67-73.

ang bagi kebebasan pers di Indonesia namun masih terasa sulit untuk mempercayai pers adalah entitas yang benar-benar otonom dan mandiri. Kepentingan eksternal dan internal masih berpeluang untuk memengaruhi pers dalam mengkonstruksi dan membingkai pesan (*framing*) atas pelbagai fakta peristiwa atau realitas politik tertentu.

II.9. Karakteristik Pers Sasaran Penelitian

Pada dasarnya, keempat pers atau surat kabar yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* memiliki karakteristik yang berbeda. Gambaran karakteristik dari masing-masing surat kabar ini, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Kompas* memiliki kedekatan dengan kelompok Katolik. Surat kabar *Kompas* didirikan pada 28 Juni 1965 atas inisiatif Partai Katolik. Sejak awal berdiri *Kompas* secara resmi memiliki afiliasi dengan Partai Katolik, tetapi hubungan dengan partai telah dihapuskan pada 1971. Pada awal 1990-an, *Kompas* memiliki kerajaan bisnis yang bergerak dalam bidang bisnis media dan non-media, yang terdiri dari 38 perusahaan dengan bendera Kompas Gramedia Group.¹⁹¹
- *Suara Pembaruan* memiliki kedekatan dengan kelompok Kristen Protestan. Surat kabar *Suara Pembaruan* merupakan nama baru mengganti *Sinar Harapan*. Pergantian nama ini akibat tindakan penguasa Orde Baru membredel

¹⁹¹ Lihat Krishna Sen dan David T. Hill., 2001, *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*, (terjemahan Sirikit Syah) Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, hlm. 68-69; Ibnu Hamad, *op.cit.*, hlm. 116.

Sinar Harapan pada 9 Oktober 1986, alasannya karena surat kabar ini dinilai mendahului pengumuman pemerintah mengenai deregulasi ekonomi Indonesia. Empat bulan kemudian, pemerintah memberikan SIUPP dengan mengharuskan perubahan nama. *Suara Pembaruan* pada intinya tidak berbeda dengan *Sinar Harapan* yang didirikan pada 27 April 1961. Ketika pemerintah mewajibkan semua surat kabar untuk berafiliasi dengan partai politik, sekitar 1964/1965 surat kabar ini menyatakan diri sebagai surat kabar Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Hubungan dengan partai diakhiri pada 1973. *Suara Pembaruan* termasuk dalam kelompok usaha bisnis media di bawah payung Grup Sinar Kasih.¹⁹²

- *Republika* memiliki kedekatan dengan kelompok Islam. Surat kabar *Republika* berdiri 19 Desember 1992 sebagai bagian integral dari program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI dibentuk pada 5 Desember 1995 sebagai strategi rezim Orde Baru untuk merangkul kembali kekuatan politik Islam yang pernah dipinggirkan pada masa 1970-1980-an. Kehadiran *Republika* disertai motif sebagai pengimbang dari pers non-Islam. *Republika* dikelola di bawah payung PT. Abdi Bangsa, sebagai badan usaha dengan pendiri 48 orang terdiri dari pejabat pemerintah dan pengusaha. Ketua badan pembina adalah B.J. Habibie, dan Amien Rais menempati posisi pada jajaran dewan redaksi *Republika*.¹⁹³

¹⁹² Lihat Ibnu Hamad, *op. cit.*, hlm. 128-129.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 120-121.

- *Jawa Pos* memiliki kedekatan dengan kelompok bisnis etnis Tionghoa. Surat kabar *Jawa Pos* didirikan pada 1949 oleh keluarga The Chung Shen, berpusat di Surabaya. Keluarga ini juga menerbitkan surat kabar berbahasa Mandarin. Tahun 1982, PT Grafiti Pers, penerbit majalah *Tempo*, mengakuisisi *Jawa Pos*, yang waktu itu tengah mengalami penurunan sirkulasi. *Jawa Pos* kemudian berkembang menjadi konglomerat pers melalui konsentrasi secara eksklusif di pasar propinsi, yang dikenal sebagai Jawa Pos Group. *Jawa Pos* juga menerbitkan satu halaman khusus dalam bahasa Mandarin dengan tujuan sirkulasi adalah etnis Tionghoa. *Jawa Pos* memiliki program ‘Tekat Sayang’ (tak kenal maka tak sayang) untuk mempromosikan interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lain yang mayoritas. Program ini dilaksanakan pada tiap musim libur sekolah. Anak-anak umur 7-12 etnis non-Tionghoa ditempatkan dalam keluarga etnis Tionghoa, dan sebaliknya.¹⁹⁴

Uraian di atas memperlihatkan bahwa keempat pers tersebut dapat dipandang sebagai merepresentasikan kekuatan sosial politik di Indonesia. Representasi kekuatan sosial politik dimaksud dapat dilihat dari faktor historis atau hubungan berdimensi primordial. *Kompas* memiliki kedekatan atau berafiliasi dengan kelompok Katolik, *Suara Pembaruan* memiliki kedekatan dengan kelompok Kristen Protestan, *Republika* memiliki kedekatan dengan kelompok Islam, sedangkan *Jawa Pos* memiliki kedekatan dengan kelompok bisnis secara khusus etnis Tionghoa.

¹⁹⁴ Lihat Ibnu Hamad, *op.cit.*, hlm. 148-151; Krishna Sen dan David T. Hill, *op.cit.*, hlm. 69-70.

Dengan demikian, keempat media pers sasaran studi ini boleh jadi memiliki orientasi politik yang berbeda-beda dan boleh jadi pula menghadirkan wacana tentang agenda politik dengan variasi sudut pandang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karena kendatipun hubungan antara pers dengan kekuatan sosial politik tertentu tidak diformalkan tetapi nuansa kedekatan itu sulit dihindarkan sehingga secara terselubung dan sistematis acap termaktub dalam produk informasi pers.¹⁹⁵ Dalam konteks pemahaman ini, *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* dalam membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi bisa saja menghadirkan spektrum politik yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing.



¹⁹⁵ Fenomena ini dapat terlihat dalam format *coverage* pers, misalnya ketika memberitakan kasus yang melibatkan komunitas agama seperti yang terjadi di Ambon pada tahun 2000. *Republika* sebagai surat kabar yang berafiliasi kepada kelompok Islam cenderung menonjolkan kepentingan kelompok Islam, sementara *Kompas* dan *Suara Pembaruan* cenderung memunculkan gambaran positif tentang kelompok Kristen. Lihat Agus Sudibyo, *op.cit.*, hlm.61-118.

BAB III**METODOLOGI****III.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini merepresentasikan suatu analisis *frame* pers (*media frame*) tentang isu demokratisasi dalam teks tajuk rencana yang diterbitkan oleh pers pada pilpres. Dalam kaitan itu, penelitian ini menggunakan metode analisis *framing*. Penggunaan analisis *framing* didasarkan pada tiga aspek pertimbangan yang relevan.¹⁹⁶

Pertama, analisis *framing* menyediakan perangkat analisis yang dapat menyingkapkan hingga detail-detail elemen *frame* dari teks informasi yang disajikan oleh pers. Kedua, analisis *framing* berpretensi untuk menjelaskan perbedaan strategi dan teknik membuat ulasan atau membingkai pesan (*framing strategies*) oleh masing-masing pers meskipun ulasan tersebut didasarkan pada fakta peristiwa atau isu permasalahan yang sama. Karena pada dasarnya, tiap surat kabar mewadahi ulasannya dengan melakukan seleksi dan penajaman dimensi tertentu atas suatu fakta peristiwa atau isu serta mempertautkannya dengan fakta lain yang dianggapnya relevan. Ketiga, dalam ranah studi komunikasi, analisis *framing* membuka diri terhadap pendekatan multidisipliner dalam menganalisis teks media. Sehingga suatu teks informasi media dapat dijelaskan berdasarkan konteks sosiologis, politik, maupun budaya yang melingkupi produksi teks itu sendiri.

¹⁹⁶ Hal ini mengacu pada penjelasan John Street., *op.cit.*, hlm. 37-38, Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 73-81, Eriyanto, *op.cit.*, hlm. 217-228, dan Agus Sudibyo, 2001, "Tinjauan Teoritis Analisis *Framing*", dalam *Pantau, Kajian Media dan Jurnalisme*, edisi 10/Tahun 2001, Jakarta: ISAI, hlm. 120.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, memadai untuk mengatakan bahwa dengan mengaplikasikan analisis *framing* niscaya dapat menjawab rumusan permasalahan serta mencapai tujuan penelitian ini.

Metode analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Gamson, dengan mengakomodasi pandangan Hertog dan Mcleod. Mengapa memilih menggunakan model Gamson, serta mengakomodasi pandangan Hertog dan Mcleod tersebut didasarkan pada dua simpul argumentasi.¹⁹⁷ Pertama, model Gamson dan pandangan Hertog dan Mcleod pada intinya didasarkan pada perspektif yang relatif sama. Keduanya mengembangkan konsep *framing* dalam paradigma konstruktivisme. Kedua, model Gamson dan pandangan Hertog dan Mcleod dipandang saling melengkapi sehingga secara lebih komprehensif dapat diaplikasikan untuk mendiagnosa, mengevaluasi, dan menentukan bagaimana pers membingkai (*framing*) isu demokratisasi berlandaskan suatu perspektif tertentu.¹⁹⁸

Menurut Hertog dan Mcleod, analisis *framing* terdiri atas pengumpulan data empiris dari isi atau teks media. Analisis dapat dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek khusus yang menonjol dalam teks media tentang ulasan tertentu (*media coverage*). Analisis *framing* dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan seperangkat *frame* umum (*establishing a common set of pre-determined frames*) dan karakteristik *frame*. Menetapkan *frame* umum dan karak-

¹⁹⁷ Lihat uraian Adam Simon dan Michael Xenos, *loc.cit.*, hlm.2, Jennifer L. St. Pierre, *op.cit.*, hlm. 3, dan Robert M. Entman, *op.cit.*, hlm. 391-392.

¹⁹⁸ Bandingkan Susan Dente Ross, *loc.cit.* Ross mengaplikasikan analisis framing model Gamson untuk mengkaji editorial majalah *New York Times* untuk mengetahui bagaimana pers mengkonstruksi peristiwa konflik antara Palestina dengan Israel.

teristik *frame* dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam mengembangkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.¹⁹⁹

Dalam kaitan dengan maksud menetapkan *frame* umum dan karakteristik *frame*, Hertog dan Mcleod mengajukan dua tahapan analisis *framing*. Tahap pertama adalah mengidentifikasi fokus utama (*focal points*) yang membentuk *frames* berbeda. Tahap kedua adalah menemukan narasi utama yang digunakan untuk mengorganisir informasi dan gagasan berbeda. Kata-kata tertentu (*certain words*), kata sifat (*adjectives*), kiasan (*metaphors*) dan *catchphrases* merupakan perangkat yang dipakai membentuk suatu *frame*.²⁰⁰ Pandangan Hertog dan Mcleod tentang fokus utama dan narasi utama dalam kaitan dengan menetapkan *frame* umum dan karakteristik *frame* dapat diartikan sebagai *frame* yang paling mencolok dari berbagai kemungkinan *frame* yang digunakan oleh pers.

Gagasan Hertog dan Mcleod tersebut di atas dipandang relevan digunakan pada tahap awal untuk mengklasifikasi *frame* isu demokratisasi atau untuk menentukan *frame* yang paling mencolok dari berbagai kemungkinan *frame* yang dilakukan pers seputar isu demokratisasi dalam teks tajuk rencana pers itu sendiri. Selain untuk dapat semakin memfokuskan analisis data, juga karena *frame* isu demokratisasi dalam teks tajuk rencana pers pada pemilihan presiden masih cukup luas sehingga perlu dijabarkan sesuai dengan ruang lingkup isu demokratisasi.

Sedangkan untuk analisis lebih mendalam dilakukan dengan mengaplikasikan analisis *framing* model Gamson, karena ia menyediakan perangkat anali-

¹⁹⁹ Lihat Jennifer L. St. Pierre, *op.cit.*, hlm. 3. Jennifer memaparkan metode analisis *framing* yang diajukan oleh Hertog dan Mcleod berdasarkan riset pada tahun 2001.

²⁰⁰ *Ibid.*

sis yang lebih komprehensif. Menurut Gamson,²⁰¹ pembedaan (*framing*) suatu peristiwa dalam teks oleh media didasarkan pada suatu perspektif atau cara pandang tertentu. Perspektif atau cara pandang media itu disebut Gamson sebagai kemasan (*package*). *Package* diartikan sebagai gugusan ide-ide yang mengindikasikan tentang isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan dengan wacana yang terbentuk. *Package* adalah semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.

Gamson memahami wacana media sebagai sebuah gugusan kemasan interpretasi (*interpretative packages*) saat mengkonstruksikan dan memberi makna suatu isu. Perspektif media atau *media package* merupakan inti dari sebuah unit besar wacana publik, dan inilah *frame*. Bagi Gamson *frame* merupakan organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu.

Sebuah *media package* (kemasan media) atau perspektif memiliki dua struktur, yaitu *core frame* dan *condensing symbol*. Struktur pertama *core frame* atau elemen inti merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membentuk komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang sedang dibicarakan. Struktur kedua (*condensing symbol*) terdiri dari *framing devices* (perangkat *framing* yang mengarahkan bagaimana cara melihat isu), dan *reasoning devices* (perangkat penalaran yang memberikan alasan pembenar apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu tersebut). *Condensing symbol* merupakan hasil pencermatan terhadap

²⁰¹ Uraian ini merujuk pada paparan Hotman M. Siahaan, et.al., 2001, *op.cit.*, hlm. 81-87, Eriyanto, *op.cit.*, hlm. 217-228, dan John Street, *op.cit.*, hlm. 37-38.

interaksi perangkat simbolik (*framing devices* dan *reasoning devices*) sebagai dasar digunakannya sebuah perspektif.

Framing devices (perangkat *framing*) terdiri dari *metaphors*, *catchphrases*, *exemplars*, *depictions*, dan *visual images*. Masing-masing perangkat *framing* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Metaphors* (metafora) secara literal dipahami sebagai cara memindahkan makna sesuatu dengan merelasikan dua fakta memakai analogi, sering berupa kiasan menggunakan kata "seperti", "bak/bagai".²⁰² Pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Media menggunakan metafora tertentu sebagai landasan berpikir, alasan pembenar, atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. Media menggunakan kepercayaan masyarakat, ungkapan sehari-hari, pribahasa, pepatah, petuah, leluhur, kata-kata kuno. bahkan mungkin ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci. Gamson dan Mondogliani menyebut hal ini sebagai *popular wisdom*.
- *Catchphrases* merupakan istilah, bentukan kata, atau frase khas cerminan fakta merujuk pada pemikiran atau semangat sosial tertentu guna mendukung praktik kekuasaan. Dalam wacana, dapat berwujud jargon, slogan atau semboyan. Misalnya, anti KKN (kolusi, korupsi, nepotisme), jurdil (jujur, adil), demokrasi Pancasila, reformasi nasional.
- *Exemplars* adalah menguraikan atau mengemas fakta tertentu secara mendalam agar memiliki bobot makna lebih pada satu sisi untuk dijadikan rujukan/pelajaran. Posisinya sebagai pelengkap dalam kesatuan wacana. Contoh dari *exemplars* adalah dengan menggunakan kisah atau peristiwa sejarah yang dapat diambil sebagai pelajaran. Misalnya, kedaulatan rakyat jangan sampai dibelokkan, membuka lembaran baru sejarah bangsa.
- *Depictions* adalah penggambaran fakta memakai kata, istilah, kalimat bermakna konotatif, dan bertendensi khusus agar pemahaman khalayak

²⁰² Lihat Arthur Asa Berger, 1991, *Media Analysis Techniques*, London: Sage Publication, hlm. 21-22.

terarah ke citra tertentu. Misalnya, pemberontak, penyelewengan, pelanggaran HAM (hak asasi manusia). *Depiction* dapat berwujud *stigmatisasi* (pelabelan) misalnya provokator, anti militer; *eufimisme* (penghalusan) misalnya penyimpangan dana untuk menyatakan korupsi, diamankan untuk menyatakan ditahan; *disfemisme* (pengerasan) misalnya bandit politik, preman bayaran; *akronimisasi* misalnya balon (bakal calon), satgas parpol (satuan tugas partai politik). Pilihan kata, istilah, atau kalimat yang termasuk *catchphrases* dan *depiction* dalam wacana mampu menempatkan seseorang atau pihak pada posisi tak berdaya karena makna konotatifnya yang berada dalam konteks relasi antara pihak yang dominan dengan yang tidak dominan mengandung dasar bagi pembenaran tindakan kekerasan fisik dan simbolik. Bila wacana berlangsung pada dataran interaksi yang tak seimbang, pers ikut bersama narasumber melakukan kekerasan.

- *Visual image* adalah pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, karikatur, dan sejenisnya untuk mengekspresikan suatu kesan, misalnya perhatian (pene-gasan) ; au penolakan (kontras), ukuran huruf besar-kecil, ditebalkan/dimi-ringkan, atau digarisbawahi, serta pemakaian warna. Tata letak halaman (*page lay out*) seperti lebar kolom, panjang berita dan penempatan berita juga merupakan bagian dari dimensi visual wacana. Visual image dipahami sebagai proses memengaruhi lewat efek dan fungsi pesan agar menancap dibenak khalayak, termasuk aspek ideologi, pengaruh, dan subjektivitas yang bersatu padu.

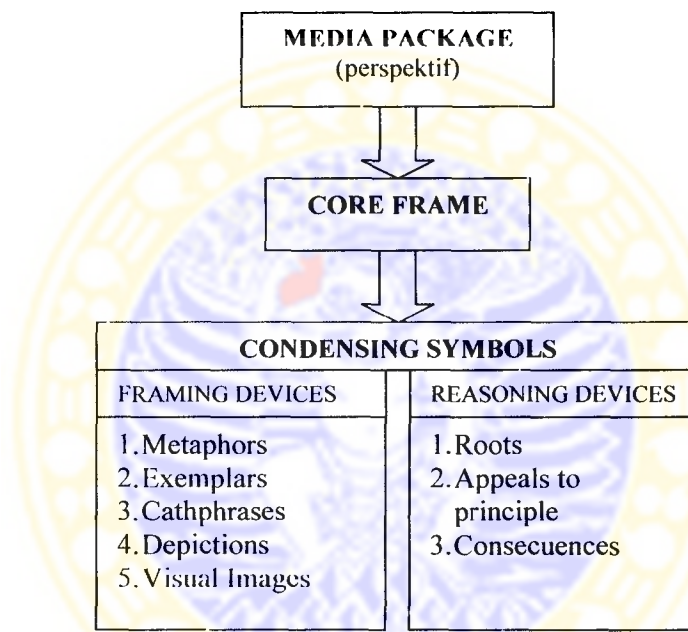
Reasoning devices (perangkat penalaran) terdiri dari *roots*, *appeals to principle*, dan *consequences*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Roots* merupakan analisis kausal atau sebab akibat yang mengedepankan hubungan yang melibatkan suatu obyek atau lebih yang dianggap sebagai sebab terjadinya hal yang lain. Adapun tujuannya memberikan alasan pembenar dalam penyimpulan.
- *Appeals to principle* adalah upaya memberikan alasan pembenar melalui logika dan prinsip moral untuk mengklaim kebenaran wacana yang dibangun. Dengan sifatnya yang apriori, dogmatis, simplistik, dan mono-

kausal kadang membuat khalayak tak berdaya untuk menyanggahnya. *Appeals to principle* adalah premis dasar, klaim-klaim moral.

- *Consequences* adalah efek spesifik atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.

Melalui kedelapan elemen yang membentuk *core frame* lewat *condensing symbol* tersebut, menurut Gamson, perspektif media (*media package*) dapat disimpulkan.



Model Analisis Framing

Sumber dimodifikasi dari Willam A. Gamson dan Andre Mondigliani, *Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach*, dalam *Journal of Sociology*, Vol. 95, No. 1, July 1989, hlm. 3. (Hotman M. Siahaan, 2001, hlm. 87)

III.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dipandang relevan, karena konsep yang dikaji adalah perspektif pers ketika membingkai pesan (*framing*) isu demokrati-

sasi dalam teks tajuk rencananya pada pemilihan presiden. Mengkaji suatu perspektif pers dalam teks tajuk rencana berarti ingin memahami sesuatu yang ada dalam pemikiran (opini) pekerja pers dalam mengkonstruksi dan memaknai isu demokratisasi. Kajian seperti ini memerlukan kedalaman materi hingga dapat mengetahui faktor-faktor dan kecenderungan apa saja yang secara representatif termuat dalam teks tajuk rencana pers yang menjadi sasaran penelitian. Untuk kajian seperti ini pendekatan kualitatif dipandang tepat diaplikasikan.

Prinsip penelitian kualitatif adalah mengamati sesuatu fakta atau data untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berada dibalik data dan fakta tersebut serta untuk melihat kecenderungan-kecenderungannya. Fakta atau data dalam penelitian ini adalah teks-teks tajuk rencana pers yang menjadi sasaran penelitian. Tetapi fokus penelitian ini adalah pada wacana demokratisasi yang secara representatif termuat dalam teks tajuk rencana sehingga secara eksplisit tidak akan menganalisis kepentingan atau ideologi yang berada di balik teks tersebut.

Selain itu, alasan memilih pendekatan kualitatif terkait pula dengan paradigma dalam memandang produk informasi pers tentang berbagai fakta peristiwa atau realitas. Mengkaji perspektif pers tentang isu demokratisasi pada pemilihan presiden berarti memerlukan suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana pers mengkonstruksi realitas, yaitu pemilihan presiden. Pada tataran inilah pendekatan kualitatif yang digunakan memiliki titik simpul dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dapat membantu menjelaskan bagaimana kecenderungan pers dalam mengkonstruksi dan memaknai isu demokratisasi pada pemilihan presiden.

Paradigma konstruktivisme memandang produk informasi pers, sesungguhnya merupakan hasil konstruksi pers atas berbagai fakta peristiwa atau realitas. Setiap individu, termasuk pekerja pers (jurnalis), dalam mengkonstruksi berbagai fakta peristiwa atau realitas selalu melibatkan pengalaman, preferensi, pendidikan, persepsi, dan lingkungan pergaulan atau relasi sosial tertentu. Ini berarti, faktor subyektivitas jurnalis dapat memengaruhi perspektif pers tentang isu demokratisasi pada pemilihan presiden.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Pilihan menggunakan penelitian deskriptif, karena data informasi yang dikaji adalah dalam bentuk deskripsi, yaitu dokumentasi teks tajuk rencana pers. Data deskriptif tersebut selanjutnya akan direkonstruksi dan diinterpretasikan untuk menghasilkan sebuah gambaran konstruksi realitas tentang subyek penelitian. Dengan demikian penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme ini tidak hendak menguji hipotesis melainkan merekonstruksi dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari subyek penelitian. Peneliti akan bertindak sebagai fasilitator pengkonstruksian realitas berdasar pada apa yang ada dalam teks tajuk rencana pers, kemudian peneliti ikut memberi makna terhadap realitas data yang dideskripsikan.

III.3. Sasaran Penelitian dan Unit Analisis

Sasaran penelitian ini adalah teks tajuk rencana *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* selama Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2004. Penggunaan data teks tajuk rencana edisi Mei-September 2004 disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pilpres, yang berlangsung dalam rentang waktu tersebut.

Tetapi data teks tajuk rencana yang menjadi unit analisis adalah semua item tajuk rencana yang mengangkat isu-isu demokratisasi sebagai topik ulasan sehubungan dengan fakta pilpres. Oleh karena itu, analisis *framing* yang dilakukan adalah terhadap semua teks tajuk rencana terbitan masing-masing surat kabar yang memuat isu demokratisasi. Dengan menggunakan semua item tajuk rencana sebagai unit analisis diharapkan bisa diperoleh gambaran perspektif (*media package*) masing-masing surat kabar secara utuh tentang isu demokratisasi dalam konteks pilpres.

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun semua data teks tajuk rencana keempat pers, yakni *Kompas*, *Suara Pemanduan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* edisi Mei – September 2004 atau selama rentang waktu pilpres.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yang ditujukan untuk memperoleh data teks tajuk rencana mana saja yang memuat isu demokratisasi pada pilpres. Observasi dilakukan dengan mengacu pada gagasan Hertog dan Mcleod tentang menetapkan fokus utama (*focal points*) yang membentuk *frames* berbeda atau *frame* yang paling mencolok dari berbagai kemungkinan *frame* yang digunakan oleh pers.²⁰³ Dalam hal ini, *focal points* isu demokratisasi adalah: tentang persamaan di depan hukum; tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan, tentang pelaksanaan pemilihan presiden, tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, dan tentang image calon presiden.²⁰⁴

²⁰³ Lihat Jennifer L. St. Pierre, *op.cit.*, hlm. 3.

²⁰⁴ Lihat uraian Bab II.1.

Sehubungan dengan itu, ditemukan data teks berikut ini. *Kompas* menyajikan 53 judul dalam rubrik Tajuk Rencana, *Suara Pembaruan* menyajikan 43 judul dalam rubrik Tajuk Rencana, *Republika* menyajikan 41 judul dalam rubrik Tajuk, dan *Jawa Pos* menyajikan 47 judul dalam rubrik Jati Diri. Seluruh data ini, kemudian diklasifikasi berdasarkan *focal points* isu demokrasi untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada model analisis Gamson.

III.5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan metode analisis *framing* model Gamson, untuk mengetahui tiga pokok penting.

Pertama, *Core Frame* (Bingkai Inti). Di sini akan diperhatikan ide atau pemikiran pers dalam teks tajuk rencananya ketika mengkonstruksi dan memaknai isu-isu demokratisasi, dan bagaimana posisi dan opini pers tentang isu-isu demokratisasi tersebut.

Kedua, *Framing Devices* (Perangkat Pembingkai). Memperhatikan elemen-elemen *framing devices* yang digunakan pers dalam teks tajuk rencananya untuk mendukung dan menekankan makna yang dikembangkan tentang isu-isu demokratisasi.

Ketiga, *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran). Memperhatikan elemen-elemen *reasoning devices* yang digunakan pers dalam teks tajuk rencana untuk menekankan kepada publik bahwa pemahaman dan sikap yang dikemukakan pers tersebut adalah logis dan benar.

Setelah itu, dikemukakan bagaimana pers membingkai isu demokratisasi dan memperlihatkan bagaimana posisi dan opini pers tentang isu demokrati-

sasi, serta menunjukkan perspektif pers (*media package*) atas isu-isu demokratisasi dengan merujuk pada pengertian demokrasi (Bab II.5). Dalam kaitan ini, dicoba mendiskusikan variasi perspektif pers dalam membingkai (*framing*) isu demokratisasi, serta merefleksikan hasil analisis dalam kaitannya dengan peran pers dalam demokratisasi di Indonesia.



B A B IV

ANALISIS FRAMING ISU DEMOKRATISASI DALAM TEKS TAJUK RENCANA PERS

IV.1. *Kompas*

1.1. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

Kompas mewadahi ulasan tentang kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan dengan mengkonstruksi dan memaknai fakta peristiwa pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Ulasan tersebut disajikan dalam lima item rubrik *Tajuk Rencana*, masing-masing berjudul:

“Rakyat agar Tahu Jati Diri Pasangan Capres” (edisi 21 Juni 2004); “Anda adalah Anda, “You Are What You Are” (edisi 28 Juni 2004); “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya” (edisi 6 Juli 2004); “Dalam 50 Hari ke Depan Semua Bisa Terjadi” (edisi 2 Agustus 2004); “Memilih Sesuai Hati Nurani” (edisi 20 September 2004).

1.1.1. Bingkai Inti: **Rakyat Bebas Menentukan Pilihan Sendiri Sesuai Akal Sehat dan Hati Nurani**

Kompas membangun bingkai inti, rakyat bebas menentukan pilihan sendiri sesuai akal sehat dan hati nurani. Konstruksi bingkai inti ini ditonjolkan *Kompas* dengan memaknai berbagai fakta peristiwa. *Kompas* memaknai fakta, rakyat mengikuti pemilihan presiden putaran pertama, sebagai pertanda kesadaran dan tanggung jawab politik rakyat serta sebagai suatu “*people’s wisdom*, kebijaksanaan rakyat” berlandaskan “akal sehat, hati bersih, sikap tulus”:

“Menjelang Senin, 5 Juli, kemarin, banyak warteg di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya tutup. Penjualnya berjejal naik bus pulang kampung. Mereka *nyoblos* memilih presiden dan wakil presiden di kampung

halamannya. Sekaligus mudik, namun juga menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab politik rakyat. Serba menggugat pertanyaan, siapa yang tidak sadar dan paham politik? Rakyat dan warga biasa atau elite dan warga yang lebih berpendidikan. Di mana-mana, apalagi di Indonesia, rakyat memiliki *people's wisdom*, kebijaksanaan rakyat. Akal sehat, hati bersih, sikap tulus”²⁰⁵

Dalam teks itu, *Kompas* mengklasifikasi rakyat pemilih atas dasar status sosial, yaitu “rakyat dan warga biasa”, dan “elite dan warga yang lebih berpendidikan”. *Kompas* mengesankan, kesadaran dan tanggung jawab politik mengikuti pilpres sebagai citra dari rakyat dan warga biasa. Rakyat dan warga biasa, dikesankan pula, mengikuti pilpres dengan akal sehat, hati bersih, sikap tulus tanpa mempersoalkan kekurangan pilpres sedangkan elite dan warga yang lebih berpendidikan justru dikesankan mempersoalkan kekurangan pelaksanaan pilpres. *Kompas* lebih lanjut menekankan hal ini, dengan mengemukakan:

“Demokrasi tidak mungkin sekali jadi. Dalam perkembangan dan pelaksanaannya masuk akal jika disertai kekurangan dan persoalan. Memilih atau tidak memilih adalah hak setiap warga. Tetapi jika kita ingat demokrasi tidak mungkin sekali jadi, bukankah implikasinya adalah lebih baik memilih. Dan itulah yang umumnya dilakukan oleh rakyat. Kita hargai sikap bijak rakyat itu.”²⁰⁶

Dengan demikian, *Kompas* menunjukkan arti bijaksana atau bersikap bijak adalah menggunakan hak dan tanggung jawab memilih. Sedang tidak menggunakan hak pilih dipandang merupakan sikap yang tidak atau kurang bijaksana. Sikap yang disebut terakhir ini, secara implisit diasosiasikan *Kompas* terdapat pada sebagian elit dan warga yang lebih berpendidikan.

²⁰⁵ *Kompas*, “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya”, Tajuk Rencana, edisi 6 Juli 2004.

²⁰⁶ *Ibid*. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga dikedepankan dalam *Kompas*, “Memilih Sesuai Hati Nurani”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004. “Tidak menggunakan hak pilih tidak melanggar hukum. Tetapi menggunakan hak pilih lebih baik karena berarti menggunakan hak kedaulatannya lima tahun sekali. Sebab pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan lima tahun sekali.”

Dalam menggunakan hak kedaulatannya menentukan pilihan sendiri dengan akal sehat dan hati nurani, *Kompas* menekankan, rakyat pemilih agar mengetahui dan mengenali jati diri capres-cawapres. Untuk dapat mengetahui dan mengenali jati diri capres-cawapres, tidak cukup sekadar menggunakan media massa sebagai referensi melainkan perlu mencari tahu siapa dan bagaimana capres-cawapres tersebut:

“Lagi pula memang untuk membangun citra sosok itulah daya efektif televisi. Sosok-sosok postur tubuh tampan mau tidak mau memperoleh nilai tambah, memperoleh kelebihan. Dan memang itulah di antaranya yang kita saksikan. Meskipun itulah kenyataannya, tentu saja, citra dan gaya yang sengaja dibangun lewat dan oleh media, bukanlah sosok yang sebenarnya. Sehebat-hebatnya citra dan gaya, belum mengungkap sosok pribadi dan kepribadiannya yang substansial, yang sesungguhnya. Perlu dilengkapi latar belakang, pendidikan, dan pengalamannya. Dikaji dan dikumpulkan bahan pengalaman berikut peristiwa-peristiwa yang berarti dan bermakna sepanjang pengalaman dan kariernya...”²⁰⁷

Dalam teks itu, *Kompas* secara khusus mengedepankan perihal sosok postur tubuh tampan, yang berasosiasi pada citra capres-cawapres laki-laki. Tetapi secara umum *Kompas* ingin menegaskan, keputusan untuk memilih capres-cawapres tertentu tidak patut didasarkan pada tampilan citra sosok capres-cawapres di media, terutama televisi, tetapi lebih pada pengenalan rakyat pemilih sendiri terhadap jati diri capres-cawapres tersebut. *Kompas* juga menyampaikan hal ini dengan menu-

lis:

“Seberapa jauh pemilih akan memberikan preferensi kepada “*you are what you are*”, apa adanya, jati diri yang *genuine*, jati diri yang asli. Sepertinya itulah yang akhirnya akan menjadi dasar keputusan”²⁰⁸

²⁰⁷ *Kompas*, “Rakyat agar Tahu Jati Diri Pasangan Capres”, Tajuk Rencana, edisi 21 Juni 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga dikedepankan dalam *Kompas*, “Anda adalah Anda, You Are What You Are”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004, “Setelah proses pembentukan sosok dan gaya yang dicitrakan lewat media, terutama media televisi, mau tidak mau, lama-lama orang mencari dan bertanya, mana sosok jati diri yang sebenarnya. Mana substansi yang bukan sekadar citra dan gaya. Mana ungkapan klasik, “*you are what you are*”, akhirnya Anda adalah Anda, Anda adalah apa adanya yang *genuine*, yang sesungguhnya.”

²⁰⁸ *Kompas*, “Anda adalah Anda, You Are What You Are”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004.

Selain itu, *Kompas* juga menegaskan arti penting menentukan pilihan sendiri dengan menyatakan rakyat pemilih tidak perlu harus terpengaruh kepada pemimpin, siapa pun itu. *Kompas* beranggapan, dalam kehidupan demokrasi perlu dan harus mewujudkan rakyat pemilih menentukan pilihan menurut pertimbangan sendiri:

“Lagi pula, lambat laun tetapi pasti, bukankah lebih sesuai dengan makna demokrasi, manakala kita, warga atau rakyat pemilih, semakin menggunakan hak kedaulatan kita menurut pertimbangan kita sendiri. Bukan sekadar ikut pendapat pemimpin karena pemimpin toh juga mengambil keputusan menurut pertimbangan dan beragam perasaan dan selernya.”²⁰⁹

Dalam teks itu, *Kompas* ingin menekankan, masing-masing rakyat pemilih berdaulat menentukan pilihan menurut pertimbangan sendiri. Arti penting kedaulatan rakyat menentukan pilihan juga dikedepankan *Kompas* ketika mengkonstruksi dan memaknai langkah politik capres Megawati. Ia menemui pimpinan parpol untuk memperoleh dukungan menghadapi pilpres putaran kedua. *Kompas* menganggap, dukungan parpol tetap berguna tetapi sesuai dengan perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia, rakyat pemilih justru sangat menentukan kemenangan capres:

“Hanya saja, semata-mata berorientasi kepada parpol dan tidak memedulikan rakyat yang mempunyai hak suara juga mustahil. Apalagi untuk pertama kalinya rakyat menentukan suara langsung. Rakyat pantas ingin menunjukkan bahwa mereka sangat menentukan. Mereka tidak mau diatur seperti zaman Orde Baru dulu dan lebih menggunakan hati nuraninya dalam menentukan pilihan. Keseimbangan untuk menjaga hubungan dengan rakyat dan parpol, inilah yang menarik dalam pemilu kali ini...Kita berharap persaingan itu berlangsung sehat. Bukan hanya para calon yang harus sportif, tetapi juga para tim sukses. Biarkan rakyat berwacana bebas, tanpa perlu harus dicurigai, mereka membawa kepentingan siapa. Apalagi dipaksa, apakah Anda ikut saya atau melawan saya.”²¹⁰

²⁰⁹ *Kompas*, “Memilih Sesuai Hati Nurani”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004.

²¹⁰ *Kompas*, “Dalam 50 Hari ke Depan Semua Bisa Terjadi”, Tajuk Rencana, edisi 2 Agustus 2004.

Dengan menampilkan teks itu, *Kompas* secara implisit mengesankan citra capres Megawati sebagai lebih mengutamakan berkoalisi dengan parpol daripada meraih simpati rakyat pemilih. Sementara, rakyat pemilih dikesankan tidak mau lagi diarahkan oleh parpol atau dipaksa oleh kekuasaan tertentu untuk memilih capres tertentu.

Kompas menekankan, semua pihak menciptakan suasana yang memberi kebebasan rakyat pemilih menentukan pilihan sendiri dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. *Kompas* juga secara eksplisit menegaskan arti penting rakyat pemilih bebas menentukan pilihan sendiri dengan akal sehat dan hati nurani:

“Hari ini, seorang diri, di dalam bilik pemilihan, kita masing-masing menjatuhkan pilihan sendiri-sendiri. Tentunya akal sehat dan hati nuranilah pedoman kita masing-masing. Selamat!”²¹¹

1.1.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

1.1.2.1. Metafora: Seperti Tarik Suara

Kompas menggunakan metafora “seperti tarik suara”²¹² untuk menggambarkan kegiatan capres-cawapres merupakan cara untuk memperoleh dukungan rakyat pemilih, seperti: mendatangi para kiai dan pesantren terkemuka, berkunjung ke pasar, rapat umum terbuka, dan tampil serta beriklan lewat media massa, terutama televisi. Dengan metafora tersebut, *Kompas* ingin mengesankan, kegiatan tersebut bukan merupakan jati diri capres-cawapres yang sesungguhnya.

Fakta itu, secara implisit, diperkuat *Kompas* dengan mengemukakan kalimat metaforis berikut ini:

“Akan memberantas KKN? Tahukah latar belakang, sumber, kolusi, serta praktik dari penyakit dan kejahatan sosial itu? Penegakan hukum yang tutup mata, tetapi nyalakan hati nurani serta konsisten dan konsekuen. Tetapi harus disertai pemahaman perihal latar belakang, tali temali, bawaan masa

²¹¹ *Kompas*, “Memilih Sesuai Hati Nurani”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004.

²¹² *Kompas*, “Anda adalah Anda, You Are What You Are”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004.

lampau termasuk struktur dan kultur feodal serta kebiasaan kolusi. Tanpa itu, omong kosong, pekerjaan panas-panas cirit ayam.”²¹³

Dengan kalimat metaforis itu, selain memperlihatkan bahwa untuk memberantas KKN bukan perkara mudah, *Kompas* sekaligus pula ingin mempengaruhi khlayak untuk bersikap kritis terhadap materi kampanye capres-cawapres. Dalam hal ini tentang akan memberantas KKN.

1.1.2.2. *Catchphrases: Rakyat Memiliki People's Wisdom*

Kompas menyajikan komponen *catchphrases* berupa jargon dan slogan untuk mengkonstruksi bingkai inti. Untuk menekankan arti penting rakyat ikut menentukan pilihan pada pilpres, *Kompas* menampilkan slogan “Di mana-mana, apalagi di Indonesia, rakyat memiliki *people's wisdom*, kebijaksanaan rakyat. Akal sehat, hati bersih, sikap tulus”. Slogan tersebut dilengkapi jargon politik “Lewat pemilihan presiden dan wapres secara langsung, kedaulatan lebih penuh dan lebih konkret berada di tangan rakyat.”²¹⁴ Slogan dan jargon tersebut, diarahkan untuk membangun kesan, rakyat dalam menentukan pilihan perlu dan harus mempertimbangkan sendiri sosok capres-cawapres yang akan dipilih.

Kompas juga memakai jargon dan slogan untuk menekankan arti penting mengubah paradigma kekuasaan dalam konteks demokrasi:

“Tegakkan hukum. Tunjuk pejabat yang memiliki komitmen, kemauan, dan keberanian. Juga amat diperlukan teladan. Tunjukkan oleh para pemimpin yang memegang kekuasaan adalah pelayanan dan pengabdian kepada rakyat

²¹³ *Kompas*, “Rakyat agar Tahu Jati Diri Pasangan Capres”, Tajuk Rencana, edisi 21 Juni 2004. Mengenai faktor penyebab KKN juga dikedepankan dalam *Kompas*, “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya”, Tajuk Rencana, edisi 6 Juli 2004.

²¹⁴ *Kompas*, “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya”, Tajuk Rencana, edisi 6 Juli 2004.

banyak. Kekuasaan bukan privilese, bukan keistimewaan.”²¹⁵

Jargon dan slogan itu dimaksudkan untuk memberi kesan, sudah saatnya para pemegang kekuasaan meninggalkan sikap mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebagai gantinya, ditekankan perlunya mengutamakan kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip kekuasaan demokrasi.

1.1.2.3. *Exemplars*: Jati Diri Capres-Cawapres yang Asli

Kompas memakai *exemplars* untuk menegaskan kepada rakyat pemilih arti penting memperhatikan sosok pribadi capres-cawapres. Penegasan ini disampaikan dengan menampilkan komponen *exemplars* berikut ini:

Mendekati hari berhentinya masa kampanye, Jumat 2 Juli, serta hari pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli, jika kita kumpul-kumpul, semakin sering dilontarkan saling pertanyaan: pasangan mana bakal menang, pasangan mana bakal unggul. Semakin mendekati hari-H, pertanyaan timbal balik itu semakin tidak jelas jawabannya. Bahkan *polling* pun memberi kesan stagnan dan jenuh. Tentu saya, yang namanya *surprise*, yang namanya kejutan masih bisa terjadi. Seberapa jauh pemilih akan memberikan preferensi kepada “*you are what you are*”, apa adanya, jati diri yang *genuine*, jati diri yang asli. Sepertinya itulah yang akhirnya akan menjadi dasar keputusan”²¹⁶

Dengan demikian, *Kompas* ingin menyakinkan pembacanya, sosok pribadi atau jati diri capres-cawapres yang asli patut lebih dipertimbangkan rakyat pemilih ketika hendak menentukan pilihan. Dalam kaitan ini, *Kompas* juga menampilkan sekilas perbandingan di negara-negara yang demokrasiya sudah berkembang:

“Di satu pihak kita mempersilahkan pasangan calon memperkenalkan dan mengampanyekan platformnya, visi, misi, dan programnya. Namun juga di negara-negara yang demokrasiya sudah lebih berkembang, yang meramai-

²¹⁵ *Kompas*, “Memilih Sesuai Hati Nurani”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004; bandingkan *Kompas*, “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya”, Tajuk Rencana, edisi 6 Juli 2004, “Kita hargai terutama dengan secara serius dan sungguh-sungguh meninggalkan faham kekuasaan feodal dan menghayati faham kekuasaan demokrasi. Menurut faham kekuasaan feodal, kekuasaan adalah privilese, hak istimewa. Maka sah dan wajar saja jika kekuasaan yang dipahami sebagai privilese disalahgunakan. Bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan sang penguasa dan lingkungannya.”

²¹⁶ *Kompas*, “Anda adalah Anda, You Are What You Are”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004.

kan dan menggairahkan kampanye presiden bukanlah visi, misi, dan program, tetapi sosok-sosok pribadi para calon. Sosok-sosok pribadi serta perjumpaan sosok-sosok pribadi itu dengan publik pemilihnya setiap kali merupakan klimaks kampanye.”²¹⁷

Komponen *exemplars* tersebut dilandasi anggapan, materi kampanye (platform, visi, misi, program) capres-cawapres tidak selalu identik dengan sosok pribadi atau jati diri capres-cawapres tersebut. Dengan kata lain, *Kompas* ingin mengesankan, materi kampanye boleh jadi dikemas sebagai suatu pernyataan tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan sosok pribadi capres-cawapres tersebut.

1.1.2.4. *Depictions*: Rakyat Tidak Mau Diatur-atur seperti zaman Orde Baru

Kompas memilih kata, istilah, dan kalimat yang menggiring khlayak (*depictions*) ke bingkai inti. *Kompas* menghadirkan kalimat, “mereka tidak mau diatur-atur seperti zaman Orde Baru dulu dan lebih menggunakan hati nuraninya dalam menentukan pilihan”, sebagai labelisasi/stigmatisasi pemerintahan “zaman Orde Baru” yang dianggap mencampuri kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan. Kalimat ini juga, “mereka tidak mau diatur-atur”, digunakan untuk mengesankan citra rakyat secara melebih-lebihkan (disfemistis) dan sekaligus untuk menekankan arti penting rakyat menentukan pilihan sendiri. Istilah “bersikap bijak” juga dipakai *Kompas* sebagai stigmatisasi terhadap rakyat yang menggunakan hak pilih.

Kata “berjejal” dipakai *Kompas* sebagai kata yang melebih-lebihkan fakta (disfemistis) ketika menggambarkan rakyat dan warga biasa yang pulang ke kampung halamannya untuk “nyoblos”. *Kompas* mengangkat akronim “warteg” untuk mendeskripsikan pekerjaan “rakyat dan warga biasa” di Jakarta. Kalimat eufemistis, “di mana-mana, apalagi di Indonesia, rakyat memiliki *people’s wisdom*, kebi-

²¹⁷ *Kompas*, “Rakyat agar Tahu Jati Diri Pasangan Capres”, Tajuk Rencana, edisi 21 Juni 2004.

jaksanaan rakyat. Akal sehat, hati bersih, sikap tulus”, digunakan *Kompas* untuk menunjukkan citra baik rakyat dan warga biasa mengikuti proses pemilihan presiden. Sekaligus, *Kompas* ingin menyatakan, rakyat dan warga biasa telah memperlihatkan arti penting menggunakan akal sehat (rasionalitas) dan hati nurani (bersih, tulus) dalam mengikuti proses pemilihan presiden.

1.1.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

1.1.3.1. *Roots*: Cara dan Sikap Capres Menghadapi Persoalan Rakyat

Kompas menghadirkan analisis kausal atau argumentasi pembenar (*roots*) untuk memperkuat bingkai inti. Berladaskan anggapan, jati diri capres-cawapres yang sesungguhnya dapat diperhatikan “dari cara dan sikapnya menghadapi kenyataan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh banyak orang”,²¹⁸ *Kompas* menggambarkan fakta permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat, dengan *roots* berikut ini:

“Polemik perihal penjualan tanker raksasa yang sedang dipesan oleh PT Pertamina di Korea Selatan kini menjadi jelas...dijual karena Pertamina menghadapi krisis keuangan...Pertamina tidak mungkin meminta bantuan keuangan dari negara karena keuangan negara sendiri sudah berat bebannya. Padahal, telah sejak beberapa waktu lalu, kita sudah menjadi *net importer* minyak. Produksi minyak dalam negeri tidak memadai lagi dibandingkan kebutuhannya. Kita harus tambahkan, sekarang ini bukan saja minyak yang harus diimpor. Juga beberapa komoditasnya lainnya, termasuk komoditas pangan, seperti gula dan beras...Tahu dan sadarkah para kandidat itu? Tentu mereka semua sadar dan tahu. Tetapi seberapa jauh, mendalam, dan komprehensif kesadaran dan pengetahuan mereka? Hal itu selama kampanye yang akan berakhir pada tanggal 1 Juli kurang tampak dan terasakan bagi kita, publik atau masyarakat luas.”²¹⁹

Kompas menunjukkan, kampanye capres-cawapres hampir tidak merespons masalah konkret yang dihadapi oleh banyak orang di negeri ini. Tetapi dengan mengedepankan kasus aktual, yakni penjualan tanker, *Kompas* mengesankan citra

²¹⁸ *Kompas*, “Anda adalah Anda, You Are What You Are”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004.

²¹⁹ *Ibid.*

pemerintahan Megawati sebagai gagal mengatasi persoalan ekonomi negeri ini dan secara implisit pula memberi kesan tentang jati diri capres Megawati yang kurang merespons persoalan rakyat banyak.

Kompas juga menampilkan analisis kausal (*roots*) faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan selama ini:

“Kita hargai terutama dengan secara serius dan sungguh-sungguh menanggalkan dan meninggalkan faham kekuasaan feodal dan menghayati faham kekuasaan demokrasi. Menurut faham kekuasaan feodal, kekuasaan adalah privilese, hak istimewa. Maka sah dan wajar saja jika kekuasaan yang dipahami sebagai privilese disalahgunakan. Bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan sang penguasa dan lingkungannya. Jika demokrasi akan tumbuh dan melaksanakan tugasnya, presiden terpilih dan elite serta lingkungan kekuasaannya harus mau dan mampu membuat lompatan menentukan itu. Kekuasaan dari privilese diubah serentak menjadi pelayanan dan pengabdian bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak. Kekuasaan disertai semangat dan penghayatan asketis.”²²⁰

Dengan pilihan argumentasi tersebut, *Kompas* berupaya mempengaruhi pembaca untuk mempersepsi, presiden terpilih harus menerapkan faham kekuasaan demokrasi.

1.1.3.2. *Appeals to principle*: Menggunakan Hak Pilih Lebih Baik

Kompas beranggapan, keputusan memilih atau tidak memilih bukan soal hukum melainkan lebih pada aspek menggunakan hak kedaulatan. Untuk membangun kesan ini, *Kompas* menghadirkan ajakan bermuatan pesan moral (*appeals to principle*):

“Tidak menggunakan hak pilih tidak melanggar hukum. Tetapi menggunakan hak pilih lebih baik karena berarti menggunakan hak kedaulatannya lima tahun sekali. Sebab pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan lima tahun sekali...Inilah kesempatan kita, warga dan rakyat pemegang kedaulatan, untuk pertama kali memilih pasangan presiden dan wakil

²²⁰ *Kompas*, “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya”, Tajuk Rencana, edisi 6 Juli 2004.

presiden secara langsung...”²²¹

Dengan menampilkan imbauan moral tersebut, *Kompas* menyatakan tidak setuju pada pendapat tidak memilih dan berupaya meyakinkan pembacanya untuk ikut menggunakan hak pilihnya.

1.2. Perspektif: Dalam Demokrasi Rakyat Bebas Menentukan Pilihan Sendiri

pilihan dengan membangun bingkai inti: rakyat bebas menentukan pilihan sendiri sesuai akal sehat dan hati nurani. Bingkai inti ini dikonstruksi *Kompas* dengan menekankan, arti penting kedaulatan rakyat dengan menggunakan hak pilih pada pilpres. Selain menyatakan menggunakan hak pilih merupakan wujud kesadaran dan tanggung jawab politik, *Kompas* juga menegaskan, hal tersebut sebagai pertanda bersikap bijak. Dalam kaitan ini, *Kompas* menolak pendapat untuk tidak menggunakan hak pilih pada pilpres.

Kompas menyatakan, penggunaan hak pilih pada pilpres ini berbeda dengan pemilu pada zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, dikesankan, penguasa mengatur apa yang menjadi pilihan rakyat sedang pada pilpres ini masing-masing rakyat lebih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri sesuai akal sehat dan hati nurani. *Kompas* juga menandakan, sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat, presiden terpilih harus menghayati faham kekuasaan demokrasi, yakni lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

²²¹ *Kompas*, “Memilih Sesuai Hati Nurani”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga dikedepankan dalam *Kompas*, “Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya”, Tajuk Rencana, edisi 6 Juli 2004, “Demokrasi tidak mungkin sekali jadi. Dalam perkembangan dan pelaksanaannya masuk akal jika disertai kekurangan dan persoalan. Memilih atau tidak memilih adalah hak setiap warga. Tetapi jika kita ingat demokrasi tidak mungkin sekali jadi, bukankah implikasinya adalah lebih baik memilih. Dan itulah yang umumnya dilakukan oleh rakyat. Kita hargai sikap bijak rakyat itu.”

Dalam menentukan pilihan sesuai akal sehat dan hati nurani, *Kompas* mengedepankan dua aspek yang perlu diperhatikan rakyat pemilih. Pertama, rakyat pemilih tidak perlu harus mengikuti keputusan pimpinan, melainkan mendasarkan pertimbangan pada keputusan sendiri. Kedua, rakyat pemilih tidak mendasarkan keputusan memilih capres-cawapres tertentu hanya pada citra capres-cawapres yang dikonstruksi media massa maupun materi kampanye yang disampaikan, tetapi patut lebih mempertimbangkan sosok pribadi capres-cawapres yang sesungguhnya atau jati dirinya. Jati diri dimaksud meliputi latar belakang, pendidikan, dan karier serta kinerja capres-cawapres selama ini.

Dengan demikian, konstruksi ulasan *Kompas* tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan berlandaskan pada gagasan bahwa dalam demokrasi rakyat berdaulat menentukan pilihan sendiri. Gagasan ini tentu beranjak dari pengertian demokrasi yang komprehensif, di mana kebebasan rakyat perlu dan harus diapresiasi dalam demokrasi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perspektif (*media package*) yang digunakan *Kompas* adalah demokratisasi.

1.3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Kompas menampilkan 40 item ulasan dalam rubrik Tajuk Rencana untuk mewadahi wacana tentang penyelenggaraan pemilihan presiden. Dalam ulasan tersebut *Kompas* mengkonstruksi dan memaknai berbagai fakta peristiwa pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama dan kedua. Pada pemilihan presiden putaran pertama, *Kompas* menampilkan 20 item rubrik, dengan judul:

“Koalisi Politik Kembali ke Tahun Lima Puluhan” (edisi 1 Mei 2004); “Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa” (edisi 5 Mei 2004); “Presiden Deklarasi Capres dan Wakilnya” (edisi 8 Mei 2004); “Pasangan Amien Rais-Siswono Pasangan Kompeten” (edisi 10 Mei 2004); “Pasangan Wiranto-Salahuddin dan Maknanya” (edisi 13 Mei 2004); “Pemilihan Presiden Berhasil, Pemerintah Pun Jalan” (17 Mei 2004); “Pemilihan Presiden agar Mencontoh Pemilihan Legislatif” (edisi 21 Mei 2004); “Lima Capres-Cawapres, Tim Sukses, dan Pola Kampanye” (edisi 25 Mei

2004); “Menurut Lasswell, Politik adalah “Siapa Dapat Apa”” (edisi 28 Mei 2004); “Capres-Cawapres Harus Men-cegah Potensi Konflik” (edisi 31 Mei 2004); “Sulitnya Memisahkan TNI dan Politik” (edisi 2 Juni 2004); “Terkaya dan Termiskin Capres-Cawapres Kita” (edisi 5 Juni 2004); “Capres Sebaiknya Apa Adanya atau Berada-ada” (edisi 7 Juni 2004); “Mengapa Pasar? Karena Banyak Warga Berkumpul” (edisi 4 Juni 2004); “Nasib Kampanye Presiden di Saat Kejuaraan Piala Eropa” (edisi 12 Juni 2004); “Kampanye Presiden Sepi atau Ganti Panggung” (edisi 15 Juni 2004); “Apa yang Bisa Kita Petik dari Debat Capres” (edisi 30 Juni 2004); “Debat Presiden di Panggung Terbuka” (edisi 2 Juli 2004); “Kampanye Damai, Demikian Pula Pemilihannya” (edisi 3 Juli 2004); “Hari Ini Kita Memutuskan untuk Lima Tahun” (edisi 5 Juli 2004).

Sedang pada pemilihan presiden putaran kedua, *Kompas* menghadirkan 20 item rubrik, terdiri dari:

“Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar” (edisi 7 Juli 2004); “Sudah Waktunya Belajar dari Kebajikan Rakyat” (edisi 8 Juli 2004); “Apa Arti Investasi Tertunda hingga Oktober” (edisi 9 Juli 2004); “Koalisi Baru Mulai Dipikir dan Digarap” (edisi 12 Juli 2004); “Benar Akan Berantas KKN? Belajarlah dari Hoegeng” (edisi 16 Juli 2004); “Perihal Koalisi Mesin Politik dan Rakyat Pemilih” (edisi 19 Juli 2004); “Implikasi Kombinasi Sistem Presidensial dan Parlementer” (edisi 23 Juli 2004); “Ledakan Bom di KPU dan Pemilihan Ulang di Al-Zaytun” (edisi 27 Juli 2004); “Yudhoyono dan Megawati Bersaing Ketat” (edisi 28 Juli 2004); “Amien-Siswono Benar-benar Siap Kalah” (edisi 30 Juli 2004); “Dua Capres Gagal Yakinkan Dunia Usaha” (edisi 3 Agustus 2004); “Memang Aneh, Tahu-tahu Klimaks 20 September” (edisi 5 Agustus 2004); “Pasangan Capres dan Tim Pemenangannya” (edisi 11 Agustus 2004); “Kompetisi Pilpres 20 September Semakin Seru” (edisi 19 Agustus 2004); “Silang Pendapat Mega dan SBY” (edisi 23 Agustus 2004); “Demokrasi dan Masyarakat Madani” (edisi 30 Agustus 2004); “Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha” (edisi 31 Agustus 2004); “Yang Lebih Tepat, Kita Membutuhkan Perbaikan” (edisi 9 September 2004); “Sekitar Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres” (edisi 16 September 2004); “Ketika Menang Menjadi Sebuah Keharusan” (edisi 18 September 2004).

1.3.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Suatu Proses untuk Memperbaiki Kehidupan Seluruh Bangsa

Kompas mengkonstruksi bingkai inti, pemilihan presiden suatu proses untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa, dengan lebih menekankan arti penting pelaksanaan pemilihan presiden sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan bangsa, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan teks berikut ini:

“Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul belakangan ini. Apakah pemilihan presiden yang akan berlangsung nanti bisa menghasilkan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa ataukah pemimpin yang berorientasi kepada kekuasaan semata. Sulit kita untuk bisa menjawabnya.

Hanya saja, dari apa yang muncul ke permukaan sekarang ini, rasanya kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Manuver elite politik lebih tertuju pada bagaimana merebut kekuasaan, bukan kepada menyelesaikan persoalan bangsa. Kalaupun itu terjadi, kita tidak boleh berkecil hati. Bagaimanapun demokrasi membutuhkan waktu. Kita baru saja masuk dalam demokrasi dan dibutuhkan waktu untuk konsolidasi sampai tercapainya demokrasi yang bekerja, *working democracy*.²²²

Dalam teks itu, *Kompas* juga menonjolkan, pemilihan presiden pada dasarnya ditujukan untuk memilih sosok pemimpin atau presiden yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Diungkapkan pula bahwa elite politik lebih berorientasi untuk merebut kekuasaan ketimbang terfokus untuk menyelesaikan persoalan bangsa.²²³ Namun kondisi tersebut dianggap *Kompas* sebagai konsekuensi dari fakta bahwa kita baru saja masuk dalam demokrasi, dan oleh karena itu hal tersebut dikesankan sebagai bagi dari konsolidasi dalam suatu rangkaian proses menuju tercapainya demokrasi yang bekerja (*working democracy*).

Lebih lanjut, *Kompas* menggarisbawahi, karakteristik *working democracy*, yakni: “bekerja untuk secara berkeadilan memperbaiki perikehidupan rakyat.”²²⁴ Hal ini ditonjolkan *Kompas* dalam kaitan dengan penekankan pada aspek memperbaiki persoalan bangsa.

Sehubungan dengan itu, *Kompas* memilih menekankan, perilaku elit politik tersebut patut dianggap sebagai bagian dari rangkaian proses berdemokrasi yang

²²² *Kompas*, “Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa”, Tajuk Rencana, edisi 5 Mei 2004.

²²³ Kesan sedemikian ini juga ditunjukkan *Kompas* ketika mengkonstruksi dan memaknai penyusunan koalisi partai dalam menentukan pasangan capres-cawapres, lihat *Kompas*, “Koalisi Politik Kembali ke Tahun Lima Puluhan”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004, “Ada kesan, seakan-akan, tujuan pokok adalah menjadi presiden, apa pun yang harus dipertaruhkan. Kesan “elite politik terjebak oportunisme kekuasaan”, bahkan bukan sekadar terjebak oportunisme kekuasaan, tetapi menjadikan kekuasaan segala-galanya!” Hal ini juga dikemukakan dalam *Kompas*, “Lima Capres-Cawapres, Tim Sukses, dan Pola Kampanye”, Tajuk Rencana, edisi 25 Mei 2004, “Cara capres dan cawapres tampil meraih posisi calon presiden dan pasangannya sejauh ini lebih memberikan kesan kuat perihal preferensi dan komitmen akan kekuasaan daripada perihal pengabdian, pelayanan, dan kepedulian terhadap rakyat banyak.”; *Kompas*, “Koalisi Baru Mulai Dipikir dan Digarap”, Tajuk Rencana, edisi 12 Juli 2004.

²²⁴ *Kompas*, “Koalisi Politik Kembali ke Tahun Lima Puluhan”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004.

harus dilalui bersama.²²⁵ Berlandaskan anggapan ini pula, *Kompas* memilih untuk selalu lebih menekankan pelaksanaan pemilu sebagai pembelajaran dalam proses berdemokrasi, sehingga secara spesifik tidak menyoroti kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden:

“Harus kita katakan bahwa karena baru pertama kali pemilu secara langsung diselenggarakan, maka banyak kelemahan dalam pelaksanaannya...Belajar dari pengalaman kedodorannya penanganan logistik pada pemilu legislatif lalu, KPU segera memperbaiki diri. Dan kita lihat sekarang ini, nyaris tidak lagi muncul persoalan logistik seperti pada pemilu 5 April lalu. Dengan kondisi seperti itu, kita tentunya pantas berharap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden bisa berjalan lancar dan aman...Pelaksanaan rangkaian pemilu ini bukanlah untuk siapa-siapa. Pelaksanaan pemilu yang baik dan lancar, serta mampu memberikan hasil yang optimal, pada akhirnya akan dinikmati oleh kita, seluruh bangsa.”²²⁶

Dalam teks itu, *Kompas* menekankan arti penting pemilu berlangsung secara demokratis, lancar, damai agar seluruh bangsa dapat menikmati hasil pemilu. Dengan kata lain, *Kompas* ingin menonjolkan, proses pelaksanaan pemilu yang baik

²²⁵ Anggapan ini juga ditekankan Kompas ketika mengkonstruksi dan memaknai berbagai fakta, lihat Kompas, “Koalisi Politik Kembali ke Tahun Lima Puluhan”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004, “Struktur dan kultur demokrasi kita dalam transisi ini jangan dibiarkan berkepanjangan. Lewat pemilihan umum jugalah cara yang demokratis untuk mengoreksi dan membuatnya sehat sehingga menghasilkan demokrasi yang bisa bekerja. Bekerja untuk secara berkeadilan memperbaiki perikehidupan rakyat.” Kompas, “Pemilihan Presiden Berhasil, Pemerintahan Pun Jalan”, Tajuk Rencana, edisi 17 Mei 2004, “Tetap saja masuk akal jika ada kekhawatiran atau pertanyaan. Namanya juga baru pertama kali terjadi. Namun, belajar dari pengalaman kita dan bangsa lain, kecuali sistem, sangat ikut menentukan adalah pribadi, karakter, dan kesantunan para figur pribadinya.”; Kompas, “Menurut Lasswell, Politik adalah “Siapa Dapat Apa””, Tajuk Rencana, edisi 28 Mei 2004, “Sementara itu, ya itulah politik. Bukan sekadar logika dan rasional, sekaligus juga rasa perasaan, kesantunan, dan orientasi. Sambil berjalan dan berpraksis, semakin kaya dan rumit saja pengalaman kita membangun kekuasaan yang berfalsafah, bersistem, dan berkerangka demokrasi. Perlu saling mengingatkan. Suatu keharusan untuk toleran dan positif terhadap kritik. Menerima kritik adalah bagian hakiki dari demokrasi.”; Kompas, “Implikasi Kombinasi Sistem Presidensial dan Parlementer”, Tajuk Rencana, edisi 23 Juli 2004, “Demokrasi kita adalah demokrasi dalam pembangunan. Perkembangan demokrasi sekali lagi ditunjukkan oleh pengalaman Indonesia selama tujuh tahun itu, tidak mungkin terlepas dari kenyataan dan kondisi masyarakat. Ada masa transisi, atau lebih tepat ada masa transformasi, yang harus diarahkan dan dijalani secara benar.”

²²⁶ Kompas, “Hari Ini Kita Memutuskan untuk Lima Tahun”, Tajuk Rencana, edisi 5 Juli 2004. Lihat juga Kompas “Sudah Waktunya Belajar dari Kebajikan Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 8 Juli 2004, “Namun, juga dengan memahami dan mempertimbangkan rumitnya sistem dan teknik penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004, berguna kiranya jika penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum, juga membuka diri untuk mengambil pengalaman dan belajar.”

dan lancar memberikan kontribusi signifikan bagi upaya memperbaiki persoalan bangsa.²²⁷ Hal ini dengan jelas juga dapat dilihat dalam kutipan teks berikut ini:

“Lagi pula, inilah salah satu perbedaannya yang prinsipil dan substansial bahwa dalam demokrasi bukanlah hasil yang penting, melainkan juga cara dan prosesnya. Hasil alias kekuasaan sebagai hasil berkaitan erat bahkan identik dengan cara dan prosesnya. Cara dan proses ikut memberikan secara substansial, nilai, dan kualitas kepada hasil yakni sosok kekuasaan.”²²⁸

Dengan menghadirkan teks itu, *Kompas* menegaskan, pemilihan presiden sebagai suatu tahapan proses untuk menyelesaikan persoalan bangsa, perlu dan harus berjalan demokratis, lancar, dan damai.²²⁹ Karena dengan demikian, sosok kekuasaan yang dihasilkan pemilu akan dapat lebih efektif memimpin bangsa ini untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa:

“Yang namanya presiden boleh datang silih berganti. Namun arah tahapan untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa harus dirumuskan dan dijadikan pegangan oleh siapa pun yang kelak memimpin bangsa ini.”²³⁰

²²⁷ Hal ini juga selalu ditekankan Kompas ketika mengkonstruksi dan memaknai berbagai fakta terkait dengan pelaksanaan pemilu, secara khusus tentang kampanye oleh capres-cawapres, lihat *Kompas*, “Pemilihan Presiden Berhasil, Pemerintah Pun Jalan”, Tajuk Rencana, edisi 17 Mei 2004; *Kompas*, “Pemilihan Presiden agar Mencontoh Pemilihan Legislatif”, Tajuk Rencana, edisi 21 Mei 2004; *Kompas*, “Capres-Cawapres Harus Mencegah Potensi Konflik”, Tajuk Rencana, edisi 31 Mei 2004; *Kompas*, “Mengapa Pasar? Karena Banyak Warga Berkumpul”, Tajuk Rencana, edisi 4 Juni 2004; *Kompas*, “Nasib Kampanye Presiden di Saat Kejuaraan Piala Eropa”, Tajuk Rencana, edisi 12 Juni 2004; *Kompas*, “Kampanye Presiden Sepi atau Ganti Panggung”, Tajuk Rencana, edisi 15 Juni 2004; *Kompas*, “Kampanye Damai, Demikian Pula Pemilihannya”, Tajuk Rencana, edisi 3 Juli 2004; *Kompas*, “Sudah Waktunya Belajar dari Kebajikan Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 8 Juli 2004; *Kompas*, “Mengambil Langkah Terbaik dari Putusan MK”, Tajuk Rencana, edisi 26 Juli 2004; *Kompas*, “Ledakan Bom di KPU dan Pemilihan Ulang di Al-Zaitun”, Tajuk Rencana, edisi 27 Juli 2004; *Kompas*, “Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha”, Tajuk Rencana, edisi 31 Agustus 2004.

²²⁸ *Kompas*, “Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha”, Tajuk Rencana, edisi 31 Agustus 2004.

²²⁹ Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditekankan dalam *Kompas*, “Pemilihan Presiden agar Mencontoh Pemilihan Legislatif”, Tajuk Rencana, edisi 21 Mei 2004, “...cara memperoleh kekuasaan haruslah bersih, jujur, fair, bebas kekerasan, jauh dari cara tidak demokratis, tidak santun, tidak beradab, dan berbudaya.”; *Kompas*, “Ketika Menang Menjadi Sebuah Keharusan”, Tajuk Rencana, edisi 18 September 2004, “Kita ingin mengajak seluruh masyarakat untuk membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi yang meski bersaing, tidak harus menjelek-jelekkan orang lain.”

²³⁰ *Kompas*, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004.

Dengan menyajikan teks itu, *Kompas* ingin menegaskan, pemilihan presiden merupakan suatu tahapan untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa, yakni dengan memilih presiden.²³¹ Sehubungan dengan ini, *Kompas* melihat pasangan capres-cawapres cenderung menyampaikan pernyataan normatif, sekadar wacana, retorika, dan janji. Isinya pun realtif sama, seperti memberantas KKN, memperbaiki ekonomi, mendorong investasi guna membuka lapangan kerja agar bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Capres-cawapres dinilai masih belum mengemukakan konsep program yang konkret tentang bagaimana caranya dan apa jaminan, janji dan agenda itu dilaksanakan.²³² *Kompas* menunjukkan, persoalan yang dihadapi bangsa ini cukup beragam dan kompleks:

“Persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa sangatlah terang benderang. Kita menghadapi masalah dengan korupsi, inefisiensi, dan juga kemiskinan. Kita dibebani juga oleh 40 juta warga yang menganggur...Dari persoalan

²³¹ *Kompas* juga selalu menekankan arti penting pemilu berlangsung secara demokratis dan damai untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memperbaiki persoalan bangsa, lihat *Kompas*, “Pemilihan Presiden agar Mencontoh Pemilihan Legislatif”, Tajuk Rencana, edisi 21 Mei 2004, “Pemilu legislatif 5 April disertai berbagai kekurangan dan masalah, namun sah dan berlangsung damai. Diharapkan masalah yang menyertai pemilu presiden dan wakil presiden sedikit lebih baik, tanpa kekerasan.”; *Kompas*, “Lima Capres-Cawapres, Tim Sukses, dan Pola Kampanye”, Tajuk Rencana, edisi 25 Mei 2004, “Memang tidak bisa lain. Sebab, posisi kekuasaanlah yang diperebutkan secara demokratis lewat pemilihan presiden dan wakil presiden.”; Ketika mengkonstruksi dan memaknai fakta pertemuan kelima pasangan capres dengan Mahkamah Konstitusi, dalam Tajuk Rencana, edisi 31 Mei 2004, “Capres-Cawapres Harus Mencegah Potensi Konflik”, *Kompas* menonjolkan, “..Mereka setuju menajuhi kompetisi dengan kekerasan...Kita mendukung pemahaman dan sikap pasangan capres dan cawapres yang berkampanye tanpa saling menjelekan, tanpa membangkitkan dan membakar emosi massa, mencegah dan jika toh terjadi persoalan pemilu, sepakat diselesaikan lewat hukum.”

²³² *Kompas* kerap mengedepankan hal ini, lihat *Kompas*, “Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa”, Tajuk Rencana, edisi 5 Mei 2004; *Kompas*, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004; *Kompas*, “Benar Akan Berantas KKN? Belajarlah dari Hoegeng”, Tajuk Rencana, edisi 16 Juli 2004; *Kompas*, “Yang Lebih Tepat, Kita Membutuhkan Perbaikan”, Tajuk Rencana, edisi 9 September 2004. Pandangan bersifat normatif dan terasa begitu ideal dinilai *Kompas* juga berlangsung pada acara debat maupun dialog capres-cawapres. Kendati demikian, *Kompas* memaknai acara debat dan dialog tersebut bermanfaat bagi pembangunan demokrasi, lihat *Kompas*, “Apa yang Bisa Kita Petik dari Debat Capres”, Tajuk Rencana, edisi 30 Juni 2004; *Kompas*, “Debat Presiden di Panggung Terbuka”, Tajuk Rencana, edisi 2 Juli 2004; *Kompas*, “Dua Capres Gagal Yakinkan Dunia Usaha””, Tajuk Rencana, edisi 3 Agustus 2004;; *Kompas*, “Sekitar Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres”, Tajuk Rencana, edisi 16 Septemt . r 2004.

itu, maka persoalan ekonomi yang harus mendapat prioritas untuk kita selesaikan.”²³³

Dengan menampilkan teks itu, *Kompas* juga mengesankan citra pemerintahan presiden Megawati yang masih belum mampu menyelesaikan persoalan bangsa,²³⁴ dan dianggap dianggap tidak menunjukkan empati kepada rakyat serta lebih berorientasi pada kekuasaan.²³⁵ Dalam kaitan ini, *Kompas* juga menonjolkan citra sosok pemimpin atau presiden terpilih pada pemilu signifikan memengaruhi bagi upaya memperbaiki kehidupan seluruh bangsa:

“Tentu saja, masalah presiden dan wakil presiden bukan sekadar masalah sosok, citra, dan gaya selebriti. Akhirnya adalah masalah kepemimpinan, masalah karakter, masalah substansi...Rakyat pemilih semakin ingin tahu dan ingin tahu dan dibuat yakin bahwa pilihannya akan benar-benar jatuh ke pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pokok kehidupan sehari-hari dalam konteks dan interaksi dengan persoalan-persoalan

²³³ *Kompas*, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditekankan dalam *Kompas*, “Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa”, Tajuk Rencana, edisi 5 Mei 2004, “...karena kalau demokrasi itu sungguh sudah bekerja, maka pijakan para elite harus bertumpu pada apa yang diinginkan oleh rakyat. Dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan banyak lembaga, jelas yang paling banyak diinginkan rakyat adalah perbaikan kondisi ekonomi. Persentase keinginan adalah perbaikan ekonomi begitu tinggi, jauh di atas permasalahan yang selama ini menjadi pembicaraan elite politik. Entah itu yang namanya pemberantasan KKN atau persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, ternyata di mata rakyat kalah penting daripada persoalan perbaikan kondisi perekonomian rakyat.”

²³⁴ Citra kegagalan Megawati juga ditampilkan *Kompas* pada pemilu putaran kedua seperti dapat dilihat dalam *Kompas*, “Pasangan Capres dan Tim Pemenangannya”, Tajuk Rencana, edisi 11 Agustus 2004, “...simaklah isi dan pesan media. Setiap hari dilaporkan peristiwa-peristiwa dan masalah negatif yang terjadi dalam masyarakat menimpa warga dan pejabat. Meskipun juga umumnya tidak dimaksudkan secara eksplisit sebagai bahan atau efek kampanye merugikan, mau tidak mau, sasaran dan sekurang-kurangnya asosiasi dari kejadian dan persoalan-persoalan negatif itu adalah pasangan yang sedang menjabat.”

²³⁵ Citra Megawati juga dikesankan *Kompas* sebagai kurang berempati dan elit politik pemerintahannya lebih mementingkan interes pribadi. Hal ini dengan jelas ditunjukkan *Kompas* dalam Tajuk Rencana, edisi 5 Mei 2004, “Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa”, dengan mengatakan: “Kenyataannya, persoalan seperti pemberhentian karyawan Hotel Indonesia tidak memancing empati. Itulah yang selama ini kita katakan adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan rakyat dan apa yang dipikirkan elite politik. Apa yang dilakukan elite politik berorientasi kepada kekuasaan, sementara apa yang dibicarakan rakyat adalah bagaimana kita keluar dari kesulitan ekonomi.” Juga dalam Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, dengan menyebut: “Sebenarnya kita bisa memacu pertumbuhan dengan lebih tinggi lagi...apalagi kalau kita melihat perilaku politisi. Mereka lebih mementingkan interes pribadi sehingga bukannya mereka ikut memberantas korupsi, tetapi justru ikut terjerumus dalam tindakan yang merugikan negara.”

aktual masyarakat, bangsa dan negara. Juga dalam interaksinya dengan dunia sekitar, dan dunia global.”²³⁶

Dalam teks itu, *Kompas* menekankan, rakyat pemilih perlu dan harus memilih sosok pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa.²³⁷ Tetapi dengan menampilkan teks itu, secara implisit, *Kompas* juga membangun kesan tentang perlunya memilih pemimpin yang lebih mampu menyelesaikan persoalan bangsa.

Lebih lanjut, *Kompas* juga membangun citra tertentu pada pasangan capres-cawapres, kecuali pasangan Hamzah-Agum. Pasangan ini tidak mendapat sorotan yang spesifik. Citra pasangan Megawati-Hasyim dibangun dengan menonjolkan ketidakmampuan Megawati menyelesaikan persoalan bangsa.²³⁸ Pasangan Wiranto-Salahuddin dikesankan menghadapi sorotan publik terlebih menyangkut dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Wiranto ketika masih menjabat sebagai Panglima ABRI. Dalam hubungan ini, Salahuddin pun dikesankan menjadi tampil

²³⁶ *Kompas*, “Perihal Koalisi Mesin Politik dan Rakyat Pemilih”, Tajuk Rencana, edisi 19 Juli 2004. *Kompas* juga menegaskan arti penting sosok presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa dalam Tajuk Rencana, edisi 5 Juli 2004, “Hari Ini Kita Memutuskan untuk Lima Tahun”, dengan mengatakan: “Hari ini merupakan hari penentuan bagi kita untuk merabangun demokrasi dan membawa bangsa dan negara ini meraih masa depan yang lebih baik. Kita harus menemukan pemimpin yang terbaik. Putusan kita hari ini akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.”; Penekanan serupa juga ditampilkan dalam *Kompas*, “Apa Arti Inventasi Tertunda hingga Oktober”, Tajuk Rencana, edisi 9 Juli 2004, “Ternyata pemilihan umum yang sedang kita laksanakan menjadi alasan bagi investor untuk menunda keputusannya. Mereka ingin melihat siapa presiden yang akan terpilih dan bagaimana pemerintahan yang akan terbentuk.”

²³⁷ Hal ini, secara eksplisit, juga dikemukakan *Kompas* dalam Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, dengan menekankan, “Yang namanya presiden boleh datang silih berganti. Namun arah tahapan untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa harus dirumuskan dan dijadikan pegangan oleh siapa pun yang kelak memimpin bangsa ini.”

²³⁸ *Kompas*, “Pasangan Capres dan Tim Pemenangannya”, Tajuk Rencana, edisi 11 Agustus 2004, “...simaklah isi dan pesan media. Setiap hari dilaporkan peristiwa-peristiwa dan masalah negatif yang terjadi dalam masyarakat menimpa warga dan pejabat. Meskipun juga umumnya tidak dimaksudkan secara eksplisit sebagai bahan atau efek kampanye merugikan, mau tidak mau, sasaran dan sekurang-kurangnya asosiasi dari kejadian dan persoalan-persoalan negatif itu adalah pasangan yang sedang menjabat.” *Kompas* juga mengesankan Megawati sebagai pimpinan yang feodal, “Presiden Deklarasi Capres dan Wakilnya”, Tajuk Rencana, edisi 8 Mei 2004.

membela Wiranto.²³⁹ Pasangan Amien Rais-Siswono dikesankan sebagai pasangan yang mempunyai kompetensi yang saling melengkapi.²⁴⁰ Pasangan Yudhoyono-Kalla dikesankan sebagai memiliki sosok apa adanya dan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, seperti rakyat pemilih independen, media massa, dan para intelektual.²⁴¹

Kompas tampak memilih lebih mengesankan citra negatif pada capres Megawati dan Wiranto, sedang citra positif dilekatkan pada capres Yudhoyono dan juga capres Amien. Tetapi terhadap capres tersebut, *Kompas* lebih menonjolkan citra positif capres Yudhoyono. Dengan demikian, secara implisit, *Kompas* membangun kesan perlunya pergantian presiden dan sosok pengganti

²³⁹ *Kompas*, "Pasangan Wiranto-Salahuddin dan Maknanya", Tajuk Rencana, edisi 13 Mei 2004, "Pasangan Wiranto-Salahuddin dan Maknanya", "...Dugaan pelanggaran HAM dan isu keterlibatan mantan Panglima ABRI dalam pelanggaran itu masih terus mengajarnya. Bahkan muncul lagi hal itu lewat pemberitaan kantor berita AP hanya beberapa hari menjelang capres dari partai Golkar itu mendeklarasikan secara resmi pasangannya untuk pemilihan presiden dan wapres 5 Juli nanti. Salahuddin Wahid (Gus Solah) bukan saja Wakil Ketua Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998. Dalam sambutan deklarasinya, ia mengajak bangsa Indonesia menanggalkan rasa dendam, mengambil pelajaran dari masa lalu, dan memusatkan perhatian ke masa depan. Sikap dan pernyataan itu berikut rekam pengalamannya memperkuat posisi Wiranto dalam permasalahan HAM."

²⁴⁰ *Kompas*, "Pasangan Amien Rais-Siswono Pasangan Kompeten", Tajuk Rencana, edisi 10 Mei 2004. *Kompas* juga menyebut pasangan Amien Rais-Siswono sebagai memiliki komitmen terhadap demokrasi dalam konteks reformasi, lihat *Kompas*, "Amien-Siswono Benar-benar Siap Kalah", Tajuk Rencana, edisi 30 Juli 2004.

²⁴¹ Hal ini ditunjukkan *Kompas* dalam Tajuk Rencana, edisi 28 Juli 2004, "Yudhoyono dan Megawati Bersaing Ketat", "...pilpres putaran pertama ditandai oleh fenomena baru, yakni semakin banyaknya jumlah rakyat pemilih yang - sebutlah independen. Pasangan SBY-Yusuf Kalla-lah yang memperoleh keuntungan dari gejala baru itu...Dari semua pasangan, kiranya SBY-lah yang paling memenuhi syarat teknologi informasi dalam reproduksi dan sosialisasi sosok, citra, dan gaya."; Juga dalam *Kompas*, "Pasangan Capres dan Tim Pemenangannya", Tajuk Rencana, edisi 11 Agustus 2004, "...Meskipun dalam pola dan proses itu juga sampai sebulan menjelang hari-H 20 September, pasangan Yudhoyono-Yusuf Kalla tetap unggul. Namun kompetisi toh tetap dan terus berlangsung."; "Kompetisi Pilpres 20 September Semakin Seru", Tajuk Rencana, edisi 19 Agustus 2004, "Posisi kompetitif pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla masih tetap kuat dan berpeluang unggul. Apalagi sejauh ini memang itulah kekhasan posisi pasangan tersebut..." Hal ini secara implisit juga dikemukakan *Kompas* ketika mengkonstruksi fakta pengumuman kekayaan capres-cawapres, lihat *Kompas*, "Terkaya dan Termiskin Capres-Cawapres Kita", Tajuk Rencana, edisi 5 Juni 2004.

yang dianggap *Kompas* lebih tepat adalah capres Yudhoyono, karena ia dikesankan lebih memiliki citra positif.²⁴²

1.3.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

1.3.2.1. Metafora: Jalan yang Panjang

Kompas menggunakan metafora untuk membangun bingkai inti. “Jalan yang panjang”²⁴³ dipakai *Kompas* sebagai metafora untuk menggambarkan demokrasi merupakan proses, serba ada rintangan, dan tidak sekali jadi. Dengan metafora ini, *Kompas* juga ingin membangun kesan, berbagai kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan presiden patut dianggap sebagai proses membangun demokrasi. Penggunaan metafora ini selaras dengan maksud *Kompas* untuk mencegah kecenderungan para elite saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab, yang digambarkan secara metaforis: “Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan”.²⁴⁴

Kompas juga menampilkan kisah pewayangan Jawa menjadi judul tajuk, yakni “Perang Baratayudha” sebagai metafora untuk menekankan arti penting

²⁴² Citra positif Yudhoyono dan kesan citra negatif Megawati juga ditampilkan *Kompas* ketika mengkonstruksi dan memaknai dialog penajaman visi, misi, dan program pasangan capres-cawapres, dengan menonjolkan: “Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla kita nilai lebih mampu mengeskpresikan pandangannya, termasuk dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari panelis. Namun, secara keseluruhan kita sudah mengenal pemikiran keduanya. Demikian pula dengan capres Megawati Soekarnoputri. Yang cukup mengejutkan justru penampilan dari cawapres Hasyim Muzadi. Ternyata pengalaman politik yang ia miliki cukup kuat...” *Kompas*, “Sekitar Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres”, Tajuk Rencana, edisi 16 September 2004. Kesan serupa, secara implisit, juga ditunjukkan *Kompas* saat mengkonstruksi silang pendapat SBY dengan Megawati tentang posisi dan peran partai politik, dalam *Kompas*, “Silang Pendapat Mega dan SBY”, Tajuk Rencana, edisi 23 Agustus 2004, “Silang pendapat berlangsung sekitar tanggapan kurang lengkap perihal pernyataan capres SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tentang posisi dan peran partai politik. Oleh Megawati Soekarnoputri, pernyataan SBY ditafsirkan seakan-akan SBY menganggap posisi dan peran partai tidak penting. Padahal yang ia maksudkan, di samping partai, jangan pula diabaikan peran pemilihan rakyat yang memilih langsung pasangan capres-cawapres.” Citra positif Yudhoyono juga dikesankan *Kompas* saat memaknai kesepakatan yang menyertai dukungan Partai Keadilan Sejahtera terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, lihat *Kompas*, “Demokrasi dan Masyarakat Madani”, Tajuk Rencana, edisi 30 Agustus 2004.

²⁴³ *Kompas*, “Preseden Deklarasi Capres dan Wakilnya”, Tajuk Rencana, edisi 8 Mei 2004.

²⁴⁴ *Kompas*, “Sudah Waktunya Belajar dari Kebajikan Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 8 Juli 2004.

pemilihan presiden berlangsung damai tanpa kekerasan. Selengkapnya *Kompas* menulis:

“Seram amat judul tajuk itu pemilihan presiden bukan perang Baratayudha. Sengaja dipilih perbandingan yang seram untuk membangkitkan perhatian. Pilpres justru kebalikan pertandingan Perang Baratayudha. Perang Kurawa lawan Pandawa perang habis-habisan. Yang kalah habis, yang menang unggul. Bukan untuk satu atau dua periode, 5 atau 10 tahun, tetap untuk selamanya. Maka pertandingan pun mati-matian.”²⁴⁵

Metafora itu juga dipakai *Kompas* untuk lebih menonjolkan kepada semua pihak, terlebih kepada kedua pasangan capres pada putaran kedua, untuk menghindari persaingan dengan kekerasan yang dapat menambah persoalan ke masa depan.

Kompas juga menghadirkan metafora “tidak mau membeli kucing dalam karung”²⁴⁶ untuk menggambarkan keinginan rakyat pemilih memperoleh konsep program yang konkret dari pasangan capres-cawapres. Konsep program tersebut adalah menyangkut berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini yang digambarkan *Kompas* dengan metafora “terang benderang”.

1.3.2.2. *Catchphrases*: Demokrasi Dalam Pembangunan

Komponen *catchphrases* berupa jargon dan slogan dipakai *Kompas* untuk menyusun bingkai inti sekaligus untuk mengarahkan pembaca pada semangat tertentu. “Demokrasi kita adalah demokrasi dalam pembangunan”, “bagaimanapun demokrasi membutuhkan waktu” digunakan *Kompas* sebagai jargon politik untuk menonjolkan pelaksanaan pemilihan presiden merupakan suatu proses berdemokrasi. Dengan jargon politik ini, *Kompas* juga ingin membangun kesan perlunya

²⁴⁵ *Kompas*, “Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha”, Tajuk Rencana, edisi 31 Agustus 2004.

²⁴⁶ *Kompas*, “Menurut Lasswell, Politik adalah “Siapa Dapat Apa””, Tajuk Rencana, edisi 28 Mei 2004.

semua pihak untuk memahami kelemahan pelaksanaan pemilu termasuk perilaku elit politik sebagai bagian dari proses “membangun demokrasi”.

Selaras dengan jargon politik itu, *Kompas* juga menghadirkan slogan untuk menekankan arah yang hendak dicapai setelah pemilu, misalnya “menyelesaikan persoalan bangsa”, “demokrasi yang bekerja”, “bekerja untuk secara berkeadilan memperbaiki perikehidupan rakyat”, “Kita harus mampu membuat demokrasi itu memang bermanfaat bagi perbaikan kehidupan seluruh rakyat”. Dengan slogan ini, *Kompas* ingin membangun kesan, tujuan pemilihan presiden adalah untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat.

Dengan memilih menggunakan jargon dan slogan itu, *Kompas* juga ingin menegaskan pelaksanaan pemilihan presiden merupakan proses untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat. Hal ini juga ditekankan *Kompas* dengan memakai komponen *catchphrases*, seperti dalam kalimat berikut:

“Pelaksanaan rangkaian pemilu ini bukanlah untuk siapa-siapa. Pelaksanaan pemilu yang baik dan lancar, serta mampu memberikan hasil yang optimal, pada akhirnya akan dinikmati oleh kita, seluruh bangsa”

Dengan menyajikan komponen *catchphrases* itu, *Kompas* ingin mengarahkan pembaca untuk menyikapi pelaksanaan pemilu dengan mengutamakan kepentingan “seluruh bangsa” daripada kepentingan kelompok maupun partai tertentu. Semangat untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa juga ditekankan *Kompas* dengan jargon sloganistis:

“Hari ini merupakan hari penentuan bagi kita untuk membangun demokrasi dan membawa bangsa dan negara ini meraih masa depan yang lebih baik. Kita harus menemukan pemimpin yang terbaik. Putusan kita hari ini akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.”²⁴⁷

²⁴⁷ *Kompas*, “Hari Ini Kita Memutuskan untuk Lima Tahun”, Tajuk Rencana, edisi 5 Juli 2004.

Selain itu, *Kompas* juga menghadirkan slogan yang secara implisit mengesankan, Megawati sebagai “pemimpin negeri” belum memberikan keteladanan:

“Rakyat ini harus diberi pemahaman yang benar tentang kondisi negara ini. Mereka akan bisa memahami dan ikut serta membangun kembali negeri ini sepanjang diberikan keteladanan yang benar oleh pemimpin negeri ini.”²⁴⁸

1.3.2.3. *Exemplars: Pengalaman Indonesia Tujuh Tahun Terakhir*

Kompas memanfaatkan komponen *exemplars* untuk membangun bingkai inti. *Kompas* menampilkan pengalaman Indonesia selama tujuh tahun terakhir sebagai ilustrasi untuk menekankan pemilihan presiden kali ini merupakan rangkaian proses yang membangun demokrasi:

“Demokrasi kita adalah demokrasi dalam pembangunan. Perkembangan demokrasi sekali lagi ditunjukkan oleh pengalaman Indonesia selama tujuh tahun itu, tidak mungkin terlepas dari kenyataan dan kondisi masyarakat. Ada masa transisi, atau lebih tepat ada masa transformasi, yang harus diarahkan dan dijalani secara benar.”²⁴⁹

Dengan menampilkan ilustrasi tersebut, secara implisit, *Kompas* bermaksud mengarahkan pembaca untuk mempersepsi, pemilihan presiden kali ini masih merupakan pembelajaran yang harus diarahkan dan dijalani secara benar.

Kompas juga menekankan, hasil pemilihan presiden sangat menentukan bagi upaya memperbaiki ekonomi, dengan menggunakan respon investor sebagai ilustrasi:

“Ternyata pemilihan umum yang sedang kita laksanakan menjadi alasan bagi investor untuk menunda keputusannya. Mereka ingin melihat siapa presiden yang akan terpilih dan bagaimana pemerintahan yang akan terbentuk.”²⁵⁰

²⁴⁸ *Kompas*, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004.

²⁴⁹ *Kompas*, “Implikasi Kombinasi Sistem Presidensial dan Parlementer”, Tajuk Rencana, edisi 23 Juli 2004. Ilustrasi serupa, dengan kalimat berbeda, juga dikemukakan dalam *Kompas*, “Pemilihan Presiden Berhasil, Pemerintahan Pun Jalan”, Tajuk Rencana, edisi 17 Mei 2004, “...Namanya juga baru pertama kali terjadi. Namun, belajar dari pengalaman kita dan bangsa lain, kecuali sistem, sangat ikut menentukan adalah pribadi, karakter, dan kesantunan para figur pribadinya.”

²⁵⁰ *Kompas*, “Apa Arti Inventasi Tertunda hingga Oktober”, Tajuk Rencana, edisi 9 Juli 2004.

Dengan ilustrasi itu, *Kompas* ingin membangun kesan, pemilihan presiden perlu dan harus berjalan secara demokratis. Selaras dengan ini, *Kompas* juga selalu berupaya menekankan arti penting mempertahankan pemilihan presiden berjalan lancar, damai, dan demokratis, dengan mendeskripsikan suasana pemilu hingga pada pemilihan presiden putaran pertama:

“Sejauh ini, cukup baik, demokratis, damai, akseptabel. Bukan saja kita yang memberikan penilaian itu serta menyaksikan dan merasakan prestasi demokrasi itu. Juga orang luar, para pemantau dari luar, media internasional tidak ketinggalan. Bukan saja suatu permulaan yang baik. Proses dan hasil yang baik memenuhi kriteria demokrasi dialamatkan kepada pemilu caleg tanggal 5 April 2004 dan pilpres putaran pertama tanggal 5 Juli 2004.”²⁵¹

Deskripsi suasana pemilu itu ditonjolkan *Kompas* untuk menekankan, pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua perlu dan harus tetap terlaksana secara demokratis.

Di sisi lain, *Kompas* juga mendeskripsikan suasana usai pemilihan presiden putaran dan mengarahkan perhatian pembaca terhadap berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan, dengan ilustrasi:

“Pemberian suara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sudah kita lakukan. Hari-hari ini kita menunggu hasil pemilihan presiden tanggal 5 Juli lalu. Di tengah masa penantian itu, tentunya baik kalau kita memerhatikan pekerjaan rumah yang masih ada dan melaksanakan tugas yang belum bisa kita selesaikan.”²⁵²

Kompas memilih menghadirkan ilustrasi itu, secara implisit, juga dimaksudkan untuk membangun kesan bahwa pemerintahan Megawati masih belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.

²⁵¹ *Kompas*, “Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha”, Tajuk Rencana, edisi 31 Agustus 2004.

²⁵² *Kompas*, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004.

1.3.2.4. *Depictions*: Membutuhkan Waktu

Kompas memilih kata, istilah, kalimat bermakna konotatif, dan bertendensi khusus (*depictions*) untuk menggiring pembaca ke dalam bingkai inti. serta *Kompas* mengarahkan pembaca untuk mempersepsi pemilihan presiden merupakan suatu proses, dengan menggunakan *depictions*: “membangun demokrasi membutuhkan waktu”, “baru pertama kali pemilu secara langsung”, “masa transisi, masa transformasi”, “dibutuhkan waktu untuk konsolidasi”, “cara dan proses ikut memberikan secara substansial, nilai, dan kualitas kepada hasil yakni sosok kekuasaan”. Dengan *depictions* ini, *Kompas* juga membangun kesan, kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan presiden merupakan bagian dari proses membangun demokrasi.

Kesan sedemikian itu, juga diperkuat *Kompas* dengan menggunakan eufemisme ketika memaknai manuver elite politik yang lebih tertuju pada bagai-mana merebut kekuasaan bukan kepada menyelesaikan persoalan bangsa, dengan menyatakan “kalaupun itu terjadi, kita tidak boleh berkecil hati”. Kata “berkecil hati” merupakan penghalusan dari “(merasa) tersinggung, marah, kecewa”. Dengan eufemisme ini, *Kompas* juga ingin menekankan, situasi pemilihan presiden perlu dan harus berjalan lancar, damai tanpa kekerasan.

Sedang untuk menonjolkan arti penting menyelesaikan persoalan bangsa, *Kompas* memilih menggunakan disfemisme “persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa sangatlah terang benderang”.

1.3.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

1.3.3.1. *Roots*: Memperbaiki Kehidupan Rakyat

Kompas mengkonstruksi bingkai inti dengan menggunakan *roots* berupa argumentasi pembenar dan analisis kausal untuk menonjolkan arti penting memperbaiki kehidupan rakyat:

”Untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, tidak bisa lain kita harus mendorong masuknya investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tingkat pertumbuhan empat persen yang kita capai dalam empat tahun terakhir ini tidak cukup memadai untuk bisa memperbaiki kehidupan rakyat. Hanya saja mustahil bagi kita bisa mengundang masuknya investor apabila sistem hukumnya tidak menunjang seperti sekarang. Ketidakpastian hukum justru membuat para investor lari dari Indonesia. Dalam enam tahun terakhir diperkirakan ada sekitar 22 miliar dollar AS modal yang justru keluar dari Indonesia”²⁵³

Ketidakpastian hukum tersebut dianggap *Kompas* merupakan salah satu akar persoalan di negeri ini telah mengakibatkan investor lari dari Indonesia dan kemudian berimplikasi pula bagi upaya memperbaiki kehidupan perekonomian rakyat. Dengan menampilkan *roots* ini, *Kompas* juga ingin membangun kesan, pemerintahan presiden Megawati selama empat tahun terakhir masih belum melakukan sesuatu yang signifikan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. *Kompas* juga menghadirkan *roots* untuk memberi aksentuasi, pelaksanaan pemilu secara langsung merupakan prestasi tersendiri bagi Indonesia dalam proses membangun demokrasi:

“Indonesia negeri berpenduduk 220 juta, nomor empat di dunia. Berlakunya sistem demokrasi baru enam tahun. Negeri berpenduduk amat multikultur dan daerah itu berada dalam kondisi krisis berkepanjangan. Ketika

²⁵³ *Kompas*, “Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004. Pada alinea berikut dalam tajuk ini, *Kompas* juga menampilkan *roots*, “Sebenarnya kita bisa memacu pertumbuhan dengan lebih tinggi lagi. Namun, itu tadi, dengan sistem hukum yang tidak jelas, peraturan perburuhan yang salah kaprah, semua kesempatan itu tidak bisa kita optimalkan. Apalagi kalau kita melihat perilaku politisi. Mereka lebih mementingkan interes pribadi sehingga bukannya mereka ikut memberantas korupsi, tetapi justru ikut terjerumus dalam tindakan yang merugikan negara.”

diselenggarakan pemilu secara langsung, semuanya berjalan lancar, damai, memenuhi syarat demokrasi. Masuk akal jika negara lain tertarik serta menyatakan penghargaan bahkan keheranan.”²⁵⁴

Dengan *roots* itu, *Kompas* bermaksud meyakinkan pembaca, pelaksanaan pemilihan presiden perlu dan harus berlangsung lancar, tanpa kekerasan, dan demokratis.

1.3.3.2. *Appeals to principle: Janganlah Terlalu Banyak Kata-kata*

Kompas beranggapan untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa harus lebih mengutamakan tindakan konkret. Anggapan ini diperkuat *Kompas* dengan menghadirkan sebuah pantun yang disampaikan Marsillam Simanjuntak sebagai pesan moral (*appeals to principle*):

“Ada sebuah pantun gurindam 12 yang disampaikan Ketua Yayasan Dharma Bakti Astra Krisni Murti Marsillam Simanjuntak dalam sebuah acara Usaha Kecil dan Menengah di Bentara Budaya Jakarta, kemarin. Pantunnya berbunyi: Janganlah terlalu banyak kata-kata, karena nanti di sana ada dusta. Tantangan kita ke depan tidak bisa hanya dijawab dengan kata-kata, tetapi harus dengan kerja.”²⁵⁵

Dengan pesan moral itu, *Kompas* ingin menekankan secara khusus kepada pasangan capres-cawapres pada pemilihan presiden putaran kedua agar visi, misi, dan program yang disampaikan tidak sekadar janji tetapi mesti diimplementasikan.

Kompas juga mengutip guyonan masyarakat yang diangkat Chris Siner Key Timu menutup tulisannya mengantarkan kepergian mantan Kepala Polri Jenderal Hoengeng Iman Santoso, “Ada dua polisi yang kejujurannya tidak bisa disuap,

²⁵⁴ *Kompas*, “Koalisi Baru Mulai Dipikir dan Digarap”, Tajuk Rencana, edisi 12 Juli 2004.

²⁵⁵ *Kompas*, “Sekitar Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres”, Tajuk Rencana, edisi 16 September 2004.

Polisi Hoegeng dan polisi tidur”²⁵⁶ sebagai landasan pesan moral (*appeals to principle*) untuk menekankan arti penting capres-cawapres menyampaikan program konkret tentang pemberantasan KKN. Kutipan ini juga diarahkan *Kompas* mendukung konstruksi bingkai inti bahwa untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa perlu komitmen keteladanan pemimpin.

1.4. Perspektif: Pemilihan Presiden Proses Menuju Demokrasi yang Bekerja

Kompas mengkonstruksi dan memaknai pelaksanaan pemilihan presiden dengan membangun bingkai inti, pemilihan presiden suatu proses untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa. Bingkai inti ini dibangun *Kompas* dengan mengedepankan gagasan, pemilihan presiden secara langsung merupakan suatu pembelajaran menuju demokrasi yang bekerja. Yakni bekerja untuk secara berkeadilan memperbaiki perikehidupan rakyat. Dengan demikian, menurut *Kompas*, pemilihan presiden pada dasarnya bertujuan untuk membentuk tatanan sosial-politik yang demokratis dengan memilih presiden yang mampu memimpin bangsa ini memperbaiki kehidupan rakyat.

Sehubungan dengan itu, *Kompas* menekankan pemilihan presiden perlu dan harus berjalan lancar, damai tanpa kekerasan, dan demokratis. Juga dibangun kesan, seluruh komponen bangsa Indonesia patut menganggap kelemahan pelaksanaan pemilu kali ini, termasuk perilaku elit politik yang lebih mengutamakan memperoleh kekuasaan, sebagai proses membangun demokrasi atau demokratisasi.

Di sisi lain, kepada rakyat pemilih, *Kompas* menonjolkan arti penting memi-

²⁵⁶ Kompas, “Benar Akan Berantas KKN? Belajarlah dari Hoegeng”, Tajuk Rencana, edisi 16 Juli 2004. Pesan moral ini juga diperkuat Kompas dengan menulis pada akhir tajuk, “...Benar, Hoegeng adalah kejujuran yang hidup, kesedehanaan dan keberanian yang hidup.”

lih sosok pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Dalam kaitan ini, *Kompas* menunjukkan fakta persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat kompleks dan mendasar, yakni meliputi ketidakpastian hukum, korupsi, kemiskinan, dan pengangguran.

Pasangan capres-cawapres, menurut *Kompas*, seharusnya mengemukakan konsep program yang konkret disertai kontrak politik yang jelas. Hal ini, dalam penilaian *Kompas*, masih belum dipenuhi oleh capres-cawapres. Kendati demikian, *Kompas* membangun citra positif capres Yudhoyono dan juga capres Amien, sementara kesan negatif dicitrakan pada capres Megawati dan Wiranto, sedang mengenai Hamzah tidak disebut secara spesifik. Dengan kata lain, secara implisit, *Kompas* lebih menghendaki Yudhoyono terpilih menjadi presiden.

Konstruksi ulasan di atas, menunjukkan bahwa *Kompas* memaknai pelaksanaan pemilihan presiden dalam konteks demokratisasi. Pemilihan presiden dipandang sebagai proses menuju demokrasi yang bekerja, yakni untuk memperbaiki kehidupan seluruh bangsa. Gagasan ini tercakup dalam pengertian demokrasi yang komprehensif, pemilihan presiden bukan tujuan akhir melainkan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Ini menunjuk, perspektif (*media package*) *Kompas* adalah demokratisasi.

1.5. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Kompas menyajikan sembilan item Tajuk Rencana untuk mewadahi wacana tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, dengan judul:

“Dalam Demokrasi Kita, Adakah Tempat Oposisi” (edisi 12 Agustus 2004); “Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi” (edisi 21 September 2004); “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi” (edisi 22 September 2004); “Sebuah Perjalanan Panjang Partai Golkar” (edisi 23 September 2004); “Membangun Perangkat Lunak Demokrasi” (edisi 24 September 2004); “Meraih Kemajuan di Tahun yang Berat” (edisi 25 September 2004); “Harapan Besar terhadap Pasangan SBY-JK” (edisi 27



September 2004); “Selamat Tinggal MPR Periode 1999-2004” (edisi 28 September

1.5.1. Bingkai Inti: **Presiden Harus Memelihara Persemaian Demokrasi dan Memperbaiki Perikehidupan Rakyat**

Kompas menampilkan wacana tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat dengan membangun bingkai inti, Presiden harus memelihara persemaian demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat. *Kompas* mengkonstruksi bingkai inti ini dengan menekankan arti penting keberhasilan pesta demokrasi dan pergantian presiden:

“Pergantian presiden dan pemerintahan selalu membawa kesempatan bagi kita untuk meraih harapan lebih baik...Momentum bagi kebangkitan itu kini ada lagi di depan mata. Kita berhasil menunjukkan kepada dunia untuk menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi yang jujur, adil, damai, aman, dan lancar...”²⁵⁷

Dengan mengedepankan teks itu, diwadahi dalam judul: “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi”, *Kompas* ingin menegaskan, pergantian presiden sesuai hasil pesta demokrasi merupakan kesempatan untuk bangkit meraih harapan lebih baik. Harapan dimaksud terfokus pada upaya memperbaiki perikehidupan rakyat, sebagaimana ditunjukkan *Kompas* dalam kutipan teks berikut ini:

“Kecuali memelihara persemaian demokrasi yang subur, kini kita dihadapkan pada pekerjaan yang tidak kalah sentral. Yakni dengan demokrasi itu, dengan presiden dan pemerintahan baru, membuat langkah nyata dan efektif untuk memperbaiki perikehidupan rakyat banyak.”²⁵⁸

Dalam teks itu, *Kompas* menonjolkan, agenda pokok presiden terpilih dan pemerintahan baru. Yakni, memelihara persemaian demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat banyak. *Kompas* beranggapan, memelihara persemaian

²⁵⁷ *Kompas*, “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

²⁵⁸ *Kompas*, “Membangun Perangkat Lunak Demokrasi”, Tajuk Rencana, edisi 24 September 2004.

demokrasi inheren dengan tindakan konkret memperbaiki perikehidupan rakyat banyak. Demokrasi sebagai suatu sistem politik, justru merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga dengan jelas ditekankan

Kompas:

“Kita telah dipuji banyak orang dengan cepat membangun demokrasi. Tugas kita untuk membuat demokrasi itu lebih bermakna, yakni membawa kesejahteraan bagi seluruh warga.”²⁵⁹

Dengan demikian, *Kompas* ingin menegaskan, membangun demokrasi tidak berhenti pada membentuk perangkat institusi demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. Tetapi seluruh perangkat dalam sistem demokrasi itu, justru harus melakukan langkah konkret untuk memperbaiki perikehidupan rakyat banyak. Karena pada dasarnya, ketiga komponen dalam sistem demokrasi yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, berfungsi melayani publik dalam artian mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini dengan lugas dikemukakan *Kompas* dalam kutipan teks berikut ini:

“Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, besarlah kekuasaan dan kewibawaannya. Tinggal lagi apakah kekuasaan dan kewibawaan itu menemukan sosok pribadi yang tanggap. Adalah benar, dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang, presiden bukan segalanya. Bahkan, dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif pun, setiap kali harus berkomunikasi dan bersepakat atau memperoleh kesepakatan DPR. Lembaga legislatif, demikian pula lembaga yudikatif, pengadilan, berdiri dan berfungsi otonom. Otonom untuk mudah-mudahan, berlomba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, seadil mungkin, sehingga demokrasi dalam segala aspeknya berlaku konsisten dan konsekuen. Presiden yang bersih, kabinet yang bersih, pemerintah dan pemerintahan yang peduli, memberi pelayanan kepada publik. Itulah dambaan kita bersama.”²⁶⁰

²⁵⁹ *Kompas*, “Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004.

²⁶⁰ *Ibid.*

Kompas secara eksplisit tidak menjelaskan perihal “presiden yang bersih, kabinet yang bersih, dan pejabat yang bersih” sebagai indikator dengan menekankan atau pening

mengubah persepsi kekuasaan:

“Banting setir perihal persepsi kekuasaan. Ini republik. Ini negara demokrasi. Ini bukan negara feodal, di mana kekuasaan adalah privilese alias hak istimewa untuk pemegang, lingkungan, kerabat, dan kelompoknya. Republik, *res publica*. Segalanya untuk kepentingan *publica*, kepentingan publik, kepentingan warga.”²⁶¹

Dengan demikian, selain mengesankan bahwa pejabat pemerintah dan pemerintahan selama ini cenderung mempersepsi kekuasaan sebagai privilese, *Kompas* secara implisit ingin menjelaskan, “presiden yang bersih, kabinet yang bersih” adalah tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Pengutamaan kepentingan rakyat juga ditonjolkan *Kompas* ketika mengkonstruksi dan memaknai kemenangan SBY-JK:

“Sikap peduli, apalagi peduli terhadap rakyat dan warga yang ketinggalan serta tertimpa musibah, agar merupakan sikap dasar, orientasi, serta semangat pemimpin dan pemerintahannya. Kemudian sikap dasar, yakni kepedulian dan solidaritas atau setia kawan, agar pula merupakan semangat dan pilar sentral perumusan *public policy*. Kebijakan publik pemerintah. Kebijakan nasional.”²⁶²

Dalam teks itu, *Kompas* secara khusus menekankan, kepedulian dan solidaritas terhadap rakyat patut menjadi sikap dasar SBY-JK berserta seluruh jajaran pemerintahannya. *Kompas* beranggapan, sikap peduli kepada yang lemah dan ketinggalan sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian, setiap kebijakan publik selalu pula harus mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak, terutama rakyat miskin, pengangguran, dan pedagang kaki lima:

²⁶¹ *Kompas*, “Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004.

²⁶² *Kompas*, “Harapan Besar terhadap Pasangan SBY-JK”, Tajuk Rencana, edisi 27 September 2004.

“Dalam kenyataannya, kebanyakan rakyat atau warga Indonesia memang tertimpa musibah sebagai akibat dan kelanjutan kondisi krisis dan kritis yang memuncak tahun 1997-1998. Kemiskinan bertambah, pengangguran demikian pula. Sudah demikian keadaannya, pengusuran justru marak. Mal seperti menjamur, sementara gambaran para pedagang kaki lima adalah gambaran yang tergusur dan terus-menerus digusur.”²⁶³

Tampak *Kompas* lebih menonjolkan, masalah perikehidupan rakyat menyangkut kemiskinan dan pengangguran. *Kompas* secara khusus juga memberi kesan, pengusuran terhadap pedagang kaki lima dapat mempengaruhi jumlah rakyat miskin dan pengangguran. Dengan kata lain, secara implisit, *Kompas* menekankan, hak-hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan, dengan membuka lapangan kerja agar bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini juga dikemukakan *Kompas* ketika memaknai kebijakan pemeritahan presiden SBY yang selalu harus mempertimbangkan kepentingan pengusaha kecil dan tidak justru menjadi merugikan mereka:

“Kalau kita lihat lebih dalam, pengusaha kecil dan menengahlah yang paling banyak memberikan kontribusi bagi terjadinya kegiatan ekonomi tersebut.”²⁶⁴

Kompas melihat pengusaha kecil dan menengah memiliki potensi dalam upaya memperbaiki perikehidupan rakyat banyak dan sekaligus pula untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan:

“Justru ketika tidak semua orang bisa menikmati hasil kemajuan itu, yang muncul adalah kesenjangan dan ketidakadilan, yang akhirnya hanya memicu radikalisme dan terorisme.”²⁶⁵

²⁶³ *Kompas*, “Harapan Besar terhadap Pasangan SBY-JK”, Tajuk Rencana, edisi 27 September 2004.

²⁶⁴ *Kompas*, “Meraih Kemajuan di Tahun yang Berat”, Tajuk Rencana, edisi 25 September 2004.

²⁶⁵ *Kompas*, “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditekankan dalam *Kompas*, “Meraih Kemajuan di Tahun yang Berat”, Tajuk Rencana, edisi 25 September 2004, “Fenomena terror memang bukan hanya menjadi milik kita, tetapi juga dunia. Namun, kita segera diingatkan bahwa sepanjang ketidakadilan masih banyak muncul di sekitar kita, maka yang namanya radikalisme maupun terorisme akan terus membayangi kehidupan kita.”

Kompas beranggapan, kesenjangan dan ketidakadilan merupakan suatu faktor yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan terorisme. Padahal, secara implisit, *Kompas* membangun kesan, radikalisme dan terorisme justru kontra-produktif bagi upaya memelihara persemaian demokrasi. Dengan kata lain, *Kompas* ingin menekankan, langkah konkret memperbaiki perikehidupan rakyat banyak merupakan keharusan karena akan dapat mencegah munculnya radikalisme dan terorisme sehingga persemaian demokrasi terpelihara.

Sehubungan dengan itu, *Kompas* menekankan arti penting seluruh komponen sistem demokrasi dalam hal ini termasuk rakyat perlu dan harus menjalankan fungsinya sesuai koridor hukum:

“Dalam sistem demokrasi, kekuasaan terbagi menurut asas *trias politica* pada tingkat vertikal. Pemerintah dalam arti penyelenggara kekuasaan dan pemerintahan terus-menerus harus disertai oleh rakyat. Penyertaan dilakukan lewat lembaga perwakilan. Penyertaan juga dilaksanakan lewat berbagai forum lain seperti pers, beragam perwakilan profesi, kepentingan, kepedulian, gerakan dan aktivitas. Memberikan masukan, juga melakukan kontrol, kritik, dan koreksi. Bahkan tekanan pun dapat diberikan sepanjang berada dalam koridor hukum dan kepatuhan publik.”²⁶⁶

Kompas menunjukkan, DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan termasuk partai politik harus berperan serta memelihara persemaian demokrasi.²⁶⁷ Bahkan berbagai komponen masyarakat pun dapat memberikan kontribusi secara konstruktif.

²⁶⁶ *Kompas*, “Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditekankan dalam *Kompas*, “Dalam Demokrasi Kita, Adakah Tempat Oposisi”, Tajuk Rencana, edisi 12 Agustus 2004, “...bagi pertimbangan dan komitmen membangun demokrasi yang melayani, yakni kekuasaan yang melayani kepentingan publik, oposisi diperlukan...Oposisi tidak ada salahnya juga memiliki kualifikasi sebagai oposisi yang kritis, kontrol, korektif, menggugat dan mempersoalkan, namun loyal terhadap kepentingan dan kesejahteraan bersama, kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak.”

²⁶⁷ Hal ini juga ditegaskan *Kompas* ketika mengkonstruksi dan memaknai persoalan internal Partai Golkar, peranan DPD dan DPR. Lihat *Kompas* “Sebuah Perjalanan Panjang Partai Golkar”, Tajuk Rencana, edisi 23 September 2004; *Kompas* “Selamat Tinggal MPR Periode 1999-2004”, Tajuk Rencana, edisi 28 September 2004; *Kompas* “Partai dan Perubahan Politik”, Tajuk Rencana, edisi 29 September 2004.

1.5.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

1.5.2.1. Metafora: Banting Setir

Kompas menghadirkan metafora “banting setir” untuk menegaskan keharusan mengubah persepsi kekuasaan dari kekuasaan feodal menjadi kekuasaan demokrasi. Perubahan persepsi ini dianggap sebagai keharusan untuk semakin menekankan arti penting pergantian presiden yang digambarkan dengan kalimat metaforis, “momentum bagi kebangkitan itu kini ada lagi di depan mata”. “Presiden yang bersih, kabinet yang bersih” juga digunakan *Kompas* sebagai metafora untuk menggambarkan sosok presiden dan kabinet yang selalu lebih mengutamakan langkah konkrit untuk memperbaiki perikehidupan rakyat banyak.

Kalimat metaforis juga digunakan *Kompas* untuk menggambarkan arti penting sikap peduli dan tanggap presiden dan pemerintahannya terhadap perikehidupan rakyat banyak:

“Berulang kali kita tamsilkan dengan pengalaman banjir besar di Jakarta tahun 2002. Pemimpin datang menyapa warga korban banjir, andaikata pada hari pertama, akan disambut sebagai pahlawan. Pemimpin yang datang pada hari keempat, ibarat akan dilempar batu oleh warga.”²⁶⁸

1.5.2.2. *Catchphrases*: Membuat Demokrasi Lebih Bermakna

Kompas menggunakan *catchphrases* berupa jargon dan slogan yang merujuk pada pemikiran atau semangat tertentu. Saat mengkonstruksi hasil pilpres, *Kompas* menghadirkan jargon dan slogan: “Kita telah dipuji banyak orang dengan cepat membangun demokrasi”; “Banyak negara yang memuji kemajuan demokrasi di Indonesia”; “Momentum bagi kebangkitan itu kini ada lagi di depan mata”.

²⁶⁸ *Kompas*, “Harapan Besar terhadap Pasangan SBY-JK”, Tajuk Rencana, edisi 27 September 2004.

Slogan dan jargon tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sambutan positif terhadap hasil pilpres dan menekankan legitimasi presiden terpilih. Tetapi slogan dan jargon itu, juga dipakai *Kompas* untuk membangun kesan, demokratisasi masih harus ditindaklanjuti lagi.

Hal itu juga ditonjolkan *Kompas* dengan menyajikan slogan: “Tugas kita untuk membuat demokrasi itu lebih bermakna, yakni membawa kesejahteraan bagi seluruh warga”; “Kecuali memelihara persemaian demokrasi yang subur, kini kita dihadapkan pada pekerjaan yang tidak kalah sentral. Yakni dengan demokrasi itu, dengan presiden dan pemerintahan baru, membuat langkah nyata dan efektif untuk memperbaiki perikehidupan rakyat banyak.” Slogan ini juga dilengkapi dengan jargon politik “Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sedemikian besar, akumulatif, serta kompleks, sehingga yang diperlukan oleh presiden dan pemerintahan baru adalah kesepakatan nasional untuk melangkah maju.”

Komponen *catchphrases* itu dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca mempersepsi, presiden bersama seluruh warga bangsa masih mengemban tugas membuat demokrasi menjadi semakin lebih bermakna.

1.5.2.3. *Exemplars*: Melangkah Maju

Kompas memakai komponen *exemplars* untuk menggambarkan respon positif berbagai negara tentang demokrasi di Indonesia dan kesulitan yang diemban pemerintahan baru:

“Banyak negara yang memuji kemajuan demokrasi di Indonesia. Setelah negara-negara Uni Eropa, terakhir Amerika Serikat yang menyatakan hal itu seperti dinyatakan Deputi Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz yang dikutip oleh surat kabar *The International Herald Tribune* edisi 21 September, halaman 1. Dengan modal itu, pemerintahan baru seharusnya bisa meminta kepada negara-negara besar untuk menegosiasi stok utang negara,

khususnya utang luar negeri. Dengan total utang 130 miliar dollar AS, sulit bagi siapa pun untuk mengelola negeri ini. Meski pemerintahan Megawati mampu melakukan reprofiling, itu hanya menggeser waktu pembayaran utang. Puncak dari waktu jatuh tempo justru akan terjadi mulai tahun 2005 hingga 2008 nanti.”²⁶⁹

Dengan memuat fakta itu, secara implisit, *Kompas* juga bermaksud menekankan kemajuan demokrasi yang telah dicapai harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata mengatasi masalah utang luar negeri yang berpengaruh signifikan bagi upaya memperbaiki perikehidupan rakyat banyak.

Di sisi lain, *Kompas* juga menampilkan komponen *exemplars* untuk menekankan pada sebagian rakyat untuk juga berpartisipasi secara konkret untuk memperbaiki perikehidupan rakyat banyak:

“Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan bentuk partisipasi yang lain. Kita bertolak dari pernyataan yang pernah populer karena disampaikan oleh mendiang presiden John F Kennedy. Ia katakan, jangan bertanya apa yang negara dapat lakukan untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang Anda dapat lakukan untuk negara. Rakyat yang menganggur masuk akal jika lebih mendahulukan pertanyaan apa yang negara alias pemerintah dapat perbuat untuk mereka. Demikian pula para warga yang tergusur, para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, biarpun negeri kita tertimpa krisis berkepanjangan, cukup banyak jumlah warga republik yang juga dalam situasi krisis itu masih beruntung mempunyai pekerjaan, bahkan berjalan terus usahanya. Mereka itulah yang sepatutnya menyambut pertanyaan retorik John Kennedy: bukan apa yang negara atau pemerintah dapat lakukan untuk dirinya, tetapi apa yang mereka dan kita yang mempunyai kemampuan dan kesempatan berbuat untuk negara. Untuk masyarakat.”²⁷⁰

Dengan ilustrasi tersebut, secara implisit, *Kompas* mengklasifikasi rakyat menjadi dua bagian. Pertama, rakyat yang pantas mempertanyakan apa yang negara alias pemerintah dapat perbuat untuk mereka. Kedua, rakyat yang pantas menjawab apa yang telah dilakukannya untuk negara dan masyarakat. *Kompas* meng-

²⁶⁹ *Kompas*, “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

²⁷⁰ *Kompas*, “Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004.

anggap, rakyat yang disebut terakhir ini, harus melakukan tindakan nyata untuk negara dan sesama warga untuk melangkah maju memperbaiki perikehidupan rakyat banyak. Arti penting melangkah maju tersebut ditekankan *Kompas* dengan menghadirkan komponen *exemplars* berikut ini:

“Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sedemikian besar, akumulatif, serta kompleks, sehingga yang diperlukan oleh presiden dan pemerintahan baru adalah kesepakatan nasional untuk melangkah maju. Baiklah melangkah maju dalam interaksi penyelenggaraan kekuasaan dan kontrol atas penyelenggaraan itu. Namun, toh tujuannya untuk melangkah maju. Memecahkan persoalan, mengejar kemajuan. Hanya beda posisi dan fungsi, yang satu lewat pemerintahan eksekutif, yang lain lewat posisi kontrol yang kritis tetapi konstruktif.”²⁷¹

Dengan ilustrasi itu, *Kompas* juga ingin menggarisbawahi, semua pihak sesuai dengan peran, posisi, fungsi, maupun kapasitasnya masing-masing perlu dan harus terarah untuk melangkah maju. Dengan kata lain, melihara persemaian demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat merupakan tugas dan tanggung jawab semua komponen warga bangsa.

1.5.2.4. *Depictions*: Persemaian Demokrasi

Kompas menggunakan berbagai pilihan kata, istilah dan kalimat (*depictions*) untuk mengarahkan pembaca ke bingkai inti. *Kompas* memilih memakai kata “persemaian” untuk menggambarkan kondisi demokrasi yang relatif masih muda. Dengan kata ini, *Kompas* juga ingin membangun kesan, betapa perlunya melakukan konsolidasi untuk “memelihara demokrasi” tersebut. Sedangkan untuk menunjukkan fakta kehidupan rakyat, *Kompas* menggunakan kata “memperbaiki perikehidupan rakyat”. Dengan kata “perikehidupan”, *Kompas* ingin

²⁷¹ *Kompas*, “Membangun Perangkat Lunak Demokrasi”, Tajuk Rencana, edisi 24 September 2004. Hal ini, dalam kalimat berbeda juga dikedepankan dalam *Kompas*, “Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004.

mempengaruhi pembaca untuk mempersepsi, seluruh aspek kehidupan rakyat memerlukan perbaikan.

Kompas juga menggunakan kalimat eufemistis “momentum bagi kebangkitan itu kini ada lagi di depan mata” untuk menghaluskan fakta “gagal” yang terjadi selama ini. Tetapi untuk menggambarkan fakta kehidupan rakyat, *Kompas* memilih memakai kalimat disfemistis: “Kemiskinan bertambah, pengangguran demikian pula. Sudah demikian keadaannya, pengusuran justru marak. Mal seperti menjamur, sementara gambaran para pedagang kali lima adalah gambaran yang tergusur dan terus-menerus digusur”; “Justru ketika tidak semua orang bisa menikmati hasil kemajuan itu, yang muncul adalah kesenjangan dan ketidakadilan, yang akhirnya hanya memicu radikalisme dan terorisme.” Dengan penggambaran semacam itu, *Kompas* juga menggiring pembaca untuk mempersepsi, keharusan melakukan langkah nyata untuk memperbaiki perikehidupan rakyat. Langkah tersebut juga dianggap merupakan bagian integral dari “memelihara persemaian demokrasi”, seperti terlihat pada kalimat eufemistis: “Tugas kita untuk membuat demokrasi itu lebih bermakna, yakni membawa kesejahteraan bagi seluruh warga.”

1.5.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

1.5.3.1. *Roots*: Gagal Menyatukan Seluruh Potensi yang Ada

Kompas menyusun bingkai inti dengan mengemukakan penjelasan kausal (*roots*), faktor penyebab menjadi gagal memperbaiki perikehidupan rakyat lebih dicitrakan sebagai akibat dari sosok presiden selama enam tahun terakhir “gagal menyatukan seluruh potensi yang ada” sementara elit politik pun cenderung lebih

mengedepankan kepentingan tertentu, sebagaimana ditonjolkan dalam kutipan teks berikut ini:

“Pergantian presiden dan pemerintahan selalu membawa kesempatan bagi kita untuk meraih harapan lebih baik. Itu terjadi ketika Abdurrahman Wahid naik ke tampuk pimpinan nasional menggantikan BJ Habibie maupun ketika Megawati Soekarnoputri naik ke kursi kepresidenan menggantikan Abdurrahman Wahid. Namun kita tahu bahwa harapan yang tinggi itu tetap tinggal harapan. Kita selalu gagal mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan yang membawa kesejahteraan rakyat. Mengapa? Karena kita gagal menyatukan seluruh potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan yang bisa ampuh untuk membangun negeri. Kita terus hidup dalam suasana penuh prasangka, perpolitikan yang tidak henti-henti, yang akhirnya justru melemahkan kita semua.”²⁷²

Kebijakan presiden dan jajaran pemerintahan selama ini, juga dilihat *Kompas* signifikan mempengaruhi kompleksitas masalah perikehidupan rakyat. Kebijakan tersebut dianggap bukan menjadi solusi tetapi malah menimbulkan persoalan lain bagi rakyat banyak. *Kompas* menarasikan hal ini dengan *roots*:

“Dalam kenyataannya, kebanyakan rakyat atau warga Indonesia memang tertimpa musibah sebagai akibat dan kelanjutan kondisi krisis dan kritis yang memuncak tahun 1997-1998. Kemiskinan bertambah, pengangguran demikian pula. Sudah demikian keadaannya, penggusuran justru marak. Mal seperti menjamur, sementara gambaran para pedagang kali lima adalah gambaran yang tergusur dan terus-menerus digusur.”

Di sisi lain, *Kompas* juga menghadirkan *roots* untuk menekankan pentingnya partai politik dalam pembangunan demokrasi. *Kompas* menganggap upaya untuk “memelihara persemaian demokrasi” akan terkendala apabila pada tataran internal partai politik terjadi gejolak karena kepentingan di antara anggota. *Kompas* menonjolkan hal ini ketika mengkonstruksi dan memaknai persoalan internal Partai Golkar:

“..kita sangat menyayangkan ketika terjadi gejolak di dalam tubuh partai itu. Apalagi sampai diikuti dengan pecat-memecat anggota, yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Mengapa kita menyayangkannya? Karena

²⁷² *Kompas*, “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

kecenderungan seperti itu terjadi hampir di semua partai politik. Perbedaan kepentingan di antara anggota menimbulkan friksi dan akhirnya bahkan menimbulkan perpecahan. Lahirlah kemudian partai-partai baru sebagai sempalan...Padahal kita tahu, kalau kita sepakat untuk membangun demokrasi, maka pilarnya adalah partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa ada partai politik. Demokrasi langsung hanya berlaku di zaman Yunani Kuno. Setelah itu yang lebih berlaku adalah demokrasi perwakilan.”²⁷³

1.5.3.2. *Appeals to principle: Apa yang Dapat Anda Lakukan untuk Negara*

Kompas juga menggunakan *appeals to principle* untuk mendukung konstruksi bingkai inti, dengan menghadirkan pernyataan John F Kennedy “jangan bertanya apa yang negara dapat lakukan untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang Anda dapat lakukan untuk negara” sebagai pesan moral kepada “rakyat yang beruntung mempunyai pekerjaan, bahkan berjalan terus usahanya” agar turut melakukan tindakan konkret memperbaiki perikehidupan rakyat banyak. Dengan kata lain, melalui pesan moral tersebut, *Kompas* sekaligus pula membangun kesan bahwa memelihara persemaian demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat bukan hanya tugas presiden tetapi semua warga bangsa juga patut berpartisipasi mewujudkannya.

Kompas juga membangun kesan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi persoalan perikehidupan rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan menghadirkan *appeals to principle* berupa klaim moral:

“Namun, kita tentunya tidak bisa hanya menyesali diri dan menangis menghadapi kenyataan ini. Kita harus tetap optimistis karena banyak kemurahan hati yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita diberikan potensi alam yang begitu melimpah, yang apabila kita bisa manfaatkan secara optimal akan menjadi bekal yang cukup bagi seluruh warga bangsa ini untuk bisa bangkit kembali.”²⁷⁴

²⁷³ *Kompas*, “Sebuah Perjalanan Panjang Partai Golkar”, Tajuk Rencana, edisi 23 September 2004.

²⁷⁴ *Kompas*, “Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

Dengan klaim moral tersebut, *Kompas* beranggapan, pada dasarnya presiden terpilih dapat diharapkan akan membawa rakyat meraih harapan lebih baik antara lain dengan memanfaatkan potensi alam secara optimal.

1.6. Perspektif: Kekuasaan Demokrasi Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Bingkai inti yang dibangun *Kompas*, ketika menyajikan ulasan tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, adalah presiden harus memelihara persamaan demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat. *Kompas* mengkonstruksi bingkai inti ini dengan menekankan, membangun demokrasi tidak berhenti setelah menyelenggarakan pemilu tetapi justru masih harus ditindaklanjuti dengan membuat demokrasi itu menjadi semakin bermakna. Yakni dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga. Karena menurut *Kompas*, sistem demokrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Kompas juga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih relatif muda, serta masih membutuhkan konsolidasi maupun pemeliharaan lebih lanjut. Dalam kaitan ini pula, *Kompas* menonjolkan, arti penting memelihara persamaan demokrasi inheren dengan memperbaiki perikehidupan rakyat. Dengan kata lain, menurut *Kompas*, langkah memperbaiki kehidupan rakyat sekaligus juga merupakan langkah memelihara demokrasi.

Menurut *Kompas*, pada dasarnya, semua komponen bangsa perlu dan harus berpartisipasi memelihara persamaan demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat. Namun *Kompas* lebih menekankan, presiden mengemban tugas pokok memimpin bangsa ini untuk memelihara persamaan demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat.

Lebih lanjut *Kompas* cenderung mencitrakan pemerintahan yang bersih adalah presiden beserta seluruh jajaran pemerintahannya mempersepsi kekuasaan demokrasi. Karakteristiknya, menurut *Kompas*, dapat dilihat dari sikap peduli dan tanggap terhadap rakyat yang ketinggalan serta tertimpa musibah. Juga dari kebijakan publik yang adil dengan lebih mengutamakan kepentingan rakyat miskin, pengangguran, serta pengusaha kecil. Dengan demikian, secara implisit, *Kompas* sekaligus pula menekankan, tentang hak-hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan, mendapat lapangan kerja, dan untuk bebas dari kemiskinan. Terhadap kinerja pemerintah ini, *Kompas* menekankan seluruh komponen masyarakat patut melakukan kontrol yang konstruktif.

Kompas menyusun pemikiran dan gagasan tersebut dengan menggunakan berbagai komponen perangkat pembingkai dan perangkat penalaran. Konstruksi ulasan *Kompas* pada dasarnya dilandaskan pada gagasan pemerintahan baru perlu dan harus menghayati faham kekuasaan demokrasi. Dengan demikian faham ini, akan terbentuk pemerintahan yang bersih, yang mengutamakan kepentingan rakyat. Gagasan ini dilandaskan pada pemahaman bahwa demokrasi merupakan proses yang selalu berkesinambungan. Hal ini tentu merupakan refleksi dari pengertian demokrasi yang sangat komprehensif. Ini berarti bahwa *Kompas* memilih menggunakan perspektif (*media package*) demokratisasi.

Tabel 1: Framing Isu Demokratisasi oleh Kompas**1. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan**

Perspektif (Media Package): Dalam Demokrasi, Rakyat Berdaulat Menentukan Pilihan Sendiri (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Rakyat Bebas Menentukan Pilihan Sendiri Sesuai Akal Sehat dan Hati Nurani	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Kegiatan capres-cawapres pada masa kampanye adalah seperti tarik suara. Pemberantasan KKN tidak berjalan karena penegakan hukum yang tutup mata dan dikerjakan panas-panas cirit ayam.	<i>Roots:</i> Jati diri capres-cawapres yang sesungguhnya dapat diperhatikan dari cara dan sikapnya menghadapi kenyataan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat.
<i>Catchphrases:</i> Rakyat memiliki <i>people's wisdom</i> , bersikap bijaksana dan dilandasi akal sehat, hati bersih, sikap tulus, mengikuti pemilihan presiden. Fahaman kekuasaan selama ini adalah kekuasaan feodal.	<i>Appeals to principle:</i> Tidak menggunakan hak pilih tidak melanggar hukum. Tetapi menggunakan hak pilih lebih baik karena berarti menggunakan hak kedaulatannya
<i>Exemplars:</i> Tentukan pilihan berdasarkan jati diri capres-cawapres yang asli, yang sesungguhnya. Materi kampanye dan sajian media tidak selalu merupakan jati diri capres-cawapres yang asli.	<i>Consequences:</i> Setiap rakyat pemilih seharusnya menggunakan hak pilihnya
<i>Depictions:</i> Rakyat tidak mau diatur-atur seperti zaman Orde Baru dulu dan lebih menggunakan hati nuraninya dalam menentukan pilihan	

2. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Perspektif (Media Package): Pemilihan Presiden Proses Menuju Demokrasi yang Bekerja (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Pemilihan Presiden Suatu Proses untuk Memperbaiki Kehidupan Seluruh Bangsa	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Demokrasi ibarat jalan panjang. Elit politik jangan seperti kata pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Pemilihan presiden bukan Perang Barathayudha. Persoalan bangsa ini terang benderang. Rakyat pemilih tidak mau membeli kucing dalam karung.	<i>Roots:</i> Ketidakpastian hukum telah mengakibatkan investor lari dari Indonesia dan kemudian berimplikasi pula bagi upaya memperbaiki kehidupan perekonomian rakyat. Pelaksanaan pemilu secara langsung merupakan prestasi tersendiri bagi Indonesia dalam proses membangun demokrasi.
<i>Catchphrases:</i> Demokrasi kita adalah demokrasi dalam pembangunan. Membangun demokrasi membutuhkan waktu. Kita menuju demokrasi yang bekerja, bekerja untuk secara berkeadilan memperbaiki kehidupan rakyat.	<i>Appeals to principle:</i> Janganlah terlalu banyak kata-kata, karena nanti di sana ada dusta. Tantangan kita ke depan tidak bisa hanya dijawab dengan kata-kata, tetapi harus dengan kerja.
<i>Exemplars:</i> Pengalaman Indonesia selama tujuh tahun terakhir memperlihatkan	<i>Consequences:</i> Kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden tidak perlu harus dipersoalkan. Pilih

bahwa membangun demokrasi tidak mungkin terlepas dari kenyataan dan kondisi masyarakat. Ada masa transisi, atau lebih tepat ada masa transformasi, yang harus diarahkan dan dijalani secara benar.	capres yang mampu memperbaiki kehidupan seluruh bangsa.
<i>Depictions:</i> Membangun demokrasi membutuhkan waktu. Kita baru pertama kali pemilu secara langsung.	

3. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Perspektif (<i>Media Package</i>):	Kekuasaan Demokrasi Mengutamakan Kepentingan Rakyat (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (<i>Core Frame</i>):	Presiden Harus Memelihara Persemaian Demokrasi dan Memperbaiki Perikehidupan Rakyat	
	Perangkat Pembingkai (<i>Framing Devices</i>)	Perangkat Penalaran (<i>Reasoning Devices</i>)
<i>Metaphors:</i> Presiden beserta jajaran pemerintahan perlu dan harus banting setir persepsi kekuasaan. Hal ini merupakan karakteristik dari pemerintahan yang bersih dan kabinet yang bersih.		<i>Roots:</i> Presiden selama enam tahun terakhir, gagal menyatukan seluruh potensi yang ada. Elit politik pun cenderung lebih mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan rakyat.
<i>Catchphrases:</i> Tugas kita adalah membuat demokrasi itu lebih bermakna, yaitu membawa kesejahteraan bagi seluruh warga.		<i>Appeals to principle:</i> Jangan bertanya apa yang negara dapat lakukan untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang Anda dapat lakukan untuk negara.
<i>Exemplars:</i> Semua komponen bangsa, sesuai kapasitasnya masing-masing perlu dan harus terarah untuk melangkah maju memperbaiki kehidupan rakyat.		<i>Consequences:</i> Memelihara persemaian demokrasi dan memperbaiki perikehidupan rakyat, bukan tugas presiden saja tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa .
<i>Depictions:</i> Kemiskinan bertambah, pengangguran demikian pula. Sudah demikian keadaannya, penggusuran justru marak. Mal seperti menjamur, sementara gambaran para pedagang kali lima adalah gambaran yang tergusur dan terus-menerus digusur.		

IV.2. *Suara Pembaruan*

2.1. Tentang Persamaan di Depan Hukum

Suara Pembaruan mewadahi wacana tentang persamaan di depan hukum dengan mengkonstruksi dan memaknai produk hukum terkait dengan kasus penolakan Gus Dur menjadi calon presiden. *Suara Pembaruan* menampilkan hal tersebut dalam dua item *Tajuk Rencana*, dengan judul: “Mampu secara Rohani dan Jasmani” Dicoret” (edisi 1 Mei 2004), dan “Pelajaran dari Kasus Gus Dur” (edisi 24 Mei 2004).

2.1.1. Bingkai Inti: Hukum Tidak Boleh Diskriminatif

Suara Pembaruan mengkonstruksi bingkai inti, hukum tidak boleh diskriminatif, dengan memilih menonjolkan fakta produk hukum terkait kasus penolakan Gus Dur menjadi calon presiden oleh KPU berdasarkan SK No. 36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004:

“Kasus Gus Dur ini secara khusus disorot tidak didasarkan pada kepentingan tokoh bersangkutan, melainkan bagi pembelajaran ke depan dalam menyusun peraturan tentang tata cara pengajuan capres dan cawapres. Sebab berkenaan dengan penolakan Capres Gus Dur, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan sehingga di mana datang tidak terjadi hal-hal yang berakibat fatal bagi siapa saja yang mengajukan capres dan cawapres.²⁷⁵

Dalam teks itu, *Suara Pembaruan* menunjukkan, kasus penolakan Gus Dur menjadi capres oleh KPU tidak sekadar kasus pribadi Gus Dur tetapi esensinya menyangkut kepentingan dan masa depan demokrasi, secara khusus dalam bidang hukum.

KPU menolak Gus Dur sebagai capres berlandaskan hukum, yaitu peraturan

²⁷⁵ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, *Tajuk Rencana*, edisi 24 Mei 2004.

tentang tata cara pengajuan capres dan cawapres. Sementara peraturan tersebut, sebagai suatu produk hukum merupakan penjabaran dari konstitusi negara, yakni UUD '45. *Suara Pembaruan* menonjolkan hal ini, dalam kutipan teks berikut:

“Memang Pasal 6 Huruf d UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres menetapkan syarat capres dan cawapres mampu secara rohani dan rohani...ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 6 UUD '45 yang menetapkan, capres dan cawapres mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Serangkaian ketentuan itulah, yang menjadi landasan hukum bagi KPU untuk mengeluarkan Keputusan KPU No. 37/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Tim Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.”²⁷⁶

Suara Pembaruan menunjukkan, landasan hukum yang digunakan KPU menolak pencalonan Gus Dur sebagai capres adalah berpangkal pada konstitusi negara. Dengan demikian, *Suara Pembaruan* ingin menegaskan, gagalnya Gus Dur menjadi capres harus lebih dilihat sebagai persoalan berdimensi hukum. Penegasan ini lebih lanjut ditunjukkan *Suara Pembaruan* dengan menggambarkan kompleksitas permasalahan legislasi di negeri ini:

“...tidak jelas hal-hal apa saja yang seharusnya diatur dalam konstitusi, demikian juga dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain. Sebab itu, terjadi kejanggalan, yaitu materi pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan induknya.”²⁷⁷

Dengan menampilkan teks itu, *Suara Pembaruan* ingin menggambarkan, kasus Gus Dur sebagai persoalan hukum merupakan refleksi dari permasalahan penyusunan legislasi yang terdapat dalam sistem politik Indonesia.

Dengan demikian, *Suara Pembaruan* mengesankan kasus tersebut sebagai suatu fenomena dari puncak gunung es permasalahan legislasi yang terdapat di Indonesia. Sehubungan dengan ini, *Suara Pembaruan* menekankan, arti penting

²⁷⁶ *Suara Pembaruan*, “Mampu secara Rohani dan Jasmani” Dicoret”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004.

²⁷⁷ *Ibid.*

membuat perundang-undangan tanpa memasukkan hal-hal teknis, seperti ketentuan “mampu secara jasmani dan rohani”. *Suara Pembaruan* menekankan hal ini dalam kutipan teks berikut:

“...seharusnya hal-hal teknis tidak perlu dimasukkan ke dalam perundang-undangan...”²⁷⁸

“Sangat mungkin, pertimbangan soal teknis inilah yang mendorong Komisi Konstitusi (KK) mencoret syarat “mampu secara rohani dan jasmani” tersebut dari Pasal 6 UUD ’45. Jadi dalam rumusan akhir Pasal 6 UUD ’45 syarat seperti itu sudah dihilangkan oleh KK.”²⁷⁹

Suara Pembaruan dalam teks itu, seakan menyatakan menolak ketentuan teknis tercantum dalam konstitusi tetapi sebaliknya justru menunjukkan posisi menyetujui keputusan Komisi Konstitusi. Untuk lebih menekankan bidang posisi ini, *Suara Pembaruan* menyatakan:

“...dari prinsip demokrasi, apalagi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pilihannya. Karenanya, kedaulatan rakyat tersebut tidak pada tempatnya diintervensi oleh peraturan birokrasi...UUD ’45 tidak mengenal diskriminasi. Selain jaminan Pasal 27 UUD ’45, Pasal 28D Ayat (3) secara tegas menyatakan, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”²⁸⁰

Dalam teks itu, *Suara Pembaruan* secara implisit menegaskan, ketentuan “mampu secara rohani dan jasmani” capres-cawapres bersifat diskriminatif, dalam hal ini terhadap “penyandang disabilitas”. Padahal diskriminasi, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan bertentangan pula dengan prinsip konstitusi negara (UUD ’45). Konstitusi negara tidak mengenal diskriminasi. Dengan kata lain, *Suara Pembaruan* ingin menekankan, setiap produk hukum harus selaras dengan prinsip demokrasi dan konstitusi negara, yakni: tidak boleh diskriminatif.

²⁷⁸ *Suara Pembaruan*, “Mampu secara Rohani dan Jasmani” Dicoret”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004.

²⁷⁹ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004; Lihat juga Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004, “Mampu secara Rohani dan Jasmani” Dicoret”.

²⁸⁰ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004

2.1.2. Perangkat Pembingkai

2.1.2.1. Metafora: Sasaran Tembak

Metafora “sasaran tembak” digunakan *Suara Pembaruan* untuk menggambarkan produk hukum - dalam hal ini terkait dengan Pilpres - digunakan oleh elit politik atau kalangan tertentu yang berpengaruh kuat dalam merancang dan menyusun legislasi dengan tujuan untuk menghalangi Gus Dur menjadi capres:

“Ada kesan kuat, sasaran tembak dari syarat “mampu secara rohani dan jasmani” bagi capres dan cawapres adalah Gus Dur.”²⁸¹

Suara Pembaruan memilih menampilkan metafora tersebut, untuk membangun kesan, suatu produk hukum di Indonesia dapat dikemas untuk tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan elit politik yang berpengaruh kuat dalam legislasi. Dengan metafora itu, *Suara Pembaruan* juga ingin mengesankan, Gus Dur merupakan korban dari elit politik yang berpengaruh dalam penyusunan legislasi. Hal ini diperkuat *Suara Pembaruan* dengan metaforsi “aroma konspirasi politik” untuk menggambarkan bahwa dalam penyusunan legislasi tersebut terjadi tarik-menarik kepentingan antarelit politik.

2.1.2.2. Catchphrases: Pelajaran dari Kasus Gus Dur

Suara Pembaruan menghadirkan komponen *catchphrases* untuk menyusun bingkai inti. *Suara Pembaruan* menonjolkan slogan “pelajaran dari kasus Gus Dur”, “pembelajaran ke depan”, “berakibat fatal” untuk menggambarkan kasus penolakan Gus Dur oleh KPU bukan sekadar kasus pribadi tetapi memiliki arti penting bagi kepentingan bersama. Dengan slogan ini, *Suara Pembaruan* ingin mengesankan, kasus penolakan Gus Dur oleh KPU merupakan bukti empiris

²⁸¹ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004

tentang perlunya menata kembali sistem legislasi, secara khusus menyangkut pengajuan capres-cawapres pada masa depan.

Jargon sloganistis: “diwarnai aroma konspirasi politik” digunakan *Suara Pembaruan* untuk menggambarkan kondisi yang terjadi ketika DPR membahas RUU Pemilu Pilpres. Dengan jargon sloganistis ini, *Suara Pembaruan* ingin membangun kesan, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres merupakan produk “konspirasi politik”. Sekaligus pula, mempengaruhi persepsi pembaca tentang citra DPR sebagai melakukan “konspirasi” ketika membahas RUU dan menetapkan UU.

Suara Pembaruan juga menekankan arti penting meninjau produk hukum yang tidak sesuai dengan UUD '45 dan bertentangan dengan demokrasi, dengan menampilkan jargon sloganistis:

“...dari prinsip demokrasi...rakyatlah yang berdaulat menentukan pilihannya. Karenanya, kedaulatan rakyat tersebut tidak pada tempatnya diintervensi oleh peraturan birokrasi...UUD '45 tidak mengenal diskriminasi.”²⁸²

Dengan jargon sloganistis itu, *Suara Pembaruan* ingin mengarahkan pembaca untuk mempersepsi, setiap produk hukum tidak boleh diskriminatif karena bertentangan dengan UUD '45 dan prinsip demokrasi.

2.1.2.3. *Exemplars*: UU Pemilu Pilpres Hasil Kompromi Elit Politik

Suara Pembaruan memakai komponen *exemplars* untuk menunjukkan hal yang tidak diperhatikan oleh elite politik di MPR ketika mengamandemen UUD '45, seperti tentang faktor insidental, dan fakta sejarah Gus Dur pernah menjadi Presiden:

²⁸² *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004.

“...tidak terpikir di benak mereka, bagaimana jadinya apabila Presiden dan Wakil Presiden terpilih tiba-tiba menjadi orang yang tidak mampu (disabilitas) di tengah masa baktinya karena berbagai hal.”²⁸³

“...Gus Dur tahun 1999 lalu melalui Sidang Umum MPR terpilih sebagai Presiden RI. Fakta itu menunjukkan bahwa disabilitas seseorang dalam penglihatan, misalnya, tidak menjadi alasan menolak yang bersangkutan menjadi presiden”²⁸⁴

Dengan komponen *exemplars* itu, *Suara Pembaruan* memberi aksentuasi, tentang dimensi kelemahan yang terjadi dalam proses legislasi di MPR. Hal ini, juga ditunjukkan *Suara Pembaruan* terjadi ketika DPR membahas RUU Pemilu Pilpres, dengan menampilkan *exemplars* :

“...sebenarnya sewaktu DPR membahas RUU Pemilu Pilpres terutama mengenai syarat “mampu secara rohani dan jasmani” diwarnai aroma konspirasi politik. Buktinya, syarat S-1 bagi Capres dan Cawapres dalam RUU dihilangkan karena kalau tidak, maka Megawati Soekarnoputri akan terganjal. Demikian juga tadinya Amien Rais bisa tidak memenuhi syarat menjadi Capres apabila 15 persen perolehan suara secara nasional oleh partai politik diterima sebagai syarat mengajukan Capres. Akhirnya, disepakati dan diatur dalam Peraturan Peralihan UU Pilpres bahwa partai politik yang memperoleh 5 persen suara secara nasional dalam Pemilu, berhak mengajukan capres dan cawapres. Sedang syarat “mampu secara rohani dan jasmani” ternyata tidak dapat dikompromikan membuat Gus Dur gagal maju menjadi Capres dalam Pemilu Pilpres, 5 Juli nanti.”²⁸⁵

Teks itu, memperlihatkan bahwa dalam pembahasan RUU Pemilu Pilpres terjadi “konspirasi politik” di antara elite politik yang berkepentingan untuk tampil menjadi capres. Disebut, Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais berhasil mengkompromikan kepentingannya, sedangkan Gus Dur gagal. Dengan cara itu, *Suara Pembaruan* seakan bermaksud membangun kesan, “konspirasi politik” tersebut adalah antara Megawati Soekarnoputri dengan Amien Rais berhadapan dengan Gus Dur. Gus Dur dikesankan sebagai korban “konspirasi politik”. Dengan

²⁸³ *Suara Pembaruan*, “Mampu secara Rohani dan Jasmani” Dicoret”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004.

²⁸⁴ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004.

²⁸⁵ *Ibid.*

demikian, *Suara Pembaruan* ingin mengesankan, UU Pilpres sebagai produk hukum merupakan hasil kompromi politik, yang disesuaikan dengan kepentingan elite politik tertentu saja.

2.1.2.4. *Depictions*: Mencoret, Konspirasi Politik

Suara Pembaruan memilih kata, istilah, dan kalimat (*depictions*) untuk memberi aksentuasi tertentu sekaligus mengarahkan pembaca ke bingkai inti, hukum tidak boleh diskriminatif. *Suara Pembaruan* menggunakan kata “mencoret” untuk menunjukkan tidak ada lagi syarat “mampu secara rohani dan jasmani” dalam Pasal 6 UUD '45 sesuai keputusan Komisi Konstitusi (KK). Dengan memakai kata “mencoret”, *Suara Pembaruan* ingin mengesankan, MPR selaku perancang dan penyusun legislasi, terbukti tidak seharusnya memasukkan “soal teknis” seperti syarat “mampu secara rohani dan jasmani” dalam “hukum dasar tertulis”.

Saat menggambarkan kondisi ketika DPR membahas RUU Pilpres, *Suara Pembaruan* memilih memakai istilah “konspirasi politik” untuk menekankan, dalam proses tersebut terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya. Karena istilah “konspirasi” (komplotan, persekongkolan) cenderung berkonotasi negatif. Istilah “penyandang disabilitas” digunakan *Suara Pembaruan* sebagai eufemisme ketika menyatakan: “Seperti diketahui Gus Dur tergolong penyandang disabilitas berkeunaan dengan penglihatannya”.²⁸⁶

2.1.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

2.1.3.1. *Roots*: Perancang dan Penyusun Legislasi Sering Kurang Tuntas

Suara Pembaruan menyusun bingkai inti dengan memanfaatkan argumentasi berlandaskan penjelasan kausal (*roots*):

²⁸⁶ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004.

“...harus diakui, perancang dan penyusun legilasi kita sering kurang tuntas dalam membuat aturan sehingga menimbulkan multiinterpretasi atau menghadapi kendala dalam pelaksanaan di lapangan...Sebab tidak jelas hal-hal apa saja yang seharusnya diatur dalam konstitusi, demikian juga dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain. Sebab itu, terjadi kejanggalan, yaitu materi pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan induknya.”²⁸⁷

Dengan menghadirkan *roots* itu, *Suara Pembaruan* membangun kesan tentang kinerja perancang dan penyusun legislasi yang serung kurang tuntas dalam membuat aturan. *Roots* ini juga digunakan untuk menekankan arti penting melakukan penataan sistem legislasi agar setiap produk hukum selaras dengan ketentuan induknya, yakni konstitusi negara.

2.1.3.2. *Appeals to principle*: UUD '45 Tidak Mengenal Diskriminasi

Suara Pembaruan menghadirkan klaim moral dogmatis (*appeals to principle*) dengan menonjolkan:

“...dari prinsip demokrasi, apalagi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pilihannya. Karenanya, kedaulatan rakyat tersebut tidak pada tempatnya diintervensi oleh peraturan birokrasi ...UUD '45 tidak mengenal diskriminasi. Selain jaminan Pasal 27 UUD '45, Pasal 28D Ayat (3) secara tegas mengatakan, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”²⁸⁸

Dengan *appeals to principle* itu, *Suara Pembaruan* ingin menegaskan, tidak ada alasan untuk membuat suatu produk hukum - dalam hal ini UU Pilpres - menjadi diskriminatif kecuali jika harus bertentangan prinsip demokrasi dan konstitusi negara.

²⁸⁷ *Suara Pembaruan*, “Mampu secara Rohani dan Jasmani” Dicoret”, Tajuk Rencana, edisi 1 Mei 2004.

²⁸⁸ *Suara Pembaruan*, “Pelajaran dari Kasus Gus Dur”, Tajuk Rencana, edisi 24 Mei 2004

2.2. Perspektif: Demokrasi Tidak Mengenal Diskriminasi

Suara Pembaruan mengkonstruksi dan memaknai persamaan di depan hukum dengan menyoroti kasus penolakan Gus Dur menjadi capres oleh KPU. Kasus ini, dalam pandangan *Suara Pembaruan*, bukan sekadar persoalan Gus Dur tetapi merupakan refleksi dari puncak gunung es permasalahan legislasi yang terdapat dalam sistem legislasi di Indonesia.

Suara Pembaruan menunjukkan hal itu dengan menampilkan fakta keputusan Komisi Konstitusi mencoret ketentuan bersifat teknis, yakni “mampu secara rohani dan jasmani”, dari Pasal 6 UUD '45 hasil amandemen oleh elit politik di MPR. Karena sebenarnya soal teknis tidak perlu dimasukkan ke dalam hukum dasar.

Fakta lain yang ditampilkan *Suara Pembaruan* adalah kondisi ketika DPR membahas RUU tentang Pilpres terjadi “konspirasi politik” oleh elit politik yang berkepentingan menghalangi Gus Dur tampil sebagai capres. Dengan demikian, kedua lembaga legislasi ini, MPR dan DPR, dikesankan *Suara Pembaruan* melakukan sesuatu yang tidak proporsional. *Suara Pembaruan* juga menonjolkan, MPR tidak mempertimbangkan berbagai komponen mendasar, seperti prinsip demokrasi dan hakikat UUD '45 yang tidak mengenal diskriminasi.

Dengan konstruksi fakta itu, *Suara Pembaruan* mengesankan, kasus penolakan Gus Dur menjadi capres oleh KPU merupakan hasil “konspirasi elit politik” yang berpengaruh dalam sistem legislasi. Sehubungan dengan itu, *Suara Pembaruan* menekankan makna substansial kasus penolakan Gus Dur bagi masa depan hukum dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Suara Pembaruan secara implisit memposisikan diri memandang produk hukum tentang syarat menjadi capres pada pilpres 2004 adalah diskriminatif. Padahal, menurut *Suara Pembaruan*, berdasarkan prinsip demokrasi sebagaimana amanat UUD '45, setiap produk hukum di Indonesia tidak boleh diskriminatif. Hukum yang diskriminatif bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi negara (UUD '45).

Gagasan itu, dikonstruksi *Suara Pembaruan* dengan menggunakan berbagai komponen *frame*, disertai dengan menekankan arti penting menata sistem legislasi sehingga tidak muncul lagi produk hukum yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi negara. Gagasan *Suara Pembaruan* ini jelas beranjak dari pengertian demokrasi yang komprehensif. Ini menunjuk, *Suara Pembaruan* memilih menggunakan perspektif (*media package*) demokratisasi.

2.3. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

Suara Pembaruan menyajikan ulasan tentang kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan, dengan menampilkan 4 item rubrik *Tajuk Rencana*, masing-masing berjudul:

“Jangan Salah Pilih yang Suka Ingkar Janji” (edisi 21 Juni 2004), “Memilih Mandataris Rakyat?” (edisi 2 Juli 2004), “Memilih Tanpa GBHN” (edisi 5 Juli 2004), “Golput Lagi, Golput Lagi” (edisi 20 Juli 2004).

2.3.1. Bingkai Inti: Rakyat Berdaulat Meyakinkan Diri Sebelum Menentukan Pilihan

Suara Pembaruan membangun bingkai inti, rakyat berdaulat meyakinkan diri sebelum menentukan pilihan, dengan mengedepankan fakta hukum tentang kedudukan presiden terpilih dalam sistem politik Indonesia:

“...Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah jalan hanya karena tidak memenuhi janji-janji yang diberikannya sewaktu kampanye. Sepanjang

tidak melakukan pelanggaran hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 7 A UUD '45, Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah masa bakti. Lagi pula mengingat Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, maka tidak ada satu institusi pun yang dapat menjatuhkannya kecuali melalui *impeachment*. Satu-satunya pengadilan baginya... paling-paling tidak dipilih lagi pada Pemilu berikutnya.”²⁸⁹

Dengan menunjukkan fakta hukum, kedudukan presiden dalam sistem politik Indonesia sangat kuat, *Suara Pembaruan* ingin mengesankan agar dalam menentukan pilihan, rakyat tidak bersandar pada janji-janji kampanye capres melainkan harus memperhatikan aspek hukum tersebut. Untuk mempertegas hal ini, *Suara Pembaruan* menekankan konsekuensi penting dari pilihan rakyat:

“...sekali kita menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan calon hari ini, berarti kita menyerahkan nasib bangsa dan negara ini kepada pemimpin terpilih untuk lima tahun mendatang dan tanpa GBHN seperti di masa lalu.”²⁹⁰

Suara Pembaruan menghadirkan teks itu, untuk menggambarkan bahwa pilihan rakyat bukan hanya menyangkut kepentingan sebagian rakyat atau kalangan pemilih tertentu melainkan “nasib bangsa dan negara”. Dengan demikian, *Suara Pembaruan* ingin menekankan arti penting mempertimbangkan konsekuensi yang akan dialami bersama, sebelum menentukan pilihan. *Suara Pembaruan* lebih lanjut menegaskan hal ini dengan menyatakan:

“Kita hendak mengatakan, sebelum menjatuhkan pilihan, rakyat perlu meyakinkan diri, pasangan calon mana yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi.”²⁹¹

²⁸⁹ *Suara Pembaruan*, “Jangan Pilih yang Suka Ingkar Janji”, Tajuk Rencana edisi 21 Juni 2004. Fakta ini selalu dijadikan *Suara Pembaruan* untuk mengarahkan ulasannya ketika mengkonstruksi dan memaknai kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan, lihat *Suara Pembaruan*, “Memilih Mandataris Rakyat?”, Tajuk Rencana edisi 3 Juli 2004, dan *Suara Pembaruan*, “Memilih Tanpa GBHN”, Tajuk Rencana edisi 5 Juli 2004.

²⁹⁰ *Suara Pembaruan*, “Memilih Tanpa GBHN”, Tajuk Rencana, edisi 5 Juli 2004.

²⁹¹ *Suara Pembaruan*, “Jangan Pilih yang Suka Ingkar Janji”, Tajuk Rencana, edisi 21 Juni 2004.

Dengan begitu, *Suara Pembaruan* menganggap menentukan pilihan pada pilpres adalah kedaulatan individu rakyat pemilih di mana masing-masing rakyat pemilih bebas menggunakan hak pilihnya secara pribadi.

Tetapi sebelum menetapkan keputusan secara personal, masing-masing rakyat perlu meyakinkan diri capres mana yang lebih tepat dipilih. *Suara Pembaruan* menekankan, capres yang tepat menjadi pilihan adalah “yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi” bukan capres “yang suka ingkar janji”.

Dalam kaitan itu, *Suara Pembaruan* juga menekankan, rakyat patut menggunakan hak pilihnya dan tidak perlu menjadi golput:

“Menurut hemat kita, sikap golput baru ada dasarnya jika ternyata...calon pemilih tidak bebas menentukan pilihannya...Alasan untuk bersikap golput dalam Pemilu 2004 ini pun kurang populer dan kurang beralasan karena berbeda dengan Pemilu era Orde Baru.”²⁹²

2.3.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

2.3.2.1. Metafora: Menjatuhkan Pilihan

Suara Pembaruan menggunakan “menjatuhkan pilihan” sebagai metaforis untuk menekankan arti penting rakyat pemilih untuk meyakinkan diri sebelum menentukan pilihan:

“...sekali kita menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan calon hari ini, berarti kita menyerahkan nasib bangsa dan negara ini kepada pemimpin terpilih untuk lima tahun mendatang dan tanpa GBHN seperti di masa lalu.”²⁹³

Kalimat metaforis itu, diperkuat *Suara Pembaruan* dengan menggambarkan kedudukan presiden terpilih sangat kuat sesuai dengan perubahan sistem politik yang terjadi, “Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah jalan hanya karena tidak

²⁹² *Suara Pembaruan*, “Golput Lagi, Golput Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 20 Juli 2004.

²⁹³ *Suara Pembaruan*, “Memilih Tanpa GBHN”, Tajuk Rencana, edisi 5 Juli 2004.

memenuhi janji-janji yang diberikannya sewaktu kampanye”.²⁹⁴ Dengan ini, *Suara Pembaruan* membangun kesan, rakyat pemilih perlu dan harus benar-benar meyakinkan diri. Hal ini juga sesuai dengan arti ungkapan (*popular wisdom*) yang dihadirkan: “apa yang dilakukan hari ini akan sangat menentukan di hari-hari mendatang”.²⁹⁵

Metafora “membeli kucing dalam karung” dipakai *Suara Pembaruan* untuk menggambarkan cara menentukan pilihan pada pemilu Orde Baru, sedang pada pemilu 2004 “sangat berbeda”.²⁹⁶ Metafora ini dikaitkan *Suara Pembaruan* untuk sekaligus menekankan bahwa rakyat pemilih tidak perlu menjadi golput.

2.3.2.2. *Catchphrases*: Golput Tidak Mau Tau Akan Pemerintah

Suara Pembaruan memakai *catchphrases* berupa jargon dan slogan yang merujuk pada pemikiran atau semangat tertentu. *Suara Pembaruan* juga menghadirkan jargon sloganistik: “Harus disadari konsekuensi golput adalah tidak mau tau akan pemerintah karena bukan pilihannya. Sikap seperti itu membuat Orde Baru mampu bertahan puluhan tahun”²⁹⁷ untuk menekankan arti penting menggunakan hak pilih.

Jargon “nasib bangsa dan negara” dipakai *Suara Pembaruan* untuk menggambarkan bahwa pilihan rakyat secara personal menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Jargon ini dikaitkan pula dengan slogan “sebelum menjatuhkan pilihan”, “sekali kita menjatuhkan pilihan”, untuk menekankan arti penting meyakinkan diri dalam menentukan pilihan.

²⁹⁴ *Suara Pembaruan*, “Jangan Pilih yang Suka Ingkar Janji”, Tajuk Rencana, edisi 21 Juni 2004.

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ *Suara Pembaruan*, “Golput Lagi, Golput Lagi”, Tajuk Rencana, edisi 20 Juli 2004.

²⁹⁷ *Ibid.*

Suara Pembaruan menampilkan jargon “mekanisme demokrasi” untuk menggambarkan bahwa secara konstitusional tidak ada peluang bagi rakyat menggugat atau mengoreksi presiden terpilih.

2.3.2.3. *Exemplars*: Tidak Ada Landasan Hukum Menggugat Presiden

Komponen *exemplars* dipilih *Suara Pembaruan* untuk memberi bobot lebih terhadap pembaca tentang arti penting menentukan pilihan tidak hanya berdasarkan pada janji yang disampaikan capres tertentu ketika kampanye tetapi juga memperhatikan “integritas dan akuntabilitas” capres tersebut. *Suara Pembaruan* menegaskan hal ini dengan menampilkan *exemplars*:

“...kita perlu mengetahui sejak awal bahwa hukum dan konstitusi tidak memberi landasan untuk menggugat dan menjatuhkan Presiden kalau ingkar janji.”²⁹⁸

Dengan *exemplars* itu, selain ingin mengesankan, kedudukan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat berbeda dengan kedudukan presiden yang dipilih oleh MPR, *Suara Pembaruan* juga seakan hendak mengarahkan pembaca untuk mempersepsi, tidak ada lagi landasan hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan pergantian presiden sebelum masa baktinya berakhir seperti pernah terjadi pada Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur.

2.3.2.4. *Depictions*: Jangan Pilih Yang Suka Ingkar Janji

Suara Pembaruan memilih kata, istilah dan kalimat (*depictions*) tertentu untuk mengarahkan pembacanya ke substansi bingkai inti. Difemistis “jangan pilih yang suka ingkar janji” dipakai *Suara Pembaruan* sebagai stigmatisasi terhadap capres-cawapres tertentu yang tidak patut dipilih. Sebaliknya disfemistis

²⁹⁸ *Suara Pembaruan*, “Jangan Pilih yang Suka Ingkar Janji”, Tajuk Rencana, edisi 21 Juni 2004.

“yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi” digunakan *Suara Pembaruan* sebagai stigmatisasi terhadap capres-cawapres yang tepat menjadi pilihan rakyat.

Suara Pembaruan tidak memberi penjelasan lebih lanjut tentang siapa capres “yang suka ingkar janji” dan siapa capres “yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi”. Tetapi dengan *depictions* itu, *Suara Pembaruan* menekankan arti penting “meyakinkan diri” sebelum menentukan pilihan. Dengan memilih menghadirkan kata “meyakinkan diri”, *Suara Pembaruan* ingin menekankan bahwa hal menentukan pilihan pada pilpres adalah keputusan personal atau merupakan kedaulatan individu. Masing-masing rakyat pemilih memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya secara pribadi. Kata ini, ditonjolkan *Suara Pembaruan* menjelang hari pencoblosan untuk mengarahkan pembaca mempertimbangkan kembali siapa capres yang patut dipilih.

Istilah “golput lagi, golput lagi!” ditampilkan *Suara Pembaruan* sebagai judul tajuk rencana untuk memberi kesan ketidaksetujuan terhadap “golput (golongan putih) yang berarti tidak menggunakan hak pilih”.

2.3.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

2.3.3.1. *Roots*: Presiden dan Wakil Presiden Tidak Dapat Dijatuhkan

Suara Pembaruan memakai analisis kausal atau argumentasi pembenar (*roots*) untuk memperkuat bingkai inti. Hal ini, misalnya dapat dilihat dalam kutipan teks berikut:

“Sebab itu, rakyat perlu dengan tenang dan obyektif menilai masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjatuhkan pilihannya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), tanggal 5 Juli nanti. Sebab Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti selama lima tahun masa baktinya tidak dapat dijatuhkan meski kinerjanya tidak memuaskan.”²⁹⁹

²⁹⁹ *Suara Pembaruan*, “Memilih Mandataris Rakyat?”, Tajuk Rencana, edisi 3 Juli 2004.

Suara Pembaruan menganggap, sesuai dengan konstitusi sebagai landasan hukum, presiden terpilih “tidak dapat dijatuhkan” oleh karena itu “rakyat perlu menilai” capres-cawapres yang patut dipilih. Selain untuk menekankan arti penting “meyakinkan diri” sebelum menentukan pilihan, *Suara Pembaruan* menggunakan *roots* ini untuk mengarahkan rakyat pemilih mempersepsi, tindakan untuk “menjatuhkan presiden” adalah inskontitusional atau tidak memiliki landasan hukum.

2.3.3.2. *Appeals to principle: Kualitas Kepemimpinan Menjadi Jaminan*

Suara Pembaruan mengedepankan *appeals to principle* berupa klaim moral, “kualitas kepemimpinan presiden terpilih nanti menjadi jaminan. Sebab kalau mengandalkan kepada sistem pengawasan yang ada, tidak efektif ..”³⁰⁰ untuk lebih mengarahkan pembaca tentang arti penting “meyakinkan diri” sebelum menentukan pilihan.

2.4. *Perspektif: Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Hukum dan Konstitusi*

Suara Pembaruan mengkonstruksi dan memaknai kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan dalam konteks pilpres dengan menonjolkan bingkai inti: rakyat berdaulat meyakinkan diri sebelum menentukan pilihan. Bingkai inti ini dikonstruksi dengan menekankan perubahan sistem politik di Indonesia, sesuai amanat UUD '45, dan menyoroti kompetensi capres-cawapres.

Suara Pembaruan menunjukkan, berdasarkan fakta hukum atau landasan konstitusional, kedudukan presiden terpilih sangat kuat. Lembaga legislatif (MPR dan DPR), sebagai mekanisme demokrasi, tidak lagi berwenang untuk meny-

³⁰⁰ *Suara Pembaruan*, “Memilih Tanpa GBHN”, Tajuk Rencana, edisi 5 Juli 2004.

takan presiden bersalah dan menuntut presiden mundur dari jabatannya. Institusi yang memiliki hak untuk menyatakan presiden melanggar konstitusi adalah Komisi Konstitusi (KK). Pelanggaran terhadap konstitusi adalah soal hukum dan mengkhianati negara, tidak termasuk soal pengingkaran terhadap janji capres pada masa kampanye.

Menurut *Suara Pembaruan*, kendati secara faktual, presiden terbukti mengingkari janji yang disampaikan pada masa kampanye, namun hal tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan untuk mengganti presiden sebelum masa baktinya selama lima tahun berakhir. Karena janji capres bukan merupakan kontrak politik tertulis antara capres dengan rakyat, tidak identik dengan GBHN.

Sehubungan dengan itu, *Suara Pembaruan* menekankan kepada rakyat pemilih untuk meyakinkan diri sebelum menentukan pilihan. Dalam arti, masing-masing rakyat pemilih berlandaskan kedaulatan yang dimiliki perlu melakukan suatu pertimbangan supaya tidak salah mengambil putusan. Hal ini dianggap *Suara Pembaruan* penting, karena pilihan rakyat, yang dilakukan secara personal, menentukan nasib bangsa dan negara.

Aspek yang diajukan *Suara Pembaruan* sebagai referensi dalam meyakinkan diri adalah “jangan pilih yang suka ingkar janji” tetapi pilihlah capres “yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi”. Perihal referensi ini, *Suara Pembaruan* tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan desain ulasan seperti itu, *Suara Pembaruan* mengesankan, tidak mengarahkan rakyat untuk memilih capres tertentu tetapi mempersilahkan rakyat untuk menentukan sendiri dengan memperhatikan perubahan sistem politik.

Dengan demikian, *Suara Pembaruan* mengajukan pendidikan politik terhadap rakyat pemilih, dengan mengedepankan fakta hukum dan konstitusi menyangkut keberadaan presiden terpilih. Ini menunjuk, gagasan pokok *Suara Pembaruan* adalah kedaulatan rakyat menentukan pilihan perlu dan harus merujuk pada hukum dan konstitusi. Gagasan ini beranjak dari pemahaman bahwa kedaulatan rakyat berlandaskan hukum dan konstitusi. Pemahaman ini berada dalam lingkup pengertian demokrasi yang komprehensif. Dengan demikian, perspektif (*media package*) yang digunakan *Suara Pembaruan* adalah demokratisasi.

2.5. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Suara Pembaruan menghadirkan 39 item rubrik *Tajuk Rencana* yang memuat ulasan tentang pelaksanaan pemilihan presiden. Ulasan tersebut didasarkan dengan mengkonstruksi berbagai fakta peristiwa seputar pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama dan kedua. Pada pemilihan presiden putaran pertama, *Suara Pembaruan* menampilkan 18 item, dengan judul:

“Pemilu Pilpres, Dulu dan Sekarang” (edisi 6 Mei 2004), “Mahkamah Konstitusi Diuji” (edisi 7 Mei 2004), “Pesan untuk Para Capres” (edisi 1 Juni 2004), “GBHN Capres Mana?” (edisi 10 Mei 2004), “Pemilihan Presiden dan Resistensi Pasar” (edisi 11 Mei 2004), “Perubahan Makin Menjauh” (edisi 12 Mei 2004), “Ketegangan Politik Berkepanjangan” (edisi 14 Mei 2004), “Menghadapi Kampanye Pemilu Pilpres” (edisi 25 Mei 2004), “Kabinet “Gotong” Sendiri!” (edisi 31 Mei 2004), “KPU Dinilai Kurang Fair” (edisi 6 Juni 2004), “Kampanye Sepi, Respon Dingin Rakyat” (edisi 8 Juni 2004), “KPU versus Panwaslu” (edisi 10 Juni 2004), “Fitnah dan Adu Domba Warnai Pilpres” (edisi 14 Juni 2004), “Pemilu Tanpa Anarki” (edisi 28 Juni 2004), “Pilpres Memerlukan Payung Hukum?” (edisi 29 Juni 2004), “Berharap dari Debat Capres” (edisi 30 Juni 2004), “Menghitung Suara dengan Hati Nurani” (edisi 6 Juli 2004), “Legitimasi Hasil Pemilu, Pertaruhan Besar” (edisi 7 Juli 2004).

Pada pemilihan presiden putaran kedua, *Suara Pembaruan* menampilkan 21 item, terdiri dari judul:

“Siap-siap Maju ke Putaran Kedua” (edisi 8 Juli 2004), “Koalisi Pilpres Putaran Kedua” (edisi 12 Juli 2004), “Siap Menang, Siap Kalah?” (edisi 13 Juli 2004), “Menjelang Pilpres II, Megawati Cuti?” (edisi 27 Juli 2004), “Masih Ada yang Antidemokrasi” (edisi 28 Juli 2004), “Koalisi, Jebakan atau Penguatan” (edisi 29 Juli 2004), “Gugatan Wiranto dan Partai Golkar” (edisi 3 Agustus 2004), “Biarlah Demokratisasi yang Menang” (edisi 6 Agustus 2004), “Putusan MK Akhiri Ketegangan Politik” (edisi 10 Agustus 2004), “RAPBN dan Pilpres” (edisi 18 Agustus 2004), “Bahaya, Koalisi Meninggalkan Rakyat” (edisi 20 Agustus 2004), “Anomali dalam Politik” (edisi 23 Agustus 2004), “Panwaslu dan Fairness Pilpres II” (edisi 25 Agustus 2004), “RUU TNI Menjelang Pilpres II” (edisi 27 Agustus 2004), “Sikap Netral Amien dan Wiranto?” (edisi 30 Agustus 2004), “Pragmatisme Versus Program” (edisi 2 September 2004), “Mappareasa, Korban atau Dikorbankan?” (edisi 4 September 2004), “Anggota TNI/Polri Memilih?” (edisi 7 September 2004), “Waspadai Kecurangan Pilpres II” (edisi 17 September 2004), “Indahnya Kampanye yang Tenang” (edisi 18 September 2004), “Lain Mega, Lain SBY” (20 September 2004).

2.5.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Belum *Fairness*, Perlu Aturan yang

Rinci

Suara Pembaruan mengkonstruksi bingkai inti, pemilihan presiden belum *fairness*, perlu aturan yang rinci, dengan memilih menyoroti pelaksanaan pilpres dari sisi fakta perangkat perundangan-undangan, yaitu UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Pilpres.

Suara Pembaruan menggambarkan, pilpres yang *fairness* adalah jujur, adil, bebas, damai, terlaksana melalui cara-cara tanpa kekerasan, tanpa anarki. Capres-cawapres bersama tim sukses menjunjung sportivitas, siap menang dan siap kalah, penghitungan suara transparan. Semua pihak mematuhi ketentuan Undang-undang.³⁰¹

Kinerja KPU selaku penyelenggara pilpres, ditunjukkan *Suara Pembaruan*, terlambat mendistribusikan logistik pilpres. Sesuai ketentuan UU Pilpres selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum pemungutan suara, pada 25 Juni 2004,

³⁰¹ *Suara Pembaruan*, “Siap Menang, Siap Kalah?”, Tajuk Rencana, edisi 13 Juli 2004; *Suara Pembaruan*, “Pemilu Tanpa Anarki”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004, “Sikap mengabaikan kritik dan tuduhan dengan balik menuduh juga tidak fair hanya terkesan membela diri karena takut ketahuan belangnya.”; *Suara Pembaruan*, “Masih Ada yang Antidemokrasi”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juli 2004.

seluruh logistik sudah harus diterima oleh PPS di seluruh Indonesia. Ternyata, sesuai jadwal yang ditentukan UU, 41 kabupaten/kota belum menerima logistik pilpres:

“...sebenarnya dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 19 Ayat (3) UU Pilpres karena masih banyak KPU kabupaten/kota yang belum menerima logistik Pemilu tanggal 25 Juni lalu, maka bukan mustahil kenyataan itu dijadikan alasan menyatakan Pilpres tidak sah secara hukum. Karena itu kita mengajak KPU agar bersikap antisipatif, dalam arti mengamankan Pilpres dari kemungkinan gugatan tidak sah dengan menyiapkan payung hukum, yaitu Perppu untuk mengamandemen beberapa pasal dari UU No 23 Tahun 2003 tentang Pilpres.”³⁰²

Dalam teks itu, KPU dengan jelas dinyatakan KPU melanggar Pasal 19 Ayat (3) UU Pilpres, tetapi *Suara Pembaruan* lebih menekankan agar KPU “menyiapkan payung hukum” sehingga pilpres dapat terhindar dari masalah hukum. Dengan menampilkan teks tersebut, *Suara Pembaruan* secara implisit mengesankan, citra KPU sebagai tidak dapat melakukan UU Pilpres secara konsisten dan lambat merespon terhadap permasalahan yang terjadi.³⁰³ Sehubungan dengan ini, *Suara Pembaruan* secara eksplisit menunjuk KPU bersikap tidak *fair* karena tidak konsisten menerapkan ketentuan UU Pemilu Pilpres terhadap semua capres:

“KPU ternyata bersikap tidak *fair*, bahkan, terkesan menutup mata terhadap pelanggaran dana kampanye legislatif, 5 April lalu dan dana kampanye pemilu pilpres sekarang. KPU tidak pernah bersuara keras seperti terhadap penolakan capres Gus Dur yang menyatakan bahwa ketentuan perundang-undangan bersifat final dan mengikat...Perlu diingatkan, ketentuan UU Pemilu itu bertujuan memenuhi tuntutan transparansi dan demokratisasi. Demikian juga keterbukaan mengumumkan kepada publik siapa saja yang

³⁰² *Suara Pembaruan*, “Pilpres Memerlukan Payung Hukum?”, Tajuk Rencana, edisi 29 Juni 2004. Kinerja KPU yang lambat merespon masalah kartu suara yang dinyatakan batal karena ikut tercoblos halaman judulnya, tapi kemudian KPU menyatakan surat suara tersebut adalah sah dan harus dilakukan penghitungan ulang dimaknai *Suara Pembaruan* sebagai KPU mempertaruhkan legitimasi hasil pilpres putaran pertama, lihat “Legitimasi Hasil Pemilu, Pertaruhan Besar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004.

³⁰³ Kelambatan KPU merespon masalah kartu suara yang dinyatakan batal karena ikut tercoblos halaman judulnya, tapi kemudian KPU menyatakan surat suara tersebut adalah sah dan harus dilakukan penghitungan ulang dimaknai *Suara Pembaruan* sebagai KPU mempertaruhkan legitimasi hasil pilpres putaran pertama, lihat “Legitimasi Hasil Pemilu, Pertaruhan Besar”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juli 2004.

memberi sumbangan dana kampanye pemilu bertujuan mencegah terjadinya pencucian uang (*money laundering*). Sikap KPU yang terkesan enggan menegur pasangan calon yang melanggar ketentuan hukum berkenaan dengan dana kampanye ini, sama artinya bahwa lembaga yang diberi wewenang penuh menyelenggarakan pemilu tersebut telah menyalahi aturan.”³⁰⁴

Dengan menghadirkan fakta kinerja KPU tersebut, *Suara Pembaruan* seakan ingin menegaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu cenderung berpihak pada kekuatan politik atau capres tertentu. Namun kendati KPU melakukan kesalahan yang dapat mengacaukan pilpres, perangkat perundang-undangan tidak mengatur saksi tegas bagi KPU. Hal ini ditunjukkan *Suara Pembaruan* dalam kutipan teks berikut:

“Perangkat perundang-undangan yang bertalian dengan Pemilu dan UU tentang Mahkamah Konstitusi, tidak mengatur sanksi bagi KPU yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pelaksanaan Pemilu kacau. Paling-paling pejabat KPU diberhentikan karena melanggar sumpah/janji dan kode etik. Sebab itu, KPU dengan enteng selalu mengatakan, kalau tidak puas atas pelaksanaan dan penghitungan suara Pemilu, silakan ajukan ke MK, dan ada kesan keputusan MK selalu menguntungkan KPU.”³⁰⁵

Dalam kutipan teks itu, *Suara Pembaruan* mengesankan citra KPU tidak berupaya menyelesaikan sendiri masalah pelaksanaan pilpres tetapi lebih menghendaki agar gugatan diselesaikan melalui MK. Setiap keputusan MK, disebut *Suara Pembaruan*, adalah final dan mengikat, dalam arti tidak dapat digugat lagi.³⁰⁶

Masih mengenai KPU, *Suara Pembaruan* juga menunjukkan bahwa Panwaslu sebagai pengawas pemilu tidak berfungsi efektif, dalam arti tidak dapat menegakkan pelaksanaan pilpres secara *fairness*, karena KPU tidak konsisten menerapkan ketentuan UU Pemilu Pilpres. KPU disebut mendominasi Panwaslu

³⁰⁴ *Suara Pembaruan*, “KPU Dinilai Kurang Fair”, Tajuk Rencana, edisi 7 Juni 2004.

³⁰⁵ *Suara Pembaruan*, “Mahkamah Konstitusi Diuji”, Tajuk Rencana, edisi 7 Mei 2004.

³⁰⁶ *Ibid.* Lihat juga *Suara Pembaruan*, “Putusan MK Akhiri Ketegangan Politik”, Tajuk Rencana, edisi 10 Agustus 2004.

serta kurang mendukung Panwaslu untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pilpres. *Suara Pembaruan* menegaskan hal ini dengan menyatakan:

“Menurut ketentuan Pasal 76 UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Pilpres, dengan tegas dikatakan bahwa Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa Pemilu Pilpres...Tapi dalam kenyataannya terkesan Panwaslu menjadi subordinasi dari KPU...KPU menganggap yang lebih berwenang menafsirkan UU Pemilu adalah pihaknya, bukan Panwaslu...”³⁰⁷

Selain itu, pada pilpres putaran kedua, *Suara Pembaruan* memandang KPU tidak menetapkan aturan yang jelas mengenai apa yang dikategorikan sebagai kampanye atau bukan kampanye:

“Menurut UU No 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, kampanye Pilpres I berlangsung 30 hari, sedangkan untuk Pilpres II 20 September, hanya tiga hari, yaitu tanggal 14, 15 dan 16 September 2004. Itupun hanya berupa penajaman visi, misi, dan program pasangan calon yang difasilitasi KPU. Jadi, tidak ada lagi rapat umum, tatap muka dan dialog, pertemuan terbatas,...Masalahnya sekarang,...siapa menjamin tidak akan ada kampanye terselubung, mencuri *start* dan bentuk-bentuk kegiatan lain yang dapat diartikan sebagai kampanye. Sampai sekarang belum ada aturan yang jelas dari KPU, bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kampanye atau yang bukan kampanye...”³⁰⁸

Ketidakjelasan aturan itu, dikesankan *Suara Pembaruan*, lebih menguntungkan capres tertentu serta menimbulkan masalah pengawasan pemilu:

“Masalah pengawasan dalam UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan, menjadi masukan berharga bagi penyusunan UU Pilpres yang lebih baik ke depan. Sebab seperti yang terjadi sekarang, Panwaslu tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap berbagai kecurangan yang ada. Banyak pelanggaran terjadi terhadap aturan main pemilu, tapi Panwaslu hanya menampung, tidak dapat menindaklanjuti menuntaskan berbagai pelanggaran itu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tampaknya tidak sepenuhnya mandiri, sehingga terkesan memihak atau enggan menolak keinginan capres tertentu. Berbagai faktor itulah yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan yang berbeda di antara dua capres menjelang pemungutan suara hari ini.”³⁰⁹

³⁰⁷ *Suara Pembaruan*, “KPU versus Panwaslu”, Tajuk Rencana, edisi 10 Juni 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditekankan dalam *Suara Pembaruan* “Panwaslu dan Fairness Pilpres II”, Tajuk Rencana, edisi 25 Agustus 2004, “untuk tercapainya *fairness* dalam Pilpres II ini, seyogianya KPU memberi dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu.”

³⁰⁸ *Suara Pembaruan*, “Menjelang Pilpres II, Megawati Cuti?”, Tajuk Rencana, edisi 27 Juli 2004.

³⁰⁹ *Suara Pembaruan*, “Lain Mega, Lain SBY”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004.

Suara Pembaruan lebih lanjut menunjuk, pada pilpres putaran kedua, capres Megawati melakukan aktivitas bertemu massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur sedang capres SBY tidak bisa melakukan kegiatan sejenis tetapi SBY mengikuti ujian program doktor di IPB. Meski kegiatan capres Megawati tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran, namun tidak dapat ditindak karena KPU tidak menetapkan aturan tentang kegiatan yang dikategorikan sebagai kampanye. Namun, dengan menghadirkan fakta ini, *Suara Pembaruan* secara implisit mengesankan SBY sebagai mematuhi ketentuan UU Pilpres sedangkan Megawati dikesankan melanggar ketentuan UU Pilpres.

Dalam pada itu, *Suara Pembaruan* juga mengesankan citra capres Megawati sebagai tengah menjabat presiden (*incumbent president*) menggunakan kekuasaannya mencapai kepentingan politik pribadi, seperti mendesak pembahasan RUU TNI, menjadikan RAPBN sebagai komoditas politik, dan melakukan berbagai manuver politik lain.³¹⁰

Sementara ketika manuver politik tersebut terungkap, seperti kasus keberpihakan Kapolwil Bayumas yang mengindikasikan ketidaknetralan institusi

³¹⁰ Lihat *Suara Pembaruan*, "RUU TNI Menjelang Pilpres II", Tajuk Rencana, edisi 27 Agustus 2004, "...ada kesan kuat tentang muatan politik di balik desakan perampungan segera RUU TNI itu. Karena hal itu tergolong *abuse of power* dari pihak penguasa, semua pihak harus menolaknya"; *Suara Pembaruan*, "RAPBN dan Pilpres", Tajuk Rencana, edisi 18 Agustus 2004, "Tahun 2005, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen. Sekali lagi, asumsi pertumbuhan itu pun dinilai tidak realistis...Kita juga akan sangat khawatir, apabila RAPBN lantas dijadikan komoditas politik,"; *Suara Pembaruan*, "Panwaslu dan Fairness Pilpres II", Tajuk Rencana, edisi 25 Agustus 2004, "Capres Megawati Soekarnoputri yang tengah menjabat presiden (*incumbent presiden*) sehingga sangat mungkin berbagai instansi terpengaruh bersikap memihak baik secara langsung maupun secara sembunyi-sembunyi"; Juga dalam *Suara Pembaruan*, "Menjelang Pilpres II, Megawati Cuti?", Tajuk Rencana, edisi 27 Juli 2004, "...sejumlah manuver politik yang dilakukan oleh Capres Megawati akhir-akhir ini, tidak lepas dari kedudukannya sebagai presiden..."; Lihat juga *Suara Pembaruan*, "Biarlah Demokratisasi yang Menang", Tajuk Rencana, edisi 6 Agustus 2004; *Suara Pembaruan* juga mengesankan citra tertentu pada Megawati, ketika mengkonstruksi tiga menteri Kabinet Gotong Royong mengundurkan diri untuk kemudian menjadi capres, dengan menganggap hal tersebut sebagai indikasi pemerintahan Mega tidak solid, lihat *Suara Pembaruan*, "Kabinet "Gotong" Sendiri!", Tajuk Rencana, edisi 31 Mei 2004.

Polri, justru yang bersangkutan dikorbankan.³¹¹ Dengan menonjolkan pelbagai hal dikaitkan dengan citra capres Megawati, *Suara Pembaruan* secara implisit sekaligus pula membangun kesan kurang menghendaki Megawati memenangkan pilpres.³¹²

Sehubungan dengan konstruksi bingkai inti, *Suara Pembaruan* menyoroti netralitas TNI/Polri dalam pemilu sebagai tidak didasarkan pada UUD '45 karena UUD '45 tidak mengenal diskriminasi, dan oleh karena itu perlu dikaji secara publik:

“...larangan penggunaan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri hanya dimuat dalam dalam ketentuan peralihan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, maka perlu dikaji secara khusus keinginan supaya anggota TNI dan Polri menggunakan hak memilih pada Pemilu di masa depan. Hal itu perlu diwacanakan secara publik agar persoalan transparan dan mengundang partisipasi masyarakat luas.”³¹³

Suara Pembaruan juga mengemukakan tidak setuju pada keputusan pihak legislatif yang memisah pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres. Karena sebenarnya berdasarkan amanat Pasal 22e UUD '45 pemilu dilakukan secara sekaligus, tidak dipisah pemilu legislatif dan pemilu pilpres:

“...pemisahan Pemilu legislatif dan Pemilu Pilpres dalam dua UU sejak semula diprotes karena Pasal 22E UUD '45 menegaskan, Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Tapi pihak legislatif bersikukuh memisah Pemilu legislatif dan

³¹¹ *Suara Pembaruan*, “Mappareasa, Korban atau Dikorbankan?”, Tajuk Rencana, edisi 4 September 2004. Tentang kasus lain yang mengindikasikan ketidaknetralan pejabat pemerintah pada pilres, lihat *Suara Pembaruan*, “Panwaslu dan Fairness Pilpres II”, Tajuk Rencana, edisi 25 Agustus 2004.

³¹² Kesan ini juga ditunjukkan *Suara Pembaruan* ketika mengkonstruksi “sikap netral Amien” dengan memilih mengutip penjelasan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais, “ Mereka bilang netral, tapi masih lebih ‘miring’ ke arah SBY. Jadi memang lebih dari separuh, 55 persen lebih meminta bersikap netral, namun arahnya lebih ke SBY”. Lihat juga *Suara Pembaruan*, “Sikap Netral Amien dan Wiranto?”, Tajuk Rencana, edisi 30 Agustus 2004; Ketika mengkonstruksi perihal koalisi, *Suara Pembaruan* secara implisit menghendaki pergantian presiden, “...mengharapkan pembaruan hasil Pemilu 2004 ini, ” lihat *Suara Pembaruan*, “Koalisi Pilpres Putaran Kedua”, Tajuk Rencana, edisi 12 Juli 2004.

³¹³ *Suara Pembaruan*, “Anggota TNI/Polri Memilih?”, Tajuk Rencana, edisi 7 September 2004.

Pemilu Pilpres, bahkan Pemilu Pilpres dimungkinkan dilakukan dua putaran.”³¹⁴

Selain mengesankan keputusan badan legislatif tersebut bertentangan dengan amanat UUD '45, *Suara Pembaruan* juga menunjuk, dalam jangka waktu antara pelaksanaan pemilu legislatif (5 April 2004) hingga terpilihnya presiden definitif, terjadi ketidakpastian dan ketegangan politik:

“Jadi, ada sekitar empat bulan masyarakat dibiarkan berada dalam ketidakpastian dan ketegangan politik. Itu kalau Pemilu Pilpres tuntas pada putaran pertama yang penetapan pengumuman hasilnya dilakukan tanggal 26 Juli 2004. Kalau Pemilu Pilpres sampai ke putaran kedua, maka penetapan pengumuman hasilnya dilakukan 20 September 2004. Itu berarti, enam bulan lamanya rakyat dibiarkan dalam ketidakpastian dan ketegangan politik...kegiatan di berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi, agak stagnan, ...ditambah lagi ketegangan karena manuver para elite mencari-cari pasangan capres dan cawapres, dan kekhawatiran akan konflik baik horizontal maupun vertikal dalam kampanye Pemilu Pilpres...”³¹⁵

Ketidakpastian dan ketegangan politik berpotensi terjadi karena perangkat perundang-undangan juga tidak mengatur peralihan antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru. *Suara Pembaruan* mengandaikan, jika capres Megawati sebagai tengah menjabat presiden (*incumbent president*) tidak terpilih pada pilpres pu-

³¹⁴ *Suara Pembaruan*, “Ketegangan Politik Berkepanjangan”, Tajuk Rencana, edisi 14 Mei 2004. Indikasi terjadinya “ketegangan politik” digambarkan Fakta menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dimaknai *Suara Pembaruan* sebagai sentimen negatif pasar terhadap pelaksanaan pilpres dan merupakan indikasi terjadinya “ketegangan politik” di kalangan pelaku pasar, lihat *Suara Pembaruan*, “Pemilihan Presiden dan Resistensi Pasar”, Tajuk Rencana, edisi 11 Mei 2004. Kondisi ketegangan politik, seperti terjadinya demonstrasi, dukung-mendukung capres, dan lain-lain, juga digambarkan dalam *Suara Pembaruan*, “Menghadapi Kampanye Pemilu Pilpres”, Tajuk Rencana, edisi 25 Mei 2004.

³¹⁵ *Suara Pembaruan*, “Ketegangan Politik Berkepanjangan”, Tajuk Rencana, edisi 14 Mei 2004. Indikasi “ketegangan politik” tercermin dari sentimen negatif pelaku pasar, yakni dengan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, lihat *Suara Pembaruan*, “Pemilihan Presiden dan Resistensi Pasar”, Tajuk Rencana, edisi 11 Mei 2004. Kondisi ketegangan politik, seperti terjadinya demonstrasi, dukung-mendukung capres, dan lain-lain, juga digambarkan dalam *Suara Pembaruan*, “Menghadapi Kampanye Pemilu Pilpres”, Tajuk Rencana, edisi 25 Mei 2004. Ketegangan politik juga dipengaruhi oleh mundurnya beberapa menteri kabinet Presiden Megawati, dan kemudian menjadi capres, “...banyaknya jabatan menteri *ad interim* dalam kabinet pelangi sekarang ialah, Presiden Megawati dibiarkan menggotong sendiri beban berat sampai ke garis *finish*, yaitu akhir masa bakti tanggal 20 Oktober 2004,” lihat *Suara Pembaruan*, “Kabinet “Gotong” Sendiri!”, Tajuk Rencana, edisi 31 Mei 2004.

taran pertama, pada 26 Juli 2004, maka selama tiga bulan yakni hingga pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2004, Megawati masih tetap menjabat presiden.

Suara Pembaruan menegaskan hal ini dalam kutipan teks berikut:

“Tetapi sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal pemerintahan demisioner. Sebab baik UUD '45 maupun UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres tidak mengatur antara kevakuman waktu Pemilu Pilpres dengan terpilihnya presiden atau pembentukan kabinet baru...para pengambil keputusan dan penyusun peraturan perundangan-undangan kita seharusnya mengantisipasi peralihan antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru. Artinya, ada perangkat undang-undangan yang memastikan tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan selama masa peralihan itu...terbukti perumus perangkat perundang-undangan kita kurang antisipatif. Jadi harus ada aturan yang rinci dan jelas dan limitatif mengenai pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden yang tengah menjabat hingga menyerahkan jabatannya kepada presiden terpilih.”³¹⁶

Suara Pembaruan, dalam kutipan teks itu, menekankan UU Pilpres harus memiliki aturan yang rinci menyangkut masa peralihan antara presiden lama dengan presiden terpilih hasil pilpres.

Dalam proses pelaksanaan pilpres, *Suara Pembaruan* menggambarkan citra elite politik termasuk capres cenderung pragmatis dengan lebih mengutamakan kepentingan memperoleh kekuasaan daripada melakukan perubahan dengan menawarkan program yang sesuai dengan kehendak rakyat. Hal ini ditunjukkan *Suara Pembaruan* dengan menonjolkan perihal penentuan pasangan capres-cawapres³¹⁷ dan juga tentang materi kampanye capres:

“Sebenarnya kampanye berisi fitnah, dusta dan adu domba seperti itu tidak perlu terjadi apabila elite politik dari semula menganut prinsip bahwa kampanye bertujuan “menjual” konsep, gagasan dan program. Tapi yang

³¹⁶ *Suara Pembaruan*, “Pemilu Pilpres, Dulu dan Sekarang”, Tajuk Rencana, edisi 6 Mei 2004.

³¹⁷ *Suara Pembaruan*, “Perubahan Makin Menjauh”, Tajuk Rencana, edisi 13 Mei 2004. Masih agak pesimis karena elite politik masih tetap berdasarkan paradigma lama “membeli kucing dalam karung”, atau kader “lompat pagar”. Penentuan pasangan capres dan cwapres pun belum beranjak dari paradigma lama berdasarkan dikotomi. Belum didasarkan pada perubahan nyata yang mengacu pada platform yang ideal bagi penanganan dan penyelesaian permasalahan bangsa dan negara.”

terjadi justru menonjolkan “siapa”-nya bukan “apa” yang menjadi calon program yang bersangkutan...”³¹⁸

Gambaran tentang citra elite, termasuk capres, juga ditunjukkan *Suara Pembaruan* yang lebih mendahulukan membentuk koalisi untuk kepentingan kekuasaan daripada untuk kepentingan melaksanakan program yang sesuai dengan kehendak rakyat.³¹⁹ Bahkan *Suara Pembaruan* juga mengesankan adanya elite politik, termasuk capres, yang berupaya menarik rakyat, bukan hanya sebagai *voter*, tetapi sebagai *supporter*.³²⁰

Sementara itu, rakyat dalam pelaksanaan pilpres, dianggap *Suara Pembaruan* sebagai makin rasional. Hal ini ditunjukkan *Suara Pembaruan* dengan memaknai respons rakyat yang sepi mengikuti kampanye sehingga tim sukses capres menjadi menemui rakyat dengan membagikan stiker:

“Kampanye seperti ini tidak harus ditanggapi sebagai kenyataan bahwa rakyat menanggapi sepi proses politik. Justru sebaliknya kebebasan dalam berpolitik dibuka dan proses politik ditanggapi dengan tenang dan makin rasional.”³²¹

Suara Pembaruan juga mengemukakan koalisi partai politik oleh elite partai

³¹⁸ *Suara Pembaruan*, “Fitnah dan Adu Domba Warnai Pilpres”, Tajuk Rencana, edisi 14 Juni 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda, juga ditunjukkan dalam *Suara Pembaruan*, “Kampanye Sepi, Respons Dingin Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 8 Juni 2004; “Berharap dari Debat Capres”, Tajuk Rencana, edisi 30 Juni 2004; Sedang mengenai agar capres lebih mengedepankan program konkret, termasuk tentang kemerdekaan pers, dikedepankan dalam *Suara Pembaruan*, “Pesan untuk Para Capres”, Tajuk Rencana, edisi 1 Juni 2004.

³¹⁹ Fakta mengenai hal ini ditunjukkan *Suara Pembaruan* dalam beberapa Tajuk Rencana: “GBHN Capres Mana?” (edisi 10 Mei 2004); “Koalisi, Jebakan atau Penguatan?” (edisi 29 Juli 2004); “Pragmatisme Versus Program” (edisi 2 September 2004); “Koalisi Pilpres Putaran Kedua” (edisi 12 Juli 2004); “Bahaya, Koalisi Meninggalkan Rakyat” (edisi 20 Agustus 2004).

³²⁰ *Suara Pembaruan*, “Biarlah Demokratisasi yang Menang”, Tajuk Rencana, edisi 6 Agustus 2004.

³²¹ *Suara Pembaruan*, “Indahnya Kampanye yang Tenang”, Tajuk Rencana, edisi 18 September 2004. Rakyat juga ditunjukkan *Suara Pembaruan* cenderung tidak mau mengorbankan pilihan nurani, hanya karena uang, lihat *Suara Pembaruan*, “Biarlah Demokratisasi yang Menang”, Tajuk Rencana, edisi 6 Agustus 2004, lihat juga *Suara Pembaruan*, “Kampanye Sepi, Respons Dingin Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 8 Juni 2004.

yang tidak mempengaruhi pilihan rakyat sebagai indikasi dari rasionalitas rakyat dalam menentukan pilihan:

“Bahkan keputusan elite partai yang diproses dalam mekanisme resmi partai dianggap sepi oleh konstituen mereka. Rakyat tampaknya mempunyai pertimbangan dan logikanya sendiri untuk menentukan orang yang mereka anggap pantas menduduki jabatan presiden dan wakil presiden”.³²²

Kegagalan Partai Golkar membawa capresnya memasuki putaran kedua, dimaknai *Suara Pembaruan* sebagai fakta bahwa elite partai tidak dapat mempengaruhi pilihan rakyat dan rakyat menentukan pilihan semakin rasional.³²³ Namun *Suara Pembaruan* juga menunjuk bahwa di kalangan masyarakat masih ada komponen bangsa yang tidak menghendaki demokratisasi berjalan baik atau anti-demokrasi, sebagaimana terbukti dari peristiwa ledakan bom di kantor KPU.³²⁴

2.5.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

2.5.2.1. Metafora: Tidak Sekadar “Tukang”

Suara Pembaruan menggunakan metafora tidak sekadar “tukang” untuk menggambarkan perbedaan mendasar pemilihan presiden selama Orde Baru dengan pemilihan presiden secara langsung:

“Pemilihan presiden selama Orde Baru misalnya, pemimpin yang akan dipilih itu diibaratkan seperti “tukang”. Artinya, setelah MPR merampungkan GBHN, barulah lembaga itu memilih siapa tokoh atau “tukang” yang dinilai mampu melaksanakan program dan arahan itu...presiden yang akan dipilih dalam Pemilu 5 Juli nanti tidak lagi sekadar “tukang” melainkan tokoh yang punya program nyata membawa bangsa ke arah kemajuan...”³²⁵

³²² *Suara Pembaruan*, “Koalisi, Jebakan atau Penguatan?”, Tajuk Rencana, edisi 29 Juli 2004. Hal ini, dalam kalimat yang berbeda, juga ditunjukkan dalam *Suara Pembaruan*, “Koalisi Pilpres Putaran Kedua”, Tajuk Rencana, edisi 12 Juli 2004; *Suara Pembaruan*, “Sikap Netral Amien dan Wiranto?”, Tajuk Rencana, edisi 30 Agustus 2004.

³²³ *Suara Pembaruan*, “Gugatan Wiranto dan Partai Golkar?”, Tajuk Rencana, edisi 3 Agustus 2004.

³²⁴ *Suara Pembaruan*, “Masih Ada yang Antidemokrasi”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juli 2004; lihat juga *Suara Pembaruan*, “Biarlah Demokratisasi yang Menang”, Tajuk Rencana, edisi 6 Agustus 2004.

³²⁵ *Suara Pembaruan*, “GBHN Capres Mana?”, Tajuk Rencana, edisi 10 Mei 2004.

Dengan metafora itu, *Suara Pembaruan* juga ingin menekankan arti penting capres mengajukan program nyata dalam kampanye.

Metafora “membeli kucing dalam karung” dan “lompat pagar” dipakai *Suara Pembaruan* untuk menggambarkan perilaku elite politik atau kader partai politik yang lebih mengejar kekuasaan daripada memperhatikan kepentingan rakyat. *Suara Pembaruan* menggunakan metafora “dagang sapi” untuk menunjukkan kecenderungan elit politik melakukan bagi-bagi kekuasaan dan jabatan di kabinet.

Metaforis “ibarat rombongan pelari jarak jauh (marathon)” digunakan *Suara Pembaruan* sebagai gambaran dari kabinet pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, di mana sebagian gagal mencapai “garis *finish*”, yaitu akhir masa kerja pemerintahan Megawati, karena mengundurkan diri dan kemudian menjadi capres. Sedang kertas suara yang dicoblos oleh rakyat dianalogikan *Suara Pembaruan* sebagai “suara hati nurani rakyat” yang harus juga “diproses dengan hati nurani.” Analogi ini digunakan untuk menekankan arti penting kejujuran dalam proses menghitung surat suara yang dicoblos rakyat pilih.

2.5.2.2. *Catchphrases: Fairness dalam Pilpres*

Suara Pembaruan menampilkan *catchphrases* berupa jargon dan slogan untuk menyusun bingkai inti. “*Fairness* dalam Pilpres” disodorkan *Suara Pembaruan* sebagai jargon untuk menekankan arti penting pelaksanaan pemilihan presiden yang transparan, demokratis, tanpa kekerasan, dan mematuhi ketentuan UU. Jargon ini kerap dikaitkan dengan jargon “antidemokrasi” serta kalimat sloganis, seperti: “Demokrasi dibangun justru karena harapan menciptakan kehidupan yang damai, melalui cara-cara tanpa kekerasan”, “ketentuan UU Pemilu itu bertu-

juan memenuhi tuntutan transparansi dan demokratisasi”, “KPU bersikap tidak *fair*”.

Jargon “ketidakpastian dan ketegangan politik” digunakan *Suara Pembaruan* untuk menunjuk situasi dan kondisi yang terjadi dalam rentang waktu antara pemilu legislatif hingga penetapan presiden terpilih pada pilpres secara defenitif. Dengan jargon ini, *Suara Pembaruan* juga ingin menekankan pentingnya melaksanakan pemilu legislatif dengan pemilu pilpres secara bersamaan sesuai amanat Pasal 22e UUD '45 serta merumuskan aturan yang rinci dan jelas tentang pelaksanaan pilpres.

Untuk menekankan pentingnya *fairness* dalam pilpres, *Suara Pembaruan* mengemukakan kalimat sloganistis, misalnya: Kecurangan “menciderai hakikat demokrasi, pelaksanaan Pemilu yang jujur serta mengkhianati hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan”³²⁶; “kemenangan terpenting sebenarnya haruslah demokratisasi dalam kehidupan bangsa ini”³²⁷ Kalimat sloganistis ini, mencerminkan cara *Suara Pembaruan* membangun bingkai inti yang disodorkan kepada khalayak pembaca dalam memaknai pelaksanaan pilpres.

2.5.2.3. *Exemplars*: Anomali dalam Politik

Suara Pembaruan menggunakan komponen *exemplars* untuk mendukung bingkai inti. Untuk menunjukkan bahwa semua pihak belum konsisten melaksanakan *fairness* pada pilpres, *Suara Pembaruan* menampilkan *exemplars*:

“Penandatanganan prasasti “Siap Menang, Siap Kalah” oleh kelima pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada awal kampanye Pilpres awal Juni lalu sungguh menjanjikan sportivitas, kedamaian, kesejukan, serta kebersamaan yang tinggi. Tapi segera setelah

³²⁶ *Suara Pembaruan*, “Waspada! Kecurangan Pilpres II”, Tajuk Rencana, edisi 17 September 2004.

³²⁷ *Suara Pembaruan*, “Biarlah Demokratisasi yang Menang”, Tajuk Rencana, edisi 6 Agustus 2004.

Pilpres selesai dan beberapa saat kemudian mulai diumumkan hasil penghitungan suara, segera timbul reaksi, terutama dari tim sukses yang perolehan suara pasangan calonnya tidak seperti diharapkan.”³²⁸

Dengan *exemplars* itu, *Suara Pembaruan* juga ingin mengesankan, komitmen capres-cawapres untuk melaksanakan *fairness* pada pilpres masih lebih berupa pernyataan - dalam hal ini menandatangani prasasti - daripada sebagai kenyataan. Kesan sedemikian ini, ingin diberi bobot lebih ketika *Suara Pembaruan* memaknai perilaku elit politik sebagai “anomali” dengan menampilkan komponen *exemplars* berikut ini:

“Berbagai anomali akhir-akhir ini makin sering terjadi membuat masyarakat terkaget-kaget. Anomali maksudnya sesuatu yang abnormal dianggap sebagai normal. Sebaliknya, sesuatu yang normal dianggap sebagai abnormal. Anomali dimaksud terutama dalam dunia politik, khususnya pada Pemilu 2004. Telah terjadi manuver politik yang melampaui batas-batas kewajaran tapi dianggap sebagai hal biasa. Bahkan telah terjadi penjungkirbalikan logika sehingga merupakan suatu anomali tapi dianggap biasa. Naluri politik rakyat banyak tidak mampu mencerna manuver dan politik “lompat pagar” para elite untuk mengejar kekuasaan....Anomali itu tercemin dalam Koalisi Kebangsaan...suatu anomali karena Koalisi Kebangsaan itu terdiri dari partai-partai politik yang menjagokan tiga Capres dan Cawapres, tapi kemudian menyatu mengusung pasangan Mega-Hasyim. Padahal menjelang Pilpres putaran pertama semua pasangan calon telah menandatangani prasasti berisi tekad “Siap Menang, Siap Kalah”.³²⁹

Dalam *exemplars* itu, selain dengan jelas menunjuk para elit politik melakukakan manuver yang tak wajar demi kekuasaan, *Suara Pembaruan* juga seakan ingin menegaskan, para elit politik tersebut tidak peduli lagi dengan *fairness* dalam pilpres, yang penting adalah meraih kekuasaan.

Suara Pembaruan juga mengedepankan *exemplars* berupa ilustrasi dengan membandingkan antara sistem politik dan birokrasi Indonesia dengan AS:

“Di AS antara pemilihan presiden dan pelantikan presiden terpilih, ada tenggang waktu beberapa bulan. Namun praktik di AS itu tidak begitu saja bisa disamakan dengan keadaan kita di Indonesia. Sebab sistem politik dan

³²⁸ *Suara Pembaruan*, “Siap Menang, Siap Kalah?”, Tajuk Rencana, edisi 13 Juli 2004.

³²⁹ *Suara Pembaruan*, “Anomali dalam Politik”, Tajuk Rencana, edisi 23 Agustus 2004.

birokrasi di AS sudah sangat matang sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dapat diminimalisasi.”³³⁰

Dalam ilustrasi itu, *Suara Pembaruan* secara implisit mengesankan citra pejabat Indonesia yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan sehingga untuk menghindarinya perlu membuat aturan yang rinci dan jelas, dalam hal ini secara khusus adalah menyangkut masa peralihan antara presiden lama dengan presiden terpilih pada pilpres.

2.5.2.4. *Depictions*: Kurang Antisipatif

Suara Pembaruan memilih kata, istilah, kalimat bermakna konotatif, dan bertendensi khusus (*depictions*) untuk menekankan citra tertentu sekaligus mengarahkan pembaca ke bingkai inti. Untuk mendeskripsikan arti penting membuat perangkat perundang-undangan sebagai pedoman menegakkan pelaksanaan pilpres secara *fairness*, *Suara Pembaruan* kerap menggunakan kalimat eufemistis, misalnya: “terbukti perumus perangkat perundang-undangan kita kurang antisipatif”, “masalah pengawasan dalam UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan”, “sampai sekarang belum ada aturan yang jelas dari KPU”. Kata “kurang antisipatif”, “sejumlah kelemahan”, “belum ada aturan” merupakan penghalusan dari “jadi harus ada aturan yang rinci dan jelas” yang juga dikemukakan *Suara Pembaruan*.

Untuk memberi makna sesungguhnya “harus ada aturan yang rinci dan jelas” itu, *Suara Pembaruan* secara tegas dan terbuka mengungkapkan: “masukan berharga bagi penyusunan UU Pilpres yang lebih baik ke depan”. *Suara Pembaruan* juga menampilkan kalimat “menarik rakyat, bukan hanya sebagai voter, tetapi

³³⁰ *Suara Pembaruan*, “Pemilu Pilpres, Dulu dan Sekarang”, Tajuk Rencana, edisi 6 Mei 2004.

sebagai *supporter*” untuk menunjuk perilaku elit politik yang “memperalat rakyat untuk mencapai puncak kekuasaan”.

Suara Pembaruan mengesankan, dalam konteks pemilu, seyogianya elit politik memosisikan rakyat sebagai “*voter*” (pemilih) bukan sebagai “*supporter*” (pendukung). Istilah “*supporter*” lebih akrab digunakan dalam pertandingan olah raga. Sedang istilah “cara-cara kotor”, “antidemokrasi” dipakai *Suara Pembaruan* sebagai stigmatisasi difemistis terhadap mereka yang menggunakan kekerasan pada pilpres, secara khusus kalangan yang terkait dengan peledakan bom di kantor KPU.

Suara Pembaruan sering menggunakan kata “kecurangan”, “pelanggaran” untuk menekankan bahwa “*fairness* dalam pilpres” belum terlaksana. Kata “*enteng*” dipilih *Suara Pembaruan* untuk lebih mengesankan citra KPU yang cenderung mengalihkan tanggung jawab untuk merespons masalah pelaksanaan pilpres dengan mengatakan “kalau tidak puas atas pelaksanaan dan penghitungan suara Pemilu, silakan ajukan ke MK”.

2.5.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

2.5.3.1. *Roots*: UU Pilpres Memiliki Sejumlah Kelemahan

Suara Pembaruan menggunakan analisis kausal (*roots*) sebagai argumentasi pembenar untuk mengkonstruksi bingkai inti. Untuk memberi bobot lebih tentang faktor penyebab pelaksanaan pilpres belum *fairness*, *Suara Pembaruan* menghadirkan *roots*:

“Masalah pengawasan dalam UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan, menjadi masukan berharga bagi penyusunan UU Pilpres yang lebih baik ke depan. Sebab seperti yang terjadi sekarang, Panwaslu tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap berbagai kecurangan yang ada. Banyak pelanggaran terjadi terhadap aturan main pemilu, tapi Panwaslu hanya menampung, tidak dapat menindaklanjuti menuntaskan berbagai pelanggaran itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tampaknya tidak sepenuhnya mandiri, sehingga terkesan memihak atau enggan menolak keinginan capres tertentu. Berbagai faktor itulah yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan yang berbeda di antara dua capres menjelang pemungutan suara hari ini.”³³¹

Dengan perangkat penalaran seperti itu, *Suara Pembaruan* ingin mempengaruhi khalayak pembaca untuk mempersepsi, pelaksanaan pilpres belum *fairness* karena perangkat perundang-undangan pilpres tidak memuat aturan yang rinci dan jelas.

2.5.3.2. *Appeals to principle: Pengalaman dan Pelajaran Berharga*

Suara Pembaruan merefleksikan fakta pemilu pilpres belum *fairness* sebagai *appeals to principle* atau pesan moral untuk menyakinkan khalayak menerima kondisi tersebut sebagai pengalaman dan pelajaran berharga:

“Fenomena kurangnya akurasi dan ketajaman program, kurangnya keterbukaan akan kekayaan capres dan cawapres pada kampanye Pemilu 2 Juli dan 20 September 2004 akan menjadi pengalaman dan pelajaran yang amat berharga. Juga fenomena kampanye yang masih bersifat propaganda seperti pada masa otoriter belum hilang sama sekali dan harus dievaluasi ulang. Sehingga pada kampanye Pemilu 2009, rakyat akan menyaksikan calon-calon yang lebih simpatik, berbobot, tanpa tuduhan-tuduhan politik yang dianggap negatif karena belum reformatif, belum demokratis, transparan dan sebagainya.”³³²

Dalam teks itu, *Suara Pembaruan* menekankan, kelemahan yang terjadi pada pilpres kali ini hendaknya tidak terulang lagi pada pilpres 2009. Fakta penandatanganan prasasti “Siap Menang, Siap Kalah” juga dipakai sebagai pesan moral kepada para elit politik: “salah satu makna “Siap Menang, Siap Kalah” ialah yang kalah bersikap *legowo* dan mau mengucapkan selamat kepada yang me

³³¹ *Suara Pembaruan*, “Lain Mega, Lain SBY”, Tajuk Rencana, edisi 20 September 2004.

³³² *Suara Pembaruan*, “Pemilu Tanpa Anarki”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juni 2004.

nang”³³³ Dengan demikian, *Suara Pembaruan* ingin membangun kesan, sikap elit politik berpengaruh signifikan terhadap proses pelaksanaan pilpres. Hal ini juga diperkuat dengan menyatakan pesan moral kepada capres-cawapres:

“Berkampanyelah secara konseptual dan santun, jangan “asal bunyi” apalagi bersifat menjelek-jelekkan satu sama lain. Kasihanilah rakyat kecil jangan diadu domba.”³³⁴

Dengan pesan moral itu, *Suara Pembaruan* ingin menegaskan, sikap capres-cawapres sangat menentukan bagi pelaksanaan pilpres. Sedang mengenai arti penting menghindari kekerasan, *Suara Pembaruan* menyodorkan landasan moral (*appeals to principle*): “Demokrasi adalah jalan yang pantas lebih dipilih bagi bangsa yang beradab”³³⁵ untuk menyakinkan semua pihak menerima demokrasi sebagai pilihan terbaik.

2.6. Perspektif: Pilpres Harus Dilaksanakan Menurut Ketentuan UU

Suara Pembaruan mengkonstruksi dan memaknai pelaksanaan pemilihan presiden dengan menonjolkan bingkai inti: pemilihan presiden belum *fairness*, perlu aturan yang rinci. Bingkai inti ini disusun dengan menyoroti kinerja pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilpres (KPU, Panwaslu, MK, dan capres-cawapres) dan perumus perangkat-perundangan-undangan.

Suara Pembaruan mengemukakan, sesuai amanat Pasal 22E UUD '45, pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan. Tetapi badan legis-

³³³ *Suara Pembaruan*, “Siap Menang, Siap Kalah?”, Tajuk Rencana, edisi 13 Juli 2004. Pesan moral juga dipakai *Suara Pembaruan* ketika mengkonstruksi persiapan memasuki pilpres putaran kedua, “Adalah menjadi harapan kita, selain KPU lebih matang dalam mempersiapkan pelaksanaan pilpres putaran kedua, para elite politik juga menyadari sepenuhnya pelaksanaan pemilu yang sangat demokratis, transparan dan akuntabel tersebut perlu dijaga baik-baik. Jangan sampai apa yang kita raih selama ini dalam melaksanakan pemilu ternoda hanya karena ambisi politik dan melupakan kesepakatan “siap menang, siap kalah”, lihat *Suara Pembaruan*, “Siap-siap Maju ke Putaran Kedua”, Tajuk Rencana, edisi 8 Juli 2004.

³³⁴ *Suara Pembaruan*, “Fitnah dan Adu Domba Warnai Pilpres”, Tajuk Rencana, edisi 14 Juni 2004.

³³⁵ *Suara Pembaruan*, “Masih Ada yang Antidemokrasi”, Tajuk Rencana, edisi 28 Juli 2004.

latif, selaku perumus perangkat perundang-undangan, menetapkan memisah pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres. Padahal menurut *Suara Pembaruan*, pemisahan tersebut menimbulkan “ketegangan dan ketidakpastian politik”. Karena dalam rentang waktu antara pemilu legislatif (5 April 2004) hingga penetapan presiden definitif hasil pilpres (20 Oktober 2004), elit politik berkonsentrasi melakukan berbagai manuver untuk meraih kekuasaan sementara masyarakat - secara khusus pelaku ekonomi - memilih menunda investasi menunggu hasil pilpres. “Ketegangan dan ketidakpastian politik” ini juga dipengaruhi oleh fakta, di mana perumus perangkat perundang-undangan tidak membuat aturan yang rinci tentang wewenang presiden dalam masa peralihan antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru.

Suara Pembaruan menunjuk pilpres belum *fairness*, dengan secara khusus menyoroti kinerja KPU. KPU dianggap tidak konsisten dan bersikap tidak *fair* menerapkan UU Pilpres. Hal ini diungkapkan *Suara Pembaruan* dengan menunjuk fakta berikut ini. *Pertama*, KPU melanggar Pasal 19 Ayat (3) UU No 23 Tahun 2003, karena tidak mendistribusikan logistik pilpres ke seluruh PPS sepuluh hari sebelum pemungutan suara, pada 25 Juni 2004. *Kedua*, KPU tidak memberi dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu sesuai ketentuan Pasal 76 UU No 23 Tahun 2003. Tetapi KPU justru terkesan memandang Panwaslu menjadi subordinasi dari KPU. *Ketiga*, KPU, sesuai UU Pemilu Pilpres, harus secara terbuka mengumumkan kepada publik sumber dana kampanye capres-cawapres. Tetapi KPU malah terkesan enggan menegur capres-cawapres yang melanggar ketentuan tersebut. *Keempat*, KPU tidak berupaya menyelesaikan sendiri masalah pelaksanaan pilpres tetapi lebih menghendaki agar

gugatan diselesaikan melalui MK. *Kelima*, KPU pada pilpres putaran kedua tidak menetapkan aturan yang jelas tentang bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kampanye atau yang bukan kampanye.

Selain faktor kinerja KPU, *Suara Pembaruan* juga menunjuk faktor lain yang membuat pilpres belum *fairness*, yaitu perilaku elit politik yang melakukan berbagai manuver untuk meraih kekuasaan. Manuver tersebut dikesankan *Suara Pembaruan* sebagai anomali. Dalam kaitan ini, *Suara Pembaruan* mengesankan, capres Megawati banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran pada pilpres dengan memanfaatkan posisinya sebagai tengah menjabat presiden (*incumbent president*). Tetapi hal tersebut tidak disoroti KPU.

Kendati demikian, *Suara Pembaruan* melontarkan gagasan agar semua pihak menerima fakta kelemahan pilpres sebagai pengalaman dan pelajaran berharga. Ini disertai harapan, pelaksanaan pilpres ke depan harus lebih baik dengan melengkapi perangkat perundangan-undangan yang ada secara rinci dan jelas. Gagasan tersebut dilandaskan pada pemahaman, pemilihan presiden harus dilaksanakan menurut ketentuan UU. Gagasan ini merefleksikan pengertian demokrasi yang komprehensif, dan berlandaskan perspektif (*media package*) demokratisasi.

2.7. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Suara Pembaruan menghadirkan enam item rubrik *Tajuk Rencana* untuk mewadahi wacana tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat dengan mengkonstruksi dan memaknai fakta peristiwa setelah pemilihan presiden putaran kedua, dengan judul:

“Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat” (edisi 21 September 2004), “Menanti Hasil Pilpres dengan Tenang” (edisi 22 September 2004), “Menuntut Visi dan Misi

Capres” (edisi 23 September 2004), “Perubahan Paradigma Pemimpin” (edisi 24 September 2004), “Pencimbang atau Penumbang?” (edisi 25 September 2004), “Berharap dari Rekonsiliasi Nasional” (edisi 27 September 2004).

2.7.1. Bingkai Inti: Presiden Harus Mewujudkan Program yang Dikemukakan Kepada Rakyat

Suara Pembaruan membangun bingkai inti, presiden harus mewujudkan program yang dikemukakan kepada rakyat, dengan memaknai sukses memenangi pilpres dalam hubungannya dengan visi dan misi yang disampaikan kepada rakyat pada masa kampanye. *Suara Pembaruan* menganggap, visi dan misi capres merupakan program yang harus diwujudkan setelah terpilih menjadi presiden:

“...tantangan bagi presiden dan wakil presiden terpilih tidak selesai setelah memenangi pemilu. Selama lima tahun memegang amanat rakyat, pasangan itu beserta kabinetnya harus mewujudkan program yang dikemukakan.”³³⁶

Dalam teks itu, *Suara Pembaruan* menggambarkan, langkah untuk mewujudkan visi dan misi atau program tersebut merupakan perjuangan berat. Disebut perjuangan berat, bukan semata-mata karena signifikan memengaruhi citra presiden tetapi lebih karena pemerintahan baru diperhadapkan dengan berbagai persoalan pokok dan membutuhkan penanganan yang mendesak. *Suara Pembaruan* menunjukkan hal ini dengan menyatakan:

“..ada tiga hal pokok dan mendasar serta mendesak untuk dilakukan pemerintahan baru nanti, yaitu menyangkut keamanan, pemberantasan KKN/penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi.”³³⁷

³³⁶ *Suara Pembaruan*, “Perubahan Paradigma Pemimpin”, Tajuk Rencana, edisi 24 September 2004. Hal ini, dengan kalimat yang berbeda, juga ditekankan dalam *Suara Pembaruan*, “Menuntut Visi dan Misi Capres”, Tajuk Rencana, edisi 23 September 2004, “sukses yang diraih dalam Pilpres II kemarin, bukanlah akhir dari kerja keras melainkan awal dari perjuangan berat, yaitu bagaimana mewujudkan visi dan misi yang “dijual” kepada konstituen. Sebab, apabila kabinet yang dihasilkan nanti dinilai tidak mampu menjabarkan visi dan misi yang dijanjikan, apalagi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih, akan berakibat fatal karena visi dan misi itu akan dianggap hanya basa-basi, bahkan bisa dituduh berbohong untuk meraih kekuasaan.” Lihat juga *Suara Pembaruan*, “Menanti Hasil Pilpres dengan Tenang”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

³³⁷ *Suara Pembaruan*, “Menuntut Visi dan Misi Capres”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

Dalam teks itu, *Suara Pembaruan* secara implisit mengedepankan tentang hak-hak rakyat atas penghidupan yang layak (pemulihan ekonomi). Namun, dalam enam item rubrik *Tajuk Rencana* yang ditampilkan untuk mewadahi wacana tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, *Suara Pembaruan* memilih menonjolkan perihal pembentukan kabinet dan pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan teks berikut ini:

“Presiden dan wakil presiden pilihan rakyat harus mewujudkan kinerja yang mencerminkan keberpihakan pada rakyat...harus menyusun kabinet yang harus mencerminkan harapan rakyat, yaitu pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan memperbaiki kehidupan bangsa yang dilanda krisis ini.”³³⁸

Dalam kutipan teks itu, *Suara Pembaruan* menegaskan, pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang tidak melakukan korupsi. Hal ini ditekankan harus menjadi prioritas utama presiden SBY, diawali dengan “raemilih figur yang bersih” menjadi menteri. Dengan demikian, *Suara Pembaruan* seolah ingin mengesankan, SBY dan seluruh kabinet pemerintahannya harus memiliki komitmen tidak akan korupsi. Dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi, presiden SBY dapat mewujudkan kinerja yang berpihak pada rakyat sesuai dengan program yang dikemukakan presiden pada masa kampanye.

³³⁸ *Suara Pembaruan*, “Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat”, *Tajuk Rencana*, edisi 21 September 2004. Hal ini, dengan kalimat yang berbeda, juga ditekankan dalam *Suara Pembaruan*, “Menanti Hasil Pipres dengan Tenang”, *Tajuk Rencana*, edisi 22 September 2004, dan *Suara Pembaruan*, “Menuntut Visi dan Misi Capres”, *Tajuk Rencana*, edisi 23 September 2004, “Memilih figur untuk menjadi menteri tidaklah pantas hanya didasarkan pada kesetiakawanan dalam perjuangan menghimpun dukungan rakyat pada pemilu, tetapi lebih pada kemampuan dan komitmennya untuk menjadi pelaksana program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Kabinet yang didasarkan pada balas jasa hanya akan menjadi awal kekecewaan rakyat. Dalam situasi korupsi telah menjadi penyakit yang mengerikan, memilih figur yang bersih dan punya komitmen untuk tetap bersih adalah prioritas utama. Apalagi SBY telah menyatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Disusul kriteria berikutnya adalah kapasitasnya sebagai pemimpin dan pelaksana program yang andal”. Lihat juga *Suara Pembaruan*, “Perubahan Paradigma Pemimpin”, *Tajuk Rencana*, edisi 24 September 2004.

Lebih lanjut, *Suara Pembaruan* juga menekankan arti penting mengubah paradigma pejabat pemerintahan untuk tidak lagi menganggap diri sebagai raja dan rakyat adalah kawula (hamba sahaya, abdi), dengan menyatakan:

“Proses pemilihan presiden secara langsung juga mencerminkan perubahan paradigma pada masyarakat dalam memandang presiden dan wakil presiden. Kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak lagi dipandang oleh rakyat sebagai penguasa seperti raja, dan rakyat bukan kawula. Sangat terlihat di kalangan rakyat bahwa asumsi presiden sebagai penguasa telah dicampakkan jauh-jauh, dan diganti sebagai sosok pemimpin, dan bahkan manajer...perubahan paradigma tersebut juga harus dijiwai oleh presiden dan wakil presiden yang tercermin dari kerja dan sepak terjangnya yang selalu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat...Perubahan paradigma itu harus menjadi awal untuk mencampakkan juga perilaku menteri dan birokrasi di departemen atau kantor kementerian negara sebagai raja-raja kecil yang jauh dari kepentingan rakyat, atau tetap menganggap rakyat sebagai kawula.”³³⁹

Dengan menghadirkan teks itu, *Suara Pembaruan* seakan ingin menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan bukan lagi penguasa tetapi pemimpin yang harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam kerangka mengutamakan kepentingan rakyat, *Suara Pembaruan* menghendaki presiden SBY dapat melakukan rekonsiliasi nasional dengan melibatkan presiden sebelumnya dalam tugas-tugas kenegaraan:

“Rekonsiliasi nasional akan lebih bermakna jika SBY-JK tidak hanya bersalaman dan tidak menghujat Megawati-Hamzah Haz, tetapi juga mempercayai mereka untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan... Alangkah indahnyanya Indonesia jika nanti SBY menggandeng Habibie, Gus Dur, Mega, maupun Hamzah Haz untuk melaksanakan tugas negara sesuai kapasitas masing-masing.”³⁴⁰

Selain itu, *Suara Pembaruan* juga menekankan, rakyat maupun partai politik perlu melakukan kontrol terhadap pemerintah:

³³⁹ *Suara Pembaruan*, “Perubahan Paradigma Pemimpin”, Tajuk Rencana, edisi 24 September 2004.

³⁴⁰ *Suara Pembaruan*, “Berharap dari Rekonsiliasi Nasional”, Tajuk Rencana, edisi 27 September 2004.

“Pihak yang kalah...bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang ikut mengontrol agar pemerintahan bekerja dengan serius dan dalam koridor konstitusi.”³⁴¹

“...partisipasi politik rakyat tidaklah berhenti setelah keluar dari bilik suara...rakyat harus terus mencermati kinerja presiden dan kabinetnya agar melaksanakan pemerintahan yang akuntabel”³⁴²

Dalam teks itu, *Suara Pembaruan* menggarisbawahi, pemerintah harus menjalankan konstitusi dan untuk itulah semua pihak perlu dan harus melakukan kontrol.

2.7.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

2.7.2.1. Metafora: Rakyat Bukan Kawula

Suara Pembaruan menggunakan metafora “penguasa seperti raja” dan “raja-raja kecil” untuk menggambarkan perilaku pejabat pemerintahan selama ini yang “jauh dari kepentingan rakyat, atau tetap menganggap rakyat sebagai kawula”. Dengan metafora ini, *Suara Pembaruan* menekankan, pemerintahan SBY harus mengubah paradigma sedemikian itu menjadi “sebagai sosok pemimpin, bahkan manajer” yang memandang “rakyat bukan kawula”. Hal ini dimaknai dianggap *Suara Pembaruan* sebagai paradigma “pemerintahan yang bersih”. Analogi “fajar yang cerah” dipakai *Suara Pembaruan* untuk menggambarkan perubahan proses politik yang telah terjadi di Indonesia, di mana rakyat secara langsung memberikan amanat kepada presiden terpilih.³⁴³

2.7.2.2. *Catchphrases*: Pemerintahan yang Bersih

³⁴¹ *Suara Pembaruan*, “Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004. Hal ini juga ditekankan *Suara Pembaruan* ketika mengkonstruksi dan memaknai keberadaan Koalisi Kebangsaan yang merupakan gabungan partai-partai politik dengan 330 anggota DPR, lihat *Suara Pembaruan*, “Penyeimbang atau Penumbang?”, Tajuk Rencana, edisi 25 September 2004.

³⁴² *Suara Pembaruan*, “Perubahan Paradigma Pemimpin”, Tajuk Rencana, edisi 24 September 2004.

³⁴³ *Suara Pembaruan*, “Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004.

Suara Pembaruan menampilkan *catchphrases* berupa jargon dan slogan. Jargon “pemerintahan yang bersih” dan slogan “memilih figur yang bersih dan punya komitmen untuk tetap bersih” dipakai *Suara Pembaruan* untuk menekankan arti penting SBY membentuk pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Suara Pembaruan juga menghadirkan jargon sloganistis “bagaimana mewujudkan visi dan misi yang “dijual” kepada konstituen. Sebab, apabila kabinet yang dihasilkan nanti dinilai tidak mampu menjabarkan visi dan misi yang dijanjikan, apalagi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih, akan berakibat fatal karena visi dan misi itu akan dianggap hanya basa-basi, bahkan bisa dituduh berbohong untuk meraih kekuasaan”. Jargon sloganistis ini dipakai memengaruhi pembaca untuk mempersepsi, SBY harus memenuhi program yang dikemukakan pada masa kampanye. Jika tidak, berarti SBY adalah pembohong.

Slogan “agar pemerintahan bekerja dengan serius dan dalam koridor konstitusi” ditampilkan untuk membangun kesan tentang tujuan kontrol yang dilakukan oleh rakyat maupun partai politik.

2.7.2.3. *Exemplars*: Menggandeng Presiden Pendahulu

Suara Pembaruan menghadirkan komponen *exemplars* berupa ilustrasi untuk memperlihatkan dampak positif menggandeng presiden pendahulu sebagai suatu bentuk konkret rekonsiliasi nasional:

“Bisakah SBY-JK menjalankan apa yang dilakukan presiden-presiden AS terhadap pendahulunya? Misalnya, seperti yang dilakukan Bill Clinton ketika mengutus mantas Wapres Walter F Mondale untuk meyakinkan Presiden Soeharto agar menaati komitmen paket reformasi IMF yang ditandatanganinya bersama Direktur Pelaksana IMF, Michael Camdessus. Alangkah indahnya Indonesia jika nanti SBY menggandeng Habibie, Gus Dur, Mega,

maupun Hamzah Haz untuk melaksanakan tugas negara sesuai kapasitas masing-masing.”³⁴⁴

Dengan *exemplars* tersebut, *Suara Pembaruan* ingin membangun kesan, pemerintahan SBY-JK perlu menciptakan hubungan yang kondusif dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan program yang dikemukakan kepada rakyat.

Sedang untuk menekankan arti penting pemerintah hasil pilpres menindaklanjuti demokratisasi dengan semakin lebih mengutamakan kepentingan rakyat, *Suara Pembaruan* menghadirkan *exemplars*:

“Pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah berhasil – dan ini patut dicatat – mengantarkan Indonesia memasuki babak penting dalam politik yang lebih demokratis. Oleh karena itu, pemerintahan periode berikutnya hendaknya melihat hal itu sebagai awal yang penting untuk berputarnya roda demokratisasi, dan melanjutkannya dengan membangun kehidupan politik yang makin sejalan dengan keinginan rakyat”³⁴⁵

Dalam komponen *exemplars* yang dimuat sebelum pengumuman hasil pilpres putaran kedua itu, *Suara Pembaruan* menunjukkan citra positif pemerintahan Megawati tetapi secara implisit juga mengesankan bahwa presiden terpilih bukan lagi Megawati.

2.7.2.4. *Depictions*: Perjuangan Berat

Suara Pembaruan memakai kata “perjuangan berat” untuk menggambarkan kondisi yang akan dihadapi presiden terpilih dalam mewujudkan program yang dikemukakan kepada rakyat pada masa kampanye. Sedang kata “berakibat fatal” mengisyaratkan konsekuensi yang akan terjadi apabila presiden tidak mewujudkan programnya.

³⁴⁴ *Suara Pembaruan*, “Berharap dari Rekonsiliasi Nasional”, Tajuk Rencana, edisi 27 September 2004.

³⁴⁵ *Suara Pembaruan*, “Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat”, Tajuk Rencana, edisi 21 September 2004.

“Penyakit yang mengerikan” dipakai untuk mengeraskan (disfemistis) fakta “situasi korupsi” yang terjadi di Indonesia. Kata “mencampakkan” digunakan sebagai disfemistis untuk menekankan semua pejabat pemerintahan SBY harus mengubah paradigma “penguasa sebagai raja” menjadi “sebagai sosok pemimpin, bahkan manajer”, dari paradigma “rakyat adalah kawula” menjadi “rakyat bukan kawula”.

2.7.3. Peraangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

2.7.3.1. *Roots*: Ini Baru Merupakan Tahap Awal

Suara Pembaruan menghadirkan analisis kausal (*roots*) untuk menekankan, bahwa apa yang telah dicapai presiden terpilih baru merupakan tahap awal dan masih harus menghadapi tantangan yakni harus mewujudkan program yang dikemukakan presiden pada masa kampanye:

“Namun harus disadari, ini baru merupakan tahap awal. Tantangan demokratisasi ke depan justru masih besar. Membangun demokrasi adalah tantangan besar, tapi menjaga demokrasi itu sendiri merupakan tantangan terbesar dan tugas tak akan pernah berakhir. Sebab itu, tantangan bagi presiden dan wakil presiden terpilih tidak selesai setelah memenangi pemilu. Selama lima tahun memegang amanat rakyat, pasangan itu beserta kabinetnya harus mewujudkan program yang telah dikemukakan.”³⁴⁶

Dalam *roots* itu, *Suara Pembaruan* mengesankan, sukses pemilu lebih pada bagian dari membangun demokrasi sedang keharusan pemerintah mewujudkan program yang dikemukakan sebagai bagian inheren dalam menjaga demokrasi.

2.7.3.2. *Appeals to principle*: Kemenangan Sama Sekali Bukan Pesta

Suara Pembaruan menampilan hasil pemilu sebagai argumentasi berlandaskan klaim moral (*appeals to principle*) untuk menekankan agar semua pihak

³⁴⁶ *Suara Pembaruan*, “Perubahan Paradigma Pemimpin”, Tajuk Rencana, edisi 24 September 2004. Hal ini, dengan kalimat yang berbeda, juga dikemukakan *Suara Pembaruan*, “Menanti Hasil Pipres dengan Tenang”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

menyambut hasil pilpres dengan tenang dan wajar. *Suara Pembaruan* menganggap soal kalah-menang dalam pilpres patut diterima dengan baik dan tidak perlu berlebihan:

“...dalam membangun dan menjaga demokrasi kita membutuhkan pemenang yang baik, dan pihak kalah yang juga baik... Dalam pemilihan presiden seperti ini, kekalahan tak perlu diratapi, dan kemenangan sama sekali bukan pesta.”³⁴⁷

Suara Pembaruan juga menggunakan *appeals to principle* berupa pesan moral, “Kita berharap agar perseteruan itu bisa berakhir dan kedua belah pihak mau berbesar hati untuk saling memaafkan dan melakukan rekonsiliasi.”³⁴⁸

Pesan moral ini, digunakan *Suara Pembaruan* sebagai jalan keluar mengatasi segala bentuk perseteruan yang terjadi pada pilpres. Tetapi dengan pesan moral tersebut, *Suara Pembaruan* secara implisit juga ingin mencitrakan mereka yang masih terus berseteru adalah karena tidak mau memaafkan dan berdamai.

2.8. Perspektif: Pemerintahan Demokrasi Mengutamakan Rakyat

Suara Pembaruan mengkonstruksi dan memaknai perihal pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat dengan menonjolkan bingkai inti: presiden harus mewujudkan program yang dikemukakan kepada rakyat. Program tersebut adalah visi dan misi yang disampaikan presiden pada masa kampanye.

Disebutkan, pemerintahan SBY menghadapi tiga masalah pokok, yaitu: keamanan, pemberantasan KKN/penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi. Ketiga hal ini tentu berkaitan dengan hak-hak rakyat. Tetapi *Suara Pembaruan* lebih menekankan untuk membentuk pemerintahan yang bersih,

³⁴⁷ *Suara Pembaruan*, “Menanti Hasil Pilpres dengan Tenang”, Tajuk Rencana, edisi 22 September 2004.

³⁴⁸ *Suara Pembaruan*, “Berharap dari Rekonsiliasi Nasional”, Tajuk Rencana, edisi 27 September 2004.

ditandai dengan tidak melakukan praktik korupsi; dan menjiwai paradigma sebagai “pemimpin, bahkan manajer” dan tidak lagi menganggap rakyat sebagai kawula.

Dengan demikian, *Suara Pembaruan* mengesankan, dengan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi disertai paradigma pejabat pemerintah adalah pemimpin, presiden SBY dapat mewujudkan program yang dikemukakannya kepada rakyat pada masa kampanye. Dalam kaitan ini, *Suara Pembaruan* juga menekankan arti penting partisipasi politik rakyat maupun partai politik untuk melakukan kontrol agar pemerintah bekerja dengan serius dan dalam koridor konstitusi.

Dalam desain ulasan di atas, *Suara Pembaruan* menekankan, pemerintahan demokrasi mengutamakan kepentingan rakyat. Pandangan ini jelas merujuk pada pengertian demokrasi yang komprehensif. Dengan demikian, perspektif (*media package*) yang digunakan *Suara Pembaruan* adalah perspektif demokratisasi.

Tabel 2: Framing Isu Demokratisasi oleh Suara Pembaruan**1. Tentang Persamaan di Depan Hukum**

Perspektif (Media Package): Demokrasi Tidak Mengenal Diskriminasi (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Hukum Tidak Boleh Diskriminatif	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Sasaran tembak dari syarat “mampu secara rohani dan jasmani” bagi capres-cawapres adalah Gus Dur. Ada aroma konspirasi politik	<i>Roots:</i> Perancang dan penyusun legilasi kita sering kurang tuntas dalam membuat aturan, sehingga materi pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan induknya
<i>Catchphrases:</i> Pelajaran dari kasus Gus Dur, pembelajaran ke depan. Pembuatan UU Pilpres diwarnai aroma konspirasi politik.	<i>Appeals to principle:</i> UUD '45 tidak mengenal diskriminasi. Kedaulatan rakyat tidak pada tempatnya diintervensi oleh peraturan birokrasi.
<i>Exemplars:</i> UU Pilpres merupakan hasil kompromi elit politik. Hal bersifat teknis seperti ketentuan “mampu secara rohani dan jasmani” tidak tepat dimasukkan ke dalam hukum dasar tertulis.	<i>Consequences:</i> Perlu menata sistem legislasi agar setiap produk hukum tidak bertentangan dengan UUD '45. Gus Dur merupakan korban atau dikorbankan oleh konspirasi elit politik oleh lembaga legislasi dan KPU.
<i>Depictions:</i> Komisi Konstitusi mencoret hal bersifat teknis “mampu secara rohani dan jasmani” dalam Pasal 6 UUD '45. Ketika DPR membahas RUU Pilpres terjadi konspirasi politik	

2. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

Perspektif (Media Package): Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Hukum dan Konstitusi (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Rakyat Berdaulat Meyakinkan Diri Sebelum Menentukan Pilihan	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Menjatuhkan pilihan berarti menyerahkan nasib bangsa dan negara kepada Presiden. Apa yang dilakukan hari ini akan sangat menentukan di hari-hari mendatang.	<i>Roots:</i> Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan selama lima tahun masa baktinya, meski kinerjanya tidak memuaskan.
<i>Catchphrases:</i> Konsekuensi golput tidak mau tahu dengan pemerintah. Pilihan rakyat menentukan nasib bangsa dan negara.	<i>Appeals to principle:</i> Kualitas kepemimpinan presiden terpilih menjadi jaminan bagi masa depan bangsa dan negara.
<i>Exemplars:</i> Hukum dan konstitusi tidak memberi landasan untuk menggugat dan menjatuhkan Presiden kalau ingkar janji.	<i>Consequences:</i> Rakyat harus benar-benar mempertimbangkan capres-cawapres yang akan dipilih.
<i>Depictions:</i> Jangan pilih yang suka ingkar janji. Pilih capres-cawapres yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi.	

3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Perspektif (Media Package): Pemilihan Presiden Harus Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Pemilihan Presiden Belum <i>Fairness</i> , Perlu Aturan yang Rinci	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Pemilihan presiden pada Orde Baru seperti memilih “tukang” sedang pada pilpres secara langsung tidak memilih sekadar “tukang” melainkan tokoh yang punya program nyata. Elit politik menjadi kader “lompat pagar” dan melakukan “dagang sapi” untuk meraih kekuasaan.	<i>Roots:</i> UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan, faktor inilah yang mengakibatkan pilpres menjadi belum <i>fair</i> .
<i>Catchphrases:</i> <i>Fairness</i> dalam pilpres. Ketentuan UU Pemilu bertujuan memenuhi tuntutan transparansi dan demokratisasi”, KPU bersikap tidak <i>fair</i> ”. Terjadi ketidakpastian dan ketegangan politik.	<i>Appeals to principle:</i> Pelaksanaan pilpres menjadi pengalaman dan pelajaran yang amat berharga serta masukan berharga bagi penyusunan UU Pilpres yang lebih baik ke depan. Kasihanilah rakyat kecil jangan diadu domba.
<i>Exemplars:</i> Terjadi anomali politik, sesuatu yang abnormal dianggap sebagai normal. Capres-cawapres tidak konsisten menerapkan makna prasasti “Siap Menang, Siap Kalah” yang telah ditandatangani.	<i>Consequences:</i> Semua pihak perlu dan harus menerima hasil pilpres, tetapi pelaksanaannya harus diperbaiki pada pilpres berikut
<i>Depictions:</i> Terbukti perumus perangkat perundang-undangan kita kurang antisipatif. Masalah pengawasan dalam UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan. Sampai sekarang belum ada aturan yang jelas dari KPU.	

4. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Perspektif (Media Package): Pemerintahan Demokrasi Mengutamakan Rakyat (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Presiden Harus Mewujudkan Program yang Dikemukakan Kepada Rakyat	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Pemerintah bukan sebagai penguasa seperti raja, dan rakyat bukan kawula. Jajaran birokrasi jangan lagi sebagai raja-raja kecil yang jauh dari kepentingan rakyat.	<i>Roots:</i> Terpilih menjadi presiden merupakan langkah awal, Selama lima tahun memegang amanat rakyat, pemerintahan SBY mewujudkan program yang telah dikemukakan kepada rakyat.
<i>Catchphrases:</i> Pemerintahan yang bersih, bebas praktik korupsi, mewujudkan program yang disampaikan kepada rakyat pada masa kampanye.	<i>Appeals to principle:</i> Kekalahan tidak perlu diratapi, kemenangan sama sekali bukan pesta
<i>Exemplars:</i> Menggandeng presiden pendahulu berdampak positif bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan programnya.	<i>Consequences:</i> Presiden SBY harus berkonsentrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan hak-hak rakyat
<i>Depictions:</i> Perjuangan berat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Situasi korupsi merupakan penyakit yang mengerikan.	

IV.3. *Republika*

3.1. Tentang Persamaan di Depan Hukum

Republika mewacanakan tentang persamaan di depan hukum dengan mengkonstruksi dan memaknai kasus Gus Dur yang terganjal menjadi calon presiden. *Republika* menampilkan hal tersebut dalam *Tajuk* edisi 25 Mei 2004 berjudul: “Langkah-langkah Gus Dur”.

3.1.1. Bingkai Inti: Semua Pihak Harus Tunduk Pada Hukum

Dalam pandangan *Republika*, di alam demokrasi semua pihak harus tunduk pada hukum. Setiap warganegara – siapapun itu – harus menghormati hukum dan mematuhi hukum. Karena di alam demokrasi, hukum merupakan bagian integral tatanan demokrasi, serta merupakan acuan tertinggi bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan demokrasi pun harus selaras dengan koridor hukum:

“Namun perlu juga diingat bahwa untuk memperjuangkan demokrasi harus ditempuh dengan cara-cara yang benar dan juga demokratis. Dalam hal ini semua pihak harus tunduk pada hukum. Di alam demokrasi, hukum adalah ‘tuan’ yang harus diikuti oleh setiap warga. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum.”

Dengan teks itu, *Republika* menekankan arti penting hukum sebagai instrumen demokrasi. Demokrasi dipandang harus berjalan di atas rel hukum. Hukum menjadi aturan main berdemokrasi. Dengan kata lain, menurut *Republika*, semua warganegara memiliki persamaan di depan hukum.

Hukum yang dimaksud *Republika* lebih pada hukum positif, yang dalam konteks sistem politik demokrasi merupakan otoritas lembaga yudikatif. *Republika* mengemukakan pandangan ini dengan mengkonstruksi kasus faktual Gus Dur. Ia bermaksud menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah KPU

menyatakan Gus Dur tidak lolos menjadi calon presiden karena tidak memenuhi syarat kemampuan jasmani dan rohani. *Republika* tidak membahas substansi keputusan KPU tersebut dan juga tidak mempersoalkan relevansinya dalam konteks demokrasi.

Republika memberi kesan bahwa gugatan Gus Dur kepada KPU tidak proporsional karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menolak *judicial review* yang diajukan Gus Dur terkait dengan SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/Cawapres. Dengan demikian, dalam logika *Republika*, sebenarnya SK KPU adalah sah berlaku, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dan tidak perlu digugat lagi:

“Gugatan terhadap KPU kali ini bukan merupakan upaya hukum pertama yang dilakukan Gus Dur. Sebelumnya, ia pernah dua kali menyampaikan *judicial review* terhadap SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/Cawapres. Yaitu ke Mahkamah Konstitusi dan ke Mahkamah Agung. Namun, kedua upaya hukum tersebut menemui jalan buntu. MK dan MA menolak permintaan *judicial review* dari Gus Dur.”

Dengan mengutarakan upaya atau langkah-langkah hukum yang telah - dan akan - dilakukan Gus Dur, *Republika* secara tidak langsung memberikan penilaian negatif terhadap figur Gus Dur. *Republika* sekilas tampak menghargai kontribusi Gus Dur bagi demokrasi. Tetapi substansi penghargaan tersebut lebih dikesankan karena faktor terpaksa. Kesan ini tercermin dari penggunaan kata “harus dianggap” sebagaimana tertera dalam kutipan teks berikut:

“Apa yang telah dilakukan Gus Dur harus dianggap sebagai pembelajaran demokrasi...langkah-langkah Gus Dur menempuh upaya hukum harus dianggap sebagai bagian dari penegakan demokrasi itu sendiri”.

Penilaian negatif *Republika* terhadap Gus Dur adalah dengan mencitrakan Gus Dur sebagai tidak tunduk pada hukum atau tidak menerima keputusan hukum. Karena ia masih mau menggugat KPU padahal *judicial review* yang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
diajukannya telah ditolak MK dan MA. *Republika* melekatkan citra tersebut dengan menyatakan upaya Gus Dur menuntut KPU sebagai langkah “untuk ‘ngotot’ mencalonkan diri sebagai presiden.” Istilah ‘ngotot’ jelas berkonotasi negatif dan menggambarkan sikap atau perilaku buruk seseorang.³⁴⁹ Padahal menurut *Republika*, ‘ngotot’ bertentangan dengan kehidupan demokrasi:

“Yang tidak boleh dalam berdemokrasi adalah memaksakan kehendak dengan aksi-aksi anarkhis. Termasuk dalam hal ini adalah mengajak massa untuk tidak terlibat aktif dalam proses demokrasi, misalnya mengajak orang lain untuk golput alias tidak memilih. Memilih atau tidak memilih dalam alam demokrasi adalah hal setiap orang. Namun, ajakan untuk tidak memilih tentulah sikap yang kurang bertanggung jawab.”

3.1.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

3.1.2.1. Metafora: Hukum adalah ‘Tuan’

Republika menggunakan metafora “hukum adalah ‘tuan’” untuk memberi citra arti penting hukum di alam demokrasi: “Di alam demokrasi, hukum adalah ‘tuan’ yang harus diikuti oleh setiap warga. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum.” Metafora ini digunakan untuk menegaskan kedudukan hukum di alam demokrasi. Semua warganegara, tanpa kecuali, memiliki kewajiban yang mutlak untuk mematuhi ketentuan hukum. Jadi, setiap warganegara dipandang memiliki persamaan di depan hukum.

3.1.2.2. *Catchphrases*: Memaksakan Kehendak, Mengajak Golput

Republika menggunakan *catchphrases* berupa jargon dan slogan untuk membangun kesan tertentu dalam menyusun bingkai inti, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan teks berikut ini:

“Yang tidak boleh dalam berdemokrasi adalah memaksakan kehendak dengan aksi-aksi anarkhis. Termasuk dalam hal ini adalah mengajak massa

³⁴⁹ Istilah “ngotot” merupakan singkatan dari kata “mengotot”, dengan kata dasar “otot”, yang berarti: “tidak mau mengalah, berkeras hati, bersikeras,” lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 805.

untuk tidak terlibat aktif dalam proses demokrasi, misalnya mengajak orang lain untuk golput alias tidak memilih. Memilih atau tidak memilih dalam alam demokrasi adalah hal setiap orang. Namun, ajakan untuk tidak memilih tentulah sikap yang kurang bertanggung jawab.”

Dengan menghadirkan komponen *catchphrases* itu, *Republika* menekankan mengenai hal yang dianggapnya tidak boleh dalam demokrasi, yakni “memaksakan kehendak dengan aksi-aksi anarkhis”. Namun secara implisit, *Republika* juga membangun kesan bahwa Gus Dur memaksakan kehendak, sebagaimana termaktub dalam slogan “termasuk...mengajak orang lain untuk golput alias tidak memilih”; “ajakan untuk tidak memilih tentulah sikap yang kurang bertanggung jawab.”³⁵⁰

Di sisi lain, seakan bermaksud menyeimbangkan pencitraannya terhadap Gus Dur, *Republika* juga menghadirkan jargon “pembelajaran demokrasi, pene-gakan demokrasi” untuk memaknai upaya hukum yang ditempuh Gus Dur.

3.1.2.3. *Exemplars*: MK dan MA Menolak *Judicial Review* dari Gus Dur

Republika menampilkan komponen *exemplars* dengan mengesankan langkah Gus Dur yang hendak menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak relevan lagi. Karena substansi gugatan Gus Dur adalah terkait dengan SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/ Cawapres. Padahal MK dan MA telah menolak *judicial review* yang diajukan Gus Dur sehubungan dengan SK KPU tersebut:

“Gugatan terhadap KPU kali ini bukan merupakan upaya hukum pertama yang dilakukan Gus Dur. Sebelumnya, ia pernah dua kali menyampaikan *judicial review* terhadap SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/Cawapres. Yaitu ke Mahkamah Konstitusi dan ke Mahkamah Agung. Namun, kedua upaya hukum tersebut menemui jalan buntu. MK dan MA menolak permintaan *judicial review* dari Gus Dur.”

³⁵⁰ Slogan ini dapat diasosikan tertuju pada diri Gus Dur. Karena pada pilpres kali ini, yang melontarkan wacana tentang golput adalah Gus Dur.

3.1.2.4. *Depictions: Ngotot*

Republika memakai komponen *depictions* berupa *stigmatisasi* (pelabelan) untuk menggambarkan citra negatif Gus Dur yang masih hendak menuntut KPU. Dalam teks, Gus Dur diberi citra negatif dengan *stigmatisasi* (pelabelan) sebagai figur yang “*ngotot*” mencalonkan diri sebagai presiden. Gus Dur disebut ‘*ngotot*’ karena MK dan MA telah menyatakan ketentuan KPU adalah benar dan sah menurut hukum, sehingga seyogianya Gus Dur patut menerima keputusan tersebut. *Stigmatisasi* ini digunakan untuk dipertentangkan dengan cara-cara yang demokratis, yakni “*semua pihak harus tunduk pada hukum.*” Dengan *stigmatisasi* tersebut, Gus Dur dicitrakan sebagai figur yang cenderung memaksakan kehendak, tidak menerima keputusan hukum, dan dengan demikian tidak demokratis.

3.1.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

3.1.3.1. *Roots: Gugatan Gus Dur ke KPU*

Republika juga memakai analisis kausal (*roots*) saat membangun bingkai inti, terlebih dengan menonjolkan gugatan Gus Dur ke KPU bukan upaya hukum yang pertama:

“Gugatan terhadap KPU kali ini bukan merupakan upaya hukum pertama yang dilakukan Gus Dur. Sebelumnya, ia pernah dua kali menyampaikan *judicial review* terhadap SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/Cawapres. Yaitu ke Mahkamah Konstitusi dan ke Mahkamah Agung. Namun, kedua upaya hukum tersebut menemui jalan buntu. MK dan MA menolak permintaan *judicial review* dari Gus Dur.”

Disebut Gus Dur telah mempersoalkan keabsahan SK KPU dengan mengajukan *judicial review* ke MK dan ke MA. Ternyata MK dan MA menolak permintaan Gus Dur. Kendati demikian Gus Dur masih bermaksud menggugat KPU

terkait dengan SK tersebut. Dengan demikian, Gus Dur dikesankan tidak menghormati keputusan MK dan MA, atau tidak mematuhi hukum.

3.1.3.2. *Appeals to principle*: Cara-cara yang Benar

Republika menggunakan klaim moral (*appeals to principle*) untuk menyoro-roti langkah-langkah Gus Dur. Klaim moral tersebut cenderung berupa imbauan atau harapan dengan mengingatkan bahwa “memperjuangkan demokrasi harus ditempuh dengan cara-cara yang benar dan juga demokratis”. Cara yang benar dan dan demokratis adalah “mematuhi hukum dan tidak boleh memaksakan kehendak.”

3.2. Perspektif: Dalam Demokrasi, Hukum adalah ‘Tuan’

Republika membahas persamaan di depan hukum di alam demokrasi dengan mengkonstruksi fakta peristiwa yang disebut *Republika* sebagai “Langkah-langkah Gus Dur”. *Republika* memilih menekankan keputusan KPU yang menyatakan Gus Dur tidak lolos menjadi calon presiden karena tidak memenuhi syarat kemampuan jasmani dan rohani adalah berdasar pada SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/Cawapres. Gus Dur lalu bermaksud menggugat KPU. Padahal, sebelumnya, telah dua kali menyampaikan *judicial review* terkait dengan SK KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan ke Mahkamah Agung. Tetapi ternyata, MK dan MA menolak permintaan *judicial review* dari Gus Dur.

Republika tidak membahas makna substansial SK KPU No 26 Tahun 2004 dalam kehidupan demokrasi dan juga tidak mempersoalkan implikasi mengapa MK dan MA menolak *judicial review* yang diajukan Gus Dur. Namun *Republika* justru segera mempertautkan fakta ini dengan menggunakan berbagai komponen

frame, untuk menonjolkan bahwa di alam demokrasi semua warganegara harus tunduk pada hukum.

Dengan kata lain, secara implisit, *Republika* memposisikan diri menyetujui keputusan KPU. Keputusan tersebut dianggap final dan secara formal telah sesuai dengan koridor hukum. Posisi *Republika* sedemikian ini juga tergambar dari cara memberi citra negatif pada Gus Dur dengan memberi label sebagai figur yang ‘ngotot’. Sebutan ini boleh jadi mengindikasikan, *Republika* tidak menghendaki langkah-langkah Gus Dur atau sangat mungkin pula *Republika* merasa senang menyambut keputusan KPU.

Namun pada dasarnya, *Republika* mengkonstruksi ulasannya beranjak dari pengertian demokrasi yang komprehensif bahwa dalam demokrasi hukum adalah ‘tuan’. Dengan demikian, *Republika* memilih menggunakan perspektif (*media package*) demokratisasi, tentu dengan aksentuasi tertentu.

3.3. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

Republika mengangkat konsep kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan pada pemilihan presiden sebagai ulasan dengan menghubungkannya pada fakta yang beragam. Secara umum, *Republika* tidak menghadirkan teks yang secara spesifik membahas tentang kedaulatan rakyat. Namun berdasarkan ruang lingkup isi, terdapat lima item, yaitu:

“Memilih Calon yang Tepat” (edisi 10 Mei 2004); “Akibat Isu Negatif” (edisi 29 Juni 2004); “Lima Menit Menentukan” (edisi 5 Juli 2004); “Menghalalkan Segala Cara” (edisi 7 September 2004); “Putaran Kedua” (edisi 16 September 2004).

3.3.1. Bingkai Inti: Rakyat Harus Menentukan Pilihan dengan Pertimbangan

Rasional

Republika memaknai peristiwa pemilihan presiden sebagai tonggak perubahan politik Indonesia, di mana “kedaulatan kembali ke tangan rakyat”. Rakyat

berdaulat menentukan pilihan dengan memilih secara langsung presiden, dan sekaligus dapat mengevaluasi kinerja presiden yang sedang berkuasa. Aksentuasi mengenai hal ini dapat dilihat dari kutipan teks berikut:

“Enam tahun setelah reformasi, ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Rakyat tidak hanya memilih anggota legislatif, tapi juga memilih langsung presiden dan wakil presiden. Rakyatlah yang memilih calon yang mereka kehendaki. Bagi presiden yang sedang berkuasa, namun tidak mendapatkan suara untuk bisa bertahan, dapatlah diartikan rakyat menghukumnya karena gagal mengemban amanat rakyat.”³⁵¹

Dengan demikian, *Republika* mengesankan, kedaulatan rakyat sangat menentukan dan memiliki konsekuensi penting. Dalam kaitan ini, *Republika* mengajukan gagasan agar rakyat benar-benar menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional, sesuai dengan akal sehat dan hati nurani:

“Rakyat dapat menentukan pilihan sesuai dengan segala pertimbangannya. Tentu diharapkan pilihan dilakukan dengan pertimbangan rasional, sehingga bangsa ini tidak terus-menerus tersandera oleh pemimpin yang gagal membawa Indonesia keluar dari keterpurukan, ketidakberdayaan, dan tentu kebodohan.”³⁵²

Republika juga menghubungkan arti penting rasionalitas dalam menentukan pilihan dengan gagasan agar rakyat memperhatikan kompetensi calon untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukan. Memperhatikan kompetensi calon, dianggap *Republika* karena diklaim, “Sebagian di antara rakyat memilih karena alasan-alasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan calon.”³⁵³

Sehubungan dengan itu, *Republika* membedakan para calon presiden menjadi dua kategori, yakni: yang memiliki misi dan visi serta komitmen untuk memperbaiki bangsa Indonesia; dan yang didominasi oleh kepentingan

³⁵¹ *Republika*, “Lima Menit Menentukan”, Tajuk edisi 5 Juli 2004.

³⁵² *Republika*, “Memilih Calon yang Tepat”, Tajuk edisi 10 Mei 2004. Hal ini juga mengemuka dalam *Republika*, “Lima Menit Menentukan”, Tajuk edisi 5 Juli 2004.

³⁵³ *Republika*, “Lima Menit Menentukan”, Tajuk edisi 5 Juli 2004.

menyatakan bahwa kalau capres X benar-benar terpilih menjadi presiden, maka umat Islam di Indonesia akan dilarang mengamalkan *qunut*, *tahlilan*, ziarah kubur dan seterusnya yang selama ini khas menjadi amalan warga *nahdliyyin*. Isu-isu demikian jelas tidak benar, namun susah untuk mencegah dan melacakinya...Akibat dari semua itu adalah sangat luar biasa. Sampai-sampai, ada capres/cawapres yang terterpa isu-isu yang menjatuhkan dirinya itu selama kampanye lebih disibukkan untuk menangkis kampanye negatif tersebut”³⁵⁵

Sehubungan dengan isu-isu itu, menjelang pemilihan presiden putaran pertama, *Republika* melansir semacam sinyal kekuatiran bahwa Amien Rais boleh jadi tidak meraih suara terbanyak. Tetapi kondisi tersebut, dianggap *Republika*, semata-mata bukan terletak pada diri Amien Rais, melainkan lebih karena faktor menjadi korban isu-isu negatif. *Republika* mengisyaratkan hal ini dengan mengatakan:

“Para penyebar isu harus ikut bertanggung jawab seandainya capres/cawapres yang didukungnya benar-benar menjadi presiden/wakil presiden, dan ternyata tidak mampu memperbaiki negeri ini. Sebab, capres/cawapres yang mestinya sanggup membawa negeri ini ke arah yang lebih baik telah terjegal oleh isu-isu tadi.”³⁵⁶

Di sisi lain, pada pemilihan presiden putaran pertama, *Republika* membangun citra capres Megawati sebagai pengumbar janji, dengan menyatakan:

“Semua seakan begitu mudah jika mereka terpilih. Namun apakah janji-janji tersebut akan mereka penuhi? Masih segar dalam ingatan kita ketika usai pemilihan umum 1999, Megawati menyatakan tidak ada lagi darah yang tumpah di Aceh. Begitu juga dengan janjinya soal pemberantasan korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan meningkatkan kesejahteraan *wong cilik*.”³⁵⁷

Memasuki pemilihan presiden putaran kedua, *Republika* juga mencitrakan Megawati sebagai gagal mengemban amanat rakyat karena pemerintahannya me-

³⁵⁵ *Republika*, “Akibat Isu Negatif”, Tajuk edisi 29 Juni 2004.

³⁵⁶ *Ibid.*

³⁵⁷ *Republika*, “Memilih Calon yang Tepat”, Tajuk edisi 10 Mei 2004.

ngulangi kecurangan dan perilaku kotor rezim Orde Baru.³⁵⁸ Ini menunjuk, sembari menekankan rakyat perlu memilih berdasarkan pertimbangan rasional, *Republika* sekaligus pula membangun kesan, secara rasional Megawati tidak layak lagi untuk dipilih.

3.3.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

3.3.2.1. Metafora: Tersandera Oleh Pemimpin yang Gagal

Republika menggunakan metafora “tersandera oleh pemimpin yang gagal” dan “lima menit di kotak suara” untuk menekankan arti penting rakyat menentukan pilihan secara rasional. Kalimat metaforis juga digunakan *Republika* untuk menekankan, bahwa atas pertimbangan rasional, presiden Megawati harus diganti karena dalam pemerintahnya terjadi pelbagai penyelewengan:

“...Semua kelakuan itu terjadi seakan rakyat tak ada...Bagi kita, orang-orang semacam ini bak sampah yang harus disapu, dimasukkan ke bak sampah, lalu dibakar agar bermanfaat sebagai pupuk. Jika dibiarkan ada di dalam rumah maka hanya membiakkan segala bibit penyakit. Kita tak mengerti bagaimana mungkin orang-orang semacam ini bisa berteriak bahwa jika berkuasa akan membasmi korupsi, membawa negeri ini menjadi negeri *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja?*”³⁵⁹

3.3.2.2. *Catchphrases*: Kemampuan Calon

Komponen *catchphrases* berupa jargon dan slogan disajikan *Republika* untuk menonjolkan bingkai inti yang dikemukakan. Slogan “sebagian di antara rak-

³⁵⁸ *Republika*, “Putaran Kedua”, Tajuk edisi 16 September 2004. “... kita menyaksikan sejumlah pengulangan perilaku kotor rezim Orde Baru. Jika di masa lalu kita takut melakukan kritik, kini kritik bak angin lalu karena alat-alat kontrol negara menjadi bagian dari skenario praktik kotor dan para pelakunya tak lagi memiliki urat malu. Lalu kita akan menyaksikan ketelanjangan perilaku kotor itu. Nilai rupiah yang dilibatkan bahkan jauh lebih besar dibandingkan di masa rezim Orde Baru yang ditumbangkan dan dinajiskan oleh para elite politik saat ini...Kita menyaksikan pemerahan dana-dana BUMN dan eks-BUMN - padahal katanya BUMN dijual karena untuk menghindari pemerahan - untuk mendukung salah satu kandidat. Penggunaan birokrasi dan institusi kenegaraan lainnya dalam penggalangan massa, tentu saja dana negara ikut terhisap. Membuat aturan-aturan yang memudahkan kecurangan dalam penghitungan dan penyelenggaraan pemilu. Menyiapkan aturan yang membuat debat capres kehilangan unsur kontestasi dan spontanitas. Membiarkan sejumlah kecurangan karena aturan-aturan yang ngawur dan tak menyentuh aspek kejujuran diri. Dan, masih banyak lagi.”

³⁵⁹ *Republika*, “Putaran Kedua”, Tajuk edisi 16 September 2004.

yat memilih karena alasan-alasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan calon”, dipakai *Republika* untuk menunjuk bahwa rakyat masih cenderung menentukan atas dasar kemampuan calon dalam arti tidak rasional.

Jargon “kedaulatan rakyat” sering dihubungkan dengan slogan “rakyat menentukan Indonesia untuk lima tahun ke depan”, “rakyatlah yang memilih calon yang mereka kehendaki”, untuk menekankan arti penting rakyat menentukan pilihan secara rasional. Hal ini juga termaktub dalam jargon sloganistis ini, “jadi tentukan pilihan sesuai dengan akal sehat dan hati nurani untuk perubahan dan kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia”.

Jargon sloganistis juga dipakai *Republika* untuk mengarahkan pembaca mempersepsi, arti penting menentukan pilihan secara rasional: “Tentu diharapkan pilihan dilakukan dengan pertimbangan rasional, sehingga bangsa ini tidak terus-menerus tersandera oleh pemimpin yang gagal membawa Indonesia keluar dari keterpurukan, ketidakberdayaan, dan tentu kebodohan.”

3.3.2.3. *Exemplars*: Kedaulatan Kembali ke Tangan Rakyat

Republika memakai komponen *exemplars* untuk memberi bobot lebih pada sejumlah fakta. Refleksi atas sejarah pemilihan di Indonesia dihadirkan *Republika* sebagai *exemplars* untuk menekankan bahwa pada pilpres kali ini kedaulatan kembali ke tangan rakyat:

“Sejak Indonesia merdeka, sudah berlangsung sembilan kali pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Pada delapan pemilu sebelumnya, rakyat memilih partai untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seusai pemilu, kedaulatan rakyat sepenuhnya diambil alih oleh MPR untuk memilih dan menetapkan presiden. Rakyat hanya sebagai penonton dan harus menerima keputusan MPR, suka atau tidak. Enam tahun setelah reformasi, ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Rakyat tidak hanya memilih anggota legislatif,

tapi juga memilih langsung presiden dan wakil presiden. Rakyatlah yang memilih calon yang mereka kehendaki.”

Dengan komponen *exemplars* itu, *Republika* juga ingin membangun kesan, pemilihan presiden kali ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari pemilihan presiden sebelumnya.

3.3.2.4. *Depictions*: Terjegal

Republika mengembangkan bingkai inti dengan memakai istilah, kata, dan kalimat (*depictions*) untuk menekankan makna tertentu. Kata “terjegal” dipilih *Republika* sebagai disfemisme untuk mendeskripsikan citra Amien Rais, apabila ia tidak terpilih menjadi presiden lebih karena faktor isu-isu negatif.

Disfemisme “carut-marut”, “krisis serba muka yang belum juga pulih”, “korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi penyakit sangat kronis”, digunakan *Republika* untuk menggambarkan kondisi Indonesia hingga masa presiden Megawati.

3.3.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

3.3.3.1. *Roots*: Transisi Demokrasi Akan Semakin Panjang

Republika memakai analisis kausal (*roots*) saat membangun bingkai inti, dengan mengemukakan akibat yang akan dihadapi Indonesia apabila rakyat tidak menentukan pilihan secara rasional: “transisi demokrasi akan semakin panjang dan tersandera”. *Republika* juga menggunakan *roots* ketika menentang isu-isu negatif yang secara asosiatif ditujukan pada Amien Rais. Isu-isu tersebut disebut tidak benar, namun secara tidak langsung *Republika* memposisikan diri membela Amien Rais dan mempersalahkan kalangan penyebar isu, dengan menulis:

“Para penyebar isu harus ikut bertanggung jawab seandainya capres/cawapres yang didukungnya benar-benar menjadi presiden/wakil presiden, dan ternyata tidak mampu memperbaiki negeri ini. Sebab, capres/cawapres

yang mestinya sanggup membawa negeri ini ke arah yang lebih baik telah terjejal oleh isu-isu tadi.”

3.3.3.2. *Appeals to principle: Gemah Ripah Loh Jinawi*

Republika menghadirkan falsafah Jawa, *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja* sebagai pesan moral (*appeals to principle*) untuk menekankan arti penting menentukan pilihan pada pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi aman, tentram dan sejahtera.

3.4. **Perspektif: Kedaulatan Rakyat Harus Dilandasi Pikiran Rasional**

Republika membangun bingkai inti, rakyat harus menentukan pilihan dengan pertimbangan rasional, dengan melakukan kilas balik pelaksanaan pemilihan presiden sebelum ini. Dalam proses pemilihan presiden selama ini, rakyat digambarkan *Republika* sebagai tidak berdaulat tetapi dengan memilih presiden secara langsung “kedaulatan kembali ke tangan rakyat”. Kondisi ini, menurut *Republika*, merupakan hakikat demokrasi.

Sehubungan dengan hal itu, *Republika* merasa perlu menandakan agar rakyat selaku pemangku kedaulatan dalam demokrasi menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan pada capres tertentu, dengan lebih memperhatikan kemampuan capres tersebut. Hal ini ditekankan *Republika*, karena dianggap sebagian rakyat Indonesia masih cenderung menentukan pilihan berdasarkan emosi seperti ikatan primordialisme ketimbang menggunakan rasio.

Republika juga mengarahkan pemikiran dengan mengembangkan citra positif Amien Rais dan mengemas citra buruk calon presiden lain terlebih Megawati. Hal ini menunjukkan, *Republika* memposisikan diri mendukung Amien Rais dan memilih berseberangan dengan Megawati. Bahkan kekalahan Amien Rais pada pilpres putaran pertama, dikesankan *Republika* bukan terletak pada faktor

kemampuan Amien Rais melainkan justru lebih pada faktor pemilih yang cenderung tidak rasional.

Terlepas dari aksentuasi tertentu, secara khusus tentang citra Amien Rais, rasional, pada dasarnya beranjak dari pengertian demokrasi yang komprehensif. Paling tidak, *Republika* selalu menekankan, kedaulatan rakyat harus dilandasi pikiran-pikiran rasional. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa *Republika* memilih menggunakan perspektif (*media package*) demokratisasi.

3.5. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Republika menyajikan 23 item tajuk untuk mewadahi wacana tentang pelaksanaan pemilihan presiden. Wacana ini ditonjolkan dengan mengkonstruksi fakta peristiwa pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama dan kedua.

Republika mengemas pesan tentang pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama dalam 16 item tajuk berjudul:

“Kampanye Dimulai” (edisi 31 Mei 2004), “Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan” (edisi 2 Juni 2004), “Dimulai dari Kekayaan Capres” (edisi 5 Juni 2004), “Cap Jempol Darah” (7 Juni 2004), “Menuju Kampanye Berkualitas” (edisi 8 Juni 2004), “Narkoba dan Kampanye Capres” (edisi 22 Juni 2004), “Sekali Lagi, Politik Uang” (edisi 26 Juni 2004), “Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus” (edisi 3 Juli 2004), “Jangan Cederai Hasil Pemilu” (edisi 6 Juli 2004), “Kepercayaan, Kejujuran” (edisi 8 Juli 2004), “Jangan Terlana Angka” (edisi 10 Juli 2004), “Golput” (edisi 15 Juli 2004), “Ujian untuk Megawati” (16 Juli 2004), “Protes Hasil Rekapitulasi” (edisi 26 Juli 2004), “Sebuah Pelajaran Demokrasi” (edisi 30 Juli 2004), “Sulitnya Menegakkan Pemilu Jurdil” (edisi 31 Juli 2004).

Pada pemilihan presiden putaran kedua, *Republika* memuat tujuh item tajuk dengan judul:

“Jangan Lagi Dagang Sapi” (edisi 2 Agustus 2004), “Jaga Citra Jelang Pilpres” (edisi 10 Agustus 2004), “Menghentikan Persekongkolan” (edisi 26 Agustus 2004), “Jangan Kotori Demokrasi Kita” (edisi 18 Agustus 2004), “Kekayaan Calon Pemimpin” (edisi 2 September 2004), “Siap Menang, Siap Kalah” (edisi 20 September 2004).

3.5.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Belum Jurdil, Sebuah Pelajaran Demokrasi

Republika memaknai pelaksanaan pemilihan presiden dengan membangun bingkai inti, pemilihan presiden belum terselenggara dengan jujur dan adil (jurdil) tetapi dalam proses tersebut terdapat pelajaran demokrasi, dengan menonjolkan apa yang disebutnya sebagai “kampanye berkualitas” dan “kampanye negatif”.

Republika mengemukakan, dalam kampanye berkualitas, capres-cawapres berkewajiban menyampaikan “program, visi, dan misi yang terukur, *reliable*, dan bisa dilakukan”; Capres-cawapres melakukan “adu konsep yang komprehensif, lengkap dan rinci” tentang bagaimana mengurus pendidikan, menangani pengangguran, mengatur ekonomi, serta konsep untuk mengurangi/menurunkan angka peredaran narkoba, dan lain-lain.³⁶⁰

Lebih lanjut *Republika* menunjukkan, dalam kampanye berkualitas, para calon “tidak mengkritik dan menjelekkkan atau mengungkit-ungkit masalah-masalah pribadi seorang capres dan cawapres” tetapi dapat saling “menyerang kelemahan konsep mengatur bangsa dan negeri ini”.³⁶¹ Dengan kata lain, *Republika* ingin menegaskan, kampanye berkualitas adalah bersaing mengajukan konsep dalam mengelola bangsa dan negara. Konsep tersebut harus terukur dan dapat direalisasikan.

Di sisi lain, *Republika* memaparkan bahwa kampanye negatif bukan hanya soal saling mengkritik dan menjelekkkan atau mengungkit-ungkit masalah-masalah pribadi seorang capres dan cawapres. Tetapi juga menggunakan isu primordial

³⁶⁰ *Republika*, “Di’mulai dari Kekayaan Capres”, Tajuk edisi 5 Juni 2004; *Republika*, “Kampanye Dimulai”, Tajuk edisi 31 Mei 2004; *Republika*, “Menuju Kampanye Berkualitas”, Tajuk edisi 8 Juni 2004; *Republika*, “Narkoba dan Kampanye Capres”, Tajuk edisi 22 Juni 2004.

³⁶¹ *Republika*, “Menuju Kampanye Berkualitas”, Tajuk edisi 8 Juni 2004.

yang tidak ada kaitannya dengan politik demokrasi seperti tentang “kecantikan” dan “kekerenan”. Aspek yang berasosiasi pada Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ini dipandang sebagai kampanye yang tidak bermutu dan membodohi rakyat.³⁶²

Terkait dengan fakta pemilihan presiden belum terselenggara secara jujur dan adil (jurdil), *Republika* secara khusus menyoroti tentang perlunya transparansi dana kampanye para capres, mengumumkan kekayaan capres, indikasi praktik politik uang dan dagang sapi, serta pelanggaran etika politik dengan mengadakan kegiatan atau kunjungan selaku pejabat pemerintah yang juga calon presiden, dan netralitas aparat dalam pemilu.³⁶³ Hal ini disoroti untuk menunjukkan, kampanye negatif masih lebih dominan terjadi daripada kampanye berkualitas, yang juga diartikan sebagai pertanda pemilihan presiden belum terselenggara secara jujur dan adil (jurdil).

Dengan membedakan kampanye berkualitas dengan kampanye negatif, *Republika* menentang kampanye negatif dan menghendaki agar pelaksanaan pemilihan presiden berlangsung dalam kondisi kampanye berkualitas. Lagi pula, “kampanye negatif sebetulnya bukanlah pilihan bagus untuk memenangkan hati publik...Mereka butuh pemimpin yang aspiratif”.³⁶⁴

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan presiden yang berkualitas, *Republika* menekankan arti penting menyelesaikan masalah pilpres melalui jalur hukum dan

³⁶² *Republika*, “Menuju Kampanye Berkualitas”, Tajuk edisi 8 Juni 2004.

³⁶³ *Republika*, “Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan”, Tajuk edisi 2 Juni 2004; *Republika*, “Dimulai dari Kekayaan Capres”, Tajuk edisi 5 Juni 2004; *Republika*, “Kekayaan Calon Pemimpin”, Tajuk edisi 2 September 2004; *Republika*, “Sekali Lagi, Politik Uang”, Tajuk edisi 26 Juni 2004; *Republika*, “Jangan Lagi, Dagang Sapi”, Tajuk edisi 2 Agustus 2004; *Republika*, “Kampanye Dimulai”, Tajuk edisi 31 Mei 2004. *Republika*, “Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus”, Tajuk edisi 3 Juli 2004; *Republika*, “Sulitnya Menegakkan Pemilu Jurdil”, Tajuk edisi 31 Juli 2004; *Republika*, “Jangan Kotori Demokrasi Kita”, Tajuk edisi 18 Agustus 2004.

³⁶⁴ *Republika*, “Kampanye Dimulai”, Tajuk edisi 31 Mei 2004.

masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, dan untuk itu aparat kepolisian harus arif menyikapi laporan tentang pelanggaran pemilu.³⁶⁵

Republika menampilkan evaluasi tentang pelaksanaan pilpres dalam “proses rasional: Selengkapnya dapat dilihat dalam kutipan teks berikut ini:

“Harus diakui, masyarakat kita masih banyak yang lebih mengedepankan emosi daripada rasio. Ini terutama terjadi di masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Mereka ini melihat kepemimpinan sebagai *pejah gesang nderek tokoh A atau B* (hidup mati yang penting ikut tokoh A atau B). Dan ini sudah terbukti misalnya lewat cap jempol darah untuk menunjukkan sebuah kesetiaan pada tokoh tertentu”.³⁶⁷

Kendati pilpres dianggap belum jurdil dan masih banyak terjadi kampanye negatif, *Republika* memilih menerima hasil pilpres, dengan disertai pernyataan, “Maka biarkan kepercayaan dan kejujuran tetap disimpan di hati, walau kekalahan mendera.”³⁶⁸ Pernyataan ini dapat diasosiasikan pada Amien Rais yang dianggap *Republika* tampil dengan kampanye berkualitas tetapi menghadapi kekalahan. *Republika* menerima hasil pilpres sebagai bagian dari pelajaran demokrasi dan dalam rangka membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.³⁶⁹

3.5.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

3.5.2.1. Metafora: Ibarat Kotak Pandora

Republika membangun bingkai inti dengan menggunakan metafora untuk memberikan aksentuasi tertentu. *Republika* menggambarkan pemilihan presiden

³⁶⁵ *Republika*, “Jangan Cederai Hasil Pemilu!”, Tajuk edisi 6 Juli 2004; *Republika*, “Jangan Terlana Angka”, Tajuk edisi 10 Juli 2004; *Republika*, “Protes Hasil Rekapitulasi” Tajuk edisi 26 Juli 2004; *Republika*, “Sulitnya Menegakkan Pemilu Jurdil”, Tajuk edisi 31 Juli 2004.

³⁶⁶ *Republika*, “Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus”, Tajuk edisi 3 Juli 2004; *Republika*, “Jangan Cederai Transisi Demokrasi”, Tajuk edisi 18 September 2004.

³⁶⁷ *Republika*, “Jangan Cederai Hasil Pemilu!”, Tajuk edisi 6 Juli 2004.

³⁶⁸ *Republika*, “Kepercayaan, Kejujuran”, Tajuk edisi 8 Juli 2004.

³⁶⁹ *Republika*, “Sebuah Pelajaran Demokrasi”, Tajuk edisi 30 Juli 2004; *Republika*, “Jangan Cederai Transisi Demokrasi”, Tajuk edisi 18 September 2004; *Republika*, “Siap Menang, Siap Kalah”, Tajuk edisi 20 September 2004.

dengan kalimat metaforis berikut ini:

“Demokrasi ibarat kotak pandora, saat dibuka akan memunculkan banyak hal tak terduga. Baik maupun buruk... Seperti Pandora – wanita pertama di bumi yang diciptakan Zeus dalam mitologi Yunani – yang membiarkan harapan tertinggi tetap tersimpan di dalam kota. Maka biarkan kepercayaan dan kejujuran tetap disimpan di hati, walau kekalahan mendera. Agar pada pemilu 2009 akan lahir harapan baru, begitu seterusnya. Begitulah demokrasi, yang selalu membuka pintu peluang.”³⁷⁰

Kalimat metaforis itu, dipakai *Republika* untuk mengesankan, hasil pemilihan presiden sebagai agenda demokrasi sulit diprediksi tetapi hasil tersebut patut diterima sebagai suatu kenyataan dalam proses membangun demokrasi. Hal ini juga ditekankan *Republika* ketika menghadirkan metafora “membangun demokrasi tidak semudah membalik telapak tangan”³⁷¹ dan juga ungkapan “*Vox populi vox Dei*, suara rakyat suara Tuhan”.³⁷²

Metafora “Politik uang seperti angin busuk. Baunya tercium tapi tak bisa ditangkap”³⁷³ digunakan *Republika* untuk mengindikasikan pemilihan presiden masih belum jurdil tetapi sulit dibuktikan dengan fakta hukum. *Republika* juga menggunakan metafora untuk membangun citra pemimpin, secara khusus tentang Megawati, dengan mengatakan:

“Para pemimpin adalah ibarat penggembala yang harus berjalan di belakang gembalaannya, menjaga agar kelompok yang paling lemah, miskin, tidak tertinggal. Sudah terlampau lama rakyat ditinggal oleh para pemimpin yang cuma mau berjalan di depan dan mengukur diri dengan kelompok terkuat, tak mempedulikan gembalaan mereka yang terseok-seok jauh di belakang.”³⁷⁴

Setelah Megawati menjadi presiden, daya kritis rakyat digambarkan *Republika* dengan metafora “bak memukul angin” dan bangsa Indonesia “seperti mati

³⁷⁰ *Republika*, “Kepercayaan, Kejujuran”, Tajuk edisi 8 Juli 2004.

³⁷¹ *Republika*, “Sebuah Pelajaran Demokrasi”, Tajuk edisi 30 Juli 2004.

³⁷² *Republika*, “Kekayaan Calon Pemimpin”, Tajuk edisi 2 September 2004.

³⁷³ *Republika*, “Sekali Lagi, Politik Uang”, Tajuk edisi 26 Juni 2004.

³⁷⁴ *Republika*, “Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan”, Tajuk edisi 2 Juni 2004.

langkah dan kehilangan visi, bak di-*sirep* alias dihipnotis.”³⁷⁵ *Republika* juga menggunakan metafora “dagang sapi” untuk menggambarkan kecenderungan elit politik untuk melakukan bagi-bagi kekuasaan dan jabatan di kabinet.

3.5.2.2. *Catchphrases*: Politik Uang

Republika memakai *catchphrases* berupa jargon dan slogan untuk menekankan bingkai inti. Jargon “politik uang”, “penegakan supremasi hukum, transparansi pendanaan”, “netralitas aparat”, dipakai untuk membangun kesan pemilihan presiden belum jujur dan adil.

Jargon “kampanye berkualitas” dan “kampanye negatif” digunakan *Republika* bukan sekadar untuk membedakan karakteristik kampanye para calon presiden tetapi juga untuk membangun suatu kesan tertentu kepada khalayak pembaca tentang citra capres tertentu. *Republika* menunjukkan hal ini dalam kalimat sloganistis, seperti berikut ini:

“Para capres dan cawapres harus mampu menerjemahkan tuntutan dan penderitaan rakyat itu menjadi program konkret, dan mereka laksanakan kala mereka terpilih...Ini bukan main-main...Sekali lagi, rakyat sudah terlampau muak dengan pemimpin yang kotor-kotor.”³⁷⁶

Kalimat sloganistis yang disodorkan kepada khalayak pembaca itu mencerminkan strategi pengemasan pesan untuk mengemukakan referensi dalam menentukan pilihan pada pemilihan presiden.

Jargon “proses transisi demokrasi” diikuti slogan “sulit memang untuk menegakkan pemilu yang jujur di negeri ini”³⁷⁷ dipakai *Republika* untuk

³⁷⁵ *Republika*, “Menghentikan Persekongkolan”, Tajuk edisi 26 Agustus 2004.

³⁷⁶ *Republika*, “Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan”, Tajuk edisi 2 Juni 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditekankan *Republika*, “Narkoba dan Kampanye Capres”, Tajuk edisi 22 Juni 2004: “Bahaya narkoba tidak lebih kecil dibanding berbagai “penyakit” yang melanda bangsa ini. Sebutlah misalnya penyakit KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), pelecehan hukum (hukum bisa dibeli), kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya.”

³⁷⁷ *Republika*, “Sulitnya Menegakkan Pemilu Jurdil”, Tajuk edisi 31 Juli 2004.

menunjukkan bahwa hasil pemilihan presiden, secara khusus pada putaran pertama, tidak sesuai dengan prediksi *Republika*. Slogan “kemenangan haruslah berasal dari proses yang bersih dan halal”³⁷⁸ digunakan untuk menekankan arti penting pemilu yang jujur.

3.5.2.3. *Exemplars*: Kita Butuh Satu Tahap Lagi

Republika menampilkan komponen *exemplars* untuk membangun bingkai inti, antara lain dengan mengemukakan evaluasi tentang pilpres sebagai *exemplars*:

“Kita mencatat, pada pemilu 2004 ada yang sedang berubah dalam wacana politik di Indonesia. Tak ada lagi nada permusuhan, anarki, dan aroma kekerasan. Ini harus disyukuri. Namun masih belum bergeser ke politik rasional. Karena isu-isu publik belum mendapat apresiasi. Yang terjadi justru bergeser ke soal selera dan popularitas. Politik menjadi berwajah *ngepop*. Kita butuh satu tahap lagi agar politik menjadi bukan soal ‘gampangan’, tapi sesuatu yang butuh pertanggungjawaban dan berjangka panjang”.³⁷⁹

Dengan menghadirkan komponen *exemplars* itu, *Republika* ingin membangun kesan, pemilihan presiden kali ini merupakan suatu tahapan proses dari tahapan lebih lanjut untuk mewujudkan politik rasional yang ditandai dengan apresiasi rakyat pemilih terhadap isu-isu publik.

Komponen *exemplars* juga ditampilkan *Republika* untuk menekankan arti penting semua aparat negara menjalan citra pelaksanaan pemilihan presiden sebagai bagian dari proses demokrasi:

“Hal-hal ini kita sampaikan agar menjadi perhatian semua aparaturnegara. Jangan sampai mereka justru mengotori dan bahkan mencoreng proses demokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Reformasi yang sedang kita jalankan antara lain justru agar aparaturnegara tidak menjadi alat kekuasaan para penguasa, seperti yang terjadi selama 32 tahun Soeharto berkuasa.”³⁸⁰

³⁷⁸ *Republika*, “Jangan Terlana Angka”, Tajuk edisi 10 Juli 2004.

³⁷⁹ *Republika*, “Golput”, Tajuk edisi 15 Juli 2004.

³⁸⁰ *Republika*, “Jangan Kotori Demokrasi Kita”, Tajuk edisi 18 Agustus 2004.

3.5.2.4. *Depictions: Pemimpin yang Kotor-kotor*

Bingkai inti *Republika* didukung penggunaan kata, istilah, dan kalimat untuk menggiring khalayak pembaca masuk ke dalam bingkai tersebut. Dengan kalimat disfemistis “rakyat sudah terlampau muak dengan pemimpin yang kotor-kotor”,³⁸¹ *Republika* menekankan apa yang disebutnya sebagai “kampanye negatif” pada pemilihan presiden. Kalimat disfemistis ini dimaksudkan *Republika* sebagai stigmatisasi terhadap calon presiden yang tidak transparan menjelaskan sumber dana kampanye, kecuali Amien Rais.

Stigmatisasi itu terkesan kuat ditujukan *Republika* untuk membangun citra buruk calon presiden Megawati yang disebut pula sebagai “sang suksesor” yang melakukan “persekongkolan jahat” termasuk dengan “begundal-begundalnya” untuk “mencopot” Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden.³⁸² *Republika* secara terang-terangan membangun stigma citra buruk Megawati dalam kalimat disfemistis berikut:

“Namun, agar tidak salah pilih yang bisa berakibat fatal pada nasib bangsa dan negara ini, masyarakat juga harus panjang (kuat) ingatan. Jangan sampai upaya ‘pemutihan’ menjelang pemilihan presiden pada 20 September nanti bisa menghapuskan ‘catatan hitam’ masing-masing capres-cawapres selama ini.”³⁸³

Republika juga menghadirkan kalimat “Harus diakui, masyarakat kita masih banyak yang lebih mengedepankan emosi daripada rasio. Ini terutama terjadi di masyarakat pedesaan yang masih tradisional”³⁸⁴ sebagai stigmatisasi terhadap mayoritas pemilih sekaligus untuk mengesankan, kemenangan maupun kekalahan

³⁸¹ *Republika*, “Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan”, Tajuk edisi 2 Juni 2004.

³⁸² *Republika*, “Menghentikan Persekongkolan”, Tajuk edisi 26 Agustus 2004.

³⁸³ *Republika*, “Jaga Citra Jelang Pilpres”, Tajuk edisi 10 Agustus 2004.

³⁸⁴ *Republika*, “Jangan Cederai Hasil Pemilu!”, Tajuk edisi 6 Juli 2004.

calon presiden tertentu bukan terletak pada visi dan misi tetapi lebih pada karakteristik rakyat pemilih yang belum rasional.

3.5.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*)

3.5.3.1. *Roots*: Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus

Untuk mengkonstruksi bingkai inti, *Republika* menggunakan argumentasi pembenar (*roots*). *Roots* berupa argumentasi sebab akibat dipakai *Republika* untuk menonjolkan agar semua pihak menerima hasil pemilihan presiden sebagai sebuah pelajaran demokrasi yang berlangsung dalam “proses transisi demokrasi”:

“Kita pun sudah seharusnya menyiapkan diri untuk menerima kemenangan ataupun kekalahan calon pilihan masing-masing. Siapa pun yang terpilih dan mendapat mandat dari rakyat untuk lima tahun ke depan, harapan kita satu: proses transisi demokrasi yang sudah berlangsung sejak 1988 harus jalan terus. Harus kita akui bahwa keberlangsungan demokrasi di negeri ini yang masih menggeliat setelah lama “mati”, amat tergantung pula pada keinginan politik dari para pemimpin yang berkuasa nantinya”³⁸⁵

Dengan *roots* itu, *Republika* membangun kesan, meski pemilu pilpres belum jujur tetapi semua pihak harus menerima kenyataan. Tetapi *Republika* juga menghadirkan *roots* yang menunjukkan salah satu faktor penyebab pemilu belum jujur:

“Namun...sulit untuk menangkap pihak-pihak yang melakukan politik uang. Padahal pada Pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jelas-jelas disebutkan bahwa pasangan calon/tim kampanye dilarang menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih (ayat 1). Sanksi atas pelanggaran tersebut berupa pembatalan pasangan calon (ayat 2).”³⁸⁶

Dalam teks itu, *Republika* menunjukkan, UU melarang politik uang tetapi hal tersebut sulit diterapkan karena selalu harus disertai dengan bukti hukum. Hal ini juga ditegaskan *Republika* dalam *roots* berikut:

³⁸⁵ *Republika*, “Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus”, Tajuk edisi 3 Juli 2004; lihat juga *Republika*, “Jangan Cederai Hasil Pemilu!”, Tajuk edisi 6 Juli 2004.

³⁸⁶ *Republika*, “Sekali Lagi, Politik Uang”, Tajuk edisi 26 Juni 2004.

“Dalam demokrasi etika adalah satu hal sementara hukum adalah hal lain. Atau juga dalam etika ada hierarki dan konstektualitas, berbeda dengan hukum yang sangat kaku, seragam, dan tegas. Untuk kepentingan *check and balances* dalam mekanisme demokrasi, etika bisa dikesampingkan...”³⁸⁷

3.5.3.2. *Appeals to principle: NgonoYo Ngono Ning Ojo Ngono*

Republika menampilkan pepatah Jawa: “Soalnya adalah dosis, atau dalam istilah orang Jawa adalah *ngono yo ngono ning ojo ngono* alias jangan kelewat-an”³⁸⁸ sebagai klaim moral (*appeals to principle*) untuk menunjukkan kampanye negatif selalu berpeluang terjadi tetapi hendaknya wajar dan tidak berlebihan.

Untuk menekankan arti penting kampanye positif, *Republika* memilih menggunakan pandangan agama sebagai referensi: “Mengambil teladan para nabi dan rasul Allah serta *khulafaur rasyidin*, sudah semestinya penegakan pemerintahan yang bersih dan tidak korup dimulai dari presiden dan wakilnya.”³⁸⁹

3.6. Perspektif: Pemilihan Presiden Proses Transisi Demokrasi

Bingkai inti yang dibangun *Republika* tentang pelaksanaan pemilihan presiden adalah pemilihan presiden belum jurdil (jujur dan adil), sebuah pelajaran demokrasi. Disebut belum jurdil, karena *Republika* menilai, kampanye negatif lebih dominan daripada kampanye berkualitas. Kampanye negatif ini antara lain dana kampanye capres dan kekayaan capres belum transparan, praktik politik uang dan dagang sapi masih terjadi, pelanggaran etika politik oleh capres selaku pejabat pemerintah, aparat belum netral.

Kampanye berkualitas adalah bersaing mengajukan konsep dalam mengelola bangsa dan negara, tidak tidak mengkritik dan menjelekkan atau mengungkit-

³⁸⁷ *Republika*, “Kampanye Dimulai”, Tajuk edisi 31 Mei 2004; *Republika*, “Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus”, Tajuk edisi 3 Juli 2004.

³⁸⁸ *Republika*, “Kampanye Dimulai”, Tajuk edisi 31 Mei 2004.

³⁸⁹ *Republika*, “Dimulai dari Kekayaan Capres”, Tajuk edisi 5 Juni 2004.

ungkit masalah-masalah pribadi capres tertentu. Hal ini disertai gagasan, pemilihan presiden merupakan “proses transisi demokrasi” di Indonesia. Karena menurut *Republika*, sejak tahun 1998 hingga pelaksanaan pemilihan presiden 2004, Indonesia berada dalam proses transisi demokrasi. Beranjak dari pemahaman ini, *Republika* mengevaluasi dan merefleksikan pemilihan presiden sebagai sebuah pelajaran demokrasi yang perlu arif disikapi dalam rangka membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam kaitan dengan evaluasi tersebut, *Republika* menilai bahwa rakyat Indonesia dalam menentukan pilihan masih belum rasional dan mengapresiasi isu-isu publik yang dikemukakan calon presiden. Faktor ini pula yang dikesankan *Republika* sebagai penyebab kekalahan Amien Rais. Namun *Republika* menekankan, semua pihak harus menerima hasil pemilihan presiden sebagai sebuah pelajaran demokrasi. Gagasan bahwa pemilihan presiden sebagai proses transisi demokrasi, selaras dengan pengertian demokrasi yang komprehensif, di mana pemilu bukan tujuan tetapi lebih merupakan proses untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, *Republika* memilih menggunakan perspektif (*media package*) demokratisasi.

3.7. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Republika menyajikan tujuh item rubrik *Tajuk* untuk mewadahi wacana mengenai pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat. Wacana ini ditonjolkan dengan mengkonstruksi fakta peristiwa usai pemilihan presiden putaran kedua dan kondisi Indonesia kontemporer. *Republika* mengemas pesan tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat dalam tajuk berjudul:

“Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat” (edisi 21 September 2004), “Teknologi Kita, Presiden” (edisi 22 September 2004), “Guru” (edisi 23 September 2004), “PR

Penganguran” (edisi 24 September 2004), “Berantas Korupsi Mulai dari Presiden” (edisi 25 September 2004), “Semoga Sukses Berjalan Mulus” (edisi 28 September 2004), dan “Pesangon” (edisi 30 September 2004).

3.7.1. Bingkai Inti: Pemerintah Harus Memberantas Korupsi, Mengatasi Masalah Pendidikan dan Ekonomi

Republika membangun bingkai inti, pemerintah yang dipimpin oleh presiden harus memberantas korupsi, mengatasi masalah pendidikan dan ekonomi dengan menekankan bahwa presiden tidak boleh membeda-bedakan rakyat, semua harus mendapatkan perlakuan sama:

“Kepada pihak SBY-JK yang diperkirakan mendapat suara terbanyak, harus memanfaatkan kesempatan ini buat menggalang rekonsiliasi, membangkitkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Mereka tidak boleh membedakan antara pendukung dan yang bukan. Semua adalah rakyat Indonesia yang harus mendapatkan perlakuan sama. Hanya dengan ini kita akan menjadi bangsa besar yang terhormat!”³⁹⁰

Republika menekankan keharusan presiden untuk memberantas korupsi, mengatasi masalah pendidikan dan ekonomi dengan menampilkan fakta masalah yang dihadapi rakyat dalam bidang pendidikan, tenaga kerja, dan pengembangan teknologi. Permasalahan ini secara eksplisit dikemukakan *Republika* dalam tajuk yang diberi judul “Guru”, “PR Pengangguran”, dan “Teknologi Kita, Presiden”. Dengan kata lain, *Republika* menekankan hak-hak rakyat atas pendidikan dan penghidupan yang layak, harus menjadi program prioritas

Dalam kaitan itu, *Republika* juga mengedepankan faktor penghambat bagi terciptanya kesejahteraan rakyat, yakni: praktik-praktik korupsi. Praktik korupsi disebut ““memenjarakan” rakyat dalam lingkaran kemiskinan”, dan dikesankan pula bahwa praktik korupsi dapat meruntuhkan pemerintahan:

“Lima tahun setelah tumbang rezim Soeharto ternyata praktik-praktik korupsi di negeri ini terus berlangsung. Para pemimpin, baik itu di lingkaran

³⁹⁰ *Republika*, “Semoga Sukses Berjalan Mulus”, Tajuk edisi 28 September 2004.

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif seakan tidak peduli bahwa runtuhnya pemerintahan Orde Baru justru karena melangitnya praktik-praktik yang “memenjarakan” rakyat dalam lingkaran kemiskinan itu. Mereka seperti tidak berdaya untuk memberantasnya, atau bahkan juga terlibat dalam praktik tersebut.”³⁹¹

Dengan menampilkan teks itu, selain membangun citra buruk pemerintahan dalam lima tahun terakhir ini, *Republika* ingin menekankan tindakan konkret memberantas korupsi merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi dianggap *Republika* akan lebih efektif jika dimulai dari diri presiden sendiri:

“Pemberantasan korupsi dan koruptor bukanlah perkara sulit. Kalau dimulai dengan kemauan dan ketegasan presiden, negeri ini akan bebas dari korupsi beserta turunannya. Rakyat tinggal bercermin pada pemimpinnya.”³⁹²

Republika mengesankan, praktik korupsi yang selama ini terjadi lebih pada citra seorang pemimpin atau presiden. Indonesia, disebut *Republika*, menjadi negeri korup adalah karena pemimpin tidak peka dan tidak berempati pada problem rakyat.³⁹³ Dengan kata lain, *Republika* menekankan pemberantasan korupsi dilakukan pendekatan paternalistik, termasuk dengan memilih menteri yang antikorupsi:

“Presiden baru juga harus memilih menteri yang bisa bertindak tegas. Kalau menteri itu jujur dan sederhana, namun tidak tegas dengan membiarkan korupsi merajalela di departemennya, sama juga bohong. Hal itu sama saja dengan membiarkan kapal dan penumpangnya tenggelam, tapi dia sudah lebih dulu di sekoci.”³⁹⁴

³⁹¹ *Republika*, “Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat”, Tajuk edisi 21 September 2004.

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ *Republika* memaknai rencana Megawati untuk memberikan pesangon kepada para presiden sebagai “tidak peka dan tidak berempati pada problem masyarakat”. Pemberian pesangon, dianggap akan menimbulkan praktik korupsi pada jajaran pemerintahan yang lebih rendah. Lihat *Republika*, “Pesangon”, Tajuk edisi 30 September 2004.

³⁹⁴ *Republika*, “Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat”, Tajuk edisi 21 September 2004.

Mengenai pemimpin pemerintahan, *Republika* menggambarkan presiden terpilih dengan analogi “Anda bukanlah kucing dalam karung”³⁹⁵ untuk menekankan ia dipilih dalam sistem yang terbuka. Para pemimpin atau elite, ditekankan *Republika* untuk menerima presiden terpilih sebagai wujud menghargai rakyat:

“Rakyat telah memberi jalan yang lapang kepada pemimpin yang nantinya terpilih, untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dan memenuhi segala janjinya...Rakyat telah mengajarkan kepada bangsa ini bagaimana cara yang etis mencapai tujuan, maka para pemimpin – yang terpilih maupun tidak – berkewajiban memberikan keteladanan.”³⁹⁶

Dalam teks itu, *Republika* rakyat ditonjolkan sebagai telah memberikan kontribusi bagi kehidupan demokrasi sedang kepada elite ditekankan untuk memberikan keteladanan dengan menerima hasil pemilihan presiden. *Republika* merasa perlu menekankan hal ini, karena dianggap proses demokrasi boleh menjadi tidak mulus, apabila elit politik memunculkan gejolak menjelang pergantian presiden:

“Dalam sejarah Indonesia merdeka, belum sekali pun pergantian pemimpin nasional (pemerintah) berjalan mulus. Dalam arti pergantian itu berlangsung normal, tanpa didahului atau dibarengi gejolak...Apa yang ingin kita sampaikan, proses demokrasi yang sudah dirintis ini hendaknya tetap bisa berjalan mulus. Pergantian presiden-wakil presiden hendaknya dapat berlangsung sebagaimana mestinya, tanpa memunculkan gejolak. Bila ini terjadi, maka sebenarnya tidak ada pihak yang kalah. Semua pihak adalah para pemenang: pemenang demokrasi!”³⁹⁷

3.7.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

3.7.2.1. Metafora: Republik Ini Memerlukan Seorang Imam

Republika menggunakan metaforis “Anda bukanlah kucing dalam karung” untuk menggambarkan presiden yang dipilih secara oleh rakyat merupakan tokoh

³⁹⁵ *Republika*, “Teknologi Kita, Presiden”, Tajuk edisi 22 September 2004.

³⁹⁶ *Republika*, “Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat”, Tajuk edisi 21 September 2004.

³⁹⁷ *Republika*, “Semoga Sukses Berjalan Mulus”, Tajuk edisi 28 September 2004.

yang tampil menjadi presiden dalam suatu sistem yang transparan. Metafora “Republik ini memerlukan seorang imam” digunakan *Republika* untuk menekankan, presiden terpilih menjadi pemimpin yang berani mengangkat martabat bangsa ini “tak cuma jadi kuli dan tempat buangan sampah”.³⁹⁸

Dengan menampilkan metafora itu, *Republika* menekankan pesan optimistik kepada presiden untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga ditegaskan *Republika* dengan kalimat metaforis: “Yang pasti mereka menghendaki Anda dapat menghela gerbong Republik ini keluar dari keterpurukan dan mampu mengangkat kepala kembali di hadapan masyarakat internasional.”³⁹⁹ Sedang mengenai langkah untuk pemberantasan korupsi, *Republika* juga memakai kalimat metaforis:

“Presiden baru juga harus memilih menteri yang bisa bertindak tegas. Kalau menteri itu jujur dan sederhana, namun tidak tegas dengan membiarkan korupsi merajalela di departemennya, sama juga bohong. Hal itu sama saja dengan membiarkan kapal dan penumpangnya tenggelam, tapi dia sudah lebih dulu di sekoci.”⁴⁰⁰

3.7.2.2. *Catchphrases*: Berantas Korupsi Mulai dari Presiden

Republika menampilkan sejumlah *catchphrases* untuk menyusun bingkai inti. Jargon sloganistis “berantas korupsi mulai dari presiden” ditonjolkan *Republika* sebagai judul tajuk untuk menekankan arti penting presiden melakukan pemberantasan korupsi. Dengan jargon ini, ingin dikesankan, praktik korupsi telah berakar kuat di negeri ini. Untuk memperkuat hal ini, *Republika* menghadirkan slogan “praktik-praktik korupsi “memenjarakan” rakyat dalam lingkaran

³⁹⁸ *Republika*, “Teknologi Kita, Presiden”, Tajuk edisi 22 September 2004

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ *Republika*, “Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat”, Tajuk edisi 21 September 2004.

kemiskinan”. Dengan demikian, *Republika* menekankan presiden harus melakukan tindakan konkret untuk membenahi pelaksanaan pemerintahan.

Kedudukan presiden terpilih digambarkan dengan jargon “mengemban amanat rakyat”, “mandat langsung dari rakyat”, dan slogan “ia duduk di kursi kepresidenan karena rakyat menghendaki”.

3.7.2.3. *Exemplars*: Karya Habibie dan Gagasan Amien Rais

Republika menghadirkan komponen *exemplars* untuk mendukung bingkai inti. Untuk menggambarkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam bidang teknologi, *Republika* menonjolkan fakta karya Habibie:

“Prof BJ Habibie pernah membuat proyek percobaan pembuatan pabrik es skala kecil menggunakan tenaga surya. Canggih? Betul. Tetapi itu tepat guna mengingat di tempat-tempat itu – kawasan nelayan Cituis dan Picon di Jawa Barat bagian utara – tak ada sumber listrik, yang ada cuma matahari. Maksudnya, dengan kemampuan membuat es, hasil tangkapan nelayan bisa dibuat lebih tahan lama, tak lekas busuk. Alhasil para nelayan mampu memperoleh hasil lebih baik”⁴⁰¹

Sementara untuk mengatasi masalah pengangguran, *Republika* memilih menampilkan gagasan Amien Rais:

“Peluang untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggenjot sektor informal. Seperti sering diucapkan oleh Amien Rais saat kampanye calon presiden putaran pertama dulu, secara teoretis jika setiap usaha kecil informal yang jumlahnya 40 juta dapat menambah satu angkatan kerja, maka persoalan pengangguran bisa selesai.”⁴⁰²

3.7.2.4. *Depictions*: KKN Bukannya Mengempes

Republika memilih kata, istilah, dan kalimat (*depictions*) untuk mengarahkan pembaca ke bingkai inti. *Republika* memakai difemisme dan stigmatisasi untuk mencitrakan pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid dan

⁴⁰¹ *Republika*, “Teknologi Kita, Presiden”, Tajuk edisi 22 September 2004.

⁴⁰² *Republika*, “PR Pengangguran”, Tajuk edisi 24 September 2004.

Megawati: “Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukannya mengempes, justru melambung.” *Republika* juga menggunakan kalimat disfemistis “rakyat masih hidup pas-pasan dan tingginya angka pengangguran” untuk menekankan perlunya tindakan nyata presiden terpilih untuk mensejahterakan rakyat.

Disfemisme dan stigmatisasi juga ditampilkan *Republika* untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia: “Kini, kesempatan untuk menjadi *pinter* makin tertutup akibat kualitas pendidikan untuk kelas sosial bawah begitu memprihatinkan.”⁴⁰³ Dengan kalimat ini, *Republika* ingin menekankan urgensi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan.

3.7.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

3.7.3.1. *Roots*: Ujungnya Konflik Sosial

Republika mengkonstruksi bingkai inti dengan menggunakan *roots* atau argumentasi pembenar. Untuk menegaskan perlunya mengatasi masalah pendidikan, *Republika* menghadirkan *roots*:

“Jika kecenderungan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sekolah negeri dan swasta untuk kelas bawah, maka kita akan menuai lahirnya disparitas sosial yang sangat tajam. Yang kaya mendapat kesempatan untuk terus meningkatkan kualitasnya dan bertahan di strata sosial atas, dan yang miskin makin terpuruk akibat tak mampu mengakselerasi diri lewat pendidikan. Terjadi pengkutuban kelas sosial yang tak bisa dicarikan titik temunya. Ujungnya adalah konflik sosial...”⁴⁰⁴

Dengan memilih menampilkan *roots* itu, *Republika* ingin membangun kesan tentang arti penting pemerintahan presiden terpilih untuk mengatasi pelbagai masalah sosial agar tidak menjadi konflik sosial. Sehubungan dengan ini, *Republika* juga menekankan arti penting memberantas korupsi dengan menampilkan *roots* merujuk pada data BPK

⁴⁰³ *Republika*, “Guru”, Tajuk edisi 23 September 2004.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

“Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sidang MPR Kamis (23/9) lalu memperlihatkan bukti itu. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukannya mengempes, justru melambung. Bukan kepalang angkanya. Sejak 1999-2004, dalam dua masa pemerintahan presiden; Abdurrahman Wahid dan Megawati, uang negara yang hilang akibat praktik-praktik jahat itu mencapai Rp 167 triliun.”⁴⁰⁵

Dengan *roots* itu, selain menunjukkan citra buruk pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, *Republika* ingin mengesankan, pemerintahan hasil pemilu diperhadapkan pada kondisi praktik KKN pada jajaran pemerintahan. Sementara untuk menggambarkan kondisi pengangguran, *Republika* menggunakan data BPS:

“Pengangguran memang tidak bisa diremehkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pengangguran saat ini sudah mencapai 38,2 juta yang terdiri dari delapan juta pengangguran terbuka dan 30,2 juta setengah pengangguran. Sedangkan angkatan kerja baru yang masuk pasar tiap tahunnya sekitar 2,3 juta.”⁴⁰⁶

Dengan menghadirkan *roots* di atas, *Republika* ingin menekankan, pelbagai masalah sosial-ekonomi, dalam bidang pendidikan, pengangguran, dan juga praktik KKN, mendesak diatasi agar tidak berujung pada konflik sosial.

3.7.3.2. *Appeals to principle: “Sami’naa wa atha’naa”*

Republika memanfaatkan agumentasi berlandaskan klaim moral dogmatis (*appeals to principle*) untuk membangun bingkai inti. *Republika* menghadirkan kutipan dari kitab suci Al-Quran untuk menekankan citra presiden sebagai pemimpin pemerintahan:

“Rakyat tinggal bercermin pada pemimpinnya. Izinkan kita mengutip penggalan ayat 255 Surat al-Baqarah, untuk menggambarkan ketaatan rakyat pada pemimpinnya: “*Sami’naa wa atha’naa.*” Kami dengar dan kami taat.”⁴⁰⁷

⁴⁰⁵ *Republika*, “Berantas Korupsi Mulai dari Presiden”, Tajuk edisi 25 September 2004.

⁴⁰⁶ *Republika*, “PR Pengangguran”, Tajuk edisi 24 September.2004.

⁴⁰⁷ *Republika*, “Berantas Korupsi Mulai dari Presiden”, Tajuk edisi 25 September 2004.

Dengan klaim moral dogmatis itu, *Republika* lebih melihat persoalan yang dihadapi rakyat terletak pada pemimpin. Rakyat dicitrakan sebagai penurut atau yang mematuhi pemimpin. *Republika* juga menghadirkan klaim moral: “menggalang rekonsiliasi” menekankan kepada presiden terpilih untuk menjalin hubungan dengan semua komponen bangsa. Dengan klaim moral ini, secara implisit *Republika* menggambarkan hubungan antarelit politik membutuhkan “rekonsiliasi”.

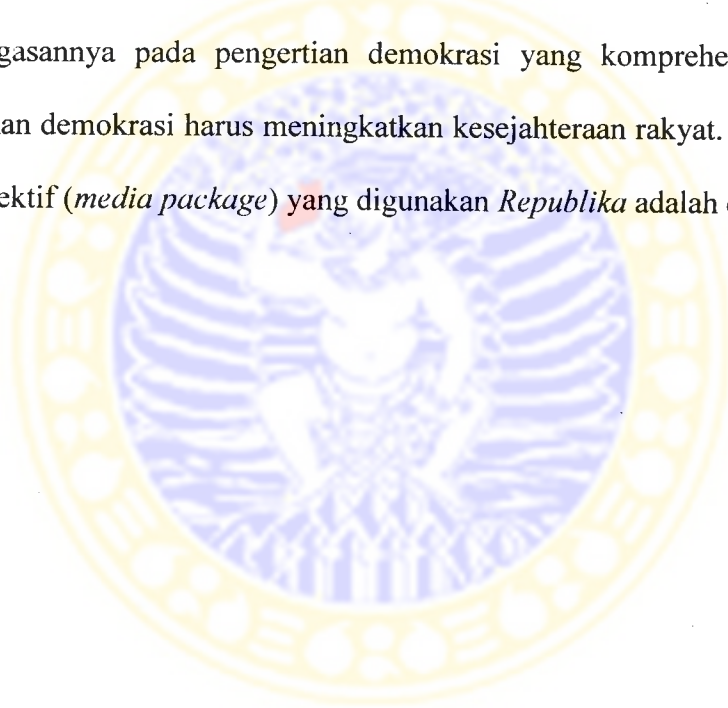
3.8. Perspektif: Pemerintahan Demokrasi Harus Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Republika membangun bingkai inti, presiden selaku pemimpin pemerintahan harus memberantas korupsi, mengatasi masalah pendidikan dan ekonomi. Hal ini dikonstruksi dengan menampilkan pelbagai masalah-masalah sosial politik dalam realitas kehidupan Indonesia kontemporer. *Republika* lebih melihat persoalan tersebut berakar pada kepemimpinan seorang presiden yang digambarkan tidak menunaikan amanat rakyat dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, para pendukungnya. Oleh karena itu, *Republika* menekankan kepada presiden terpilih agar semua rakyat diperlakukan setara tanpa membedakan latar belakang sosial, politik maupun agama.

Menurut *Republika*, program yang harus menjadi agenda prioritas presiden terpilih adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat banyak meliputi hak yang setara dalam mengakselerasi diri dalam bidang pendidikan (hak atas pendidikan), memperoleh pekerjaan dan penghasilan tetap (hak atas penghidupan yang layak). Sehubungan dengan ini, *Republika* mendesak presiden untuk membenahi pemerintahannya dengan memberantas korupsi.

Republika menganggap, praktik-praktik korupsi di “negeri korup” ini memiliki efek domino pada berbagai aspek kehidupan rakyat dan bahkan korupsi telah “memenjarakan” rakyat dalam lingkaran kemiskinan. Tindakan pemberantasan korupsi, menurut *Republika*, harus “mulai dari presiden” sebagai pemimpin pemerintahan. *Republika* yakin, dengan pendekatan paternalistik, di mana presiden menjadi teladan, pemerintah dapat memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan hak-hak rakyat banyak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Dengan desain ulasan seperti itu, memperlihatkan bahwa *Republika* melandaskan gagasannya pada pengertian demokrasi yang komprehensif, di mana pemerintahan demokrasi harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, perspektif (*media package*) yang digunakan *Republika* adalah demokratisasi.



Tabel 3: Framing Isu Demokratisasi oleh *Republika***1. Tentang Persamaan di Depan Hukum**

Perspektif (Media Package): Dalam Demokrasi Hukum adalah 'Tuan' (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Semua Pihak Harus Tunduk Pada Hukum	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Hukum adalah 'tuan' yang harus diikuti oleh setiap warga. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum.	<i>Roots:</i> Gugatan Gus Dur ke KPU bukan yang pertama. Bahkan telah mengajukan <i>judicial review</i> tetapi ditolak oleh MK dan MA.
<i>Catchphrases:</i> Gus Dur memaksakan kehendak dengan mengajak orang lain menjadi golput. Ajakan untuk tidak memilih tentulah sikap yang tidak bertanggung jawab.	<i>Appeals to principle:</i> Memperjuangkan demokrasi harus ditempuh dengan cara-cara yang benar dan juga demokratis, yakni mematuhi hukum dan tidak boleh memaksakan kehendak
<i>Exemplars:</i> MK dan MA telah menolak <i>judicial review</i> yang diajukan Gus Dur terkait dengan SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/ Cawapres.	<i>Consequences:</i> Gus Dur bukan figur yang demokratis karena tidak mematuhi keputusan penegak hukum.
<i>Depictions:</i> Gus Dur 'ngotot' mencalonkan diri sebagai presiden	

2. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

Perspektif (Media Package): Demokratisasi, Kedaulatan Rakyat Harus Dilandasi Pikiran-Pikiran Rasional	
Bingkai Inti (Core Frame): Rakyat Harus Menentukan Pilihan dengan Pertimbangan Rasional	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Tersandera oleh pemimpin yang gagal. Lima menit di kotak suara akan menentukan Indonesia untuk lima tahun ke depan.	<i>Roots:</i> Rakyat harus rasional. Apabila rakyat salah menentukan pilihan, transisi demokrasi akan semakin panjang dan Indonesia tersandera lima tahun ke depan.
<i>Catchphrases:</i> Sebagian di antara rakyat memilih karena alasan-alasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan calon. Rakyat menentukan Indonesia untuk lima tahun ke depan.	<i>Appeals to principle:</i> <i>Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.</i>
<i>Exemplars:</i> Enam tahun setelah reformasi, kedaulatan kembali ke tangan rakyat.	<i>Consequences:</i> Megawati tidak layak dipilih. Amien Rais tidak terpilih menjadi presiden karena dalam menentukan pilihan, rakyat masih belum rasional.
<i>Depictions:</i> Amien Rais terjejal oleh isu-isu negatif. Kondisi Indonesia carut marut, terjadi krisis serba muka.	

3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Perspektif (Media Package): Pemilihan Presiden Proses Transisi Demokrasi (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame) : Pemilihan Presiden Belum Jurdil, Sebuah Pelajaran Demokrasi	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Demokrasi ibarat kotak Pandora. Tidak semudah membalik telapak tangan. <i>Vox populi vox Dei</i> , suara rakyat suara Tuhan. Politik uang seperti angin busuk. Para pemimpin ibarat penggembala yang harus berjalan di belakang gembalaannya.	<i>Roots:</i> Transisi demokrasi harus jalan terus, semua pihak harus siap menerima kemenangan ataupun kekalahan calon masing-masing sebagai sebuah pelajaran demokrasi.
<i>Catchphrases:</i> Politik uang. Sulit memang menegakkan pemilu jurdil di negeri ini. Lebih banyak terjadi kampanye negatif daripada kampanye positif.	<i>Appeals to principle:</i> <i>ngono yo ngono ning ojo ngono</i> alias jangan kelewatan. Mengambil teladan para nabi dan rasul Allah serta <i>khulafaur rasyidin</i> .
<i>Exemplars:</i> Kita butuh satu tahap lagi untuk mewujudkan politik rasional, di mana rakyat mengapresiasi isu-isu publik.	<i>Consequences:</i> Menerima hasil pemilihan presiden, dengan berbagai kekurangan pelaksanaan.
<i>Depictions:</i> Rakyat muak dengan pemimpin yang kotor-kotor. Megawati sang suksesor, melakukan persekongkolan mencopot Abdurrahman Wahid.	

4. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Perspektif (Media Package): Pemerintahan Demokrasi Harus Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame) : Presiden Harus Memberantas Korupsi, Mengatasi Masalah Pendidikan dan Pengangguran	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Republik ini memerlukan seorang imam untuk membawa bangsa ini tak cuma jadi kuli dan tempat buangan sampah. Pemimpin tidak boleh membiarkan kapal dan penumpangnya tenggelam, tapi dia sudah lebih dulu di sekoci.	<i>Roots:</i> Pelbagai masalah sosial-ekonomi, dalam bidang pendidikan, pengangguran, dan juga praktik KKN, mendesak diatasi agar tidak berujung pada konflik sosial.
<i>Catchphrases:</i> Berantas korupsi mulai dari presiden. Praktik-praktik korupsi telah "memenjarakan" rakyat dalam lingkaran kemiskinan.	<i>Appeals to principle:</i> Rakyat tinggal bercermin pada pemimpinnya. Penggalan ayat 255 Surat al-Baqarah menggambarkan ketaatan rakyat pada pemimpinnya: " <i>Sami'naa wa atha'naa.</i> " Kami dengar dan kami taat.
<i>Exemplars:</i> Habibie pernah membuat teknologi tepat guna bagi nelayan. Gagasan Amien Rais masalah pengangguran dapat diatasi jika setiap usaha kecil informal yang dapat menambah satu angkatan kerja.	<i>Consequences:</i> Pemerintahan yang bersih dapat dicapai apabila presiden menjadi teladan. Gagasan Habibie dan Amien Rais perlu menjadi rujukan.
<i>Depictions:</i> KKN bukannya mengempes. Rakyat hidup pas-pasan. Angka pengangguran tinggi. Rakyat miskin tak mampu mengakselerasi diri lewat pendidikan.	

IV.4. *Jawa Pos*

4.1. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

Jawa Pos menyajikan ulasan tentang kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan pada pemilihan presiden dalam 12 item rubrik *Jati Diri*, masing-masing berjudul:

“Pemilih Harus Angkuh” (edisi 13 Mei 2004); “Penonaktifan Hasyim-Gus Sholah” (edisi 18 Mei 2004); “Calon Orang Nomor 1”, (edisi 25 Mei 2004); “Mencoblos Capres yang Sah” (edisi 29 Mei 2004); “Cap Jempol Darah” (edisi 7 Juni 2004); “Fatwa Pilih Capres Pria” (edisi 8 Juni 2004); “Dukungan Pesantren ke Capres” (edisi 16 Juni 2004); “Debat Capres” (edisi 30 Juni 2004); “Pengarahan Kiai Sahal” (edisi 1 Juli 2004); “Memasuki Masa Tenang” (edisi 2 Juli 2004); “Lulus Ujian Politik” (edisi 6 Juli 2004); “Dukungan Warga NU ke SBY” (edisi 9 Juli 2004); “Dukung-mendukung Capres” (edisi 27 Juli 2004); “Taushiyah Syuriah PB NU” (edisi 10 September 2004); “Mengayomi Pendukung Capres” (edisi 18 September 2004).

Judul tersebut menunjukkan, *Jawa Pos* mendasarkan ulasannya pada berbagai fakta peristiwa, dan di antaranya terdapat 6 item yang berhubungan dengan kalangan NU.

4.1.1. Bingkai Inti: Rakyat Harus Berdaulat, Mandiri, serta Otonom Menentukan Pilihan

Jawa Pos membangun bingkai inti, rakyat harus berdaulat, mandiri, serta otonom menentukan pilihan dengan menonjolkan dan memaknai berbagai fakta peristiwa sehubungan dengan pemilihan presiden. *Jawa Pos* menonjolkan bingkai inti tersebut dengan memaknai kondisi politik Indonesia sebagai telah berubah.

Hal ini dikedepankan dengan menulis:

“Ini benar-benar buah demokrasi yang dilahirkan reformasi politik 1998...banyaknya tokoh yang maju sebagai calon pasangan presiden-wakil presiden menunjukkan bahwa demokrasi di negeri ini telah membuahkkan kompetisi politik yang bebas...Kini tugas selanjutnya ialah rakyat calon pemilih harus mengintai. Rakyat bebas menimbang-nimbang calon presiden-wakil presiden yang disukai. Bebas menentukan pilihan sesuka hati...Kini era bebas. Era kemandirian individu. Era otonomi sikap dan pilihan politik. Jangan mau dimobilisasi. Jangan mau diiming-imingi janji politik, hadiah,

uang, dan segala jenis imbalan materi yang tendensinya menyogok atau merayu Anda sebagai pemilih.”⁴⁰⁸

Dalam teks itu, *Jawa Pos* menekankan konteks pemilihan presiden berlangsung dalam iklim demokrasi dan oleh karena itu rakyat diingatkan agar tidak mau dipengaruhi oleh capres-cawapres manapun:

“Jika ada calon pasangan presiden-wakil presiden seperti itu, mereka layak segera digembosi. Tidak usah perhatikan. Apalagi harus mencoblosnya. Saatnya kini para pemilih angkuh untuk mempertahankan nilai tawar politiknya. Yakni, hanya mau memilih calon pasangan presiden-wakil presiden yang memang patut, layak, memiliki kapabilitas, dan kapasitas yang bisa dipercaya bangsa ini.”⁴⁰⁹

Selain itu, *Jawa Pos* juga mengkonstruksi dan memaknai berbagai fakta peristiwa untuk menekankan kedaulatan dan kemandirian rakyat dalam menentukan pilihan.⁴¹⁰ Hal ini, misalnya dapat dilihat dalam kutipan teks berikut:

“Kita tidak respek terhadap cara dukung-mendukung dengan penyiksaan diri seperti cap jempol darah...Berpolitik, termasuk dalam dukung mendukung calon presiden, bukanlah perkara hidup mati. Tetapi menyangkut *bargaining* antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan calon presiden sebagai orang yang bakal diberi kepercayaan untuk menjalankan kedaulatan itu”⁴¹¹
 “Perebutan kursi presiden saat ini adalah masalah profan yang tidak layak disakralkan. Para calon yang sedang bertarung juga mendasarkan langkah-langkahnya kepada hal-hal yang pragmatis. Karena itu, tidak selayaknyalah bila para kiai menggunakan otoritas keagamaannya untuk mengarahkan politik para santri atau anak didiknya.”⁴¹²

⁴⁰⁸ *Jawa Pos*, “Pemilih Harus Angkuh”, Jati Diri edisi 13 Mei 2004. *Jawa Pos* kerap menyebut tentang kondisi kebebasan memilih pada pilpres 2004 yang ditandai dengan “banyak pilihan”, lihat *Jawa Pos*, “Calon Orang Nomor 1”, Jati Diri edisi 25 Mei 2004.

⁴⁰⁹ *Jawa Pos*, “Pemilih Harus Angkuh”, Jati Diri edisi 13 Mei 2004.

⁴¹⁰ Lihat *Jawa Pos*, “Penonanaktifan Hasyim-Gus Sholah”, Jati Diri edisi 18 Mei 2004; *Jawa Pos*, “Cap Jempol Darah”, Jati Diri edisi 7 Juni 2004; *Jawa Pos*, “Fatwa Pilih Capres Pria”, Jati Diri edisi 8 Juni 2004; *Jawa Pos*, “Dukungan Pesantren ke Capres”, Jati Diri edisi 16 Juni 2004; *Jawa Pos*, “Debat Capres”, Jati Diri edisi 30 Juni 2004; *Jawa Pos*, “Pengarahan Kiai Sahal”, Jati Diri edisi 1 Juli 2004; *Jawa Pos*, “Dukung-mendukung Capres”, Jati Diri edisi 27 Juli 2004; *Jawa Pos*, “Taushiyah Syuriah PB NU”, Jati Diri edisi 10 September 2004.

⁴¹¹ *Jawa Pos*, “Cap Jempol Darah”, Jati Diri edisi 7 Juni 2004.

⁴¹² *Jawa Pos*, “Dukungan Pesantren ke Capres”, Jati Diri edisi 16 Juni 2004.

Jawa Pos juga menekankan urgensi menciptakan suasana kondusif pemilihan presiden demi mewujudkan kedaulatan dan kemandirian rakyat dalam menentukan pilihan:

“Masa tenang harus dikondisikan agar kedaulatan pemilih diwujudkan. Mereka harus berdaulat, mandiri, serta otonom bahwa keputusan untuk memilih atau tidak memilih capres-cawapres tertentu menjadi kewenangan mutlak individu pemilih. Kontestan (capres-cawapres) juga harus memberikan pendidikan politik yang benar bahwa setelah kampanye selesai dan memasuki masa tenang tidak perlu ada intervensi terhadap kedaulatan individu para pemilih.”⁴¹³

Sehubungan dengan makna kedaulatan rakyat menentukan pilihan, *Jawa Pos* menekankan rakyat berhak mendapat penjelasan dari calon presiden tentang apa program dan janji-janji politiknya,⁴¹⁴ dan rakyat berhak pula mendapat sosialisasi dari KPU tentang tata cara memilih yang benar.⁴¹⁵

Dalam pada itu, *Jawa Pos* juga mengesankan pemilihan presiden telah berlangsung dalam suasana kebebasan rakyat menentukan pilihan. Hal ini ditunjuk *Jawa Pos* dengan menyatakan:

“Tetapi, yang patut kita beri simpati dan respek, para pemilih kemarin memiliki keberanian untuk tidak terikat lagi pada sekat-sekat primordial ideologi partainya. Mereka pun tak mau dipaksa, diarahkan, dan dikondisikan untuk memilih capres-cawapres mana pun yang dianggap tidak sesuai selera pribadi. Mereka bebas menggunakan hak pilihnya sesuai persepsi serta harapan-harapan politiknya lima tahun ke depan.”⁴¹⁶

Dengan demikian, *Jawa Pos* mengesankan citra positif rakyat pemilih. Ketika mengkonstruksi dan memaknai arti penting mengayomi pendukung capres, *Jawa Pos* menunjukkan citra positif capres SBY:

⁴¹³ *Jawa Pos*, “Memasuki Masa Tenang”, *Jati Diri* edisi 2 Juli 2004. Hal ini, dengan kalimat yang berbeda, juga ditekankan dalam *Jawa Pos*, “Mengayomi Pendukung Capres”, *Jati Diri* edisi 18 September 2004.

⁴¹⁴ *Jawa Pos*, “Pemilih Harus Angkuh”, *Jati Diri* edisi 13 Mei 2004.

⁴¹⁵ *Jawa Pos*, “Mencoblos Capres yang Sah”, *Jati Diri* edisi 29 Mei 2004.

⁴¹⁶ *Jawa Pos*, “Lulus Ujian Politik”, *Jati Diri* edisi 6 Juli 2004.

“Kemarin, di koran ini, kubu SBY menegaskan bahwa pihaknya siap berekonsiliasi dengan pendukung Megawati. Belum terdengar apakah hal serupa dilakukan kubu Megawati atau tidak.”⁴¹⁷

Sedang ketika mengkonstruksi aksi aksi cap jempol darah, *Jawa Pos* melekatkan citra buruk pada Megawati dengan mengatakan: “Hal itu mencerminkan kegagalan pendidikan politik, khususnya dari partai dan capres yang bersangkutan.”⁴¹⁸

4.1.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

4.1.2.1. Metafora: Saatnya Kini Para Pemilih Angkuh

Jawa Pos memilih menggunakan kalimat metaforis untuk menegaskan arti penting kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan:

“Rakyat bebas menimang-nimang calon presiden-wakil presiden yang disukai...Saatnya kini para pemilih angkuh untuk mempertahankan nilai tawar politiknya.”⁴¹⁹

Dengan metafora “saatnya kini para pemilih angkuh”, secara implisit, *Jawa Pos*, merefleksikan bahwa pada pemilu sebelumnya rakyat tidak memiliki nilai tawar politik. Kalimat metaforis juga digunakan *Jawa Pos* untuk mengapresiasi rakyat pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan mandiri:

“Bangsa Indonesia lulus ujian politik. Bahkan, nilainya 10. Lulus dengan sangat terhormat...Tidak tampak nafsu politik berlebihan untuk dukung-mendukung capres-cawapres...Capres-cawapres boleh berkampanye sekuat tenaga. Mulutnya boleh berbusa-busa di atas panggung kampanye untuk menjual program politik kepada calon pemilih. Namun para pemilih menerimanya dengan cerdas. Anda (rakyat) berhak mendapat bintang.”⁴²⁰

4.1.2.2. *Catchphrases*: Bebas Menentukan Pilihan Sesuka Hati

Jawa Pos memakai *catchphrases* berupa jargon dan slogan yang merujuk pada pemikiran atau semangat tertentu. *Jawa Pos* menampilkan kalimat “bebas

⁴¹⁷ *Jawa Pos*, “Mengayomi Pendukung Capres”, Jati Diri edisi 18 September 2004.

⁴¹⁸ *Jawa Pos*, “Cap Jempol Darah”, Jati Diri edisi 7 Juni 2004.

⁴¹⁹ *Jawa Pos*, “Pemilih Harus Angkuh”, Jati Diri edisi 13 Mei 2004.

menentukan pilihan sesuka hati”, ”para pemilih bebas memberikan dukungan dan tidak memberikan dukungan terhadap calon presiden”, sebagai slogan untuk menekankan arti penting kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan. Slogan itu ditegaskan lagi dengan jargon politik “mempertahankan nilai tawar politik”, “*bargaining* antara rakyat dengan calon presiden”.

Jawa Pos kerap menghadirkan kalimat sloganistis untuk menegaskan, semua pihak harus memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, seperti jelas dalam kutipan teks berikut: “tidak perlu ada intervensi terhadap kedaulatan individu para pemilih”⁴²¹; “...tidak selayaknyalah bila para kiai menggunakan otoritas keagamaannya untuk mengarahkan politik para santri atau anak didiknya”⁴²²; “...yang harus kita wujudkan ialah membangun kompetisi politik yang terbuka melalui dukungan yang bebas dari ancaman fisik kepada siapa pun.”⁴²³

4.1.2.3. *Exemplars*: Ini Benar-benar Buah Demokrasi

Jawa Pos memakai *exemplars* untuk menekankan kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan dengan membandingkan fakta peristiwa pemilihan presiden 2004 dengan kondisi pemilihan presiden sebelumnya dan mengangkat fakta jumlah calon presiden. Hal ini disajikan *Jawa Pos* dengan menulis:

“Ini benar-benar buah demokrasi yang dilahirkan reformasi politik 1998... banyaknya tokoh yang maju sebagai calon pasangan presiden-wakil presiden menunjukkan bahwa demokrasi di negeri ini telah membuahkannya kompetisi politik yang bebas...Asal ada dukungan. Sepanjang ada parpol yang mau mencalonkan, siapapun bisa maju dan bersaing menjadi capres dan cawapres. Mau yang murni pasangan tokoh sipil ada. Suka yang mantan militer ada. Mau pasangan yang berbau ideologis, misalnya pasangan nasionalis-

⁴²⁰ *Jawa Pos*, “Lulus Ujian Politik”, Jati Diri edisi 6 Juli 2004.

⁴²¹ *Jawa Pos*, “Memasuki Masa Tenang”, Jati Diri edisi 2 Juli 2004.

⁴²² *Jawa Pos*, “Dukungan Pesantren ke Capres”, Jati Diri edisi 16 Juni 2004.

⁴²³ *Jawa Pos*, “Cap Jempol Darah”, Jati Diri edisi 7 Juni 2004.

religius, juga ada. Bahkan, masih bisa dirinci lagi. Yakni, pasangan tokoh Islam modernis dengan nasionalis juga ada.”⁴²⁴

Dalam *exemplars* itu, *Jawa Pos* menyeleksi fakta dengan tidak menyinggung tentang gagalnya Gus Dur menjadi capres padahal ia memperoleh dukungan dari parpol. Dengan cara ini, *Jawa Pos* boleh jadi hendak mengesankan kepada khalayak pembacanya di basis NU di daerah Jawa Timur bahwa hal itu tidak relevan lagi dipersoalkan.⁴²⁵

Cara konstruksi sedemikian itu, secara implisit, tercermin pula dari pilihan *Jawa Pos* untuk menonjolkan hasil survei LP3ES dan NDI sebagai *exemplars* untuk menggambarkan perilaku politik warga NU telah mengalami perubahan:

“Hasil survey LP3ES dan NDI (*The National Democratic Institute for International Affairs*) benar-benar menarik. Diketahui, dalam pemilihan presiden 5 Juli 2004 lalu, 32 persen warga NU memberikan dukungan kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. Sedangkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan Wiranto-Salahuddin Wahid yang lebih “jelas” ke NU-annya mendapatkan dukungan masing-masing 22 persen dan 33 persen. Kendati hanya hasil survei, secara nyata fenomena itu memang bisa kita rasakan. Di beberapa daerah Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai basis NU (PKB), pasangan SBY-Kalla ternyata mendapatkan dukungan besar. Sedangkan pasangan Mega-Hasyim dan Wiranto-Gus Sholah mendapatkan dukungan lebih kecil.”⁴²⁶

Dengan *exemplars* itu, selain mengesankan citra positif warga NU yang semakin bebas menentukan pilihan secara pribadi, *Jawa Pos* juga sekaligus ingin membangun citra positif SBY:

4.1.2.4. *Depictions*: Perebutan Kursi Presiden Masalah Profan

Jawa Pos memilih kata, istilah dan kalimat (*depictions*) untuk menggiring pembaca ke substansi bingkai inti, misalnya “perebutan kursi presiden saat ini adalah masalah profan yang tidak layak disakralkan”, “pemilihan presiden adalah

⁴²⁴ *Jawa Pos*, “Pemilih Harus Angkuh”, *Jati Diri* edisi 13 Mei 2004.

⁴²⁵ Bandingkan *P publik*, “Langkah-langkah Gus Dur”, *Jati Diri* edisi 25 Mei 2004.

⁴²⁶ *Jawa Pos*, “Dukungan Warga NU ke SBY”, *Jati Diri* edisi 9 Juli 2004.

persoalan keduniawian yang tidak patut disakralkan,” “para calon sedang bertarung”, “pesantren seharusnya berada di wilayah netral dan apolitis”, “tidak ada kewajiban fisik dan kesetiaan emosional dalam memberikan dukungan”, “Warga NU di lapisan bawah juga harus bisa mengendurkan tali patronasenya dengan kiai NU tertentu”.

Dengan *depictions* itu *Jawa Pos* ingin membangun kesan tentang arti penting menentukan pilihan secara personal. *Jawa Pos* dengan jelas menggunakan kalimat disfemistis untuk menyatakan agar kiai NU membiarkan para santri dan warga NU untuk menentukan pilihannya secara bebas:

“Perebutan kursi presiden saat ini adalah masalah profan yang tidak layak disakralkan. Para calon yang sedang bertarung juga mendasarkan langkah-langkahnya kepada hal-hal yang pragmatis. Karena itu, tidak selayaknyalah bila para kiai menggunakan otoritas keagamaannya untuk mengarahkan politik para santri atau anak didiknya.”⁴²⁷

Jawa Pos juga menggunakan *stigmatisasi* untuk menekankan penolakan terhadap aksi cap jempol darah, “tekad seperti itu harus dihentikan karena bersifat membabi buta”.⁴²⁸

4.1.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

4.1.3.1. *Roots*: Warga NU Harus Mengendurkan Patronasenya Dengan Kiai

Jawa Pos memakai analisis kausal atau argumentasi pembenar (*roots*) untuk memperkuat bingkai inti. Untuk menekankan, warga NU harus berdaulat menentukan pilihan tanpa harus terikat dengan kiai, *Jawa Pos* menghadirkan *roots*:

⁴²⁷ *Jawa Pos*, “Dukungan Pesantren ke Capres”, Jati Diri edisi 16 Juni 2004. Hal ini, dengan kalimat yang berbeda, juga ditampilkan dalam *Jawa Pos*, “Pengarahan Kiai Sahal”, Jati Diri edisi 1 Juli 2004, “...pemilihan presiden adalah persoalan keduniawian yang tidak patut disakralkan. Perbedaan dukungan merupakan suatu kelaziman yang tak layak diperdebatkan atau dipertentangkan.”

⁴²⁸ *Jawa Pos*, “Cap Jempol Darah”, Jati Diri edisi 7 Juni 2004.

“Para elite NU yang saat ini terlibat dalam dukung-mendukung harus jujur mengakui bahwa yang dilakukannya itu sangat kental kepentingan pribadi atau kelompoknya...Warga NU di lapisan bawah juga harus bisa mengendurkan tali patronasinya dengan kiai NU tertentu. Warga NU harus bisa tetap melihat kiai sebagai sosok manusia yang tidak lepas dari hal-hal yang sarat interes pribadi. Seorang kiai layak ditempatkan sebagai patron yang harus ditaati ketika langkah-langkahnya masih berada di kawasan Illahiah. Yakni, ketika ajakannya berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT...pemilihan presiden adalah persoalan keduniawian yang tidak patut disakralkan...”⁴²⁹

Dengan *roots* itu, *Jawa Pos* berupaya meyakinkan pembacanya, secara khusus warga NU dan lebih khusus lagi para kiai, untuk tidak melibatkan diri secara personal maupun secara institusional (pesantren) dalam dukung-mendukung capres tertentu. Tetapi menentukan pilihan dengan bebas.

4.1.3.2. *Appeals to principle: Taushiyah Syuriah PB NU*

Jawa Pos beranggapan, kehidupan politik yang sehat harus menerima hasil pemilihan presiden. Untuk membangun kesan ini, *Jawa Pos* menonjolkan fakta *taushiyah* syuriah PB NU sebagai klaim moral (*appeals to principle*):

“Syuriah PB NU mengeluarkan *taushiyah* atau rekomendasi. Salah satu butir *taushiyah* itu, syuriah meminta agar masyarakat, khususnya warga NU, menerima siapa pun yang terpilih sebagai presiden nanti...sekali lagi, kita sangat menghargai dan menghormati *taushiyah* yang dikeluarkan Syuriah PB NU itu. Namun, makna dan manfaat *taushiyah* itu akan terasa bila para petinggi NU, khususnya yang aktif di politik, ikut aktif menyosialisasikan serta mempraktikkannya di tengah-tengah masyarakat.”⁴³⁰

Dengan imbauan moral tersebut, *Jawa Pos* ingin membangun pemahaman, secara khusus di kalangan warga NU, perbedaan pilihan pada pemilihan presiden patut diakhiri dengan menerima presiden hasil pilihan rakyat.

⁴²⁹ *Jawa Pos*, “Pengarahan Kiai Sahal”, Jati Diri edisi 1 Juli 2004. Hal senada juga ditekankan *Jawa Pos* ketika mengkonstruksi dan memaknai dukungan pesantren ke capres, lihat *Jawa Pos*, “Dukungan Pesantren ke Capres”, Jati Diri edisi 16 Juni 2004.

⁴³⁰ *Jawa Pos*, “Taushiyah Syuriah PB NU”, Jati Diri edisi 10 September 2004.

4.2. **Perspektif: Dalam Demokrasi Rakyat Berdaulat Menentukan Pilihan Politik Sendiri (Demokratisasi)**

Jawa Pos membangun bingkai inti: rakyat harus berdaulat, mandiri, serta otonom menentukan pilihan pada pemilihan presiden, dengan menggambarkan kondisi politik Indonesia yang telah mengalami proses demokratisasi sejak tahun 1998, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan tampilnya banyak tokoh sebagai calon pasangan presiden-wakil presiden.

Jawa Pos beranggapan, dalam konteks politik Indonesia semua komponen masyarakat harus memberi kebebasan bagi rakyat untuk memutuskan siapa yang akan dipilihnya menjadi presiden. Sehubungan dengan ini, *Jawa Pos* menyoroti berbagai fakta peristiwa yang dianggap berpotensi untuk menghalangi kedaulatan rakyat atau kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan. Fakta peristiwa yang banyak menjadi topik ulasan *Jawa Pos* adalah tentang kiai, pesantren, dan institusi NU yang disebut melibatkan diri untuk dukung-mendukung capres tertentu.

Keterlibatan kiai, pesantren, dan institusi NU dalam dukung-mendukung capres, dianggap *Jawa Pos*, signifikan mempengaruhi kehidupan demokrasi di kalangan masyarakat secara khusus warga NU. Terhadap realitas ini, *Jawa Pos* menekankan pemikiran agar kiai, pesantren, dan institusi NU tidak memobilisasi rakyat untuk mendukung capres tertentu melainkan harus membiarkan seluruh warga NU bebas menentukan pilihan.

Kendati merujuk hasil survei LP3ES dan NDI, *Jawa Pos* mensinyalir rakyat pemilih, dalam hal ini terutama warga NU, tidak lagi terikat pada sekat-sekat primordial dalam menentukan pilihan. Tetapi menurut *Jawa Pos*, fenomena

tersebut masih perlu ditindaklanjuti untuk semakin memaknai demokrasi. Karena tidak perlu ada intervensi terhadap kedaulatan individu para pemilih.

Konstruksi ulasan sedemikian itu didasarkan pada gagasan bahwa dalam demokrasi rakyat berdaulat menentukan pilihan politik sendiri. Gagasan ini merujuk pada pengertian demokrasi yang komprehensif. Dengan demikian *Jawa Pos* memilih menggunakan perspektif (*media package*) demokratisasi.

4.3. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Jawa Pos menampilkan 27 item rubrik *Jati Diri* yang memuat ulasan tentang pelaksanaan pemilihan presiden. Ulasan tersebut didasarkan dengan mengkonstruksi berbagai fakta peristiwa seputar pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama dan kedua. Pada pemilihan presiden putaran pertama, *Jawa Pos* menampilkan 9 item rubrik, dengan judul:

“Mana Program Kerjanya?” (edisi 8 Mei 2004); “Presiden Bersih Dipilih dengan Bersih” (edisi 11 Mei 2004); “Tender Logistik Pilpres” (edisi 17 Mei 2004); “Pertarungan Lima Pasangan” (edisi 1 Juni 2004); “Miskin Kampanye Kreatif” (edisi 3 Juni 2004); “Semua Janji Berantas Korupsi” (edisi 9 Juni 2004); “Politisasi Kudatuli” (edisi 10 Juni 2004); “Perang Menepis Isu Negatif” (edisi 25 Juni 2004); “Rupiah dan Pilpres” (edisi 8 Juli 2004).

Pada pemilihan presiden putaran kedua, *Jawa Pos* menghadirkan 18 item rubrik *Jati Diri*, terdiri dari judul:

“Intip Sana Intip Sini” (edisi 13 Juli 2004); “Gus Dur Bertemu Megawati” (edisi 20 Juli 2004); “Ledakan Kecil-kecilan di KPU” (edisi 28 Juli 2004); “Koalisi” (edisi 2 Agustus 2004); “Tarik-menarik Elite PKB” (edisi 5 Agustus 2004); “Tarik-menarik Internal Golkar” (edisi 10 Agustus 2004); “Pelajaran bagi Parpol dan KPU” (edisi 12 Agustus 2004); “Jangan Menjadi Kuda Tuli” (edisi 26 Agustus 2004); “Saling Umumkan Calon Menteri” (edisi 28 Agustus 2004); “Visi Ekonomi Capres” (edisi 4 Agustus 2004); “Saling Mendekat Saling Menjauh” (edisi 19 Agustus 2004); “Langkah Zig-zag Gus Dur” (edisi 24 Agustus 2004); “Sikap Netral PKB” (edisi 2 September 2004); “Memantau Kecurangan Pilpres” (edisi 9 September 2004); “Koalisi yang Masih Rapuh” (edisi 14 September 2004); “Kampanye Formalitas” (edisi 15 September 2004); “Diuji Sejarah Sekali Lagi” (edisi 20 September 2004).

Judul tersebut menunjukkan terdapat 5 item yang berhubungan dengan NU dan PKB, sementara 2 item secara spesifik menggunakan istilah ekonomi.

4.3.1. Bingkai Inti: Pemilihan Presiden Belum Mengutamakan Pendidikan Politik, Miskin Kampanye Kreatif

Jawa Pos memaknai pelaksanaan pemilihan presiden dengan mengkonstruksi bingkai inti, pemilihan presiden masih belum mengutamakan pendidikan politik dan miskin kampanye kreatif. *Jawa Pos* mengkonstruksi bingkai inti tersebut dengan menonjolkan fakta peristiwa yang memperlihatkan bahwa kelima pasangan capres-cawapres belum memaparkan program politik atau program kerja dengan rumuskan secara konkret dan pesan-pesan politik yang disampaikan pun dianggap kontraproduktif:

“Kesan yang kita amati,...masing-masing kubu capres-cawapres kehilangan kreatifitas untuk menghasilkan formula dan bentuk kampanye yang dianggap bisa menarik simpati massa...kampanye pilpres tersebut seolah miskin isu politik untuk dijual kepada publik...Justru, jika kita mengamati, banyak isi pesan dalam kain rentang itu yang kontraproduktif. Bahkan, menjadi kampanye negatif terhadap kubu capres-cawapres yang dimaksud dalam kain rentang tersebut.”⁴³¹

Dalam teks itu, *Jawa Pos* menekankan perlunya capres-cawapres melakukan pendidikan politik dengan melakukan apa yang disebut *Jawa Pos* sebagai “kampanye kreatif”⁴³² yakni dengan mengemas pesan-pesan politik yang menjangkau aspirasi pemilih dan menawarkan program politik yang dirumuskan secara jelas dan riil.⁴³³ Perihal ini juga ditampilkan *Jawa Pos* ketika mengkonstruksi dan memaknai visi yang disampaikan capres pada forum dialog yang

⁴³¹ *Jawa Pos*, “Miskin Kampanye Kreatif?”, Jati Diri edisi 3 Juni 2004.

⁴³² *Ibid.*

⁴³³ *Jawa Pos*, “Semua Janji Berantas Korupsi”, Jati Diri edisi 9 Juni 2004: ““Semua capres-cawapres berjanji memberantas korupsi...Padahal, memberantas korupsi bukan hanya berkatat pada janji. Perlu program politik yang menjamin pelanggaran hukum – termasuk tindak pidana korupsi – bisa diberantas....yang dinanti rakyat adalah program riil...”

digelar Kadin Indonesia, dengan menekankan bahwa para capres, “menjanjikan suatu program ekonomi yang muluk-muluk.”⁴³⁴

Jawa Pos juga menunjukkan hal itu, saat mengkonstruksi dan memaknai keputusan KPU tentang kampanye pilpres putaran kedua hanya tiga hari dan melarang mobilisasi massa. *Jawa Pos* menekankan keputusan tersebut sebagai “kampanye formalitas” karena capres tidak dibolehkan menggalang dukungan massa pemilih secara terbuka melalui orasi politik sehingga kampanye tersebut lebih merupakan “pemborosan dana yang dilakukan penyelenggara pemilu.”⁴³⁵ Dengan kata lain, *Jawa Pos* ingin mengesankan keputusan KPU tersebut tidak mengakomodasi arti penting pendidikan politik.

Jawa Pos juga menampilkan sisi fakta untuk menekankan arti penting pendidikan politik, dengan mengkonstruksi dan memaknai “tarik menarik elite PKB”, “sikap netral PKB”, dan “langkah zig zag Gus Dur”, sebagaimana misalnya dapat dilihat dalam kutipan teks berikut:

“Jadi, dengan mengambil keputusan itu, PKB secara konkret telah memecahkan perbedaan atau konflik di antara mereka. Sementara, dari kaca mata luar, PKB telah mampu menunjukkan permainan politik yang lebih beretika...Kita berharap, keputusan tersebut akan membawa masalah bagi warga PKB dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.”⁴³⁶

Dalam teks itu, *Jawa Pos* mengedepankan dimensi pendidikan politik dengan mengesankan citra positif elite PKB dan Gus Dur sebagai telah memberikan kontribusi dalam upaya pendidikan politik bagi masyarakat.⁴³⁷

⁴³⁴ *Jawa Pos*, “Visi Ekonomi Capres?”, Jati Diri edisi 4 Agustus 2004.

⁴³⁵ *Jawa Pos*, “Kampanye Formalitas”, Jati Diri edisi 15 September 2004.

⁴³⁶ *Jawa Pos*, “Sikap Netral PKB”, Jati Diri edisi 2 September 2004.

⁴³⁷ Tentang apresiasi *Jawa Pos* terhadap elite PKB dan secara khusus Gus Dur, lihat *Jawa Pos*, “Tarik-menarik Elite PKB”, Jati Diri edisi 5 Agustus 2004, *Jawa Pos*, “Langkah Zig-zag Gus Dur”, Jati Diri edisi 24 Agustus 2004.

Dengan cara itu, *Jawa Pos* ingin menegaskan, perlunya semua pihak melakukakan pendidikan politik, termasuk para capres-cawapres. *Jawa Pos* lebih lanjut menekankan agar para capres melakukan pendidikan politik dengan menawarkan program politik kepada pemilih, dengan menyatakan:

“Siapa pun pasangan capres-cawapres itu harus segera digugat...rakyat harus menuntut calon orang nomor satu dan nomor dua tersebut untuk membeberkan program kerjanya agar para pemilih bisa menilai dan mempertimbangkan untuk memilih pasangan itu... Mengapa program itu diperlukan...agar calon presiden-wakil presiden tidak hanya melakukan manuver untuk tujuan koalisi dan mencari dukungan tanpa program kerja yang jelas”⁴³⁸

Dengan demikian, *Jawa Pos* ingin menekankan arti kampanye sebagai “tawar-menawar program politik” antara capres dengan rakyat. Capres berkewajiban membeberkan program kerjanya sebagai suatu pendidikan memilih dengan menghadirkan dua sisi fakta. Pertama, tentang “keterbatasan pengetahuan pemilih” yang sering dibiarkan dan malah dimanfaatkan elit politik. Kedua, tentang adanya kecenderungan capres-cawapres lebih mengutamakan melakukan manuver untuk tujuan koalisi. Dengan memilih menonjolkan kedua sisi fakta ini, *Jawa Pos* mengesankan capres-cawapres boleh jadi lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada melakukan pendidikan politik, sebagaimana kerap terjadi di negeri ini. Hal ini digambarkan *Jawa Pos* dengan menyatakan:

“Tiap hari publik mewacanakan urgensi pemimpin yang bersih. Elite politik yang bebas korupsi. Pemimpin politik yang secara moral dan hukum tidak bermasalah. Tetapi, dalam praktiknya, wacana yang aspiratif itu tidak mudah diwujudkan. Sebab, harapan-harapan seperti itu sering dikalahkan oleh ke-

⁴³⁸ *Jawa Pos*, “Mana Program Kerjanya?”, Jati Diri edisi 8 Mei 2004. Hal ini, dengan kalimat yang berbeda, juga di kedepankan dalam *Jawa Pos*, “Pertarungan Lima Pasangan”, Jati Diri edisi 1 Juni 2004, ““Justru, yang diharapkan adalah kelima pasangan tersebut bisa memberikan pendidikan memilih secara benar dan rasional. Yakni melalui sosialisasi serta penawaran politik yang layak dijual. Jangan biarkan dan jangan manfaatkan keterbatasan pengetahuan pemilih. Sebaliknya, para capres-cawapres justru perlu mengajak pemilih untuk memiliki sikap serta pengetahuan tentang tawar-menawar program politik.”

menjadi capres-cawapres, sehingga dianggap tidak mungkin merumuskan program kerja.⁴⁴²

Dengan demikian, secara implisit, *Jawa Pos* ingin menekankan, pasangan Megawati-Hasyim lebih dilatarbelakangi kepentingan pragmatis jangka pendek dan cenderung akan lebih mendahulukan manuver untuk tujuan koalisi daripada mengutamakan pendidikan politik rakyat pemilih.

Dalam kaitan itu, *Jawa Pos* juga membangun citra PDIP sebagai partai yang lebih mendahulukan manuver untuk tujuan koalisi ketimbang mengakomodasi aspirasi rakyat pemilih. Kesan PDPI yang sedemikian ini ditunjukkan *Jawa Pos* ketika mengangkat fakta pembukaan kembali perkara penyerbuan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 - yang kemudian dikenal dengan Kudatuli - oleh kalangan PDIP.⁴⁴³ Citra tersebut juga dikesankan *Jawa Pos* terdapat pada partai Golkar dengan menunjuk terjadinya tarik menarik internal partai Golkar antara kubu Akbar ke Megawati-Hasyim, kubu Fahmi dan Marzuki ke SBY-Kalla.⁴⁴⁴

Jawa Pos juga membangun citra tertentu pada pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo. Amien dicitrakan sebagai “pribadi yang belum kotor dalam comberan politik. *Track record*-nya sebagai tokoh yang masih bersih terutama

⁴⁴² *Jawa Pos*, “Mana Program Kerjanya?”, Jati Diri edisi 8 Mei 2004: “...pasangan calon presiden-wakil presiden...tidak berasal dari partai yang memiliki *platform* dan ideologi politik serupa. SBY-Yusuf Kalla, misalnya, berasal dari partai yang berbeda. Lebih tragis lagi ialah Megawati-Hasyim Muzadi. Mereka berasal dari koalisi bukan partai, tetapi antara partai dan organisasi keagamaan (NU). Bagaimana mungkin, misalnya, partai politik dan organisasi keagamaan bisa bersatu menyusun program kerja politik. Sebab kedua organisasi itu memiliki fungsi dan tujuan berbeda.” Tentang citra sedemikian ini juga dikedepankan *Jawa Pos* ketika mengkonstruksi gagasan Hasyim untuk membentuk koalisi partai, dengan menyatakan: “Hanya, gagasan seperti itu - koalisi kaki tiga atau koalisi kaki empat - tidak bisa dilakukan semudah membalik tangan. Meskipun ada sejumlah partai yang memiliki kesamaan dan perbedaan *platform*, partai-partai tersebut tidak sendirinya mudah diajak berkoalisi. Kesulitan membentuk koalisi itu sering terbentur pada kepentingan pragmatis jangka pendek”, *Jawa Pos*, “Koalisi”, Jati Diri edisi 2 Agustus 2004.

⁴⁴³ *Jawa Pos*, “Politisasi Kudatuli”, Jati Diri, edisi 10 Juni 2004.

⁴⁴⁴ *Jawa Pos*, “Tarik-menarik Internal Golkar”, Jati Diri, edisi 10 Agustus 2004.

garan yang patut ditermati. Pertama, politik uang dalam banyak bentuk...Kedua, intimidasi...Ketiga, netralitas birokrasi pemerintah..”⁴⁵² Dengan menekankan soal “intimidasi” dan “netralitas birokrasi pemerintah”, *Jawa Pos* mengesankan citra tertentu pada capres Megawati yang juga sedang berkuasa sebagai presiden.

4.3.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

4.3.2.1. Metafora: Ajang Kampanye Harus Dijadikan Pasar Bebas

Jawa Pos memilih menggunakan metafora yang akrab dengan keseharian pelaku ekonomi. “Pasar bebas” digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan suasana kampanye, sebagaimana dapat dilihat dalam kalimat metaforis berikut ini:

“Ajang kampanye harus dijadikan pasar bebas bagi agenda-agenda politik dan program politik para capres-cawapres. Pihak capres-cawapres bebas berjualan agenda-agenda politiknya. Bebas menjajakan program-program politiknya. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat bebas membeli. Bebas menawar. Bahkan, yang tidak laku layak ditinggalkan.”⁴⁵³

Dengan menghadirkan kalimat metaforis tersebut, *Jawa Pos* ingin mencitrakan, kampanye pilpres sebagai “pasar bebas”, tempat di mana berlangsung bebas kegiatan “jual-beli” atau “tawar-menawar” program politik antara capres-cawapres dengan rakyat pemilih.

Metafora “bersifat gado-gado” dipilih *Jawa Pos* untuk mencitrakan “lima pasangan capres-cawapres” yang tampil sebagai kontestan pada pilpres sebagai tidak berasal dari partai yang memiliki *platform* dan ideologi politik serupa. *Jawa Pos* menampilkan istilah “intip sana intip sini” sebagai metaforis untuk menggambarkan “kubu” Mega-wati-Hasyim Muzadi dan SBY-Kalla, “mencari kawan baru

⁴⁵² *Jawa Pos*, “Memantau Kecurangan Pilpres”, Jati Diri edisi 9 September 2004.

⁴⁵³ *Jawa Pos*, “Pertarungan Lima Pasangan”, Jati Diri edisi 1 Juni 2004. Kalimat metaforis senada juga digunakan dalam *Jawa Pos*, “Pertarungan Lima Pasangan”, Jati Diri edisi 1 Juni 2004.

politik” guna memenangkan “pertarungan” pilpres putaran kedua. Sedang metafora “tidak bisa dilakukan semudah membalik tangan” dipakai untuk menunjukkan kesulitan membentuk koalisi yang sering terbentur pada kepentingan pragmatis jangka pendek.

Selain itu, langkah ketua Dewan Syura PKB KH Abburrahman Wahid (Gus Dur), yang pada pada malam hari bertemu dengan capres PDIP Megawati Soekarnoputri dan kemudian pada pagi harinya “berjalan santai” bersama capres Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, dimaknai *Jawa Pos* sebagai langkah yang berdimensi pendidikan politik, dengan mengemukakan suatu analogi:

“...perbedaan sikap politik tidak harus menjadikan kita menutup komunikasi. Kita harus bisa membedakan antara persoalan politik dengan persoalan pribadi. Bisa saja kita berbeda politik dengan saudara kandung kita. Namun, tali silaturahmi sebagai satu keluarga harus tetap dipelihara. Sebab, dengan cara itulah, kedewasaan berpolitik akan kita dapatkan.”⁴⁵⁴

Dengan analogi tentang hubungan saudara itu, *Jawa Pos* sekaligus juga ingin mengarahkan pembaca untuk mempersepsi, berbeda politik merupakan kewajaran sehingga meskipun terdapat perbedaan pilihan politik di antara mereka tetapi tali silaturahmi harus tetap terjalin. Perbedaan pilihan politik tidak perlu menjadi memisahkan hubungan persaudaraan.

4.3.2.2. *Catchphrases*: Pendidikan Politik Rakyat Pemilih

Jawa Pos menampilkan sejumlah *catchphrases* berupa jargon dan slogan untuk menyusun bingkai inti. Jargon “pendidikan politik rakyat pemilih”, program politik”, “program kerja”, “pertanggungjawaban politik”, “dagangan politik”, “pendidikan pemilih” berulang kali digunakan *Jawa Pos* untuk menekankan perlunya capres-cawapres menyampaikan apa yang disebut dalam slogan “yang

⁴⁵⁴ *Jawa Pos*, “Langkah Zig-zag Gus Dur”, Jati Diri, edisi 24 Agustus 2004.

dinanti rakyat adalah program riil". Dengan jargon dan slogan ini, *Jawa Pos* ingin mengarahkan pembaca untuk mempersepsi, kampanye merupakan suatu proses "tawar-menawar program politik" atau "ajang" bagi capres-cawapres untuk menjelaskan apa saja yang menjadi programnya jika terpilih menjadi presiden dan rakyat "bebas" menilai program yang dijelaskan tersebut.

Untuk menekankan isi pesan capres-cawapres dalam "kain rentang" atau spanduk tidak konkret, sesuai dengan kepentingan rakyat pemilih, *Jawa Pos* menggunakan jargon "miskin kampanye kreatif", "miskin kreatifitas pesan-pesan politik". Jargon ini dipakai pula untuk menonjolkan bahwa rakyat pemilih tidak paham terhadap isi pesan yang disampaikan pada spanduk-spanduk tersebut.

Dengan jargon "koalisi", "manuver politik", "kepentingan pragmatis", "moralitas bangsa", *Jawa Pos* menggambarkan kecenderungan elit politik yang disebut lebih mendahulukan kepentingan jangka pendek bagi dirinya dan kelompoknya daripada melakukan "pendidikan politik" terhadap rakyat. Sedangkan untuk mengarahkan khalayak pembaca untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional dan berdaulat, *Jawa Pos* menghadirkan kalimat sloganistis:

"Bangsa ini ternyata bisa menggunakan hak pilihnya secara benar dan bertanggung jawab. Tidak terusik imbauan-imbauan untuk mendukung salah satu partai atau salah satu pasangan capres-cawapres."⁴⁵⁵

Dengan slogan itu, *Jawa Pos* juga ingin menekankan agar rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya tidak terikat pada partai tertentu.

⁴⁵⁵ *Jawa Pos*, "Semua Janji Berantas Korupsi", Jati Diri edisi 9 Juni 2004.

4.3.2.3. *Exemplars*: Banyak Pemilih Masih Awam

Jawa Pos memakai komponen *exemplars* untuk menekankan arti penting capres-cawapres menawarkan program politik karena diduga masih banyak pemilih yang masih awam mengenai program politik yang layak didukung:

“Mungkin, kali ini - karena baru pertama - banyak pemilih yang masih awam mengenai program politik yang layak didukung...sangat mungkin pilihan mereka...lebih banyak disebabkan faktor hubungan personal, ketokohan, kedekatan, primordialisme, serta faktor-faktor budaya lainnya. Kecenderungan demikian akan sangat bermanfaat bagi pendidikan politik pemilih jika kelima pasangan capres-cawapres tersebut tidak sengaja memanfaatkannya. Sebaliknya, kecenderungan seperti itu perlu dikurangi. Kemudian, mereka diajak tawar-menawar program politik. Ajang kampanye harus dijadikan pasar bebas bagi agenda-agenda politik dan program politik para capres-cawapres.”⁴⁵⁶

Dengan komponen *exemplars* itu, *Jawa Pos* menekankan, untuk mengurangi kecenderungan menentukan pilihan atas dasar faktor kedekatan tertentu dapat dilakukan dengan “tawar-menawar program politik” dengan rakyat pemilih. *Jawa Pos* juga menggunakan komponen *exemplars* berupa ilustrasi untuk menunjukkan, pesan-pesan politik yang disampaikan capres-cawapres pada spanduk tidak menjangkau perkembangan aspirasi pemilih:

“Contohnya, “si A menjadi presiden akan mengurangi utang; pasangan capres-cawapres A-B menang akan menghapus utang”. Pesan politik tersebut sangat tidak produktif. Pertama, publik yang paham terhadap persoalan utang Indonesia akan tertawa melecehkan. Mengapa? Sebab, siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden sampai 20 tahun mendatang mustahil bisa menghapus utang RI. Isi pesan kampanye seperti

⁴⁵⁶ *Jawa Pos*, “Pertarungan Lima Pasangan”, Jati Diri edisi 1 Juni 2004. Komponen *exemplars*, dengan kalimat berbeda, untuk ditekankan arti penting program politik juga ditampilkan dalam *Jawa Pos*, “Semua Janji Berantas Korupsi”, Jati Diri edisi 9 Juni 2004, “...memberantas korupsi bukan hanya berkuat pada janji. Perlu program politik yang menjamin pelanggaran hukum – termasuk tindak pidana korupsi – bisa diberantas....yang dinanti rakyat adalah program riil yang dinyatakan dengan terbuka oleh calon jaksa agung atau calon Kapolri para capres-cawapres itu...membeberkan teknik-teknik pengungkapan perkara serta pembuktiannya dalam menyelidiki perkara korupsi.” Tetapi menurut *Jawa Pos*, calon tersebut harus merupakan tokoh yang kredibel, berkapasitas, non-partisan, lihat *Jawa Pos*, “Saling Umumkan Calon Menteri”, Jati Diri edisi 28 Agustus 2004.

itu dianggap omong-kosong dan bisa menipu publik...Publik yang tidak paham terhadap pesan-pesan politik untuk menarik simpati serta dukungan makin tidak terusik. Mereka tidak mengerti isi pesan politik tersebut. Isi pesan-pesan politik itu tidak familier. Tidak *smart* (tidak cerdas). Bahkan, sama sekali tidak populis. Juga, tidak akrab dengan keseharian serta bahasa masyarakat awam.”⁴⁵⁷

Dengan ilustrasi itu, *Jawa Pos* ingin mengarahkan pembaca untuk memerhatikan isi spanduk capres-cawapres, dan secara khusus mengesankan citra tertentu pada capres-cawapres yang menyatakan “akan mengurangi utang...akan menghapus utang” sebagai capres yang “tidak cerdas”.

Selain itu, *Jawa Pos* juga menampilkan komponen *exemplars* untuk menekankan perlunya elite PKB untuk lebih mengutamakan pendidikan politik ketimbang kepentingan jangka pendek:

“Jadi, rasanya, sangat tidak pantas “para santri” yang saat ini menjadi elite PKB itu larut dalam permainan politik yang saat ini berkembang di Indonesia – semata-mata mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kaum santri, sesuai karakternya sebagai komunitas agamawan, seharusnya bisa tampil beda. Bisa menjadi contoh bagi pihak lain.”⁴⁵⁸

4.3.2.4. *Depictions*: Menjajakan Dagangan Politik

Jawa Pos memilih kata, istilah, kalimat bermakna konotatif, dan bertendensi khusus (*depictions*) untuk menekankan citra tertentu sekaligus mengarahkan pembaca ke bingkai inti. Istilah yang akrab dengan keseharian pelaku ekonomi, selalu digunakan *Jawa Pos* untuk memaknai kampanye pemilihan presiden sekaligus

⁴⁵⁷ *Jawa Pos*, “Miskin Kampanye Kreatif?”, Jati Diri, edisi 3 Juni 2004. Perihal capres-cawapres belum merumuskan program konkret ditegaskan *Jawa Pos*, “Visi Ekonomi Capres?”, Jati Diri edisi 4 Agustus 2004: “Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam forum itu didampingi cawapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa untuk membawa Indonesia keluar dari krisis, pertumbuhan ekonomi 4,5-5 persen tidak cukup. Pertumbuhan harus dipacu ke level yang lebih tinggi lagi, 6,6-7,6 persen. Megawati...mengatakan, selama ini pemerintahannya berhasil menjaga stabilitas makro ekonomi. Karena itu, dalam periode lima tahun mendatang, fokus pemerintahannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi...Tidak ada satu pun pengamat maupun pelaku ekonomi yang optimistis kedua capres itu akan mudah mengimplementasikan program-program ekonominya...Karena itu, seharusnya para capres tidak menjanjikan suatu program ekonomi yang muluk-muluk.”

⁴⁵⁸ *Jawa Pos*, “Tarik-menarik Elite PKB”, Jati Diri, edisi 5 Agustus 2004.

menekankan arti penting menyampaikan program konkret, seperti: “menjajakan dagangan politik, “propasar”, “pasar bebas”, “bebas berjualan agenda politik”, “bebas menjajakan program-program politiknya”, “tawar-menawar”, “masyarakat bebas membeli, bebas menawar”, “yang tidak laku layak ditinggalkan”. *Jawa Pos* memilih kata “intip sana intip sini”, “manuver”, “pragmatis” sebagai istilah yang menggambarkan kecenderungan elit politik melakukan “koalisi” untuk mewujudkan “kepentingan jangka pendek”.

Untuk menekankan citra tertentu pada elit PKB, *Jawa Pos* memilih memakai istilah konotatif, yaitu “politik kaum santri”. Sedang untuk menggambarkan citra Amien Rais, digunakan istilah “tokoh yang masih bersih”, “pribadi yang belum kotor dalam comberan politik”. Kata yang bersifat menghaluskan (eufemistis), seperti “permainan politik”, “dengan enteng”, “berjalan santai”, “langkah zig-zag” dipakai *Jawa Pos* untuk memaknai langkah Gus Dur yang pada malam hari menemui capres Megawati dan kemudian pada pagi harinya ia bersama SBY. Selain itu, *Jawa Pos* juga memakai bentukan kata, yaitu “kudatuli” sebagai singkatan kasus penyerbuan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996.

4.3.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

4.3.3.1. *Roots*: Program Kerja Perlu sebagai ‘GBHN’

Jawa Pos menggunakan analisis kausal (*roots*) sebagai landasan untuk mengkonstruksi bingkai inti dengan menekankan bahwa capres–cawapres berkewajiban menyampaikan program kerja sesuai dengan perubahan sistem politik:

“Mengapa program itu diperlukan? Pertama, karena setelah pemilihan presiden dilakukan secara langsung, tidak ada lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan kata lain, program kerja lima tahun ke depan tidak bisa lagi dibuat dan disusun oleh wakil-wakil rakyat di MPR. MPR juga

tidak bisa lagi dengan serta merta meminta pertanggungjawaban presiden seperti masa lalu. MPR baru bisa meminta pertanggungjawaban jika presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Itu pun harus ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu yang memvonis presiden atau wakil presiden bersalah. Setelah itu barulah bisa meng-*impeach* (memecat) presiden atau wakil presiden...Kedua, agar calon presiden-wakil presiden tidak hanya melakukan manuver untuk tujuan koalisi dan mencari dukungan tanpa program kerja yang jelas.”⁴⁵⁹

Dengan *roots* itu, *Jawa Pos* ingin mengarahkan pembaca untuk mempersepsi, program kerja sebagai GBHN dan capres-cawapres yang tidak menyampaikan program kerja yang jelas akan cenderung melakukan manuver untuk tujuan koalisi dan mencari dukungan.

Perihal “manuver untuk tujuan koalisi”, secara implisit, dimaksudkan *Jawa Pos* untuk membangun citra tertentu pada capres tertentu, yang dalam hal ini dapat diasosiasikan lebih mengarah pada capres Megawati.⁴⁶⁰

Sebaliknya, *roots* juga dipakai *Jawa Pos* menunjukkan kesan tentang citra positif SBY:

“Membaiknya rupiah dan indeks saham juga merupakan sinyal bahwa pasar merespons positif pasangan SBY-Kalla yang saat ini *leading* dalam penghitungan suara. Artinya, pasar menaruh harapan yang besar kepada pasangan capres-cawapres tersebut. Harapan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil propasar dan mampu mengerek kinerja dari sisi makro.”⁴⁶¹

⁴⁵⁹ *Jawa Pos*, “Mana Program Kerjanya?”, Jati Diri, edisi 8 Mei 2004.

⁴⁶⁰ Hal ini tercermin dalam *Jawa Pos*, “Semua Janji Berantas Korupsi”, Jati Diri, edisi 9 Juni 2004: “Rezim lama – dalam hal ini pemerintahan Presiden Megawati – pada awal-awal kemenangan PDIP dalam Pemilu 1999 juga berjanji serupa. Bahkan, dalam pidato politiknya saat deklarasi PDI Pro-Mega menjadi PDI Perjuangan (PDIP), Megawati berjanji menegakkan hukum. Malah, saat itu Mega berjanji menyeret para pelanggar hukum, termasuk presiden yang saat itu sedang berkuasa, jika terbukti melanggar hukum. Nyatanya, di antara janji-janji itu, sangat sedikit yang terbukti diwujudkan. Sebagian besar koruptor lolos. Sebagian memang dihukum, tetapi beban hukumannya sangat ringan. Karena itu, yang saat ini ditunggu publik bukan hanya janji-janji capres-cawapres yang jika ingkar kelak tidak ada pertanggungjawaban politiknya.”

⁴⁶¹ *Jawa Pos*, “Rupiah dan Pilpres”, Jati Diri, edisi 8 Juli 2004.

4.3.3.2. *Appeals to principle: Tali Silaturahmi*

Jawa Pos memanfaatkan fakta pertemuan Gus Dur dengan capres Megawati dan kemudian dengan capres SBY sebagai pesan moral (*appeals to principle*), dengan menulis:

“Kita harus bisa membedakan antara persoalan politik dengan persoalan pribadi. Bisa saja kita berbeda politik dengan saudara kandung kita. Namun, tali silaturahmi sebagai satu keluarga harus tetap dipelihara. Sebab, dengan cara itulah, kedewasaan berpolitik akan kita dapatkan.”⁴⁶²

Dengan pesan moral itu, selain membangun citra positif Gus Dur, *Jawa Pos* juga ingin menegaskan, perbedaan politik di antara rakyat - dalam hal ini lebih pada perbedaan pilihan pada pilpres - tidak patut menimbulkan persoalan pribadi.

4.4. **Perspektif: Pemilihan Presiden Merupakan Pendidikan Politik Rakyat**

Jawa Pos membangun bingkai inti, pemilihan presiden belum mengutamakan pendidikan politik dan miskin kampanye kreatif. *Jawa Pos* memperlihatkan hal ini dengan menonjolkan dua sisi fakta. Pertama, capres-cawapres belum menyampaikan rumusan program politik atau program kerja yang jelas kepada rakyat. Kalaupun ada program capres-cawapres, tetapi itu disampaikan sebagai janji dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci.

Padahal, menurut *Jawa Pos*, kampanye merupakan “pasar bebas” tempat di mana capres-cawapres melakukan “tawar-menawar program politik” dengan rakyat pemilih. Kedua, pesan-pesan politik yang disampaikan capres-cawapres dalam spanduk tidak menjangkau aspirasi rakyat pemilih secara konkret. Fakta inilah yang disebut *Jawa Pos* sebagai “miskin kampanye kreatif”.

Terkait dengan kedua fakta itu, *Jawa Pos* juga menunjukkan kecenderungan

⁴⁶² *Jawa Pos*, “Langkah Zig-zag Gus Dur”, Jati Diri, edisi 24 Agustus 2004.

elit politik, termasuk capres-cawapres, melakukan manuver untuk tujuan koalisi. Padahal *Jawa Pos* beranggapan, koalisi lebih ditujukan pada kepentingan jangka pendek serta kepentingan pragmatis elit politik. *Jawa Pos* mengemukakan, capres-cawapres perlu dan harus membeberkan program politik yang jelas dalam kampanye dan melakukan kampanye kreatif dengan menyampaikan pesan-pesan politik yang cerdas dalam spanduk-spanduk. Kedua aspek ini, program politik dan kampanye kreatif, dianggap *Jawa Pos* sebagai bagian inheren dalam pendidikan politik pemilih.

Dengan menonjolkan kedua sisi fakta itu, *Jawa Pos* menandakan, capres-cawapres masih lebih mendahulukan kepentingan pragmatis daripada mengutamakan pendidikan politik kepada rakyat secara khusus pemilih.

Jawa Pos juga melekatkan citra tertentu pada capres-cawapres. Kelima pasangan capres-cawapres, secara umum, dipandang *Jawa Pos* belum mengutamakan pendidikan politik. Tetapi Megawati-Hasyim, dicitrakan sebagai lebih dilatarbelakangi kepentingan pragmatis jangka pendek dan cenderung mendahulukan melakukan manuver untuk tujuan koalisi. Amien Rais dianggap sebagai tokoh yang bersih tetapi peluangnya untuk memenangkan pilpres relatif kecil. *Jawa Pos* terkesan lebih menghendaki Amien untuk tampil sebagai tokoh untuk memperjuangkan pelaksanaan pilpres yang jujur, bersih, dan adil. Sementara citra SBY-Kalla ditampilkan secara lebih positif, malah *Jawa Pos* memberi kesan kuat agar SBY terpilih menjadi presiden.

Selain itu, *Jawa Pos* juga menunjukkan citra elite PDIP dan elite partai Golkar lebih mendahulukan manuver untuk tujuan koalisi. Sementara elite PKB dan

Gus Dur dipandang memberikan dimensi pendidikan politik bagi warganya dan masyarakat.

Konstruksi ulasan diuraikan di atas tampak didasarkan *Jawa Pos* pada gagasan bahwa pemilihan presiden merupakan pendidikan politik rakyat. Gagasan perspektif (*media package*) yang digunakan *Jawa Pos* adalah demokratisasi.

4.5. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Jawa Pos menurunkan tiga item *jati diri* tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat dengan mengkonstruksi dan menaknai fakta peristiwa kemenangan SBY pada pemilihan presiden putaran kedua, masing-masing berjudul:

“Mengontrol dan Menagih Janji” (edisi 22 September 2004), “SBY Kelebihan Beban Harapan” (28 September 2004), “Menanti Kabinet Ekonomi” (edisi 29 September 2004).

4.5.1. Bingkai Inti: Kita Harus Mengontrol Pemerintah dan Menagih Janji Presiden

Jawa Pos memandang proses pemilihan presiden sebagai kenyataan yang menunjukkan Indonesia “berhasil maju satu langkah dalam proses demokratisasi.”⁴⁶³ Dalam kaitan ini, *Jawa Pos* menampilkan ulasan mengenai hasil pemilihan presiden dengan membangun bingkai inti, kita harus mengontrol dan menagih janji presiden pilihan rakyat. *Jawa Pos* menekankan hal tersebut dalam kutipan teks berikut:

“Karena itu, saatnya kini kita mengambil jarak kritis dengan SBY-Kalla. Kita harus melakukan kontrol semaksimal mungkin, meskipun harus berlawanan dengan sikap pemerintah. Sebab, demokrasi tidak akan ada

⁴⁶³ *Jawa Pos*, “Menanti Kabinet Ekonomi”, Jati Diri edisi 29 September 2004.

artinya tanpa kontrol yang kritis dan terus-menerus dari rakyat. Kontrol yang bermakna merupakan sinyal peringatan dari kejatuhan yang lebih dalam.”⁴⁶⁴

Jawa Pos tidak merinci lebih lanjut bagaimana cara rakyat dalam melakukan kontrol dan menagih janji presiden. Tetapi *Jawa Pos* mengesankan, kontrol dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan pemerintah. Dalam kaitan ini, *Jawa Pos* menonjolkan fakta kelemahan pemerintahan pada periode sebelumnya terutama dalam bidang penegakan hukum:

“Yang perlu diberi garis bawah tebal adalah penegakan hukum. Di masa lalu banyak pemimpin kita yang punya kemampuan membangun ekonomi dan keamanan. Namun, belum ada satu pun yang serius menegakkan hukum.”⁴⁶⁵

Fakta kelemahan pemimpin pemerintahan pada masa lalu dalam bidang hukum, dianggap *Jawa Pos* berimplikasi luas dan bahkan dikesankan merupakan akar masalah-masalah yang dihadapi negeri ini:

“Karena hukum dilemahkan para pembesar dan elite ini, menghadanglah batu besar bernama korupsi. Bolehlah disebut korupsi adalah *root of all evil* (akar dari segala kejahatan) di negeri ini. Hampir tidak ada bencana sosial, hukum, dan kemanusiaan di Indonesia yang tidak terkait dengan kriminal berat yang bernama korupsi ini. Sebut saja ketidakpastian hukum, seretnya investasi, berbagai bencana alam, kemiskinan struktural, narkoba, terorisme, separatisme – semuanya bisa ditelusuri akarnya kepada kekejian korupsi. Semuanya!”⁴⁶⁶

Dengan demikian, *Jawa Pos* menunjukkan, faktor penyebab utama terjadinya korupsi adalah karena “hukum dilemahkan para pembesar dan elite”. Korupsi telah mengakibatkan berbagai permasalahan, termasuk menimbulkan kemiskinan struktural, yang dalam hal ini merupakan bukti pengabaian hak rakyat atas penghidupan yang layak.

⁴⁶⁴ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

⁴⁶⁵ *Ibid.*

⁴⁶⁶ *Ibid.*

Jawa Pos juga menekankan, SBY-MJK tidak “mengulangi sejarah yang menjengkelkan rakyat” melainkan melakukan perubahan sebagaimana telah dijanjikan SBY-Kalla pada masa kampanye.⁴⁶⁷ Janji perubahan yang disampaikan SBY-Kalla, disebut *Jawa Pos*, dipahami kalangan masyarakat secara subyektif:

“Celaknya pula, janji yang dilontarkan SBY-Kalla pada saat kampanye putaran pertama dan kedua adalah perubahan menjadi lebih baik bagi bangsa Indonesia. Perubahan apa saja? Serba longgar batasan-batasannya banyak bergantung pada persepsi subyektif serta harapan banyak orang. Bagi kalangan menengah ke atas, janji perubahan ditafsirkan harus segera ada pemerintahan yang jujur, bersih, dan menegakkan supremasi hukum. Bagi kalangan ini, perubahan bisa ditafsirkan adanya peningkatan rasa aman untuk status quonya. Sebaliknya, bagi kalangan menengah ke bawah, perubahan yang dijanjikan SBY ditafsirkan perbaikan ekonomi. Upah naik terus, subsidi pemerintah harus dilanjutkan agar tidak ada kenaikan harga BBM, listrik, dan pajak. Padahal, siapa pun yang memerintah mustahil harus terus-menerus melanjutkan subsidi tersebut. Lalu, bisakah SBY memenuhi janji perubahan itu?”⁴⁶⁸

Dengan menunjukkan persepsi subyektif masyarakat itu, *Jawa Pos* ingin mengesankan bahwa janji perubahan tersebut meliputi pemerintahan yang jujur dan bersih (bidang hukum) serta berorientasi pada pewujudan hak-hak rakyat atas penghidupan yang layak (bidang ekonomi). Dengan kata lain, secara implisit, *Jawa Pos* ingin membangun kesan bahwa kontrol terhadap pemerintahan SBY-Kalla adalah termasuk dengan menagih janji perubahan yang disampaikan pada masa kampanye.

Lebih lanjut *Jawa Pos* mengedepankan, langkah awal SBY dalam memenuhi janjinya dapat dilihat dari komposisi kabinet hukum, dan komposisi kabinet ekonomi.⁴⁶⁹

⁴⁶⁷ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

⁴⁶⁸ *Jawa Pos*, “SBY Kelebihan Beban Harapan”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

⁴⁶⁹ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004; *Jawa Pos*, “Menanti Kabinet Ekonomi”, Jati Diri edisi 29 September 2004.

4.5.2. Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

4.5.2.1. Metafora: Angin Segar

Jawa Pos mengapresiasi berlangsungnya pilpres dengan baik dengan metafora “angin segar”. Sementara untuk menyambut hasil pemilihan langsung oleh rakyat, *Jawa Pos* memilih menggunakan kalimat metaforis: “Era baru telah datang. Harapan Bermekaran...Hari-hari ini adalah saat bulan madu bagi SBY-MJK serta para pendukungnya.”

Kalimat metaforis itu, juga digunakan *Jawa Pos* untuk menggambarkan perubahan yang telah terjadi dalam sistem politik Indonesia. Sedang mengenai korupsi digambarkan *Jawa Pos* dengan ungkapan “*root of all evil* (akar dari segala kejahatan).”

4.5.2.2. *Catchphrases*: SBY Kelebihan Beban Harapan

Komponen *catchphrases* berupa slogan “SBY kelebihan beban harapan” dan jargon “mengontrol dan menagih janji” digunakan *Jawa Pos* untuk membangun kesan adalah keharusan bagi SBY-Kalla untuk menepati janji. Hal ini juga ditonjolkan dalam jargon sloganistis:

“Banyak pekerjaan sudah menunggu. Banyak daftar tagihan dari janji-janji yang mereka tebar dalam masa kampanye dulu bakal dicecarkan oleh rakyat...Apakah SBY-MJK akan mengulangi sejarah yang menjengkelkan rakyat itu? Seharusnya tidak!”⁴⁷⁰

Dengan slogan dan jargon itu, *Jawa Pos* menonjolkan citra SBY-Kalla pada dua posisi: menepati janji atau mengingkari janji. Dalam kaitan ini, *Jawa Pos* mengarahkan pembaca memperhatikan bagaimana SBY membentuk kabinet. Hal ini ditulis *Jawa Pos* dengan slogan dan jargon:

⁴⁷⁰ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

“Tak berlebihan kiranya bila kesan pertama yang bakal tertangkap tentang keseriusan menegakkan hukum bisa dilihat dari komposisi kabinet hukumnya. Kalau jaksa agung, Kapolri, serta menteri kehakiman diisi figur orang yang tidak menimbulkan optimisme tentang penegakan hukum, harapan membubung rakyat bakal terkulai. Di sinilah delegitimasi kepemimpinan dimulai.”⁴⁷¹

Dengan demikian *Jawa Pos* menunjukkan bahwa kontrol dan tagihan janji kepada SBY sudah mulai dilakukan pada tahap pembentukan kabinet.

4.5.2.3. *Exemplars*: Mencegah Kejatuhan Bangsa

Jawa Pos menekankan arti penting melakukan kontrol terhadap pemerintah dan menagih janji SBY-Kalla demi kesejahteraan rakyat. Kontrol terhadap pemerintah merupakan keharusan dalam demokrasi untuk mencegah kejatuhan bangsa, ditonjolkan *Jawa Pos* dengan komponen *exemplars*:

“Sebab, demokrasi tidak akan ada artinya tanpa kontrol yang kritis dan terus-menerus dari rakyat. Kontrol yang bermakna merupakan sinyal peringatan dari kejatuhan yang lebih dalam.”⁴⁷²

Jawa Pos juga memuat *exemplars* yang menggambarkan suatu bentuk tagihan janji kepada SBY-Kalla oleh rakyat:

“Kita dapat memahami perasaan warga yang mendatangi SBY. Mereka adalah warga yang punya masalah, seperti karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan rombongan guru-guru. Mereka berharap pemerintahan baru dapat menyelesaikan masalah yang menimpa mereka.”⁴⁷³

4.5.2.4. *Depictions*: Tak Bisa Terpuruk Lebih Dalam Lagi

Untuk mengarahkan pembaca ke bingkai inti, *Jawa Pos* memilih menggunakan istilah maupun kalimat disfemistis, misalnya: “Bangsa kita tak bisa terpuruk lebih dalam lagi”, “Apakah SBY-MJK akan mengulangi sejarah yang men-

⁴⁷¹ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004. Hal ini, dengan kalimat berbeda juga ditonjolkan *Jawa Pos*, “Menanti Kabinet Ekonomi”, Jati Diri edisi 29 September 2004: “Tim ekonomi dalam kabinet pemerintahan baru haruslah sosok yang bisa diterima pasar. Selain orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas di bidang ekonomi, tim ini harus diisi sosok yang jujur.”

⁴⁷² *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

⁴⁷³ *Jawa Pos*, “SBY Kelebihan Beban Harapan”, Jati Diri edisi 28 September 2004.

jengkelkan rakyat itu? Seharusnya tidak”, “melakukan kontrol semaksimal mungkin”, “harapan membubung rakyat bakal terkulai”, “harapan terhadap SBY berlebihan”, “bisakah SBY memenuhi janji perubahan itu?” Selain itu, *Jawa Pos* juga melekatkan stigma pada SBY-Kalla, dengan menulis:

“Untuk bidang ekonomi, kita berharap besar kepada figur Kalla. Dia telah membuktikan diri sebagai pengusaha besar yang sukses. Dia pastilah punya konsep yang konkret untuk mengembangkan ekonomi. Sedangkan di bidang keamanan, SBY pasti punya konsep keamanan yang konkret untuk membuat Indonesia lebih aman dan stabil. Bintang empat yang kemilau di pundaknya menjadi salah satu garansi. Yang perlu diberi garis bawah tebal adalah penegakan hukum. Di masa lalu banyak pemimpin kita yang punya kemampuan membangun ekonomi dan keamanan. Namun, belum ada satu pun yang serius menegakkan hukum.”⁴⁷⁴

Jawa Pos melakukan stigmatisasi dengan menunjukkan kemampuan SBY-Kalla dalam bidang ekonomi dan keamanan, tetapi dibangun pula kesan tentang kelemahan SBY-Kalla dalam bidang penegakan hukum.

4.5.3. Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*).

4.5.3.1. *Roots*: Memilih Jaksa Agung

Jawa Pos memakai penjelasan kausal (*roots*) untuk menyusun bingkai inti. Menurut *Jawa Pos*, kondisi kehidupan rakyat Indonesia menjadi “terpuruk” karena presiden tidak memilih jaksa agung yang bisa membuat penegakan hukum optimistis:

“Kita harus menengok dan belajar dari pemerintahan sebelumnya. Setidaknya.. sejak Pak Harto jatuh. Baik Habibie, Gus Dur, maupun Mega tidak terkesan memasang orang-orang yang bisa membuat penegakan hukum optimistis. Habibie memasang Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang berakhir dengan penonaktifan karena skandal. Gus Dur mengangkat Marzuki Darusman yang kinerjanya tidak memeson. Gus Dur amat terlambat ketika menggantinya dengan Baharuddin Lopa karena Gus Dur di ambang kejatuhan, serta Lopa kemudian meninggal. Sedangkan Megawati, kita semua tahu, memilih M.A. Rachman yang banyak membuat geregetan.”⁴⁷⁵

⁴⁷⁴ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

⁴⁷⁵ *Ibid.*

Kelemahan dalam bidang penegakan hukum oleh pemerintahan sebelumnya digambarkan *Jawa Pos* dengan *roots*:

“Karena hukum dilemahkan para pembesar dan elite ini, menghadanglah batu besar bernama korupsi. Bolehlah disebut korupsi adalah *root of all evil* (akar dari segala kejahatan) di negeri ini. Hampir tidak ada bencana sosial, hukum, dan kemanusiaan di Indonesia yang tidak terkait dengan kriminal berat yang bernama korupsi ini. Sebut saja ketidakpastian hukum, seretnya investasi, berbagai bencana alam, kemiskinan struktural, narkoba, terorisme, separatisme – semuanya bisa ditelusuri akarnya kepada kekejian korupsi. Semuanya!⁴⁷⁶

Dengan *roots* itu, *Jawa Pos* membangun kesan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dalam hal ini bebas korupsi, dan sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan menegakkan hukum.

4.5.3.2. *Appeals to principle*: Korupsi Akar Dari Segala Kejahatan

Korupsi akar dari segala kejahatan (*root of all evil*) dipakai *Jawa Pos* sebagai klaim moral (*appeals to principle*) untuk menonjolkan arti penting menegakkan hukum dengan memilih kabinet bidang hukum yang kompeten dan kapabel.

4.6. Perspektif: Kontrol Terhadap Pemerintah Demi Hak-hak Rakyat

Bingkai inti *Jawa Pos* ketika mengkonstruksi tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, adalah kita harus mengontrol pemerintah dan menagih janji presiden. Kontrol terhadap pemerintah, dianggap *Jawa Pos*, bertujuan untuk memelihara kesinambungan kehidupan demokrasi, dan untuk mewujudkan hak-hak rakyat. Disebutkan pula, presiden terpilih berkewajiban untuk memenuhi janji yang dilontarkannya pada masa kampanye. Bahkan *Jawa Pos* mengesankan, kontrol terhadap pemerintahan SBY-Kalla adalah dengan menagih janji perubahan yang disampaikan oleh SBY-Kalla pada masa kampanye.

⁴⁷⁶ *Jawa Pos*, “Mengontrol dan Menagih Janji”, Jati Diri edisi 22 September 2004.

Dalam kaitan itu, *Jawa Pos* menekankan arti penting penegakan hukum dengan menunjukkan bahwa para pembesar dan elite selama ini melemahkan hukum sehingga menimbulkan permasalahan besar yakni korupsi. Praktik korupsi, dianggap *Jawa Pos*, telah mengakibatkan bangsa ini terpuruk. Korupsi dinyatakan sebagai akar dari segala masalah yang terjadi di negeri ini, termasuk mengakibatkan kemiskinan struktural.

Jawa Pos merasa optimis, penegakan hukum akan berimplikasi luas bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jujur - dalam hal ini bebas praktik korupsi – dan bagi pemenuhan hak rakyat atas penghidupan yang layak (bidang ekonomi).

Desain ulasan sedemikian itu, *Jawa Pos* mengedepankan gagasan bahwa kontrol terhadap pemerintah adalah demi hak-hak rakyat atas penghidupan yang layak. Hal ini tercakup dalam pengertian demokrasi yang komprehensif. Perspektif (*media package*) yang digunakan *Jawa Pos* adalah demokratisasi.

Tabel 4: Framing Isu Demokratisasi oleh Jawa Pos**1. Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan**

Perspektif (Media Package): Dalam Demokrasi Rakyat Berdaulat Menentukan Pilihan Politik Sendiri (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame) : Rakyat Harus Berdaulat, Mandiri, serta Otonom Menentukan Pilihan	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Saatnya kini para pemilih angkuh untuk mempertahankan nilai tawar politiknya. Rakyat bebas menimbang-nimbang calon yang disukai.	<i>Roots:</i> Warga NU di lapisan bawah harus bisa mengendurkan tali patronasinya dengan kiai tertentu. Kiai sebagai sosok manusia yang tidak lepas dari hal-hal yang sarat interes pribadi.
<i>Catchphrases:</i> Bebas menentukan pilihan sesuka hati. Tidak perlu ada intervensi terhadap kedaulatan individu para pemilih.	<i>Appeals to principle: Taushiyah</i> syariah PB NU, yang menyatakan menerima siapa pun yang terpilih sebagai presiden nanti, perlu disosialisasikan dan dipraktikkan para petinggi NU.
<i>Exemplars:</i> Ini benar-benar buah demokrasi yang dilahirkan dari reformasi politik 1998. Terindikasi warga NU semakin bebas menentukan pilihan secara pribadi.	<i>Consequences:</i> Semua komponen bangsa harus ikut mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan pada pemilihan presiden.
<i>Depictions:</i> Perebutan kursi presiden saat ini adalah masalah profan, masalah keduniawian, yang tidak layak disakralkan	

2. Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

Perspektif (Media Package): Pemilihan Presiden merupakan Pendidikan Politik Rakyat (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame) : Pemilihan Presiden Belum Mengutamakan Pendidikan Politik, Miskin Kampanye Kreatif	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Ajang kampanye harus dijadikan pasar bebas tempat melakukan tawar-menawar program politik. Lima pasangan capres-cawapres bersifat gado-gado. Membentuk koalisi tidak bisa dilakukan semudah membalik tangan.	<i>Roots:</i> Program kerja perlu sebagai 'GBHN' dan agar calon presiden-wakil presiden tidak hanya melakukan manuver untuk tujuan koalisi dan mencari dukungan tanpa program kerja yang jelas.
<i>Catchphrases:</i> Capres-cawapres harus melakukan pendidikan politik rakyat pemilih dengan mengajukan program riil. Miskin kampanye kreatif, isi kain rentang tidak konkret.	<i>Appeals to principle:</i> Bisa saja kita berbeda politik dengan saudara kandung kita. Namun, tali silaturahmi sebagai satu keluarga harus tetap dipelihara.
<i>Exemplars:</i> Mungkin, kali ini banyak pemilih yang masih awam mengenai program politik yang layak didukung. Sangat mungkin pilihan mereka didasarkan pada faktor kedekatan tertentu.	<i>Consequences:</i> Capres-cawapres masih lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek.
<i>Depictions:</i> Capres-cawapres dalam kampanye menjajakan dagangan politik, masyarakat bebas membeli, bebas menawar, yang tidak laku layak ditinggalkan.	

3. Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

Perspektif (Media Package): Kontrol Terhadap Pemerintah Demi Hak-hak Rakyat (Demokratisasi)	
Bingkai Inti (Core Frame): Kita Harus Mengontrol Pemerintah dan Menagih Janji Presiden	
Perangkat Pembingkai (Framing Devices)	Perangkat Penalaran (Reasoning Devices)
<i>Metaphors:</i> Angin segar. Hari-hari ini adalah saat bulan madu bagi SBY-MJK. Korupsi adalah <i>root of all evil</i> (akar dari segala kejahatan).	<i>Roots:</i> Presiden sebelumnya tidak memilih Jaksa Agung yang bisa membuat penegakan hukum optimistis. Hukum dilemahkan para pembesar dan elite selama ini sehingga menghadanglah batu besar bernama korupsi.
<i>Catchphrases:</i> SBY kelebihan beban harapan. Banyak daftar tagihan dari janji-janji yang mereka tebar dalam masa kampanye dulu bakal dicecarkan oleh rakyat.	<i>Appeals to principle:</i> Korupsi akar dari segala kejahatan.
<i>Exemplars:</i> Demokrasi tidak akan ada artinya tanpa kontrol yang kritis dan terus-menerus dari rakyat. Kontrol yang bermakna merupakan sinyal peringatan dari kejatuhan yang lebih dalam.	<i>Consequences:</i> Tanpa kontrol, korupsi akan tetap terjadi dan bangsa ini akan terpuruk lagi.
<i>Depictions:</i> Bangsa kita tak bisa terpuruk lebih dalam lagi. Rakyat perlu melakukan kontrol semaksimal mungkin.	

IV.5. Framing Pers Mengenai Isu Demokratisasi

Analisis *framing* isu demokratisasi dalam teks tajuk rencana *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* memperlihatkan bahwa *framing* masing-masing surat kabar adalah berbeda-beda. Perbedaan ini tampak dari strategi dan teknik membuat ulasan. Tiap surat kabar mewadahi ulasannya dengan melakukan seleksi terhadap fakta peristiwa, penajaman dimensi-dimensi tertentu dari fakta peristiwa tersebut serta mempertautkannya dengan fakta lain. Dengan memilih (*selection*) dan menonjolkan (*salience*) aspek tertentu dari fakta peristiwa atau realitas tersebut, konstruksi bingkai inti (*core frame*) keempat surat kabar juga relatif berlainan. Perangkat pembingkai (*framing devices*) dan perangkat penalaran (*reasoning devices*) yang digunakan keempat surat kabar untuk menyusun bingkai inti juga tidak serupa.

Perbedaan strategi membingkai pesan (*framing strategis*) oleh keempat surat kabar, menghasilkan konstruksi makna yang spesifik atau pesan sendiri. Sehingga kendatipun keempat surat kabar mengangkat isu demokratisasi yang sama - dalam hal ini adalah: tentang persamaan di depan hukum; tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan; tentang pelaksanaan pemilihan presiden; dan tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat - namun pada dasarnya setiap surat kabar menghadirkan pesan (opini) sendiri serta memperlihatkan bidang posisi atau sikap sendiri pula.

Suara Pembaruan dan *Republika* membingkai pesan (*framing*) tentang persamaan di depan hukum berlandaskan fakta peristiwa yang sama, yakni kasus gagalnya Gus Dur menjadi capres karena ia tidak memenuhi syarat “mampu secara rohani dan jasmani”. Sementara *Kompas* dan *Jawa Pos* tidak menampilkan isu persamaan di depan hukum dan juga tidak mengangkat fakta kasus Gus Dur menjadi topik ulasan.

Suara Pembaruan dan *Republika* membingkai (*framing*) isu persamaan di depan hukum dengan konstruksi ulasan yang berlainan. *Suara Pembaruan* memilih untuk lebih menonjolkan kasus penolakan Gus Dur oleh KPU dari sisi penyusunan legislasi atau produk hukum. *Republika* lebih menekankan dan menyoroti hal tersebut dari sisi langkah-langkah Gus Dur menggugat keputusan KPU. *Suara Pembaruan* mengaksentuasi aspek produk hukum terkait kasus Gus Dur, dengan menyoroti ketentuan KPU sebagai suatu produk hukum yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan amanat UUD '45. Sementara *Republika* cenderung melihatnya sebagai kasus pribadi Gus Dur, tanpa mempersoalkan substansi keputusan tersebut. *Suara Pembaruan* merefleksikan kasus tersebut

dengan menekankan arti penting penataan hukum agar setiap produk hukum tidak bersifat diskriminatif. Tetapi *Republika* menekankan bahwa setiap warga negara harus tunduk pada keputusan hukum. Perbedaan tersebut juga mengindikasikan bidang posisi atau sikap yang berbeda. *Suara Pembaruan* secara implisit menyatakan menolak keputusan KPU karena bersifat diskriminatif dan oleh karena itu *Suara Pembaruan* menekankan arti penting meninjau setiap produk hukum agar tidak mengandung unsur diskriminasi. *Republika* secara implisit justru menunjukkan sikap setuju pada keputusan KPU, dengan lebih menekankan setiap warga negara, termasuk Gus Dur, harus tunduk pada hukum.

Dengan demikian *Suara Pembaruan* meringkai pesan (*framing*) persamaan di depan hukum dengan menekankan arti penting mengakomodasi hak minoritas, dalam hal ini penyandang disabilitas, dalam produk hukum. Bahkan *Suara Pembaruan* juga menekankan, setiap produk hukum yang diskriminatif perlu dan harus ditinjau ulang. Ini menunjukkan suatu harapan, suatu cita-cita ideal dalam berdemokrasi.⁴⁷⁷ *Republika* memilih meringkai pesan (*framing*) persamaan di depan hukum dengan menonjolkan arti penting kepatuhan setiap warga negara pada ketentuan hukum tanpa harus mempersoalkan substansi hukum itu sendiri. Ini merupakan suatu gagasan normatif. Dalam kaitan dengan meringkai pesan (*framing*) tersebut patut diperhatikan bahwa *Republika* cenderung mengesankan citra Gus Dur sebagai ngotot, dan hal ini secara implisit menunjukkan sikap *Republika* yang tidak menghendaki Gus Dur tampil menjadi capres.

⁴⁷⁷ Menurut David Held, sesuai konsepsi demokrasi yang komprehensif, dalam demokrasi pada prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi bagi warga negara. Mengenai hal ini telah diuraikan pada Bab II.1.

Perbedaan *framing* tersebut tampaknya bukan faktor kebetulan semata melainkan juga mengindikasikan faktor pengaruh yang beragam maupun kepentingan tertentu yang diusung oleh surat kabar itu sendiri. *Suara Pembaruan* terkesan menyuarakan hak minoritas, dan hal ini boleh jadi dipengaruhi oleh faktor latar belakang historisnya.⁴⁷⁸ Faktor semikian ini, kedekatan dengan kekuatan sosial politik tertentu, juga diperlihatkan oleh *Republika*. Cara *Republika* dengan cenderung melekatkan suatu citra negatif pada sosok Gus Dur mengindikasikan bahwa *Republika* mengusung kepentingan kelompok Islam tertentu, dalam mana Gus Dur bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut.⁴⁷⁹ Mengenai mengapa *Kompas* dan *Jawa Pos* tidak melibatkan diri mewacanakan isu ini, boleh jadi juga didasarkan pada memiliki pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut boleh jadi dilatarbelakangi faktor keinginan memelihara target pasar atau maksud melindungi kepentingan ekonomi.⁴⁸⁰

Keempat surat kabar, pada dasarnya meringkai pesan (*framing*) tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan dengan menekankan arti penting setiap

⁴⁷⁸ *Suara Pembaruan*, secara historis, memiliki kedekatan atau berafiliasi dengan kekuatan sosial politik yakni kelompok Protestan yang terbilang minoritas di negeri ini.

⁴⁷⁹ Tentang mengapa *Republika* tidak mengehendaki Gus Dur tampil sebagai capres barangkali dapat dibaca dari faktor kedekatan sosial-politik *Republika* pada kelompok Islam. Kelompok Islam dalam hal ini adalah lebih pada kalangan ICMI dan dari sejarahnya *Republika* juga mempunyai keterkaitan dengan Muhammadiyah. Amien Rais mantan ketua PP Muhammadiyah termasuk salah seorang direksi *Republika*). Sehingga kendatipun *Republika* memiliki keterkaitan dengan kelompok Islam tetapi titik berangkat ideologis lebih berbasis pada kepentingan politik ICMI dan Muhammadiyah. Pada tataran ini menarik memperhatikan bahwa Gus Dur adalah sosok elite NU. Menurut Zein, dalam mewacanakan tentang NU, *Republika* sebagai anak kandung ICMI cenderung memperlihatkan suatu sentimen tertentu saat mengkonstruksi dan memaknai fakta atau realitas NU, lihat Fathurin Zein, 2004, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta: LKiS, hlm. 253.

⁴⁸⁰ Hal ini lebih tampak pada *Jawa Pos* sebagai surat kabar dengan segmen pasar utama adalah di Jawa Timur. Jawa Timur dikenal merupakan basis NU, dan juga pendukung PKB. *Jawa Pos* cenderung untuk selalu meringkai citra positif NU, dan juga PKB. *Jawa Pos* memilih tidak mengangkat kasus gagalnya Gus Dur sebagai topik ulasan boleh jadi lebih didasarkan pada pertimbangan karena kasus ini berpotensi menimbulkan kontroversi di kalangan khalayak pembaca. Sehingga lebih pada keinginan untuk memelihara segmen pasar.

rakyat memilih menggunakan hak pilih berdasarkan keputusan pribadi. Hal ini oleh tiap surat kabar dianggap merupakan makna esensial kedaulatan rakyat sesuai hakikat demokrasi. Keempat surat kabar menganggap, pilpres kali ini terselenggara dalam kondisi politik yang telah berubah, setiap rakyat memilih bebas menentukan pilihan tanpa harus tunduk lagi pada pengaruh siapapun dan pihak manapun. Dalam hal ini, termasuk tidak ada lagi keharusan bagi rakyat untuk tunduk memilih partai pemerintah yang sedang berkuasa.

Kendati demikian, keempat surat kabar juga memperlihatkan strategi pembingkai pesan (*framing strategis*) yang berbeda, terlebih dalam hal memaknai tentang bagaimana penggunaan hak pilih tersebut dan siapa capres-cawapres yang patut dipilih. *Kompas* menonjolkan, menggunakan hak pilih merupakan wujud kesadaran dan tanggung jawab politik, serta sebagai pertanda bersikap bijak. *Kompas* secara eksplisit menolak untuk tidak menggunakan hak pilih. Mengenai siapa capres-cawapres yang menjadi pilihan, *Kompas* menekankan agar didasarkan pada pertimbangan sosok pribadi capres-cawapres yang sesungguhnya atau jati dirinya. Hal ini menunjuk bahwa *Kompas* cenderung membingkai pesan dengan gagasan yang ideal atau yang seharusnya.

Suara Pembaruan juga menampilkan strategi pembingkai pesan (*framing strategis*) berlandaskan pemikiran ideal dan normatif. *Suara Pembaruan* menonjolkan agar dalam menggunakan hak pilih, rakyat memerhatikan perubahan sistem politik di Indonesia. Sesuai amanat UUD '45, ruang lingkup kekuasaan presiden terpilih sangat kuat. Selama lima tahun masa baktinya, presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan meski kinerjanya tidak memuaskan. *Suara Pembaruan* menyatakan, rakyat patut menggunakan hak pilih dan tidak perlu menjadi golput

alias tidak memilih. *Suara Pembaruan* mengemukakan, referensi dalam menentukan pilihan adalah pilihlah capres yang punya integritas dan akuntabilitas tinggi.

Republika merefleksikan bahwa rakyat selama ini cenderung menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan emosional seperti ikatan primordialisme. *Republika* mengedepankan, pada pilpres ini rakyat perlu dan harus menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, dengan lebih memperhatikan kemampuan masing-masing capres-cawapres. *Republika* tidak setuju rakyat menjadi golput. Di sisi lain, *Republika* konsisten membangun citra positif Amien Rais. Dengan strategi pembingkaihan pesan ini, *Republika* memilih menghadirkan konsepsi ideal dalam menentukan pilihan tetapi serta-merta pula mengarahkan khalayak untuk memilih sosok capres tertentu.

Jawa Pos menekankan, semua komponen bangsa perlu dan harus membiarkan rakyat pemilih untuk bebas menentukan pilihan sendiri. Para kiai, pesantren, dan institusi NU tidak perlu terlibat dukung-mendukung capres tertentu. *Jawa Pos*, secara eksplisit menyatakan, memilih tidak memilih adalah hak individu. Mengenai sosok capres yang layak dipilih, *Jawa Pos* mengajukan kriteria yakni yang memiliki kapabilitas, dan kapasitas yang bisa dipercaya bangsa ini. Dengan demikian, *Jawa Pos* juga menggunakan strategi pembingkaihan pesan berlandaskan gagasan yang ideal namun terindikasi adanya ketidaktegasan mengenai golput.

Tampak bahwa secara umum, keempat surat kabar menunjukkan suatu idealisme⁴⁸¹ dan bidang posisi yang relatif sama. Yakni mengapresiasi kedaulatan

⁴⁸¹ Dalam konteks penelitian ini, surat kabar dimaknai memiliki idealisme bila gagasan yang dikemukakan berorientasi pada pengertian demokrasi yang komprehensif. Jadi, idealisme dalam hal ini adalah pandangan yang merujuk pada prinsip dasar otonomi demokrasi menurut David Held (lihat uraian pada Bab II.1).

rakyat menentukan pilihan, menghendaki semua pihak untuk tidak mengintervensi kedaulatan rakyat, dan memotivasi rakyat pemilih untuk menggunakan hak pilih secara personal. Kendati demikian, titik berangkat ideologisnya terkesan berbeda. Ini terindikasi dari bidang posisi atau sikap mengenai golput dan sosok capres yang layak dipilih. *Kompas*, *Suara Pembaruan*, dan *Republika* menyatakan tidak setuju terhadap golput. Tetapi *Jawa Pos* menunjukkan bidang posisi atau sikap berbeda.⁴⁸² Secara eksplisit, *Kompas*, *Suara Pembaruan*, dan *Jawa Pos* tidak mem-perlihatkan asosiasi pada sosok capres tertentu, sementara *Republika* jelas con-dong pada capres Amien Rais. Perbedaan ini boleh jadi dapat dibaca dari faktor kedekatan tiap surat kabar pada kekuatan sosial politik tertentu atau pada pengaruh kepentingan surat kabar itu sendiri.

Kompas dan *Suara Pembaruan* tampak memilih lebih mengedepankan orientasi gagasan yang idealis dan normatif.⁴⁸³ Orientasi gagasan *Republika* cenderung diwarnai oleh faktor kedekatan dengan kelompok Islam.⁴⁸⁴ Tentu di balik orientasi gagasan idealis maupun faktor kedekatan dengan kelompok tertentu boleh jadi termaktub pula pertimbangan ekonomi. Namun faktor pertimbangan ekonomi lebih tampak pada *Jawa Pos*, yang memilih tidak melibatkan diri dengan isu golput yang dianggap dapat menuai kontroversi pada basis target pemasarannya di Jawa Timur.⁴⁸⁵

⁴⁸² Seperti diketahui bahwa yang melontarkan wacana golput pada pilpres kali ini adalah Gus Dur.

⁴⁸³ Hal ini boleh jadi merupakan refleksi dari kedekatan *Kompas* dan *Suara Pembaruan* pada kekuatan sosial politik tertentu di negeri ini. Dari sejarahnya, *Kompas* memiliki kedekatan dengan Katolik, sedangkan *Suara Pembaruan* memiliki kedekatan dengan Kristen Protestan. Kedua kelompok kekuatan sosial politik ini terbilang minoritas di negeri ini.

⁴⁸⁴ Kelompok Islam dalam hal ini adalah ICMI dan Muhammadiyah.

⁴⁸⁵ Bandingkan Rachmah Ida., *loc.cit*, hlm. 78-79. Ida menyebut, *Jawa Pos*, pada 7 Mei 2000, menghadapi tekanan dari banser NU karena dinilai memuat pemberitaan tidak obyektif tentang Gus Dur.

Dalam membingkai pesan (*framing*) tentang pelaksanaan pemilihan presiden, *Kompas* nyaris tidak memperlihatkan adanya kekurangan pelaksanaan pemilihan presiden. Kalaupun, ada kekurangan seperti perilaku elit politik yang cenderung lebih mengutamakan memperoleh kekuasaan dan perihal capres yang belum menawarkan konsep program yang konkret, itu dianggap wajar terjadi dalam proses membangun demokrasi. Malah kekurangan tersebut cenderung dikesankan sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi.

Tiga surat kabar lainnya, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, justru menampilkan sisi fakta yang berbeda. Selain mempersoalkan perihal konsep program capres belum konkret, ketiga surat kabar ini juga menunjukkan aspek lain yang dianggap sebagai kekurangan pelaksanaan pemilihan presiden.

Suara Pembaruan memilih lebih menyoroti kinerja KPU yang tidak konsekuen memberlakukan UU pemilu pilpres, Panwaslu juga dilihat tidak berfungsi optimal, sementara capres yang tengah menjabat presiden (*incumbent president*) pun dianggap menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pilpres. Fakta ini, bagi *Suara Pembaruan*, merupakan pertanda pemilihan presiden belum *fairness*, dan oleh karena itu perlu aturan yang rinci tentang tugas penyelenggara pilpres termasuk ketentuan mengenai wewenang *incumbent president* selama pilpres serta peralihan kekuasaan dari *incumbent president* kepada presiden terpilih. *Republika* cenderung menonjolkan pelbagai kampanye negatif, terlebih oleh capres yang juga sedang berkuasa. *Jawa Pos* lebih mempersoalkan isi spanduk yang dinilai tidak kreatif.

Secara ekspisit, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* menilai pelaksanaan pilpres. *Suara Pembaruan*, pemilihan presiden belum *fairness* dan perlu

aturan yang rinci. *Republika*, pemilihan presiden belum terselenggara dengan jujur dan adil (jurdil), sebuah pelajaran demokrasi. *Jawa Pos*, pemilihan presiden belum mengutamakan pendidikan politik dan miskin kampanye kreatif. Tetapi *Kompas* menetapkan pilihan tidak menilai pelaksanaan pilpres melainkan cenderung ‘menilai’ pemerintahan Megawati yang dianggap belum optimal memperbaiki persoalan bangsa ini.

Dengan cara sedemikian itu, keempat surat kabar memperlihatkan strategi membingkai pesan (*framing strategis*) yang berbeda. Meski tiga surat kabar, yaitu *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, sama-sama mengemukakan semacam penilaian, tetapi aspek penilaian tersebut justru dipertautkan dengan fakta maupun opini yang berlainan.

Republika mempertautkan aspek belum jurdil dengan fakta dan opini, menyangkut apa yang disebutnya sebagai kampanye negatif. Seperti, transparansi dana kampanye para capres, kekayaan capres, indikasi praktik politik uang dan dagang sapi, serta pelanggaran etika politik, dan lain-lain. *Jawa Pos* memilih menyoroti materi kampanye capres yang dianggap tanpa konsep program yang konkret, dan perilaku elite partai politik yang lebih mendahulukan manuver politik. Faktor ini, dipakai *Jawa Pos* sebagai argumen pembenaran untuk menyatakan pilpres belum mengutamakan pendidikan politik. Namun elite yang dicitrakan *Jawa Pos* lebih mendahulukan manuver untuk tujuan koalisi adalah elite PDIP dan elite partai Golkar. Sementara elite PKB dan juga Gus Dur justru dikesankan memberi pendidikan politik bagi warganya dan masyarakat.

Berbeda dengan *Republika* dan *Jawa Pos*, *Suara Pembaruan* cenderung menonjolkan fakta dan opini perihal UU pilpres yang mestinya dilaksanakan KPU

serta perlu melengkapi produk hukum menyangkut masa peralihan antara presiden lama dengan presiden terpilih. Lain lagi dengan *Kompas*, justru menekankan hasil pemilu sebagai babak baru untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Tampak bahwa masing-masing surat kabar secara subyektif melakukan pemingkalian pesan (*framing*) atas isu pelaksanaan pemilihan presiden. Setiap surat kabar mempertautkan fakta dan opini sesuai dengan strategi surat kabar itu sendiri. Fakta dan opini tersebut tercampur-aduk ataupun tumpang tindih. Namun, pada dasarnya *framing* oleh keempat surat kabar tersebut mencerminkan bidang posisi yang tidak jauh berbeda dari bidang posisi ketika mengkonstruksi dan memaknai realitas tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan. Demikian pula dengan orientasi masing-masing surat kabar.

Suara Pembaruan, *Republika*, dan *Jawa Pos* memperlihatkan kesamaan gagasan bahwa pelaksanaan presiden perlu disempurnakan. Orientasi gagasan ini, merujuk pada pengertian demokrasi yang komprehensif. Pengertian sedemikian juga melandasi gagasan *Kompas*. Hanya saja, *Kompas* terlihat lebih menekankan arah yang diharapkan dapat dicapai setelah pilpres, yakni memperbaiki persoalan bangsa. Jadi pada dasarnya keempat surat kabar mengajukan gagasan yang mirip satu sama lain berlandaskan pengertian demokrasi yang komprehensif. Sama-sama menghendaki pemilu presiden perlu dan harus berlangsung lancar, damai, dan demokratis. Titik berangkat gagasan ini adalah cita-cita ideal demokrasi.

Kendati demikian, motif orientasi keempat surat kabar relatif berbeda. *Suara Pembaruan* lebih menonjolkan idealisme, terlihat dari gagasan normatif perihal pada fakta hukum. *Kompas* juga menunjukkan idealisme, tampak dari penekanan hasil pilpres sebagai tahapan untuk memperbaiki persoalan bangsa.

Republika menampilkan sisi idealisme dengan memaknai pelaksanaan pilpres sebagai proses transisi demokrasi, tetapi orientasi ideologis (kelompok Islam) tercermin pula dari penonjolan citra positif capres Amien Rais. *Jawa Pos* tampak lebih mempertimbangkan faktor kepentingan ekonomi dengan memilih menetapkan citra positif pada NU, PKB, dan Gus Dur.

Ketika membingkai pesan (*framing*) tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, keempat surat kabar mengkonstruksi bingkai inti yang didasarkan pada gagasan yang relatif tidak berbeda. Yakni sama-sama mengungkapkan harapan atau cita-cita ideal agar presiden terpilih memberi teladan dan membentuk pemerintahan yang bersih (lebih dimaknai sebagai bebas dari praktik KKN), serta membawa kesejahteraan bagi rakyat. Fakta berupa permasalahan yang dikemukakan oleh keempat surat kabar juga hampir sama, seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan. Permasalahan ini dianggap patut menjadi program prioritas presiden terpilih. Ini menunjuk, keempat pers menyajikan ulasannya dengan merujuk pada pengertian demokrasi yang komprehensif.

Kendati demikian, tiap surat kabar menampilkan strategi membingkai pesan (*framing strategies*) yang berbeda. Terutama saat memilih menggunakan komponen pembingkai (*framing devices*) dan komponen penalaran (*reasoning devices*). *Kompas* menekankan, arti penting pemerintahan hasil pilpres memelihara persemaian demokrasi dan mengubah persepsi kekuasaan. Dari persepsi kekuasaan otoriter menjadi faham kekuasaan demokrasi, yakni lebih mengutamakan kepentingan rakyat. *Suara Pembaruan* juga mengungkapkan gagasan yang kurang lebih sama. Yaitu, semua pejabat pemerintahan SBY harus mengubah

paradigma penguasa sebagai raja menjadi sebagai sosok pemimpin, bahkan manajer. Dari paradigma rakyat adalah kawula menjadi rakyat bukan kawula. Dengan formulasi ini, *Kompas* dan *Suara Pembaruan* menunjukkan orientasi yang relatif sama, yakni idealis dan normatif.

Republika juga menghadirkan sikap idealis. Tetapi dalam menyusun bingkai inti, *Republika* memilih menonjolkan fakta karya Habibie dan gagasan Amien Rais sebagai rujukan membenarkan argumentasi yang dikemukakan. Ini boleh jadi mengindikasikan, keterikatan *Republika* pada tokoh ICMI. Sementara *Jawa Pos* lebih memperlihatkan dimensi sikap idealis, seperti dengan menekankan presiden terpilih perlu dan harus menegakkan hukum, dan seluruh komponen bangsa mengontrol dan menagih janji presiden.

Dalam ulasan tentang keempat isu demokratisasi di atas, masing-masing surat kabar konsisten membangun citra (*image*) tertentu kepada calon presiden, kecuali pada capres Hamzah Haz karena ia tidak pernah dihadirkan oleh keempat surat kabar sebagai sosok yang mendapat sorotan secara spesifik. *Kompas* pada putaran pertama mengkonstruksi citra positif capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga capres Amien Rais. Sedang citra capres Megawati cenderung ditonjolkan negatif terutama dengan menampilkan berbagai fakta kegagalan pemerintahan presiden Megawati. Capres Wiranto juga dikesankan secara negatif terkait kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Pada pilpres putaran kedua, *Kompas* tetap konsisten membangun citra positif SBY. *Suara Pembaruan* pada pilpres putaran pertama dan kedua membangun citra negatif capres Megawati, dan citra positif pada capres SBY.

Di sisi lain, *Republika* menonjolkan citra positif Amien Rais. Bahkan kekalahan Amien pada pilpres putaran pertama dikesankan lebih karena faktor rakyat pemilih masih belum rasional. Sejak pilpres putaran pertama *Republika* menonjolkan citra negatif capres Megawati, dan pada pilpres putaran kedua *Republika* memilih lebih menampilkan citra positif SBY. Konsistensi *Republika* membangun citra positif Amien tentu bukan faktor kebetulan, tetapi menunjukkan keterlibatan politik *Republika* secara langsung untuk mengusung Amien tampil memenangkan pilpres.⁴⁸⁶ *Jawa Pos* pada pilpres putaran pertama dan kedua mengkonstruksi citra positif SBY, dan citra negatif kepada Megawati antara lain dengan menyoroti kasus cap jempol darah. Sementara citra capres Amien Rais dikesankan *Jawa Pos* sebagai memiliki resistensi politik yang lemah.

Konstruksi citra capres tersebut mencerminkan bidang posisi atau sikap masing-masing surat kabar terhadap figur capres-cawapres. Keempat surat kabar pada dasarnya menghendaki pergantian presiden, dan semua surat kabar tidak lagi menghendaki terpilihnya capres Megawati menjadi presiden. Tetapi mengenai sosok capres yang pantas terpilih, tampak perbedaan bidang posisi dari keempat pers tersebut. *Republika* lebih menginginkan capres Amien terpilih, tetapi setelah Amien gagal memasuki pilpres putaran kedua *Republika* memilih menonjolkan citra positif SBY. Tetapi *Kompas*, sejak pilres putaran pertama hingga kedua, lebih menginginkan terpilihnya capres SBY. Hal serupa juga ditunjukkan oleh *Suara Pembaruan*, dan *Jawa Pos*. Dengan kata lain, secara implisit, keempat surat kabar turut mendukung SBY untuk memenangkan pemilihan presiden. Tetapi

⁴⁸⁶ *Republika* merupakan sebagai institusi pers yang memiliki kedekatan dengan kekuatan sosial-politik kelompok Islam dan memiliki afiliasi dengan ICMI. Amien Rais adalah salah seorang dewan redaksi *Republika*.

pada saat yang bersamaan, di pihak lain, keempat surat kabar juga memberikan pengaruh bagi kekalahan Megawati.

IV.6. Perspektif Pers dan Demokratisasi di Indonesia

Dalam membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi pada pilpres, keempat surat kabar pada dasarnya menggunakan perspektif demokratisasi. Pilihan perspektif ini dengan jelas terungkap setelah seluruh item tajuk rencana masing-masing surat kabar yang dianalisis dengan metode analisis *framing* model Gamson.

Surat kabar dimaknai menggunakan perspektif demokratisasi bila dalam membingkai fakta peristiwa atau realitas pemilu pilpres didasarkan pada pengertian demokrasi yang komprehensif. Pemilu pilpres lebih dilihat sebagai proses konsolidasi demokrasi menuju budaya politik demokrasi.⁴⁸⁷ Dalam kaitan ini, menarik pula memerhatikan bahwa keempat surat kabar, secara eksplisit menggunakan istilah yang menggambarkan pemilu pilpres dimaknai sebagai proses konsolidasi demokrasi. Misalnya, *Kompas*: membangun demokrasi, demokrasi yang bekerja, memelihara persediaan demokrasi; *Suara Pembaruan*: prinsip demokrasi tidak mengenal diskriminasi, antidemokrasi, biarlah demokratisasi yang menang; *Republika*: transisi demokrasi harus jalan terus, sebuah pelajaran demokrasi, jangan kotori demokrasi kita, jangan cederai transisi demokrasi; *Jawa Pos*: Indonesia berhasil maju satu langkah dalam proses demokratisasi, kita harus mengontrol dan menagih janji presiden.

Dalam terang perspektif demokratisasi, keempat surat kabar pada dasarnya juga memfungsikan diri sebagai instrumen yang mendorong publik untuk

⁴⁸⁷ Lihat uraian Bab II.1.

berpartisipasi dalam dialog demokrasi. Antara lain tampak dari opini tentang menggunakan hak pilih; mengemukakan gagasan agar pilpres berjalan lancar, damai, dan demokratis; menampilkan wajah buruk pemerintahan presiden Megawati. Sehubungan dengan ini, secara umum, keempat surat kabar dapat disebut memfungsikan dirinya sebagai instrumen demokrasi.⁴⁸⁸

Namun, segera harus ditambahkan bahwa subyektifitas masing-masing surat kabar turut mewarnai perspektif demokratisasi oleh keempat surat kabar tersebut. Subyektifitas, dalam hal ini, mencakup berbagai faktor pengaruh atau kepentingan beragam yang memberi kontribusi dalam proses produksi teks tajuk rencana. Termasuk faktor sejarah yang menyertai perkembangan institusi surat kabar itu sendiri. Hal ini, sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dalam deskripsi analisis terhadap *frame* tajuk rencana tiap surat kabar mengenai isu demokratisasi.

Sehubungan dengan itu, tanpa mengabaikan faktor subyektifitas masing-masing pers termasuk dalam hal ini adalah faktor kedekatan secara historis atau afiliasi primordial pada kekuatan sosial politik tertentu, secara umum, dapat dikatakan bahwa keempat surat kabar memberikan kontribusi bagi pengembangan demokratisasi di Indonesia. Paling tidak keempat surat kabar menyajikan beragam pendapat (opini) yang berpotensi untuk meningkatkan rasionalitas khalayak.

⁴⁸⁸ Lihat uraian Bab II.6.

B A B V**K E S I M P U L A N****V.1. Kesimpulan**

- 5.1.1. Keempat surat kabar melakukan pembingkai (*framing*) atas isu demokratisasi. Tetapi tidak semua surat kabar membingkai lima *focal points* isu demokratisasi, yaitu: tentang persamaan di depan hukum, tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan, tentang pelaksanaan pemilihan presiden, tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat, dan tentang *image* calon presiden. *Framing* isu demokratisasi tentang persamaan di depan hukum, hanya diangkat oleh *Suara Pembaruan* dan *Republika*, yang didasarkan pada fakta peristiwa yang sama, yakni kegagalan Gus Dur menjadi capres. Sedangkan *framing* tentang *image* calon presiden, cenderung untuk selalu ditampilkan oleh keempat surat kabar saat melakukan *framing* tentang isu demokratisasi yang lain.
- 5.1.2. *Suara Pembaruan* membingkai persamaan di depan hukum dengan lebih mengaksentuasi pemahaman bahwa seluruh produk aturan hukum tidak boleh bersifat diskriminatif, dan oleh karena itu harus memperlakukan setiap warga negara secara setara. Termasuk menjamin hak minoritas, dalam hal ini penyandang disabilitas, sesuai dengan amanat UUD '45. Dalam kaitan ini, *Suara Pembaruan* menekankan arti penting meninjau setiap aturan hukum agar tidak mengandung unsur diskriminasi, termasuk syarat “mampu secara rohani dan jasmani” bagi capres. Dengan demikian, secara implisit, *Suara Pembaruan* menyatakan tidak

setuju pada keputusan KPU yang menolak Gus Dur menjadi capres, karena dianggap bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan semangat UUD '45.

5.1.3. *Republika* membingkai persamaan di depan hukum dengan lebih menekankan bahwa semua warga negara harus mematuhi dan tunduk pada keputusan hukum. Terlebih bila keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini telah diputuskan oleh MK dan MA. Dalam konteks ini, secara implisit, *Republika* menunjukkan sikap setuju pada keputusan KPU yang menolak Gus Dur menjadi capres. *Republika* juga membangun kesan, kepatuhan pada keputusan hukum adalah mutlak berlaku bagi setiap warga negara dan substansi dari keputusan tersebut pun tidak perlu harus dipersoalkan lagi.

5.1.4. *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos* membingkai isu demokratisasi tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan berdasarkan gagasan (opini) yang ideal atau yang seharusnya. Yakni, bahwa setiap warga negara atau rakyat pemilih memiliki kewenangan untuk secara personal menggunakan hak pilih dan menentukan pilihan. Hal ini oleh tiap surat kabar dianggap merupakan makna esensial kedaulatan rakyat sesuai hakikat demokrasi. Keempat surat kabar memandang pilpres kali ini terselenggara dalam kondisi politik yang telah berubah, setiap rakyat pemilih bebas menentukan pilihan tanpa harus tunduk lagi pada pengaruh siapapun dan pihak manapun. Termasuk tidak ada lagi keharusan bagi rakyat untuk tunduk memilih partai pemerintah yang sedang berkuasa, seperti pada masa Orde Baru. Keempat surat kabar

mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pilpres dan menghendaki semua pihak untuk tidak mengintervensi kedaulatan rakyat menentukan pilihan.

- 5.1.5. Dalam membingkai (*framing*) tentang kedaulatan rakyat menentukan pilihan, keempat surat kabar memperlihatkan suatu titik berangkat ideologis yang relatif berbeda. Ini terindikasi dari bidang posisi atau sikap mengenai golput dan sosok capres yang layak dipilih. *Kompas*, *Suara Pembaruan*, dan *Republika* dengan terbuka menyatakan tidak setuju terhadap golput. Tetapi *Jawa Pos* justru menggarisbawahi, memilih atau tidak memilih adalah hak individu. *Kompas*, *Suara Pembaruan*, dan *Jawa Pos* tidak secara eksplisit merekomendasikan sosok capres yang layak dipilih, sementara *Republika* pada pilpres putaran pertama memilih mem-positisikan diri untuk condong mendukung capres Amien Rais.
- 5.1.6. *Framing* tentang pelaksanaan pemilihan presiden oleh keempat surat kabar, sama-sama mengedepankan harapan agar pilpres berjalan lancar, damai, dan demokratis. Tetapi tiap surat kabar menampilkan sisi fakta yang berbeda.
- 5.1.7. *Kompas* nyaris tidak mempersoalkan fakta adanya kekurangan pelaksanaan pilpres, karena hal itu dianggap wajar terjadi dalam proses membangun demokrasi. *Kompas* memilih untuk lebih menekankan hasil pilpres sebagai babak baru untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Namun *Suara Pembaruan*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, justru mengajukan suatu

penilaian yang dianggap sebagai kekurangan pilpres yang perlu diperbaiki.

- 5.1.8. Menurut *Suara Pembaruan*, pilpres belum *fairness* dan oleh karena itu perlu aturan yang rinci. KPU yang dianggap tidak konsekuen memberlakukan UU pemilu pilpres, Panwaslu juga tidak berfungsi optimal, dan capres yang tengah menjabat presiden (*incumbent president*) dikesankan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pilpres. Oleh karena itu, *Suara Pembaruan* memandang pilpres memerlukan aturan yang lebih rinci, antara lain adalah tentang tugas dan wewenang KPU dan Panwaslu, termasuk ketentuan mengenai wewenang *incumbent president* selama pilpres serta aturan menyangkut peralihan kekuasaan dari *incumbent president* kepada presiden terpilih.
- 5.1.9. *Republika* memandang pemilihan presiden belum terselenggara dengan jujur dan adil (jurdil). Disebut belum jurdil, karena kampanye negatif lebih dominan daripada kampanye berkualitas. Kampanye negatif ini antara lain dana kampanye capres dan kekayaan capres belum transparan, praktik politik uang dan dagang sapi masih terjadi, pelanggaran etika politik oleh capres selaku pejabat pemerintah, aparat belum netral. Kampanye berkualitas adalah bersaing mengajukan konsep dalam mengelola bangsa dan negara, tidak mengkritik dan menjelekkan atau mengungkit-ungkit masalah-masalah pribadi capres tertentu. Fakta belum jurdil ini, dipandang *Republika* sebagai sebuah pelajaran demokrasi.

- 5.1.10. *Jawa Pos* menilai pemilihan presiden belum mengutamakan pendidikan politik dan miskin kampanye kreatif. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa materi kampanye capres belum disertai konsep program yang konkret sebagai jawaban atas kebutuhan riil rakyat pemilih, begitu juga dengan isi spanduk yang dipublikasikan tidak realistis dan oleh karena itu tidak kreatif, sementara perilaku elite partai politik pun cenderung lebih mendahulukan manuver politik. Elite yang dicitrakan *Jawa Pos* lebih mendahulukan manuver untuk tujuan koalisi adalah elite PDIP dan elite partai Golkar. Sementara elite PKB dan juga Gus Dur justru dikesankan memberi pendidikan politik bagi warganya dan masyarakat.
- 5.1.11. *Framing* tentang pemerintahan yang bersih dan hak-hak rakyat oleh keempat surat kabar didasarkan pada gagasan yang relatif tidak berbeda. Yakni sama-sama mengungkapkan harapan atau cita-cita ideal agar presiden terpilih memberi teladan, dan membentuk pemerintahan yang bersih (lebih dimaknai sebagai bebas dari praktik korupsi!), serta membawa kesejahteraan bagi rakyat. Fakta berupa permasalahan yang dikemukakan oleh keempat surat kabar juga hampir sama, seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, penegakan hukum, dan pendidikan. Permasalahan ini dianggap patut menjadi program prioritas presiden terpilih. Namun, tiap surat kabar juga mengaksentuasi gagasan tertentu.
- 5.1.12. *Kompas* dan *Suara Pembaruan* pada dasarnya menekankan gagasan yang kurang lebih sama. Yakni, mengharapkan pemerintahan hasil pilpres dapat semakin menghayati faham kekuasaan demokrasi, yakni tidak otoriter melainkan harus lebih mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat.

Republika mengaksentuasi gagasan dengan menghadirkan fakta karya Habibie dan gagasan Amien Rais sebagai rujukan argumentasi dalam hal pengembangan teknologi dan mengatasi pengganguran. Sementara *Jawa Pos* mengemukakan gagasan terkait dengan iklim investasi dengan menekankan presiden terpilih perlu dan harus menegakkan hukum, dan seluruh komponen bangsa mengontrol dan menagih janji presiden.

- 5.1.13. Masing-masing surat kabar, membangun citra (*image*) tertentu kepada calon presiden. Keempat surat kabar pada dasarnya menghendaki pergantian presiden, dan tidak lagi menghendaki terpilihnya capres Megawati menjadi presiden. Hal ini terlihat dari cara keempat surat kabar, cenderung untuk selalu membangun citra negatif capres Megawati terlebih dengan menonjolkan sisi buruk pemerintahannya sebagai presiden. Tetapi mengenai sosok capres yang pantas terpilih, keempat surat kabar memperlihatkan perbedaan bidang posisi.
- 5.1.14. *Republika* pada dasarnya lebih menginginkan capres Amien Rais terpilih, tetapi setelah ia gagal memasuki pilpres putaran kedua, *Republika* memilih menonjolkan citra positif SBY. Tetapi *Kompas*, sejak pilres putaran pertama hingga kedua, cenderung menonjolkan citra positif SBY, dan oleh karena itu secara implisit lebih menginginkan terpilihnya capres SBY. Hal serupa juga ditunjukkan oleh *Suara Pembaruan*, dan *Jawa Pos*. Tetapi *Jawa Pos* mengesankan citra Amien Rais sebagai memiliki resistensi politik yang lemah.
- 5.1.15. *Framing* keempat surat kabar tentang citra (*image*) calon presiden memperlihatkan bahwa keempat surat kabar turut mendukung SBY

untuk memenangkan pemilihan presiden. Tetapi di sisi lain, keempat surat kabar juga memberikan pengaruh bagi kekalahan Megawati.

- 5.1.16. *Framing* isu demokratisasi oleh keempat surat kabar tersebut, pada dasarnya tidak luput dari berbagai faktor pengaruh atau kepentingan yang beragam. Termasuk, dalam hal ini, faktor kedekatan secara historis atau sentimen primordialisme masing-masing surat kabar kepada kekuatan sosial politik tertentu di Indonesia. Faktor ini, secara eksplisit maupun implisit, disertakan oleh pers dalam mengungkapkan pendapat (opini) dan menetapkan bidang posisi atau sikap.
- 5.1.17. *Kompas* dan *Suara Pembaruan* cenderung membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi berlandaskan pada pemikiran ideal dan normatif. Pandangan (opini) yang dikemukakan mengacu pada konsepsi yang ideal dan yang seharusnya, seperti pada norma hukum dan amanat konstitusi (UUD '45). Pilihan untuk lebih menonjolkan idealisme ini, boleh jadi terkait dengan faktor pengaruh kedekatannya pada kelompok tertentu di negeri ini. Dari sejarahnya, *Kompas* memiliki keterikatan sejarah dengan kelompok Katolik, dan *Suara Pembaruan* terhadap kelompok Kristen Protestan.
- 5.1.18. *Republika* saat membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi, memperlihatkan keterlibatan membawa kepentingan Islam terutama faktor keterkaitannya secara langsung dengan ICMI. Indikasinya, antara lain, adalah: konsisten membangun citra positif capres Amien Rais; secara implisit, menyetujui penolakan Gus Dur menjadi capres, di mana seperti

diketahui Gus Dur sebagai seorang tokoh NU tidak bergabung dengan ICMI.

- 5.1.19. *Jawa Pos*, ketika membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi, memperlihatkan aspek kedekatannya kepada kelompok bisnis (etnis Tionghoa) dengan lebih mempertimbangkan faktor kepentingan ekonomi. Yakni, dengan memilih untuk tidak melibatkan diri dalam wacana yang dianggap berpotensi menimbulkan kontroversi pada basis target pemasaraannya di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari cara *Jawa Pos* untuk tidak membahas isu golput yang dilontarkan oleh Gus Dur, maupun fakta penolakan KPU terhadap Gus Dur menjadi capres. Tetapi *Jawa Pos* justru memilih membangun citra positif pada NU, PKB, dan Gus Dur.
- 5.1.20. Di balik gagasan idealis (*Kompas* dan *Suara Pembaruan*) maupun orientasi ideologis (Islam) oleh *Republika*, dan orientasi ekonomi (*Jawa Pos*), termaktub pula pertimbangan ekonomi maupun kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, faktor kedekatan masing-masing pers pada kelompok tertentu bukanlah faktor tunggal tetapi dapat juga bercampur-aduk ataupun tumpang tindih dengan faktor pengaruh lain yang beragam.
- 5.1.21. Dengan tanpa mengabaikan faktor subyektifitas pers, termasuk dalam hal ini adalah faktor kedekatan secara historis atau afiliasi primordial pada kekuasaan sosial politik tertentu, pada dasarnya, keempat surat kabar membingkai isu demokratisasi dalam terang pengertian demokrasi yang komprehensif (perspektif demokratisasi). Pemilihan presiden, dalam perspektif demokratisasi, bukan tujuan melainkan lebih sebagai suatu

proses konsolidasi demokrasi. Gagasan (opini) ini secara umum ditonjolkan oleh keempat surat kabar. Hal ini dapat dianggap sebagai kontribusi pers bagi pengembangan demokrasi. Selain karena opini tersebut relevan dengan konteks demokratisasi di Indonesia, juga menunjukkan suatu harapan, suatu cita-cita ideal dalam berdemokrasi.

V.2. Saran/Rekomendasi

2.1. Metode analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis *framing* model Gamson, terfokus pada teks tajuk rencana yang diproduksi oleh surat kabar itu sendiri. Ruang lingkungannya terbatas pada bagaimana pesan dibentuk dalam teks yang merupakan hasil konstruksi pers atas realitas (realitas simbolik). Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengungkapkan secara komprehensif fakta di balik teks atau konteks. Antara lain, bagaimana proses yang sesungguhnya terjadi dalam ruang redaksi masing-masing surat kabar ketika memproduksi suatu teks, sehingga surat kabar tersebut menyajikan teks dengan *framing* tertentu. Faktor-faktor pengaruh apa saja yang sebenarnya melatarbelakangi surat kabar tersebut dalam memproduksi teks tajuk rencana.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini lebih merupakan langkah awal bagi penelitian selanjutnya dalam menggali apa saja fakta di balik teks maupun dalam menelusuri bagaimana proses konstruksi pers atas suatu realitas. Penelitian berikut hendaknya menggunakan pendekatan atau teori lain yang dapat menjelaskan secara lebih komprehensif fakta di balik teks yang potensial menyertai pembentukan teks tersebut. Hal ini dapat dikaji

dengan pendekatan kritis (*critical approach*) yang berpretensi menjelaskan produksi teks media.

- 2.2. Hasil analisis *framing* terhadap teks tajuk rencana *Kompas*, *Suara Pembauran*, *Republika*, dan *Jawa Pos*, memperlihatkan bahwa secara umum keempat surat kabar menggunakan perspektif demokratisasi. Tetapi terindikasi pula, masing-masing surat kabar memiliki kecenderungan untuk membingkai pesan (*framing*) isu demokratisasi atas dasar keterikatan pada kepentingan kelompok tertentu, dan terlebih pada kepentingan ekonomi. Kecenderungan sedemikian ini seyogianya tidak perlu terjadi apabila masing-masing surat kabar memilih menetapkan untuk semakin memfungsikan diri sebagai instrumen demokrasi dengan mengkonstruksi pesan (*framing*) berlandaskan komitmen keberpihakan pada seluruh khalayak demi pengembangan demokrasi.
- 2.3. Berdasarkan hasil analisis *framing* ditemukan bahwa apa yang disajikan oleh surat kabar dalam tajuk rencanya merupakan hasil pandangan mereka terhadap realitas. Setiap surat kabar menyajikan ulasan disertai maksud tertentu sesuai dengan orientasinya sendiri. Masing-masing surat kabar mengarahkan khalayak pembaca untuk mempersepsi pemikiran (opini) serta bidang posisi (sikap) yang dikonstruksi oleh surat kabar itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membaca teks tajuk rencana hendaknya memerhatikan maksud dan juga orientasi surat kabar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alger, Dean E., 1990, "The Media in Elections: Evidence on the Role and the Impact", dalam Doris A. Graber, *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc.
- Altschull, J. Herbert., 1984, *Agent of Power, The Role of the News Media in Human Affairs*, New York: Longman Inc.
- Arterton, F. Christopher., 1990, "Campaign Organization Confront the Media-Political Environment", dalam Doris A. Graber, *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc.
- Berger, Arthur Asa., 1991, *Media Analysis Techniques*, London: Sage Publication
- Boyd-Barret, Oliver., 1995, *Political Economy and Mass Society, Pluralism: Approach to Media, A Reader.*, Australia: Monash University.
- Branner, Julia, 1999, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar.
- Dhakidae, Daniel., 1993, "Negara dan Ekonomi Pers Indonesia" dalam Siahaan, Hotnan M., Purnomo W., Tjahjo., (editor), *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari – Empat Puluh Tahun Surabaya Post*, Surabaya: Yayasan Keluarga Bakti.
- Downing, Jhon, et.al., 1990, *Questioning The Media – A Critical Introduction*, California: Sage Publications.
- Effendy, Onong Uchjana, 1992, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tadjuddin Noer Effendi., 2003, "Lika Liku Demokrasi: Sebuah Pengantar", dalam Georg Sorensen., *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek*

dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah), (terjemahan I. Made Krisna, penyunting dan pengantar Tadjuddin Noer Effendi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS.

- Entman, Robert M., 2002, "Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm," dalam dalam Denis Mcquail., (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications.
- Eriyanto, 2004, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS.
- Frauenrath, Maria., Yonis Ali Nur, Menek Suwondo, 2003, "*Jadi, Bagaimana Menurut Pendapat Anda...?*" *Buku Panduan Praktis Bagi Wartawan*, London: BBC World Service Trust.
- Gaffar, Afan, 2002, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazali, Effendi, 2000, "Antara Benci dan Banci terhadap Rezim: Analisis Peran Koran dan Radio Lokal" dalam Dedy N. Hidayat, et.al. (editor), *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gouldner, Alvin W., 2002, "The Communications Revolution: News, Public, and Ideologi", dalam dalam Denis Mcquail (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications.
- Graber, Doris A., 1990, *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc.
- Hall, Stuart, 1982, "The Rediscovery of 'Ideology': Return of the Repressed in Media Studies", dalam Michael Gurevith, et.al, (ed.) *Culture, Society and Media*, London, Methuen.
- Hamad, Ibnu., 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit.

- Kuntowijoyo, 1993, "Peranan Budaya dalam Pembangunan Pers Pancasila", Siahaan, Hotman M., Purnomo W., Tjahjo., (editor), 1993, *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari, Empat Puluh Tahun Surabaya Post*, Surabaya: Yayasan Keluarga Bakti.
- Lewis, Glen., dan Christina Slade, 2000, *Critical Communication*, second edition, Australia: Prentice Hall.
- Lichtenberg, Judith., 2002, "Foundations and Limits of Freedom of the Press", Denis Mcquail, (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications.
- Liddle, R. William., 1994, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Lippmann, Walter., 1990, "Newspaper" dalam Graber, Doris A., *Media Power in Politics*, second edition, USA: Congressional Quarterly Inc.
- Littlejohn, Stephen W., 1992, *Theories of Human Communication*, Fourth Edition, California: Wadsworth Publishing Company.
- Lorimer, Rowland., 1994, *Mass Communications, A Comparative Introduction*, New York: Manchester University Press.
- McChesney, Robert W., 2000, *Rich Media, Poor Democracy Communication Politics in Dubious Times*, New York: The New Press.
- McQuail, Denis., 1990, "The Influence and Effects of Mass Media", dalam Doris A. Graber., *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressional Quarterly Inc.
- McQuail, Denis., 2003., *Teori Komunikasi Massa - Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, (terjemahan Agus Dharma dan Aminuddin Ram), Jakarta: Erlangga.
- Merrigan, Gerianne., Huston, Carole Logan., 2004, *Communication Research Methods*, USA: Wadsworth.

- Mulyana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan., 1993, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, (penerjemah Tjun Surjaman), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Heru., 2002, "Terpaan Demokrasi Global dan Pasang Surut Demokratisasi di Indonesia, Sebuah Pengantar untuk John Markkoff," dalam John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, (terjemahan, Ari Setyanigrum, penyunting dan pengantar, Heru Nugroho), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CSSS.
- Newman, W. Lawrence., 2000, *Social Reseach Methods - Qualitative and Quantitative Approaches*, Fourth Edition, Boston: Allyn and Bacon.
- Nyhan, David., 1990, "Newspaper in Campaigns" dalam Doris A Graber, *Media Power in Politics*, United States of Amerika: Congressonal Quarterly Inc.
- Sen, Krishna dan Hill, David T., 2001., *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*, (terjemahan Sirikit Syah) Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Shoemaker, Pamela J., and Reese, Stephen D., 1996, *Mediating the Message – Theories of Influences on Mas Media Content*, USA: Logman Publisher.
- Siahaan, Hotman M., et.al., 2001, *Pers yang Gamang – Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*, Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Institut Studi Arus Informasi.
- Siregar, Ashadi 1994, "Pers Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Politik, dalam Bambang Wahyudi dan M.Faried Cahyono (ed.), *Pers, Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Sorensen, Georg., 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, (terjemahan I. Made Krisna, penyunting dan pengantar Tadjuddin Noer Effendi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS.
- Street, Jhon., 2001, *Mass Media, Politics and Democracy*, New York: Palgrave.

Sudibyo, Agus., 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS.

Subiakto, Henry., 1997, "Dominasi Negara dan Wacana Pemberitaan Pers, dalam Susilo, I. Basis (editor)., *Masyarakat dan Negara*, Surabaya: Airlangga University Press.

Victor, Menayang, et.al., 2000, "Pers Bawah Tanah: Media sebagai Pergerakan Sosial", dalam Hidayat, Dedy N., dkk. (editor), *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zoonen, Liesbet van., 2002, "A 'New' Paradigm?" Mcquail, Denis., (edited), *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: SAGE Publications.

Jurnal, Surat Kabar, dan Situs

Abdullah, Taufik, 1999, "Pers dan Tumbuhnya Nasionalisme Indonesia", dalam *Media Komunikasi Profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia*, edisi 7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Anwar, H. Rosihan., "Sikap Media Hadapi Pemilu 2004," dalam *Pikiran Rakyat*, 24 Maret 2004, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0304/24/0801.htm> (diakses 5 Oktober 2004).

Franklin, Bob., 1995, *The Media and Party Politics*, dalam <http://www.psa.ac.uk/cps/1995%5Cfrank.pdf> (diakses, 20 April 2005).

Guma, Greg., "Watchdogs and Lapdogs", dalam *Toward Freedom Magazine*, December 1997/January 1998, http://www.thirdworldtraveler.com/Media/Lapdogs_TF.html (diakses, 20 April 2005)

Hamad, Ibnu., 2004, "Mempersiapkan Media yang Fair pada Pemilu 2004: Mempertanyakan Kembali Independensi dan Komitmen Media pada Demokrasi", dalam <http://www.pantaupemilu.or.id/index.cfm?Fuseaction=analisis.detail&detailid=19> (diakses 5 Oktober 2004).

- Hidayat, Dedy N., 1999, "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi" dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. III/April, Bandung, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan Remaja Rosdakarya.
- Haryanto, Ignatius., "Kepemilikan Media Terpusat dan Ancaman terhadap Demokrasi", dalam *Kompas*, 4 Agustus 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/04/Bentara/1189006.htm> (diakses 8 Oktober 2004).
- Ida, Rachmah., 2000, "Menyingkap Jurnalisme Profesional di Indonesia: Mengukur Obyektifitas Pemberitaan, dalam *Jurnal Penelitian Media Massa*, Vol. 3 No. 6, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Surabaya, hlm. 72-80.
- Kellner, Douglas., 2004, "The Media and the Crisis of Democracy in the Age of Bush-2" *e-Journal National Communication Association*, Vol.1, No. 1, Maret, USA: Routledge.
- Luwarso, Lukas., dkk. (ed.), 2002, *Natural Press Attackers: Tekanan terhadap Pers Indonesia 2001 – Laporan Tahunan The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta Office*, Jakarta: SEAPA.
- Malik, Dedy Djameluddin, 1998, "Pemilihan Langsung Presiden: Perspektif Budaya dan Komunikasi Politik," dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, No. 2/Oktober, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Olutokun, Ayo and Dele Seteolu., 2001, "The Media and Democratic Rule in Nigeria," dalam *Development Policy Management Network Bulletin* Vol. XIII, N° 3, September 2001 hlm. 30-34, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN004216.pdf> (diakses, 20 April 2005).
- Pierre, Jennifer L. St., 2004, "Framing The War With Iraq: A Content Analysis of Three Newspapers' Coverage", A Thesis, The Pennsylvania State University Schreyer Honors College, dalam <http://www.jstpierre.com/Thesis%20final%20draft.htm> (diakses 19 September 2005)
- Phillips, Peter., "Media Censorship and a Free Press in America," dalam http://www.thirdworldtraveler.com/Media/Media%20Censor_ProjCensor.html (diakses, 20 April 2005)

- Pool, Roy Morgan., *Why Australians don't respect the media survey*, <http://www.roymorgan.com/resources/pdf/papers/20040903.pdf> (diakses, 20 April 2005)
- Qodari, Muhammad., 2001, "Membandingkan Tajuk Rencana Tahun 1965," dalam *Jurnal Pantau – Kajian Media dan Jurnalisme*, edisi 10, Jakarta: ISAI.
- Reljiæ, Dušan., 2004, "Who Builds Civil Society? Civil Society, Mass Media and Democracy in Post-Communist Countries", dalam *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) Working Paper No. 131, Januari*, www.dcaf.ch/publications/Working_Papers/131.pdf (diakses, 20 April 2005).
- Ross, Susan Dente., 2003, "Framing of the Palestinian-Israeli Conflict in Thirteen Months of *New York* Editorial Surrounding the Attack of September 11, 2001", *Conflic & Communication Online*, Vol. 2. No. 2, http://www.cco.regener-online.de/2003_2/pdf_2003_2/ross_engl.pdf (diakses 6 Oktober 2004).
- Simon, Adam, dan Xenos, Michael., "*Media Framing and Effective Public Deliberation*," dalam <http://jsis.artsci.washington.edu/programs/cwesuw/simon.htm> (diakses 23 Nopember 2004).
- Subiakto, Henry., 2001, "Media Massa di Indonesia Baru", dalam *Jurnal Penelitian Media Massa*, Vol. 4 No. 7, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Surabaya, hlm. 29-42.
- Sudibyoy, Agus., 2001, "Tinjauan Teoritis Analisis *Framing*", dalam *Pantau, Kajian Media dan Jurnalisme*, edisi 10, Jakarta: ISAI, hlm. 120-133.

Lampiran 1

Tabel *Framing* Isu Demokratisasi oleh Surat Kabar Indonesia1. *Framing* Tentang Persamaan Di Depan Hukum

	<i>Suara Pembaruan</i>	<i>Republika</i>
Bingkai Inti	Hukum Tidak Boleh Diskriminatif	Semua Pihak Harus Tunduk Pada Hukum
Perangkat Pembingkai		
Metafora	Sasaran tembak dari syarat “mampu secara rohani dan jasmani” bagi capres-cawapres adalah Gus Dur. Ada aroma konspirasi politik	Hukum adalah ‘tuan’ yang harus diikuti oleh setiap warga. Tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum.
<i>Catchphrases</i>	Pelajaran dari kasus Gus Dur, pembelajaran ke depan. Pembuatan UU Pil-pres diwarnai aroma konspirasi politik.	Gus Dur memaksakan kehendak dengan mengajak orang lain menjadi golput. Ajakan untuk tidak memilih tentulah sikap yang tidak bertanggung jawab.
<i>Exemplars</i>	UU Pilpres merupakan hasil kompromi elit politik. Hal bersifat teknis seperti ketentuan “mampu secara rohani dan jasmani” tidak tepat dimasukkan ke dalam hukum dasar tertulis.	MK dan MA telah menolak <i>judicial review</i> yang diajukan Gus Dur terkait dengan SK KPU No 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Capres/ Cawapres.
<i>Depictions</i>	Komisi Konstitusi mencoret hal bersifat teknis “mampu secara rohani dan jasmani” dalam Pasal 6 UUD '45. Ketika DPR membahas RUU Pilpres terjadi konspirasi politik	Gus Dur ‘ngotot’ mencalonkan diri sebagai presiden
Perangkat Penalaran		
<i>Roots</i>	Perancang dan penyusun legilasi kita sering kurang tuntas dalam membuat aturan, sehingga materi pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan induknya	Gugatan Gus Dur ke KPU bukan yang pertama. Bahkan telah mengajukan <i>judicial review</i> tetapi ditolak oleh MK dan MA.
<i>Appeals to principle</i>	UUD '45 tidak mengenal diskriminasi. Kedaulatan rakyat tidak pada tempatnya diintervensi oleh peraturan birokrasi.	Memperjuangkan demokrasi harus ditempuh dengan cara-cara yang benar dan juga demokratis, yakni mematuhi hukum dan tidak boleh memaksakan kehendak

2. Framing Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan

	Surat Kabar			
	<i>Kompas</i>	<i>Suara Pembaruan</i>	<i>Republika</i>	<i>Jawa Pos</i>
Bingkai Inti	Rakyat Bebas Menentukan Pilihan Sendiri Sesuai Akal Sehat dan Hati Nurani	Rakyat Berdaulat Meyakinkan Diri Sebelum Menentukan Pilihan	Rakyat Harus Menentukan Pilihan dengan Pertimbangan Rasional	Rakyat Harus Berdaulat, Mandiri, serta Otonom Menentukan Pilihan
Perangkat Pembingkai				
Metafora	Kegiatan capres pada masa kampanye seperti tarik suara. Pemberantasan KKN tidak berjalan karena penegakan hukum yang tutup mata dan dikerjakan panas-panas cirit ayam.	Menjatuhkan pilihan berarti menyerahkan nasib bangsa dan negara kepada Presiden. Apa yang dilakukan hari ini akan sangat menentukan di hari-hari mendatang.	Tersandera oleh pemimpin yang gagal. Lima menit di kotak suara akan menentukan Indonesia untuk lima tahun ke depan.	Saatnya kini para pemilih angkuh untuk mempertahankan nilai tawar politiknya. Rakyat bebas menimbang-nimbang calon yang disukai.
Catchphrases	Rakyat memiliki <i>people's wisdom</i> , bersikap bijaksana dan dilandasi akal sehat, tulus, mengikuti pemilihan presiden. Faham kekuasaan selama ini adalah kekuasaan feodal.	Konsekuensi golput tidak mau tahu dengan pemerintah. Pilihan rakyat menentukan nasib bangsa dan negara.	Sebagian di antara rakyat memilih karena alasan-alasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan calon. Rakyat menentukan Indonesia untuk lima tahun ke depan.	Bebas menentukan pilihan sesuka hati. Tidak perlu ada intervensi terhadap kedaulatan individu para pemilih.
Exemplars	Tentukan pilihan berdasarkan jati diri capres-cawapres yang asli, yang sesungguhnya. Materi kampanye dan sajian media tidak selalu merupakan jati diri capres-cawapres yang asli.	Hukum dan konstitusi tidak memberi landasan untuk menggugat dan menjatuhkan Presiden kalau ingkar janji.	Enam tahun setelah reformasi, kedaulatan kembali ke tangan rakyat.	Ini benar-benar buah demokrasi yang dilahirkan dari reformasi politik 1998. Terindikasi warga NU semakin bebas menentukan pilihan secara pribadi.
Depictions	Rakyat tidak mau diatur-atur seperti zaman Orde Baru dan lebih menggunakan hati	Jangan pilih yang suka ingkar janji. Pilih capres-cawapres yang punya integritas dan akuntabilitas	Amien Rais terjegal oleh isu-isu negatif. Kondisi Indonesia carut marut, terjadi krisis serba muka.	Perebutan kursi presiden saat ini adalah masalah profan, masalah keduniawian, yang tidak layak

	nuraninya menentukan pilihan.	tinggi.		disakralkan
Perangkat Penalaran				
<i>Roots</i>	Jati diri capres-cawapres yang sesungguhnya dapat diperhatikan dari cara dan sikapnya menghadapi kenyataan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat.	Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan selama lima tahun masa baktinya, meski kinerjanya tidak memuaskan.	Rakyat harus rasional. Apabila rakyat salah menentukan pilihan, transisi demokrasi akan semakin panjang dan Indonesia tersandera lima tahun ke depan.	Warga NU di lapisan bawah harus bisa mengendurkan tali patronasenya dengan kiai tertentu. Kiai sebagai sosok manusia yang tidak lepas dari hal-hal yang sarat interes pribadi.
<i>Appeals to principle</i>	Tidak menggunakan hak pilih tidak melanggar hukum. Tetapi menggunakan hak pilih lebih baik karena berarti menggunakan hak kedaulatannya	Kualitas kepemimpinan presiden terpilih menjadi jaminan bagi masa depan bangsa dan negara.	<i>Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.</i>	<i>Taushiyah</i> syariaah PB NU, yang menyatakan menerima siapa pun yang terpilih sebagai presiden nanti, perlu diso-sialisasikan dan dipraktikkan para petinggi NU.

3. *Framing* Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden

	Surat Kabar			
	<i>Kompas</i>	<i>Suara Pembaruan</i>	<i>Republika</i>	<i>Jawa Pos</i>
Bingkai Inti	Pemilihan Presiden Suatu Proses untuk Memperbaiki Kehidupan Seluruh Bangsa	Pemilihan Presiden Belum <i>Fairness</i> , Perlu Aturan yang Rinci	Pemilihan Presiden Belum Jurdil, Sebuah Pelajaran Demokrasi	Pemilihan Presiden Belum Mengutamakan Pendidikan Politik, Miskin Kampanye Kreatif
Perangkat Pembingkai				
Metafora	Demokrasi ibarat jalan panjang. Elit politik jangan seperti kata pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Pemilihan presiden bukan Perang Barathayudha. Persoalan bangsa ini terang benderang.	Pemilihan presiden pada Orde Baru seperti memilih “tukang” sedang pada pilpres secara langsung tidak memilih sekadar “tukang” melainkan tokoh yang punya program nyata. Elit politik menjadi kader “lompat pagar” dan melakukan “dagang sapi” untuk meraih kekuasaan.	Demokrasi ibarat kotak Pandora. Tidak semudah membalik telapak tangan. <i>Vox populi vox Dei</i> , suara rakyat suara Tuhan. Politik uang seperti angin busuk. Para pemimpin ibarat penggembala yang harus berjalan di belakang gembalaannya.	Ajang kampanye harus dijadikan pasar bebas tempat melakukan tawar-menawar program politik. Lima pasangan capres-cawapres bersifat gado-gado. Mem-bentuk koalisi tidak bisa dilakukan semudah membalik tangan.
Catchphrases	Demokrasi kita adalah demokrasi dalam pembangunan. Membangun demokrasi membutuhkan waktu. Kita menuju demokrasi yang bekerja, bekerja untuk secara berkeadilan memper-baiki perikehidupan rakyat.	<i>Fairness</i> dalam pilpres. Ketentuan UU Pemilu bertujuan memenuhi tuntutan transparansi dan demokratisasi”, KPU bersikap tidak <i>fair</i> ”. Terjadi ketidak-pastian dan ketegangan politik.	Politik uang. Sulit memang menegakkan pemilu jurdil di negeri ini. Lebih banyak terjadi kampanye negatif daripada kampanye positif.	Capres-cawapres harus melakukan pendidikan politik rakyat pemilih dengan mengajukan program riil. Miskin kampanye kreatif, isi kain rentang tidak konkret.
Exemplars	Pengalaman Indonesia selama tujuh tahun terakhir memperlihatkan bahwa membangun demokrasi tidak mungkin terlepas dari kenyataan dan	Terjadi anomali politik, sesuatu yang abnormal dianggap sebagai normal. Capres-cawapres tidak konsisten menerapkan makna prasasti “Siap Menang, Siap	Kita butuh satu tahap lagi untuk mewujudkan politik rasional, di mana rakyat mengapresiasi isu-isu publik.	Mungkin, kali ini banyak pemilih yang masih awam mengenai program politik yang layak didukung. Sangat mungkin pilihan mereka didasarkan pada

	kondisi masyarakat. Ada masa transisi, atau masa transformasi, yang harus diarahkan dan dijalani secara benar.	Kalah” yang telah ditandatangani.		faktor kedekatan tertentu.
<i>Depictions</i>	Membangun demokrasi membutuhkan waktu. Kita baru pertama kali pemilu secara langsung.	Terbukti perumus perangkat perundang-undangan kita kurang antisipatif. Masalah pengawasan dalam UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan. Sampai sekarang belum ada aturan yang jelas dari KPU.	Rakyat muak dengan pemimpin yang kotor-kotor. Megawati sang suksesor, melakukan persekongkolan mencopot Abdurrahman Wahid.	Capres-cawapres dalam kampanye menjajakan dagangan politik, masyarakat bebas membeli, bebas menawar, yang tidak laku layak ditinggalkan.
Perangkat Penalaran				
<i>Roots</i>	Ketidakpastian hukum telah mengakibatkan investor lari dari Indonesia dan kemudian berimplikasi pula bagi upaya memperbaiki kehidupan perekonomian rakyat. Pelaksanaan pemilu presiden merupakan prestasi Indonesia dalam proses membangun demokrasi.	UU Pilpres memiliki sejumlah kelemahan, faktor inilah yang mengakibatkan pilpres menjadi belum <i>fair</i> .	Transisi demokrasi harus jalan terus, semua pihak harus siap menerima kemenangan ataupun kekalahan calon masing-masing sebagai sebuah pelajaran demokrasi.	Program kerja perlu sebagai ‘GBHN’ dan agar calon presiden-wakil presiden tidak hanya melakukan manuver untuk tujuan koalisi dan mencari dukungan tanpa program kerja yang jelas.
<i>Appeals to principle</i>	Janganlah terlalu banyak kata-kata, karena nanti di sana ada dusta. Tantangan kita ke depan tidak bisa hanya dijawab dengan kata-kata, tetapi harus dengan kerja.	Pelaksanaan pilpres menjadi pengalaman dan pelajaran yang amat berharga serta masukan berharga bagi penyusunan UU Pilpres yang lebih baik ke depan. Kasihanilah rakyat kecil jangan diadu domba.	<i>ngono yo ngono ning ojo ngono</i> alias jangan kelewatan. Mengambil teladan para nabi dan rasul Allah serta <i>khulafaur rasyidin</i> .	Bisa saja kita berbeda politik dengan saudara kandung kita. Namun, tali silaturahmi sebagai satu keluarga harus tetap dipelihara.

4. Framing Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat

	Surat Kabar			
	<i>Kompas</i>	<i>Suara Pembaruan</i>	<i>Republika</i>	<i>Jawa Pos</i>
Pengkal Inti	Presiden Harus Memelihara Persemaian Demokrasi dan Memperbaiki Perikehidupan Rakyat	Presiden Harus Mewujudkan Program yang Dikemukakan Kepada Rakyat	Presiden Harus Memberantas Korupsi, Mengatasi Masalah Pendidikan dan Pengangguran	Kita Harus Mengontrol Pemerintah dan Menagih Janji Presiden
Perangkat Pembingkai				
Metafora	Presiden beserta jajaran pemerintahan perlu dan harus banting setir persepsi kekuasaan. Hal ini merupakan karakteristik dari pemerintahan yang bersih dan kabinet yang bersih.	Pemerintah bukan sebagai penguasa seperti raja, dan rakyat bukan kawu-la. Jajaran birokrasi jangan lagi sebagai raja-raja kecil yang jauh dari kepentingan rakyat.	Republik ini memerlukan seorang imam untuk membawa bangsa ini tak cuma jadi kuli dan tempat buangan sampah. Pemimpin tidak boleh membiarkan kapal dan penumpangnya tenggelam, tapi dia sudah lebih dulu di sekoci.	Angin segar. Hari-hari ini adalah saat bulan madu bagi SBY-MJK. Korupsi adalah <i>root of all evil</i> (akar dari segala kejahatan).
Catchphrases	Tugas kita adalah membuat demokrasi itu lebih bermakna, yaitu membawa kesejahteraan bagi seluruh warga.	Pemerintahan yang bersih, bebas praktik korupsi, mewujudkan program yang disampaikan kepada rakyat pada masa kampanye.	Berantas korupsi mulai dari presiden. Praktik-praktik korupsi telah "memenjarakan" rakyat dalam lingkaran kemiskinan.	SBY kelebihan beban harapan. Banyak daftar tagihan dari janji-janji yang mereka tebar dalam masa kampanye dulu bakal dicecarkan oleh rakyat.
Exemplars	Semua komponen bangsa, sesuai kapasitasnya masing-masing perlu dan harus terarah untuk melangkah maju memperbaiki kehidupan rakyat.	Menggandeng presiden pendahulu berdampak positif bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan programnya.	Habibie pernah membuat teknologi tepat guna bagi nelayan. Gagasan Amien Rais masalah pengangguran dapat diatasi jika setiap usaha kecil informal yang dapat menambah satu angkatan kerja.	Demokrasi tidak akan ada artinya tanpa kontrol yang kritis dan terus-menerus dari rakyat. Kontrol yang bermakna merupakan sinyal peringatan dari kejatuhan yang lebih dalam.

<i>Depictions</i>	Kemiskinan bertambah, pengangguran demikian pula. Sudah demikian keadaannya, pengurusan justru marak. Mal seperti menjamur, sementara gambaran para pedagang kali lima adalah gambaran yang tergusur dan terus-menerus digusur.	Perjuangan berat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Situasi korupsi merupakan penyakit yang menge-rikan.	KKN bukannya mengempes. Rakyat hidup pas-pasan. Angka penganggur-an tinggi. Rakyat miskin tak mampu mengakselerasi diri lewat pendidikan.	Bangsa kita tak bisa terpuruk lebih dalam lagi. Rakyat perlu melakukan kontrol semaksimal mungkin.
Perangkat Penalaran				
<i>Roots</i>	Presiden selama enam tahun terakhir, gagal menyatukan seluruh potensi yang ada. Elit politik pun cenderung lebih mendahulukan kepenting-annya daripada kepentingan rakyat.	Terpilih menjadi presiden merupakan langkah awal, Selama lima tahun memegang amanat rakyat, pemerintahan SBY mewujudkan program yang telah dikemukakan kepada rakyat.	Pelbagai masalah sosial-ekonomi, dalam bidang pendikan, pengangguran, dan juga praktik KKN, mendesak diatasi agar tidak berujung pada konflik sosial.	Presiden sebelumnya tidak memilih Jaksa Agung yang bisa membuat penegakan hukum optimistis. Hukum dilemahkan para pembesar dan elite selama ini sehingga menghadanglah batu besar bernama korupsi.
<i>Appeals to principle</i>	Jangan bertanya apa yang negara dapat lakukan untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang Anda dapat lakukan untuk negara.	Kekalahan tidak perlu diratapi, kemenangan sama sekali bukan pesta.	Rakyat tinggal bercermin pada pemimpinnya. Penggalan ayat 255 Surat al-Baqarah menggambarkan ketaatan rakyat pada pemimpinnya: “ <i>Sami’naa wa atha’naa.</i> ” Kami dengar dan kami taat.	Korupsi akar dari segala kejahatan.

Lampiran 2

Klasifikasi Isu Demokratisasi dalam Tajuk Rencana
Kompas, Suara Pembaruan, Republika, dan Jawa Pos
 Edisi Mei – September 2004 Tentang Pemilihan Presiden 2004

No	Klasifikasi Isu Demokratisasi	Judul Tajuk Rencana			
		<i>Kompas</i>	<i>Suara Pembaruan</i>	<i>Republika</i>	<i>Jawa Pos</i>
1.	Tentang Persamaan di Depan Hukum		-“Mampu Secara Rohani dan Jasmani” Dicoret (1 Mei) -Pelajaran dari Kasus Gus Dur (24 Mei)	-Langkah-langkah Gus Dur (25 Mei)	
2.	Tentang Kedaulatan Rakyat Menentukan Pilihan	-Rakyat agar Tahu Jati Diri Pasangan Capres (21 Juni) -Anda adalah Anda, “You Are What You Are” (28 Juni) -Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya (6 Juli) -Dalam 50 Hari ke Depan Semua Bisa Terjadi (2 Agst) -Memilih Sesuai Hati Nurani (20 Sept)	-Jangan Salah Pilih yang Suka Ingkar Janji (21 Juni) -Memilih Mandataris Rakyat? (2 Juli) -Memilih Tanpa GBHN (5 Juli) -Golput Lagi, Golput Lagi (20 Juli)	-Memilih Calon yang Tepat (10 Mei) -Akibat Isu Negatif (29 Juni) -Lima Menit Menentukan (5 Juli) -Menghalalkan Segala Cara (7 Sept) -Putaran Kedua (16 Sept)	-Pemilih Harus Angkuh (13 Mei) -Penonaktifan Hasyim-Gus Sholah (18 Mei) -Calon Orang Nomor 1 (25 Mei) -Mencoblos Capres yang Sah (29 Mei) -Cap Jempol Darah (7 Juni) -Fatwa Pilih Capres Pria (8 Juni) -Dukungan Pesantren ke Capres (16 Juni) -Debat Capres (30 Juni) -Pengarahan Kiai Sahal (1 Juli) -Memasuki Masa Tenang (2 Juli) -Lulus Ujian Politik (6 Juli) -Dukungan Warga NU ke SBY (9 Juli)

					-Taushiyah Syuriah PB NU (10 Sept) Mengayomi Pendukung Capres (18 Sept)
3.	Tentang Pelaksanaan Pemilihan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> -Koalisi Politik Kembali ke Tahun Lima Puluhan (1 Mei) -Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa (5 Mei) -Preseden Deklarasi Capres dan Wakilnya (8 Mei) -Pasangan Amien Rais-Siswono Pasangan Kompeten (10 Mei) -Pasangan Wiranto-Salahuddin dan Maknanya (13 Mei) -Pemilihan Presiden Berhasil, Pemerintah Pun Jalan (17 Mei) -Pemilihan Presiden agar Mencontoh Pemilihan Legislatif (21 Mei) -Lima Capres-Cawapres, Tim Sukses, dan Pola Kampanye (25 Mei) -Menurut Lasswell, Politik adalah "Siapa Dapat Apa" (28 Mei) -Capres-Cawapres Harus Mencegah Potensi Konflik (31 Mei) -Sulitnya Memisahkan TNI dan Politik (2 Juni) -Terkaya dan Termiskin Capres-Cawapres Kita (5 Juni) -Capres Sebaiknya Apa Adanya atau Berada-ada (7 Juni) -Mengapa Pasar? Karena 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemilu Pilpres, Dulu dan Sekarang (6 Mei) -Mahkamah Konstitusi Diuji (7 Mei) -Ketegangan Politik Berkepanjangan (14 Mei) -Pesanan untuk Para Capres (1 Juni) -GBHN Capres Mana? (10 Mei) -Pemilihan Presiden dan Resistensi Pasar (11 Mei) -Perubahan Makin Menjauh (12 Mei) -Menghadapi Kampanye Pemilu Pilpres (25 Mei) -Kabinet "Gotong" Sendiri! (31 Mei) -KPU Dinilai Kurang Fair (6 Juni) -Kampanye Sepi, Respon Dingin Rakyat (8 Juni) -KPU versus Panwaslu (10 Juni) -Fitnah dan Adu Domba Warnai Pilpres (14 Juni) -Pemilu Tanpa Anarki (28 Juni) -Pilpres Memerlukan Payung Hukum? (29 Juni) -Berharap dari Debat Capres (30 Juni) -Menghitung Suara dengan Hati Nurani (6 Juli) -Legitimasi Hasil Pemilu, 	<ul style="list-style-type: none"> -Kampanye Dimulai (13 Mei) -Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan (2 Juni) -Dimulai dari Kekayaan Capres (5 Juni) -Cap Jempol Darah (7 Juni) -Menuju Kampanye Berkualitas (8 Juni) -Narkoba dan Kampanye Capres (21 Juni) -Sekali Lagi, Politik Uang (26 Juni) -Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus (3 Juli) -Jangan Cederai Pemilu (6 Juli) -Kepercayaan, Kejujuran (7 Juli) -Jangan Terlana Angka (10 Juli) -Golput (15 Juli) -Ujian untuk Megawati (16 Juli) -Protes Hasil Rekapitulasi (26 Juli) -Sebuah Pelajaran Demokrasi (30 Juli) -Sulitnya Menegakkan Pemilu Jurdil (31 Juli) -Jangan Lagi Dagang Sapi (2 Agst) -Jaga Citra Jelang Pilpres (9 Agst) -Jangan Kotori Demokrasi Kita 	<ul style="list-style-type: none"> -Mana Program Kerjanya? (8 Mei) -Presiden Bersih Dipilih dengan Bersih (11 Mei) -Tender Logistik Pilpres (17 Mei) -Pertarungan Lima Pasangan (1 Juni) -Miskin Kampanye Kreatif (3 Juni) -Semua Janji Berantas Korupsi (9 Juni) -Politisasi Kudatuli (10 Juni) -Perang Menepis Isu Negatif (25 Juni) -Rupiah dan Pilpres (8 Juli) -Intip Sana Intip Sini (13 Juli) -Gus Dur Bertemu Megawati (20 Juli) -Dukung-mendukung Capres (27 Juli) -Koalisi (2 Agst) -Tarik-menarik Elite PKB (5 Agst) -Tarik-menarik Internal Golkar (10 Agst) -Pelajaran bagi Parpol dan KPU (12 Agst) -Jangan Menjadi Kuda Tuli (26 Agst)

		<p>Banyak Warga Berkumpul (4 Juni)</p> <p>-Nasib Kampanye Presiden di Saat Kejuaraan Piala Eropa (12 Juni)</p> <p>-Kampanye Presiden Sepi atau Ganti Panggung (15 Juni)</p> <p>-Apa yang Bisa Kita Petik dari Debat Capres (30 Juni)</p> <p>-Debat Presiden di Panggung Terbuka (2 Juli)</p> <p>-Kampanye Damai, Demikian Pula Pemilihannya (3 Juli)</p> <p>-Hari Ini Kita Memutuskan untuk Lima Tahun (5 Juli)</p> <p>-Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar (7 Juli)</p> <p>-Sudah Waktunya Belajar dari Kebajikan Rakyat (8 Juli)</p> <p>-Apa Arti Investasi Tertunda hingga Oktober (9 Juli)</p> <p>-Koalisi Baru Mulai Dipikir dan Digarap (12 Juli)</p> <p>-Benar Akan Berantas KKN? Belajarlah dari Hoegeng (16 Juli)</p> <p>-Perihal Koalisi Mesin Politik dan Rakyat Pemilih (19 Juli)</p> <p>-Implikasi Kombinasi Sistem Presidensial dan Parlemerter (23 Juli)</p> <p>-Ledakan Bom di KPU dan Pemilihan Ulang di Al-Zaytun (27 Juli)</p>	<p>Pertaruhan Besar (7 Juli)</p> <p>-Siap-siap Maju ke Putaran Kedua (8 Juli)</p> <p>-Koalisi Pilpres Putaran Kedua (12 Juli)</p> <p>-Siap Menang, Siap Kalah? (13 Juli)</p> <p>-Menjelang Pilpres II, Megawati Cuti? (27 Juli)</p> <p>-Masih Ada yang Antidemokrasi (28 Juli)</p> <p>-Koalisi, Jebakan atau Penguatan (29 Juli)</p> <p>-Gugatan Wiranto dan Partai Golkar (3 Agst)</p> <p>-Biarlah Demokratisasi yang Menang (6 Agst)</p> <p>-Putusan MK Akhiri Ketegangan Politik (10 Agst)</p> <p>-RAPBN dan Pilpres (18 Agst)</p> <p>-Bahaya, Koalisi Meninggalkan Rakyat (20 Agst)</p> <p>-Anomali dalam Politik (23 Agst)</p> <p>-Panwaslu dan Fairness Pilpres II (25 Agst)</p> <p>-RUU TNI Menjelang Pilpres II (27 Agst)</p> <p>-Sikap Netral Amien dan Wiranto? (30 Agst)</p> <p>-Pragmatisme Versus Program (2 Sept)</p> <p>-Mappareasa, Korban atau Dikorbankan? (4 Sept)</p> <p>-Anggota TNI/Polri Memilih?</p>	<p>(18 Agst)</p> <p>-Menghentikan Persekongkolan (26 Agst)</p> <p>-Kekayaan Calon Pemimpin (2 Sept)</p> <p>-Jangan Cederai Transisi Demokrasi (18 Sept)</p> <p>-Siap Menang, Siap Kalah (20 Sept)</p>	<p>-Saling Umumkan Calon Menteri (28 Agst)</p> <p>-Visi Ekonomi Capres (4 Agst)</p> <p>-Saling Mendekat Saling Menjauh (19 Agst)</p> <p>-Langkah Zig-zag Gus Dur (24 Agst)</p> <p>-Sikap Netral PKB (2 Sept)</p> <p>-Memantau Kecurangan Pilpres (9 Sept)</p> <p>-Koalisi yang Masih Rapuh (14 Sept)]</p> <p>-Kampanye Formalitas (15 Sept)</p> <p>-Diuji Sejarah Sekali Lagi (20 Sept)</p>
--	--	---	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> -Yudhoyono dan Megawati Bersaing Ketat (28 Juli) -Amien-Siswono Benar-benar Siap Kalah (30 Juli) -Dua Capres Gagal Yakinkan Dunia Usaha (3 Agst) -Memang Aneh, Tahu-tahu Klimaks 20 Sept (5 Agst) -Pasangan Capres dan Tim Pemenangannya (11 Agst) -Kompetisi Pilpres 20 Sept Semakin Seru (19 Agst) -Silang Pendapat Mega dan SBY (23 Agst) -Demokrasi dan Masyarakat Madani (30 Agst) -Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha (31 Agst) -Sekitar Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres (16 Sept) -Ketika Menang Menjadi Sebuah Keharusan (18 Sept) -Yang Lebih Tepat, Kita Membutuhkan Perbaikan (9 Sept) 	<ul style="list-style-type: none"> (edisi 7 Sept) -Waspada! Kecurangan Pilpres II (17 Sept) -Indahnya Kampanye yang Tenang (18 Sept) -Lain Mega, Lain SBY (20 Sept) 		
4.	Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Hak-hak Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> -Dalam Demokrasi Kita, Adakah Tempat Oposisi (12 Agst) -Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi (21 Sept) -Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi (22 Sept) 	<ul style="list-style-type: none"> -Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat (21 Sept) -Menanti Hasil Pilpres dengan Tenang (22 Sept) -Menuntut Visi dan Misi Capres (23 Sept) 	<ul style="list-style-type: none"> -Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat (21 Sept) -Teknologi Kita, Presiden (22 Sept) -Guru (23 Sept) -PR Penganguran (24 Sept) 	<ul style="list-style-type: none"> -Mengontrol dan Menagih Janji (22 Sept) -Menanti Kabinet Ekonomi (29 Sept) -SBY Kelebihan Beban Harapan (18 Sept)

	<ul style="list-style-type: none"> -Sebuah Perjalanan Panjang Partai Golkar (23 Sept) -Membangun Perangkat Lunak Demokrasi (24 Sept) -Meraih Kemajuan di Tahun yang Berat (25 Sept) -Harapan Besar terhadap Pasangan SBY-JK (27 Sept) -Selamat Tinggal MPR Periode 1999-2004 (28 Sept) -Partai dan Perubahan Politik (30 Sept) 	<ul style="list-style-type: none"> -Perubahan Paradigma Pemimpin (24 Sept) -Penyeimbang atau Penumbang? (25 Sept) -Berharap dari Rekonsiliasi Nasional (27 Sept) 	<ul style="list-style-type: none"> -Berantas Korupsi Mulai dari Presiden (25 Sept) -Semoga Suksesi Berjalan Mulus (28 Sept) -Pesangon (30 Sept) 	
--	--	---	--	--



Lampiran 3

Judul Tajuk Rencana/Editorial Tentang Pemilihan Presiden 2004
Kompas, Suara Pembaruan, Republika, dan Jawa Pos
Edisi Mei – September 2004

No	Edisi	Judul Tajuk Rencana/Editorial Tentang Pemilihan Presiden 2004				Judul Lain/Tidak Tentang Pemilihan Presiden 2004
		<i>Kompas</i>	<i>Suara Pembaruan</i>	<i>Republika</i>	<i>Jawa Pos</i>	
I.	1 Mei	Koalisi Politik Kembali ke Tahun Lima Puluhan	"Mampu Secara Rohani dan Jasmani" Dicoret	-	-	<i>Jawa Pos</i> "Ujian Akhir Nasional"
	Mg	-	-	-	-	
	3 Mei	-	-	-	-	<i>Jawa Pos</i> "Polisi v Mahasiswa di Makassar"
	4 Mei					<i>Kompas</i> "Korban Bentrokan Makassar Besar, Termasuk Digantinya Kapolda"; <i>Suara Pembaruan</i> "Mahasiswa dan Polri Perlu Memahami Fungsi"; <i>Republika</i> "Mempertanyakan Sikap Polri"; <i>Jawa Pos</i> "Kekerasan Dibalas Kekerasan"
	5 Mei	Kekuasaan atau Pemecahan Persoalan Bangsa			Dirampas Elite Politik	<i>Kompas</i> "Cobaan yang Tak Kunjung Berakhir"; <i>Suara Pembaruan</i> "Kepentingan AS di Selat Malaka"; <i>Republika</i> "Hak Asasi Manusia di Irak"
	6 Mei	-	Pemilu Pilpres, Dulu dan Sekarang			<i>Republika</i> "Hasil Sistem Terbuka Setengah Hati", <i>Jawa Pos</i> "Kekejaman Tentara AS di Iraq"
	7 Mei		Mahkamah Konstitusi Diuji			<i>Kompas</i> "Beberapa Catatan terhadap Pengumuman Hasil Pemilu"; <i>Republika</i> "Keamanan dan Perekonomian"; <i>Jawa Pos</i> "Rusuh Suporter Sepakbola"
	8 Mei	Presiden Deklarasi Capres dan Wakilnya			Mana Program Kerjanya?	<i>Suara Pembaruan</i> "Utamakan Dialog dan Pembangunan Maluku"; <i>Republika</i> "Kupon Undian Olah Raga"
	Mg	-	-	-	-	

10 Mei	Pasangan Amien Rais-Siswono Pasangan Kompeten	GBHN Capres Mana?	Memilih Calon yang Tepat		<i>Jawa Pos</i> "Tekanan agar Rumsfeld Mundur"
11 Mei		Pemilihan Presiden dan Resistensi Pasar		Presiden Bersih Dipilih dengan Bersih	<i>Kompas</i> "Harapan Tinggal Tertumpu di Piala Thomas"; <i>Republika</i> "Ujian Akhir Nasional"
12 Mei		Perubahan Makin Menjauh	-		<i>Kompas</i> "Kerikil Ekonomi Sudah Menghadang Lagi"; <i>Jawa Pos</i> "Momentum Kenaikan Suku Bunga"
13 Mei	Pasangan Wiranto-Salahuddin dan Maknanya	-		Pemilih Harus Angkuh	<i>Republika</i> "Amerikalah Pencipta Teroris"
14 Mei		Ketegangan Politik Berkepanjangan			<i>Kompas</i> "Di Samping Statusnya, Juga Penting Nasib Rakyatnya"; <i>Republika</i> "Ekonomi Sedang Diuji"; <i>Jawa Pos</i> "Peristiwa 12 Mei 1998"
15 Mei					<i>Kompas</i> "Membangkitkan Gairah dari Tragedi Mei"; <i>Suara Pembaruan</i> "Partai Kongres India Mengulangi Kekuasaan"; <i>Republika</i> "Semoga Aceh Jadi Lebih Baik"; <i>Jawa Pos</i> "Spekulasi Transaksi Valas"
Mg	-	-	-	-	
17 Mei	Pemilihan Presiden Berhasil, Pemerintah Pun Jalan			Tender Logistik Pilpres	<i>Suara Pembaruan</i> "Thomas, Uber, dan Hakikat Pesta Olahraga"; <i>Republika</i> "Selamat Ferry Santoro"
18 Mei				Penonaktifan Hasyim-Gus Sholah	<i>Kompas</i> "Apa Arti Perampokan di Atas Kereta Api Itu"; <i>Suara Pembaruan</i> "Apa Beda dari Militer ke Sipil?"; <i>Republika</i> "Kritik Megawati Terhadap Pengajaran Agama"
19 Mei					<i>Kompas</i> "Sebanyak 43 Anggota DPRD Divonis Penjara"; <i>Suara Pembaruan</i> "Pesoalan Pencemaran Pantura Jakarta"; <i>Republika</i> "Telekomunikasi Kita"; <i>Jawa Pos</i> "Pembebasan Ferry Santoro"
20 Mei	-	-	-		<i>Jawa Pos</i> "Tren Melemahnya Rupiah"

21 Mei	Pemilihan Presiden agar Mencontoh Pemilihan Legislatif					<i>Suara Pembaruan</i> "Tarif Pelayanan Publik Harus Realistis"; <i>Republika</i> "Surga Penyelundup"; <i>Jawa Pos</i> "Sonia Gandhi Lepaskan Hak"
22 Mei						<i>Kompas</i> "Pekerjaan Wartawan Memang Penuh Bahaya dan Risiko"; <i>Suara Pembaruan</i> "Sekali Lagi, Komitmen Membangun Pendidikan"; <i>Republika</i> "Perlindungan TKW di Luar Negeri"; <i>Jawa Pos</i> "Penyiksaan TKW"
Mg	-	-	-	-	-	
24 Mei		Pelajaran dari Kasus Gus Dur				<i>Kompas</i> "Pengamanan Lingkungan Laut dan Perekonomian Bahari"; <i>Republika</i> "Maklumat AS"; <i>Jawa Pos</i> "Kekejaman Tentara AS Kian Luas"
25 Mei	Lima Capres-Cawapres, Tim Sukses, dan Pola Kampanye	Menghadapi Kampanye Pemilu Pilpres	Langkah-langkah Gus Dur	Calon Orang Nomor 1		
26 Mei						<i>Kompas</i> "Kenaikan Harga Minyak Itu Membawa Malapetaka"; <i>Suara Pembaruan</i> "Perlu Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia"; <i>Republika</i> "Irak, Kesewenangan yang Dibakukan"; <i>Jawa Pos</i> "Irak Semakin Kacau"
27 Mei						<i>Kompas</i> "Pekerja Itu Tewas Tertimpa Lantai Bangunan"; <i>Suara Pembaruan</i> "Kapan Tragedi TKI Berakhir?"; <i>Republika</i> "Anak-Anak Kita"; <i>Jawa Pos</i> "Dolas AS Terus Meroket"
28 Mei	Menurut Lasswell, Politik adalah "Siapa Dapat Apa"					<i>Suara Pembaruan</i> "Perketat Pengawasan Daging Ilegal"; <i>Republika</i> "Konsekuensi Harga Minyak"; <i>Jawa Pos</i> "Lintasan KA Minta Korban Lagi"
29 Mei					Mencoblos Capres yang Sah	<i>Kompas</i> "Tewasnya Jaksa Ferry Silalahi Tidak Boleh Sia-sia"; <i>Suara Pembaruan</i> "Perketat Pengawasan Daging Ilegal"; <i>Republika</i> "Solusi

						Bagi Program Olahraga di Tanah Air”
	Mg	-	-	-	-	
	31 Mei	Capres-Cawapres Harus Men-cegah Potensi Konflik	Kabinet “Gotong” Sendiri!	Kampanye Dimulai		<i>Jawa Pos</i> “Gaji Ke-13 PNS”
II.	1 Juni		Pesan untuk Para Capres		Pertarungan Pasangan Lima	<i>Republika</i> “LSM dan Demokrasi”, <i>Kompas</i> “Semua Dimulai dari Penegakan Hukum”
	2 Juni	Sulitnya Memisahkan TNI dan Politik		Kampanye Pilpres di Tengah Serba Tuntutan		<i>Suara Pembaruan</i> “Rupiah dalam Lingkaran Politik”; <i>Jawa Pos</i> “Suksesi ala Singapura”
	3 Juni	-	-	-	Miskin Kampanye Kreatif	
	4 Juni	Mengapa Pasar? Karena Banyak Warga Berkumpul				<i>Suara Pembaruan</i> “Korupsi di Daerah Perlu Dituntaskan”; <i>Republika</i> “Pemerintahan Transisi Irak Terbentuk”; <i>Jawa Pos</i> “Menunggu Langkah BI”
	5 Juni	Terkaya dan Termiskin Capres-Cawapres Kita		Dimulai dari Kekayaan Capres		<i>Suara Pembaruan</i> “Masalah Pangan yang Merisaukan”; <i>Jawa Pos</i> “George Tenet Mundur”
	Mg	-	-	-	-	
	7 Juni	Capres Sebaiknya Apa Adanya atau Berada-ada	KPU Dinilai Kurang Fair	Cap Jempol Darah	Cap Jempol Darah	
	8 Juni		Kampanye Sepi, Respon Dingin Rakyat	Menuju Kampanye Berkualitas	Fatwa Pilih Capres Pria	<i>Kompas</i> “Pemberantasan Korupsi Itu Dimulai dari Sumbar”
	9 Juni				Semua Janji Berantas Korupsi	<i>Kompas</i> “Makin Banyak Kasus Korupsi DPRD yang Terungkap”; <i>Suara Pembaruan</i> “Keprihatinan akan Perusakan Rumah Ibadah”; <i>Republika</i> “Saatnya Rakyat Irak Berbicara”
	10 Juni		KPU versus Panwaslu		Politisasi Kudatuli	<i>Kompas</i> “Faktanya Letusan Gunung Bromo Menewaskan Dua Turis”; <i>Republika</i> “BPK dan BI”
	11 Juni					<i>Kompas</i> “Bahan Tambahan Perihal Faktor Integratif Bangsa”; <i>Suara Pembaruan</i> “Membangun Infrastruktur demi Investasi”; <i>Republika</i> “Demi Stabilitas Rupiah”; <i>Jawa Pos</i>

						“Paket Kebijakan BI”
12 Juni	Nasib Kampanye Presiden di Saat Kejuaraan Piala Eropa					<i>Suara Pembaruan</i> “Akuntabilitas DPR Dipertanyakan”; <i>Republika</i> “Berantas Korupsi dari Anggota Dewan”; <i>Jawa Pos</i> “Ancaman Gunung Berapi”
Mg	-	-	-	-	-	
14 Juni		Fitnah dan Adu Domba Warnai Pilpres				<i>Kompas</i> “Pasar Janganlah Bereaksi Berlebihan”; <i>Republika</i> “Televisi Kita”; <i>Jawa Pos</i> “Euro 2004”
15 Juni	Kampanye Presiden Sepi atau Ganti Panggung					<i>Suara Pembaruan</i> “Pahitnya Gula Impor Ilegal”; <i>Republika</i> “Pelajaran dari Piala Eropa”; <i>Jawa Pos</i> “Mengarah ke Perang Saudara”
16 Juni				Dukungan Pesantren ke Capres		<i>Kompas</i> “Kasus UAN, Jangan Permainkan Anak!”; <i>Suara Pembaruan</i> “Menggugat Nilai Konversi UAN”; <i>Republika</i> “Nurani Berbicara di Eropa”
17 Juni						<i>Kompas</i> “Krisis Listrik Harus Diatasi dengan Solusi Komprehensif”; <i>Suara Pembaruan</i> “Jalan Damai Terbuka di NAD”; <i>Republika</i> “Aceh”; <i>Jawa Pos</i> “Soal Konversi Nilai UAN”
18 Juni						<i>Kompas</i> “Perlu Gerakan Masyarakat untuk Hadapi Penyelundupan”; <i>Suara Pembaruan</i> “Anggota DPR Mangkir, Tanggungjawab Partai”; <i>Republika</i> “Harga Kertas”; <i>Jawa Pos</i> “Respons Swedia”
19 Juni						<i>Kompas</i> “Dagang Perkara di Kejaksaan Itu Sinyalemen atau Fakta”; <i>Suara Pembaruan</i> “Ironis Malaria Masih Mengganas”; <i>Republika</i> “Kebohongan Apa Lagi Bush?”; <i>Jawa Pos</i> “KPK soal Kekayaan Jukung”
Mg	-	-	-	-	-	
21 Juni	Rakyat agar Tahu Jati Diri Pasangan Capres	Jangan Salah Pilih yang Suka Ingkar Janji				<i>Republika</i> “Tokoh GAM Dibebaskan”; <i>Jawa Pos</i> “Gaji Dirut Pertamina”

	22 Juni			Narkoba dan Kampanye Capres		<i>Kompas</i> “Cendekiawan, Godaan dan Pilihannya”; <i>Suara Pembaruan</i> “Eksekusi Mati Pelaku Narkoba”; <i>Jawa Pos</i> “Barang Serba Selundupan”
	23 Juni					<i>Kompas</i> “Bisakah Jakarta Menjadi Lebih Baik”; <i>Suara Pembaruan</i> “Gagasan tentang Komunitas Asia Timur”; <i>Republika</i> “Tak Perlu Asing Hadir di Selat Malaka”; <i>Jawa Pos</i> “Transparansi BUMN”
	24 Juni					<i>Kompas</i> “Musim Asap, Musimnya Menuai Malu”; <i>Suara Pembaruan</i> “Ada Menteri di Balik Gula Ilegal?”; <i>Republika</i> “Kebiasaan Muter-muter Kasus”; <i>Jawa Pos</i> “Sanderia Korsel yang Dipenggal”
	25 Juni				Perang Menepis Isu Negatif	<i>Kompas</i> “Tidakkah Terbayang 21.000 Buruh Kehilangan Kerja”; <i>Suara Pembaruan</i> “Seriuslah pada Masalah Asap”; <i>Republika</i> “Daftar Hitam”
	26 Juni			Sekali Lagi, Politik Uang		<i>Kompas</i> “Bahaya Narkoba Menyergap Setiap Saat”; <i>Suara Pembaruan</i> “Mengantar Irak Menuju Kedaulatan Penuh”; <i>Jawa Pos</i> “Pemalsu Dokumen Impor Gula”
	Mg	-	-	-	-	
	28 Juni	Anda adalah Anda, “You Are What You Are”	Pemilu Tanpa Anarki			<i>Republika</i> “Lawan Penyalahgunaan Narkoba”; <i>Jawa Pos</i> “Kebersamaan Melawan Narkoba”
	29 Juni		Pilpres Memerlukan Payung Hukum?			<i>Kompas</i> “Tidak Mungkin Negara Tanpa Produksi”; <i>Republika</i> “Akibat Isu Negatif”; <i>Jawa Pos</i> “Warning dari Ancaman Pemenggalan”
	30 Juni	Apa yang Bisa Kita Petik dari Debat Capres	Berharap dari Debat Capres		Debat Capres	<i>Republika</i> “Pelimpahan Kedaulatan di Irak”
III.	1 Juli				Pengarahan Kiai Sahal	<i>Kompas</i> “Bergunalah Memahami di Mana Kita Kini Berada”; <i>Suara Pembaruan</i> “Polri yang

						Bermitra dengan Rakyat"; <i>Republika</i> "Menyambut Baik Langkah KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
2 Juli	Debat Presiden di Panggung Terbuka				Memasuki Masa Tenang	<i>Suara Pembaruan</i> "Prakarsa Memperkuat ASEAN"; <i>Republika</i> "Hapus Dana Non-Bujeter"
3 Juli	Kampanye Damai, Demokrasi Pula Pemilihannya	Memilih Mandataris Rakyat?	Transisi Demokrasi Harus Jalan Terus			<i>Jawa Pos</i> "Mengadili Saddam Hussein"
Mg	-	-	-	-	-	
5 Juli	Hari Ini Kita Memutuskan untuk Lima Tahun	Memilih Tanpa GBHN	Lima Menit Menentukan			
6 Juli	Rakyat Telah Melaksanakan Kedaulatannya	Menghitung Suara dengan Hati Nurani	Jangan Cederai Pemilu	Lulus Ujian Politik		
7 Juli	Pemilu Tidak Menyelesaikan Persoalan Mendasar	Legitimasi Hasil Pemilu, Pertaruhan Besar				<i>Republika</i> "Ketidaktenangan Meluas di Timur Tengah"; <i>Jawa Pos</i> "Yunani Ternyata Bisa"
8 Juli	Sudah Waktunya Belajar dari Kebajikan Rakyat	Siap-siap Maju ke Putaran Kedua	Kepercayaan, Kejujuran	Rupiah dan Pilpres		
9 Juli	Apa Arti Investasi Tertunda hingga Oktober			Dukungan Warga NU ke SBY		<i>Suara Pembaruan</i> "Berbagi Beban Biaya Pendidikan"; <i>Republika</i> "Sinyal Positif"
10 Juli			Jangan Terlana Angka			<i>Kompas</i> "Pantaskah Kita Menggugat Keberadaan Pihak Asing"; <i>Suara Pembaruan</i> "Antisipasi Kekeringan"; <i>Jawa Pos</i> "Kembali ke Enam Hari Kerja"
Mg	-	-	-	-	-	
12 Juli	Koalisi Baru Mulai Dipikir dan Digarap	Koalisi Pilpres Putaran Kedua				<i>Republika</i> "Kabar Gembira dari Senayan (Olahraga)"; <i>Jawa Pos</i> "Masalah Orang Tua, Murid, dan Pendidikan"
13 Juli		Siap Menang, Siap Kalah?		Intip Sana Intip Sini		<i>Kompas</i> "Ketika Bangunan Sekolah Pun Sampai Dijarah"; <i>Republika</i> "Hukuman Berat untuk Pongor Narkoba"
14 Juli						<i>Kompas</i> "Hukum Kita Sungguh Sedang Dipertaruhkan"; <i>Suara Pembaruan</i> "Pendidikan Jadi Korban Otonomi"; <i>Republika</i> "Menyimak Kampanye Pemilihan Presiden"

						AS”; <i>Jawa Pos</i> “Menyadap Perwakilan RI”
15 Juli			Golput			<i>Kompas</i> “Selebriti, Media AIDS, dan Narkoba”; <i>Suara Pembaruan</i> “Dunia dalam Darurat AIDS”; <i>Jawa Pos</i> “Politisasi Pidana Mati”
16 Juli	Benar Akan Berantas KKN? Belajarlah dari Hoegeng		Ujian untuk Megawati			<i>Suara Pembaruan</i> “Pembobolan, Penyakit Baru Perbankan”; <i>Jawa Pos</i> “Filipina Tarik Tentaranya dari Iraq”
17 Juli						<i>Kompas</i> “Apa Jadinya Hutan Lindung Boleh Ditambang”; <i>Suara Pembaruan</i> “Memperbaiki Kualitas SDM, Sebuah Keniscayaan”; <i>Republika</i> “Busway Sudah Untung atau Masih Rugi”; <i>Jawa Pos</i> “Mengadili Anggota DPRD”
Mg	-	-	-	-	-	
19 Juli	Perihal Koalisi Mesin Politik dan Rakyat Pemilih					<i>Suara Pembaruan</i> “Eksekusi Hukuman Abilio Soares”; <i>Republika</i> “Tahun Ajaran Baru, Beban Baru”; <i>Jawa Pos</i> “Nasib Abilio Soares”
20 Juli		Golput Lagi, Golput Lagi		Gus Dur Bertemu Megawati		<i>Kompas</i> “Kita Hormati Ketaatan Hukum Abilio Soares”; <i>Republika</i> “Ironi Warga Bangsa Bernama Abilio”
21 Juli						<i>Kompas</i> “Mengapa Perbaikan Harus Menunggu Hari Esok”; <i>Suara Pembaruan</i> “Kasus Palu Mencoreng Citra Polri”; <i>Republika</i> “Bush Kian “Ngebet” Cari Topangan”; <i>Jawa Pos</i> “Memprioritaskan Investor Lokal”
22 Juli						<i>Kompas</i> “Bhopal, Buyat, dan Pentingnya Pengelolaan Industri Aman”; <i>Suara Pembaruan</i> “PSSI Perlu Pengurus yang Kerja Maksimal”; <i>Republika</i> “Minahasa, Minamata”; <i>Jawa Pos</i> “Bebas, Angelo de la Cruz”
23 Juli	Implikasi Kombinasi Sistem Presidensial dan					<i>Suara Pembaruan</i> “Makin Peka pada Kepentingan Anak”; <i>Republika</i> “60 Tahun

		Parlementer				Bank Dunia"; <i>Jawa Pos</i> "Puteh, Nurdin, dan Nursalim"
	24 Juli					<i>Kompas</i> "Sistem yang Kondusif Membangun SDM Bermutu"; <i>Suara Pembaruan</i> "Deportasi TKI Ilegal Akan yang Terakhir?"; <i>Republika</i> "SP3 yang Tak Adil Itu"; <i>Jawa Pos</i> "Wajah Sebagian Anak RI"
	Mg	-	-	-	-	
	26 Juli			Protes Hasil Rekapitulasi		<i>Kompas</i> "Mengambil Langkah Terbaik dari Putusan MK"; <i>Suara Pembaruan</i> "Pro-Kontra Putusan MK"; <i>Jawa Pos</i> "Belajarlah ke Filipina"
	27 Juli	Ledakan Bom di KPU dan Pemilihan Ulang di Al-Zaytun	Menjelang Pilpres II, Megawati Cuti?	Bom di KPU	Dukung-mendukung Capres	
	28 Juli	Yudhoyono dan Megawati Bersaing Ketat	Masih Ada yang Antidemokrasi		Ledakan Kecil-kecilan di KPU	<i>Republika</i> "Konvensi Partai Demokrat"
	29 Juli		Koalisi, Jebakan atau Penguatan			<i>Kompas</i> "Setiap Tahun Biaya Pungli Mencapai Rp 3 Triliun"; <i>Republika</i> "VCD Banyumas"; <i>Jawa Pos</i> "Kudatuli"
	30 Juli	Amien-Siswono Benar-benar Siap Kalah		Sebuah Pelajaran Demokrasi		<i>Suara Pembaruan</i> "Menggugat Kemandirian Kejaksaan"; <i>Jawa Pos</i> "Belum Dibui"
	31 Juli		-	Sulitnya Menegakkan Pemilu Jurdil		<i>Kompas</i> "Kasus Buyat Sebaiknya Ubah Perilaku Birokratis"; <i>Suara Pembaruan</i> "Menyimak Pidato Nominasi John Kerry"; <i>Jawa Pos</i> "Bus v Kerry"
IV.	Mg	-	-	-	-	
	2 Agst	Dalam 50 Hari ke Depan Semua Bisa Terjadi		Jangan Lagi Dagang Sapi	Koalisi	<i>Suara Pembaruan</i> "RUU TNI Jangan Dipaksakan"
	3 Agst	Dua Capres Gagal Yakinkan Dunia Usaha	Gugatan Wiranto dan Partai Golkar			<i>Republika</i> "Harga Mahal Invasi AS untuk Rakyat Irak"; <i>Jawa Pos</i> "Penyanderaan Warga Asing di Iraq"
	4				Visi Ekonomi Capres	<i>Kompas</i> "Mengapa Kasus Amanda Menarik

	Agst					Perhatian?"; <i>Suara Pembaruan</i> "AS Siaga Hadapi Serangan Teroris"; <i>Republika</i> "Reformasi Intel ala Bush"
	5 Agst	Memang Aneh, Tahu-tahu Klimaks 20 Sept			Tarik-menarik Elite PKB	<i>Suara Pembaruan</i> "Akhirnya Ayodhya Dieksekusi"; <i>Republika</i> "Amanda adalah Potret Sosial Kita"
	6 Agst		Biarlah Demokratisasi yang Menang			<i>Kompas</i> "Pembangunan Harus Berbasis kepada Manusia"; <i>Republika</i> "Likuidasi Ketat"; <i>Jawa Pos</i> "257 Wakil Rakyat Bermasalah"
	7 Agst					<i>Kompas</i> "Bagaimana Eksekusi Mati Dipertanggungjawabkan"; <i>Suara Pembaruan</i> "Harga Minyak Membelit Ekonomi Dunia"; <i>Republika</i> "Buka Seluas-luasnya Diskusi RUU TNI"; <i>Jawa Pos</i> "Eksekusi dan Penyelundup Narkoba"
	Mg					
	9 Agst					<i>Kompas</i> "RUU TNI agar Dibuat dengan Saling Percaya"; <i>Suara Pembaruan</i> "DPR Hasil Pemilu 2004 Belum Ideal"; <i>Republika</i> "Setelah Bandar Narkoba, Berikutnya Korupsi?"; <i>Jawa Pos</i> "Jagoan Bola Asia"
	10 Agst		Putusan MK Akhiri Ketegangan Politik	Jaga Citra Jelang Pilpres	Tarik-menarik Internal Golkar	<i>Kompas</i> "Tak Mungkin Ada Pelayanan dalam Kultur Feodal"
	11 Agst	Pasangan Capres dan Tim Pemenangannya				<i>Suara Pembaruan</i> "Suksesi Mulus di Singapura"; <i>Republika</i> "Sampai Titik Darah Penghabisan"; <i>Jawa Pos</i> "27 Tahun Pasar Modal"
	12 Agst	Dalam Demokrasi Kita, Adakah Tempat Oposisi			Pelajaran bagi Parpol dan KPU	<i>Suara Pembaruan</i> "Demontstrasi di Lembaga Pendidikan"; <i>Republika</i> "Pengadilan HAM"
	13 Agst					<i>Kompas</i> "Pengambilalihan Pelabuhan dan Nafsu Kekuasaan"; <i>Suara Pembaruan</i> "Olimpiade Athena 2004 Dibuka"; <i>Republika</i> "Perombakan Direksi Pertamina"; <i>Jawa Pos</i> "Lee Hsien Loong PM Baru Singapura"

14 Agst						<i>Kompas</i> "Olimpiade Pulang ke Rumah Saat Dunia Berubah"; <i>Suara Pembaruan</i> "Dalam PTS Ternyata Ada "PTS"; <i>Republika</i> "Olimpiade di Tengah Kegagalan Dunia"; <i>Jawa Pos</i> "AS v Kaum Syiah Iraq"
Mg	-	-	-	-	-	
16 Agst						<i>Kompas</i> "Bintang di Langit, Lumpur di Tanah"; <i>Suara Pembaruan</i> "Keprihatinan, Harapan, dan Tekad"; <i>Republika</i> "Renungan Indonesia"; <i>Jawa Pos</i> "Biaya Mahal PTN"
17 Agst	-	-	-	-	-	
18 Agst		RAPBN dan Pilpres	Jangan Kotori Demokrasi Kita			<i>Kompas</i> "Di Mana Bung Karno, di Mana Bung Hatta"; <i>Jawa Pos</i> "Anggaran Pendidikan di RAPBN"
19 Agst	Kompetisi Pilpres 20 Sept Semakin Seru				Saling Mendekat Saling Menjauh	<i>Suara Pembaruan</i> "Ungkapkan Fakta di Buyat"; <i>Republika</i> "Al-Sadr"
20 Agst		Bahaya, Koalisi Meninggalkan Rakyat	-			<i>Kompas</i> "Karah Bodas dan Pemberantasan KKN"; <i>Jawa Pos</i> "Lalu Siapa Penyiksanya?"
21 Agst						<i>Kompas</i> "Ketika Kecerobohan Masuk Ruang Operasi"; <i>Suara Pembaruan</i> "Penghapusan Fiskal ke Luar Negeri"; <i>Republika</i> "Bayangkan Bila Terjadi pada Keluarga Kita"; <i>Jawa Pos</i> "Penghapusan Fiskal LN"
Mg	-	-	-	-	-	
23 Agst	Silang Pendapat Mega dan SBY	Anomali dalam Politik				<i>Republika</i> "Terima Kasih Taufik (Olah Raga)"; <i>Jawa Pos</i> "Emas Olimpiade"
24 Agst					Langkah Zig-zag Gus Dur	<i>Kompas</i> "Harga Minyak Dunia Menembus 50 Dollar AS"; <i>Suara Pembaruan</i> "Kembangkan Pembukaan Lahan Tanpa Api"; <i>Republika</i> "Kekeringan"
25 Agst		Panwaslu dan Fairness Pilpres II				<i>Kompas</i> "Apa Arti Medali Emas Taufik Hidayat"; <i>Republika</i> "Titik Temu Itu Perlu Dicari"; <i>Jawa Pos</i> "WNI Tewas di Iraq"

	26 Agst			Menghentikan Persekongkolan	Jangan Menjadi Kuda Tuli	<i>Kompas</i> “Bagaimana Ini? Anggota DPRD Kok Bermasalah”; <i>Suara Pembaruan</i> “Tersangka Korupsi Jadi Anggota Dewan”
	27 Agst		RUU TNI Menjelang Pilpres II			<i>Kompas</i> “Bintang Olahraga Kok Kalah Pamor dari Selebriti”; <i>Republika</i> “Perburuan Bank Permata”; <i>Jawa Pos</i> “Belajar dari Kejadian Parto”
	28 Agst				Saling Umumkan Calon Menteri	<i>Kompas</i> “Olimpiade Sains Nasional dan Indonesian Idol”; <i>Suara Pembaruan</i> “Mengatasi Kemacetan Total Ibukota”; <i>Republika</i> “Soal Pilkada, DPR Jangan Berpikiran Sempit”
	Mg	-	-	-	-	
	30 Agst	Demokrasi dan Masyarakat Madani	Sikap Netral Amien dan Wiranto?			<i>Republika</i> “Apa Rencana Australia?”; <i>Jawa Pos</i> “Jeda Perang AS v Al Sadr”
	31 Agst	Pemilihan Presiden Bukan Perang Baratayudha				<i>Suara Pembaruan</i> “Kekalutan Industri TPT Nasional”; <i>Republika</i> “Unjuk Rasa Warnai Pelantikan Anggota DPRD”; <i>Jawa Pos</i> “Dilantik lalu Didemo”
V.	1 Sept					<i>Kompas</i> “Di Mana Sebenarnya Perekonomian Kita Berada”; <i>Suara Pembaruan</i> “Politik Luar Negeri Bush Dikecam”; <i>Republika</i> “Konvensi Partai Republik”; <i>Jawa Pos</i> “Jernihkan Divestasi Permata”
	2 Sept		Pragmatisme Versus Program	Kekayaan Calon Pemimpin	Sikap Netral PKB	<i>Kompas</i> “Ramai-ramai Anggota Baru DPRD Didemo”
	3 Sept					<i>Kompas</i> “Kemandirian Ekonomi, Apakah Sebuah Utopia”; <i>Suara Pembaruan</i> “Perlu Serius Tangani Kebakaran Hutan”; <i>Republika</i> “Subsidi Bagi Petani”; <i>Jawa Pos</i> “Wisman Hanya Naik 4,14 Persen”
	4 Sept		Mapparesa, Korban atau Dikorbankan?			<i>Kompas</i> “PON Jangan Hanya Sekadar Meriah dan Antusias”; <i>Republika</i> “PON dan

						Pembangunan SDM Kita”; <i>Jawa Pos</i> “Bebaskan Pemred Tempo”
	Mg	-	-	-	-	
	6 Sept					<i>Kompas</i> “Panggung Ekonomi dan Pelakunya”; <i>Suara Pembaruan</i> “Aksi Demo Warnai Pelantikan”; <i>Republika</i> “Malaysia”; <i>Jawa Pos</i> “Penyidik Bertemu Terpidana”
	7 Sept		Anggota Memilih?	TNI/Polri	Menghalalkan Segala Cara	<i>Kompas</i> “Salahkah Kalau Kita Kaji Lagi Strategi Divestasi”; <i>Jawa Pos</i> “12 Tewas di Lintasan KA”
	8 Sept					<i>Kompas</i> “Mengambil Manfaat dari Perjalanan Menuju Bintang”; <i>Suara Pembaruan</i> “Hilangnya Situ-situ di Depok”; <i>Republika</i> “Begitulah Israel”; <i>Jawa Pos</i> “Selamat Jalan Munir”
	9 Sept	Yang Lebih Tepat, Kita Membutuhkan Perbaikan				Memantau Kecurangan Pilpres <i>Suara Pembaruan</i> “Ikon HAM Itu Telah Tiada”; <i>Republika</i> “Sayembara Indonesia Sukses”
	10 Sept					Tushiyah Syuriah PB NU <i>Kompas</i> “Bom Lagi, Bom Lagi, Sampai Kapan”; <i>Suara Pembaruan</i> “Bersatu Melawan Terorisme”; <i>Republika</i> “Apapun, Itu Terkutuk”
	11 Sept					<i>Kompas</i> “Bom Kuningan agar Merapatkan Barisan”; <i>Suara Pembaruan</i> “Supersemar Tetap Misterius”; <i>Republika</i> “Ada yang Salah dengan Pendidikan Anak Kita”; <i>Jawa Pos</i> “Bom di Kedubes Australia”
	Mg	-	-	-	-	
	13 Sept	-	-	-	-	<i>Jawa Pos</i> “Teror dan Ekonomi”
	14 Sept					Koalisi yang Masih Rapuh <i>Kompas</i> “Instruksi Pemerintah dan Partisipasi Kita”; <i>Suara Pembaruan</i> “Aparat Intelijen Harus Fokus”; <i>Republika</i> “Memaknai Peringatan Isra Mi’raj”

15 Sept					Kampanye Formalitas	<i>Kompas</i> “Dampak Ekonomi dari Teror Bom Harus Dihitung”; <i>Suara Pembaruan</i> “PON XVI Berakhir Tanpa Medali Sepakbola”; <i>Republika</i> “Jangan Tutupi Fakta”
16 Sept	Sekitar Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres		Putaran Kedua			<i>Suara Pembaruan</i> “Sekali Lagi, Teror Bom”; <i>Jawa Pos</i> “Rp 1 Miliar bagi Penemu Azhari”
17 Sept		Waspadai Kecurangan Pilpres II				<i>Kompas</i> “Pita Hitam bagi Dunia Pers”; <i>Republika</i> “Kriminalisasi Pers”; <i>Jawa Pos</i> “Presiden Buruk Kebebasan Pers”
18 Sept	Ketika Menang Menjadi Sebuah Keharusan	Indahnya Kampanye yang Tenang	Jangan Cederai Transisi Demokrasi Kita	Mengayomi Pendukung Capres		
Mg	-	-	-	-		
20 Sept	Memilih Sesuai Hati Nurani	Lain Mega, Lain SBY	Siap Menang, Siap Kalah	Diuji Sejarah Sekali Lagi		
21 Sept	Demokrasi, Kepedulian, dan Partisipasi	Selamat Datang Presiden Pilihan Rakyat	Jangan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat	-		
22 Sept	Momentum Ini Jangan Sampai Gagal Lagi	Menanti Hasil Pilpres dengan Tenang	Teknologi Kita, Presiden	Mengontrol dan Menagih Janji		
23 Sept	Sebuah Perjalanan Panjang Partai Golkar	Menuntut Visi dan Misi Capres				<i>Republika</i> “Guru”; <i>Jawa Pos</i> “Bantuan Internasional untuk Iraq”
24 Sept	Membangun Perangkat Lunak Demokrasi	Perubahan Paradigma Pemimpin	PR Penganguran	Islah Warga NU		
25 Sept	Meraih Kemajuan di Tahun yang Berat	Penyeimbang atau Penumbang?	Berantas Korupsi Mulai dari Presiden	Perpecahan Internal Partai		
Mg	-	-	-	-		
27 Sept	Harapan Besar terhadap Pasangan SBY-JK	Berharap dari Rekonsiliasi Nasional				<i>Republika</i> “Polri, Profesionallah”; <i>Jawa Pos</i> “Memburu Pengebom”
28 Sept	Selamat Tinggal MPR Periode 1999-2004		Semoga Suksesi Berjalan Mulus	SBY Kelebihan Beban Harapan		<i>Suara Pembaruan</i> “Reformasi Partai Politik”
29 Sept	Partai dan Perubahan Politik			Menanti Kabinet Ekonomi		<i>Suara Pembaruan</i> “Reformasi di Tubuh PDI-P”; <i>Republika</i> “Dan Penjajah Pun Saling Bertikai”

30 Sept			Pesangon		<i>Kompas</i> "Isu Suap dalam Pembahasan Undang-undang"; <i>Suara Pembaruan</i> "Tanggung Jawab Rakyat Makin Besar"; <i>Jawa Pos</i> "UU Sistem Jaminan Sosial"

Jadwal Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden Putaran Pertama

Masa persiapan : 2 Mei – 31 Mei 2004

Masa kampanye : 1 Juni-1 Juli 2004

Masa pelaksanaan : 2 Juli- 25 Juli 2004

(Pengumuman Hasil Pemilu Legislatif, 5 Mei 2004)

Pemilihan Presiden Putaran Kedua

Masa persiapan : 26 Juli – 5 Agst 2004

Masa kampanye : 6 Agst – 16 Sept 2004

Masa pelaksanaan : 17 Sept-20 Sept 2004

